



PT BPR BKK JATENG
(Perseroda)

LAPORAN PROFIL RISIKO & TINGKAT KESEHATAN BANK

SEMESTER I 2025

**LAPORAN PROFIL RISIKO DAN
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK PERKREDITAN RAKYAT**

Nama BPR : PT. BPR BKK Jateng (Perseroda)
Alamat : Jl. Tanjung No. 11 A, Sekayu, Kec. Semarang
Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50132
Sandi BPR : 602759
Periode Laporan : Semester 1 Tahun 2025
Modal Inti : Rp. 404.152.833.744
Total Aset : Rp. 2.328.631.007.761
Jumlah Kantor Cabang : 28
Penerbit ATM/Kartu Debet : Tidak
Jumlah Risiko : 6 Risiko

Pada periode pelaporan ini, Bank melaporkan 6 (Enam) jenis risiko, yaitu Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, Risiko Likuiditas, Risiko Reputasi dan Risiko Strategik.

Semarang, 30 Juli 2025

Mengetahui dan Menyetujui
Direksi PT. BPR BKK Jateng (Perseroda)



Koesnanto

Direktur Utama

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by several smaller strokes.

Gunawan Pramodo

Kepala Satker Manajemen Risiko

DAFTAR ISI

	Halaman
LAPORAN PROFIL RISIKO KIRIM OJK	1
RISIKO KREDIT	3
Profil Analisis Risiko Kredit	4
Kredit Inheren.....	5
Kredit KPMR	8
RISIKO OPERASIONAL	12
Profil Analisis Risiko Operasional	13
Operasional Inheren	14
Operasional KPMR	17
RISIKO KEPATUHAN	22
Profil Analisis Risiko Kepatuhan	23
Kepatuhan Inheren	24
Kepatuhan KPMR.....	26
RISIKO LIKUIDITAS	31
Profil Analisis Risiko Likuiditas.....	32
Likuiditas Inheren	33
Likuiditas KPMR.....	35
RISIKO REPUTASI.....	40
Profil Analisis Risiko Reputasi	41
Reputasi Inheren	42
Reputasi KPMR	44
RISIKO STRATEJIK	48
Profil Analisis Risiko Stratejik	49
Stratejik Inheren	50
Stratejik KPMR	52
TINGKAT KESEHATAN BANK KIRIM OJK	56
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank	57
PROFIL RISIKO FINAL	59
Profil Risiko Final Semester I 2025	60
Profil Risiko Kredit	63
Profil Risiko Operasional	83
Profil Risiko Kepatuhan	104
Profil Risiko Likuiditas.....	121
Profil Risiko Reputasi	137

Profil Risiko Strategik.....154

TINGKAT KESEHATAN BANK (TKS).....171

 Penilaian Tingkat Kesehatan BPR172

 TKS - Kuantitatif Rentabilitas174

 TKS - Kualitatif Rentabilitas175

 TKS - Tingkat Rentabilitas.....178

 TKS - Kuantitatif Permodalan.....179

 TKS - Kualitatif Permodalan.....180

 TKS - Tingkat Permodalan182

TATA KELOLA183



PT BPR BKK JATENG
(Perseroda)

LAPORAN PROFIL RISIKO & TINGKAT KESEHATAN BANK

SEMESTER I 2025
(Versi template OJK)

Form Laporan Profil Risiko

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Sandi	Jenis Risiko	Penilaian Posisi Laporan			Penilaian Posisi Sebelumnya		
							Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko	Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko
1	Y	D01	Single	+	0001	Risiko Kredit	5	4	5	4	4	4
2	Y	D01	Single	+	0002	Risiko Operasional	3	4	3	4	4	4
3	Y	D01	Single	+	0003	Risiko Kepatuhan	3	4	3	4	4	4
4	Y	D01	Single	+	0004	Risiko Likuiditas	2	3	2	2	3	2
5	Y	D01	Single	+	0005	Risiko Reputasi	2	3	2	2	3	2
6	Y	D01	Single	+	0006	Risiko Stratejik	4	3	4	3	3	3
7	Y	D01	Single	+	0000	Peringkat Risiko			4			4
8	Y	F01	Penyusunan Laporan Profil Risiko melibatkan seluruh RTU melalui pembahasan forum Rapat Komite Manajemen Risiko serta direview oleh Komite Pemantau Risiko untuk menetapkan peringkat risiko komposite yang wajar. Berdasarkan hasil penilaian diperoleh penilaian Profil Risiko Semester I 2025 sebesar 3.40 dengan Peringkat Risiko Tinggi. Nilai Risiko mengalami penurunan dari periode Semester II 2024 merujuk pada hasil penilaian yang disampaikan OJK 3,64 (risiko tinggi). Risiko Kredit memiliki peringkat Sangat Tinggi sedangkan Risiko Operasional dan Risiko Kepatuhan memiliki peringkat Sedang mengalami perbaikan dibandingkan periode Semester II 2024. Risiko Likuiditas dan Risiko Reputasi stabil di peringkat Rendah, dan Risiko Stratejik menjadi peringkat Risiko Tinggi. Profil Risiko Kredit menjadi faktor utama yang mempengaruhi risiko stratejik, pilar kualitas kredit sangat mempengaruhi Risiko Kredit secara keseluruhan. Manajemen harus menyusun rencana tindak perbaikan kualitas kredit dan kualitas monitoring kredit mencegah migrasi penurunan kualitas kredit. Pada Risiko Operasional dipengaruhi kekosongan jabatan yakni Direktur Pemasaran dan Direktur Kepatuhan, sehingga berpengaruh pada kualitas kinerja struktur dibawahnya dan penerapan Tata Kelola perusahaan. Pemenuhan pejabat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu dilakukan untuk memperbaiki risiko Operasional. Pada Risiko Kepatuhan perlu dilakukan perbaikan pada peningkatan penerapan budaya sadar risiko dan perbaikan proses rule making the rule. Risiko Stratejik mengalami kenaikan, khususnya kualitas aset yang berdampak keuangan dibandingkan peer group BPR, meskipun target indikator rasio keuangan di Semester I 2025 telah sesuai dengan RBB di Semester I. Mitigasi risiko di tahun 2025 harus difokuskan pada strategi perbaikan kualitas kredit khususnya pada debitur inti dan penurunan beban CKPN selain perbaikan kualitas SDM dengan menerapkan pedoman pengelolaan manajemen SDM.									



PT BPR BKK JATENG
(Perseroda)

RISIKO KREDIT

Form Analisis Risiko Kredit

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Sandi	Nama Komponen	Nilai	Analisis
1	Y	D01	Single	+	1100	Tingkat Risiko	5	Risiko Kredit menunjukkan bahwa pada Semester I 2025, tingkat risiko kredit berada pada peringkat Sangat Tinggi. Faktor utama yang menyebabkan risiko kredit ini memiliki peringkat Tinggi adalah kualitas kredit dan kredit bermasalah (NPL) yang masih sangat tinggi sehingga berdampak pada kualitas aset yang kurang baik. Beberapa permasalahan utama yang berkontribusi terhadap tingginya eksposur risiko kredit meliputi ekspansi kredit yang tidak sesuai target, dominasi konsentrasi kredit pada sektor berisiko tinggi, serta lemahnya penguasaan dan pelaksanaan bisnis proses. Selain itu, kompetensi SDM di bidang perkreditan masih belum memadai, khususnya dalam pemasaran dan observasi awal terhadap calon debitur. Unit kerja perkreditan juga masih menghadapi tantangan dalam menyalurkan kredit dengan plafon besar, terutama dalam kegiatan lapangan, analisis, dan monitoring. Faktor lain yang memperburuk risiko adalah kegagalan restrukturisasi kredit, keterlambatan dalam penanganan kredit bermasalah, serta strategi penyelesaian yang belum efektif akibat agunan yang tidak marketable dan appraisal yang tidak sesuai. Kekurangan SDM serta kekosongan jabatan struktural di unit perkreditan semakin memperburuk situasi. Evaluasi pendidikan belum dilakukan sehingga tidak ada alat ukur efektivitas pelatihan. Selain itu, monitoring, pendampingan, serta pengawasan dari atasan belum berjalan optimal. Masing-masing risk owner juga belum melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian profil risiko serta belum menyusun rencana perbaikan yang jelas. Penerapan Key Performance Indicator (KPI) serta sistem reward dan punishment terhadap kinerja individu maupun target kepala cabang yang belum optimal semakin memperlemah upaya mitigasi risiko kredit. Dengan berbagai permasalahan tersebut, diperlukan langkah strategis dan perbaikan yang sistematis agar risiko kredit dapat dikelola lebih efektif serta menurunkan tingkat NPL.
2	Y	D01	Single	+	1200	Tingkat Risiko Inheren	5	Berdasarkan kertas kerja penilaian profil risiko secara konsolidasi nilai risiko inheren kredit di Laporan Profil Risiko adalah 4,39 atau peringkat Risiko Sangat Tinggi. Nilai risiko ditetapkan berdasarkan penilaian Risiko tertinggi yaitu di Pilar 2 kualitas aset. Hasil penilaian ini sama dengan periode penilaian sebelumnya. Kualitas kredit masih menjadi fokus dan titik risiko tertinggi selama periode tahun berjalan. Migrasi kredit masih terjadi pada tingkatan yang tinggi. Meskipun kredit dengan plafon besar telah dilakukan analisa dan review oleh second line dengan melakukan komite kredit secara berjenjang yang diputuskan oleh kantor pusat. Dalam memutuskan kredit masih ditemukan kesalahan dalam menentukan skema kredit yang tepat. Kelemahan dalam melakukan analisa repayment capacity dan memahami bisnis proses dari usaha calon debitur. kedepan bidang atau Divisi pemasaran akan merumuskan program-program yang dapat merangsang penyerapan NOA baru yang berfokus pada sektor UMKM dengan jangka waktu pendek dan menengah dengan mengedepankan data-data analisis yang tepat dan fokus pada kepuasan nasabah dalam layanan perbankan. Digitalisasi perbankan akan terus dikembangkan dimana hal ini menjadi nilai lebih bank dalam tingkat persaingan peer group BPR.
3	Y	D01	Single	+	1300	Tingkat KPMR	4	Dalam Penerapan manajemen risiko kredit Dewan Komisaris dan Direksi memiliki komitmen yang sangat kuat melalui kebijakan dan kerangka kerja yang terstruktur. Namun, implementasinya belum merata, dengan kelemahan pada pengelolaan SDM, pemahaman kebijakan, dan pelaksanaan prosedur. Proses manajemen risiko telah berjalan mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian, tetapi terkendala oleh sistem informasi yang belum optimal. Temuan menunjukkan pelanggaran regulasi, tata kelola yang lemah, dan kurangnya prinsip kehati-hatian. Satuan kerja pengendalian memiliki pedoman kerja dan rutin melakukan evaluasi, tetapi efektivitas pengendalian masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan manajemen risiko kredit. Mendasarkan dari hal tersebut penilaian KPMR kredit pada periode penilaian memiliki nilai risiko 3.35 dengan peringkat Kurang Memadai.

Form Kertas Kerja Risiko Inheren Kredit

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Sandi	Nama Komponen	Rasio	Nilai	Keterangan
1	Y	D01	Single	+	1210	Komposisi Portfolio Aset dan Tingkat Konsentrasi Kredit		2	Pilar 1 berdasarkan metode penilaian internal dengan tetap merujuk pada parameter baku sesuai ketentuan peringkat risiko tertinggi di parameter 1 (Risiko Rendah). Pada Pilar 1 ditetapkan peringkat risiko berdasarkan nilai rata-rata dari 21 parameter (termasuk 4 utama sesuai ketentuan di SEOJK) sehingga didapatkan hasil nilai 2,11 (Risiko Rendah). Kredit yang perlu mendapatkan perhatian adalah kredit tanpa agunan untuk tujuan apapun sedangkan kredit berdasarkan jangka waktu menunjukkan rasio yang cukup ideal dengan kecenderungan terjadi pergeseran dari jangka waktu pendek ke jangka waktu menengah, kedepan pada Semester II akan dilakukan evaluasi pada skema jangka waktu kredit dengan meningkatkan portofolio kredit dengan jangka waktu pendek untuk mencapai ambang batas ideal yang ditentukan.
2	Y	D01	Single	+	1211	Rasio aset produktif terhadap total aset	102.25	3	Komposisi Aset produktif pada periode penilaian didominasi oleh KYD sebesar 68,11 %, Komposisi KYD meningkat dari periode penilaian Semester II Th 2024 (65,88%). Sedangkan penempatan Antar Bank sebesar 31,89%. Penyerapan kredit masih belum cukup optimal dimana penempatan bank lain masih diatas total aset produktif (31,89%) melebihi ambang batas yang ditetapkan (30%), saldo PPAP melebihi ambang batas hal ini seiring dengan meningkatnya tunggakan kredit dan masih terdapat pengikatan APHT di notaris yang belum terselesaikan. Penyaluran kredit masih disalurkan dalam 11 produk utama dengan komposisi tertinggi di kredit KUB sebesar 29,76% lebih rendah dari Semester II 2024 sebesar 35,7%. Terjadi penurunan NOA secara konsolidasi dari 37.984 di Semester I 2024 menjadi 37.325 di Semester I 2025 yang akan menjadi fokus perbaikan pada periode berikutnya.
3	Y	D01	Single	+	1212	Rasio kredit yang diberikan terhadap total aset produktif	68.11	2	Kredit yang diberikan terhadap aset produktif telah lebih kecil dari ambang batas (75%) namun terdapat beberapa skema kredit yang masih perlu disoroti seperti kredit jangka menengah dan jangka panjang melebihi ambang batas, sedangkan untuk kredit jangka pendek masih lebih kecil dari ambang batas yang ditetapkan, Ekspansi kredit akan terus dilakukan dengan menyesuaikan komposisi skema kredit dengan evaluasi-evaluasi dan penyesuaian yang akan dilakukan pada setiap produk kredit. Dalam penilaian parameter ini secara konsisten di bawah limit yang ditetapkan atau peringkat 1, Dari seluruh parameter tersebut didapatkan nilai/peringkat kategori peringkat Rendah. Parameter tambahan untuk menentukan skema kredit antara lain parameter Kredit Jangka Pendek, Menengah, dan Jangka Panjang, NOA/number of account kredit dengan plafon di atas Rp.150 juta, Kredit dengan agunan tanah dan bangunan, kredit dengan agunan kendaraan bermotor, dan komposisi produk kredit KUB. Mendasarkan hal tersebut meskipun berdasarkan tabel ketentuan rasio Kredit yang Diberikan di bawah limit ketentuan OJK atau pada peringkat 1 (Sangat Rendah) namun memperhatikan penilaian tambahan berada pada tingkat risiko Sedang atau tergolong kredit sebagian besar atau seluruhnya sederhana dengan jenis yang beragam. Maka untuk Parameter 2 ditetapkan pada peringkat risiko Rendah.
4	Y	D01	Single	+	1213	Rasio 25 debitur terbesar terhadap total kredit yang diberikan	7.17	2	Komposisi kredit kepada 25 debitur terbesar/inti berdasarkan saldo baki debit per periode penilaian di bawah limit ketentuan dan secara konsisten selama tahun berjalan selalu berada di bawah limit yang ditetapkan atau tergolong peringkat 2 atau Rendah. Debitur inti didominasi oleh kredit pada perusahaan korporasi sebesar 79,61% sedangkan sisanya 20,39% oleh perorangan, komposisi 25 debitur inti masih cukup kecil atau jauh dari ambang batas yang ditetapkan. Debitur inti baik perorangan maupun badan hukum memiliki jenis usaha dan peruntukan yang sangat beragam dan seluruh kredit tersebut dipergunakan untuk modal kerja dan investasi. Kredit kepada debitur inti didominasi mulai tahun 2022 setelah bank mendapatkan ijin operasional. Debitur inti terbesar saat ini mendapatkan fasilitas restruk.
5	Y	D01	Single	+	1214	Rasio kredit per sektor ekonomi terhadap total kredit yang diberikan	28.13	2	Exposure kredit persektor ekonomi masih perlu pendalaman lebih lanjut dikarenakan terdapat kelemahan identifikasi sektor ekonomi pada core banking yang masih belum akurat, Bank telah melakukan langkah sosialisasi dan pelatihan kepada unit kerja di cabang untuk melakukan pengkinian dan verifikasi data sektor ekonomi dengan tujuan mendapatkan data yang lebih akurat khususnya data sektor ekonomi. 3 Sektor Ekonomi terbesar antara lain Bukan Lapangan Usaha lainnya, Rumah Tangga untuk Keperluan Multiguna Lainnya, Aktivitas jasa perorangan lainnya menjadi sektor ekonomi 3 terbesar di seluruh kantor cabang. Berdasarkan penilaian rasio sektor ekonomi berada pada nilai 1 atau tingkat risiko rendah meskipun demikian mempertimbangkan kualitas data serta strategi pemasaran yang belum berdasarkan target sektor usaha tertentu maka penilaian parameter ini dilakukan penyesuaian nilai pada tingkat 3 (Risiko Sedang) atau tidak berubah untuk jangka waktu yang lama. Sehingga parameter 4 ditetapkan pada peringkat 2 atau Rendah. Peringkat risiko Rendah tersebut sama dengan kondisi di periode penilaian sebelumnya.

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Sandi	Nama Komponen	Rasio	Nilai	Keterangan
6	Y	D01	Single	+	1220	Kualitas aset		5	Pilar 2 berdasarkan metode penilaian internal dengan tetap merujuk pada parameter baku sesuai ketentuan peringkat risiko tertinggi di parameter 1 (Risiko Sangat tinggi). Pada Pilar 2 ditetapkan peringkat risiko berdasarkan nilai rata-rata dari seluruh parameter (termasuk 4 utama sesuai ketentuan di SEOJK) sehingga didapatkan hasil nilai 4,39 (Risiko Sangat Tinggi). Pemantauan dan monitoring kredit pasca pencairan merupakan salah satu hal yang perlu dilakukan evaluasi. Dari penilaian parameter diatas didapatn bahwa kualitas aset dari periode ke periode semakin memburuk. Banyaknya account kredit yang flow terutama pada kredit PAR 3 dan PAR 4 menjadi NPL. Hal tersebut akan menjadi evaluasi dan perhatian untuk dilakukan perbaikan.
7	Y	D01	Single	+	1221	Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	18.28	5	Rasio Aset Produktif bermasalah di atas limit ketentuan yaitu 18,28% dan lebih tinggi dibandingkan periode penilaian sebelumnya 14,64%. Secara konsisten selama tahun berjalan dan di periode tahun sebelumnya tidak terdapat penempatan Antar Bank yang bermasalah. Bank telah membentuk CKPN yang cukup mendasarkan pada ketentuan internal berdasarkan Produk Kredit. Meskipun demikian belum dilakukan evaluasi atas skema perhitungan CKPN saat ini dikarenakan kebijakan yang baru berlaku di awal tahun 2025. Terjadi peningkatan NPL gross dibandingkan periode sebelumnya (22,23%) menjadi 26,49% di periode penilaian. Aset produktif bermasalah secara keseluruhan berasal dari kredit yang disalurkan. Pemburuan atau migrasi juga terjadi setiap bulannya sementara ekspansi kredit belum berkinerja sesuai dengan target yang ditetapkan. Realisasi kredit tiga terbesar berdasarkan produk terdapat di produk kredit KUB, BKK Joglo, dan Mikro BKK. Mendasarkan pada hasil penilaian tercatat rasio aset produktif bermasalah yang lebih tinggi dari limit ketentuan serta identifikasi kondisi kredit selama periode penilaian maka Parameter 1 ditetapkan pada peringkat risiko Sangat Tinggi.
8	Y	D01	Single	+	1222	Rasio kredit bermasalah neto terhadap total kredit yang diberikan (NPL Net)	19.17	4	Rasio kredit bermasalah netto terhadap total kredit adalah 19,17% atau melebihi ambang batas yang ditetapkan dan lebih tinggi dari periode sebelumnya (16,49%). Hal ini masih berpotensi terjadi pemburuan apabila tidak dapat dilakukan monitoring dengan tepat. Bank telah melakukan pengkinian data khususnya data yang terkait langsung dengan perhitungan CKPN. Pada 6 parameter tambahan kesemuanya membutuhkan perhatian lebih dikarenakan 6 parameter tersebut melebihi ambang batas yang ditetapkan, kredit yang menjadi wewenang kantor cabang (kredit dibawah Rp. 150 juta) mempunyai exposure NPL yang Tinggi, dan pada Semester II akan segera dilakukan evaluasi, begitu juga dengan NPL pada total kredit dengan nilai agunan yang lebih rendah dari baki debet melebihi ambang batas yang telah ditetapkan.
9	Y	D01	Single	+	1223	Rasio kredit kualitas rendah terhadap total kredit yang diberikan	39.40	4	Kredit yang diberikan terhadap aset produktif telah lebih kecil dari ambang batas (75%) namun terdapat beberapa skema kredit yang masih perlu disoroti seperti kredit jangka menengah dan jangka panjang melebihi ambang batas, sedangkan untuk kredit jangka pendek masih lebih kecil dari ambang batas yang ditetapkan, Ekspansi kredit akan terus dilakukan dengan menyesuaikan komposisi skema kredit dengan evaluasi-evaluasi dan penyesuaian yang akan dilakukan pada setiap produk kredit. Dalam penilaian parameter ini secara konsisten di bawah limit yang ditetapkan atau peringkat 1, Dari seluruh parameter tersebut didapatkan nilai/peringkat kategori peringkat Rendah. Parameter tambahan untuk menentukan skema kredit antara lain parameter Kredit Jangka Pendek, Menengah, dan Jangka Panjang, NOA/number of account kredit dengan plafon di atas Rp.150 juta, Kredit dengan agunan tanah dan bangunan, kredit dengan agunan kendaraan bermotor, dan komposisi produk kredit KUB. Mendasarkan hal tersebut meskipun berdasarkan tabel ketentuan rasio Kredit yang Diberikan di bawah limit ketentuan OJK atau pada peringkat 1 (Sangat Rendah) namun memperhatikan penilaian tambahan berada pada tingkat risiko Sedang atau tergolong kredit sebagian besar atau seluruhnya sederhana dengan jenis yang beragam. Maka untuk Parameter 2 ditetapkan pada peringkat risiko Rendah.
10	Y	D01	Single	+	1230	Strategi penyediaan dana		3	Pada Pilar 3 seperti penilaian periode sebelumnya telah ditambahkan paremeter-parameter tambahan yang mendukung penilaian pada pilar utama. Peer group industri sejenis yang digunakan adalah 3 BPR yang memiliki aset diatas 1 triliun dan tercatat memiliki pertumbuhan aset selama periode penilaian. Pertumbuhan BKK Jateng per Semester I 2025 sebesar -1,02% berada dibawah rata-rata pertumbuhan industri BPR sebesar 2,24%. Terhadap strategi penyaluran dana BKK Jateng menyalurkan ke sektor yang sebagian besar telah dikuasai. Penurunan OSC terjadi pada sektor yang dikuasai dengan kualitas kredit kecenderungan meningkat. Sektor ekonomi yang tidak dikuasai memiliki kecenderungan menurun dibanding periode sebelumnya. Terdapat pertumbuhan kredit yang negatif dengan kecenderungan peningkatan NPL selama periode penilaian. Terdapat penempatan antar bank di BPR dalam batasan yang moderat. Mendasarkan pada hal tersebut peringkat risiko untuk Pilar 3 adalah risiko Sedang.
11	Y	D01	Single	+	1240	Faktor eksternal		1	Pada pilar 4 faktor Eksternal Bank menetapkan tingkat risiko rendah dimana pada setiap sub-pilar Layanan Digital Kompetitor, kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap kinerja bank, Persaingan layanan antar BPR, dan Regulasi pemerintah dalam penilaian rendah. Bank akan selalu mengedepankan Customer Service Excellence untuk merespon persaingan layanan antar BPR dengan meningkatkan kualitas SDM yang berkesinambungan dengan pendidikan/pelatihan-pelatihan berjenjang pada karyawan internal. Inovasi produk dan layanan akan terus dikembangkan dengan pengoptimalisasi Divisi Litbang dengan selalu mengedepankan kebutuhan masyarakat dengan fokus pada UMKM dan Digitalisasi perbankan yang terus akan dikembangkan. Dengan pengumpulan data-data analisis pasar strategi-strategi pemasaran akan dirumuskan guna merespon persaingan layanan antar bank dan merespon regulasi-regulasi pemerintah seperti fasilitas kredit KUR yang digulirkan pemerintah melalui bank-bank umum penyalur program KUR tersebut.

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Sandi	Nama Komponen	Rasio	Nilai	Keterangan
12	Y	D01	Single	+	1299	Lainnya		3	Pilar penilaian lainnya menggunakan beberapa parameter yang mempengaruhi risiko inhern kredit antara lain khususnya kompetensi account officer dan analisis kredit, fungsi dan peranan komite kredit, proses keputusan dan realisasi kredit, monitoring atas penggunaan dana kredit, pengawasan dan monitoring kewajiban, kecukupan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia di pemasaran. Mendasarkan hal tersebut ditetapkan peringkat risiko pada Pilar 5 adalah risiko Sedang.
13	Y	D01	Single	+	1292	Tingkat Risiko Inheren Kredit		5	Berdasarkan kertas kerja penilaian profil risiko secara konsolidasi nilai risiko inhern kredit di Laporan Profil Risiko adalah 4,39 atau peringkat Risiko Sangat Tinggi. Nilai risiko ditetapkan berdasarkan penilaian Risiko tertinggi yaitu di Pilar 2 kualitas aset. Hasil penilaian ini sama dengan periode penilaian sebelumnya. Kualitas kredit masih menjadi fokus dan titik risiko tertinggi selama periode tahun berjalan. Migrasi kredit masih terjadi pada tingkatan yang tinggi. Meskipun kredit dengan plafon besar telah dilakukan analisa dan review oleh second line dengan melakukan komite kredit secara berjenjang yang diputuskan oleh kantor pusat. Dalam memutuskan kredit masih ditemukan kesalahan dalam menentukan skema kredit yang tepat. Kelemahan dalam melakukan analisa repayment capacity dan memahami bisnis proses dari usaha calon debitur. kedepan bidang atau Divisi pemasaran akan merumuskan program-program yang dapat merangsang penyerapan NOA baru yang berfokus pada sektor UMKM dengan jangka waktu pendek dan menengah dengan mengedepankan data-data analisis yang tepat dan fokus pada kepuasan nasabah dalam layanan perbankan. Digitalisasi perbankan akan terus dikembangkan dimana hal ini menjadi nilai lebih bank dalam tingkat persaingan peer group BPR.

Form Kertas Kerja KPMR Kredit

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Sandi	Nama Komponen	Nilai	Keterangan
1	Y	D01	Single	+	1310	Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris	3	Dewan Komisaris dan Direksi memiliki komitmen yang tinggi dalam rangka penerapan kebijakan Manajemen Risiko kredit dengan menetapkan kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko kredit, melakukan review secara berkala, menetapkan langkah - langkah untuk memastikan. Pengurus telah menindaklanjuti komitmen pemeriksaan OJK tentang penerapan kebijakan manajemen risiko perkreditan meskipun belum secara menyeluruh diterapkan. Masih terdapat kelemahan antara lain pemenuhan dan pengelolaan sumber daya manusia bidang perkreditan, pelaksanaan dan penerapan atas kebijakan manajemen risiko kredit yang ditetapkan, implementasi, maupun pengawasan rencana strategi manajemen perkreditan di setiap unit kerja perkreditan.
2	Y	D01	Single	+	1311	Apakah Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	2	Dewan Komisaris telah menyetujui kebijakan perkreditan dan ketentuan - ketentuan lain yang meliputi SOP, surat keputusan, surat edaran serta kebijakan di bidang perkreditan, strategi dan kerangka manajemen risiko, serta limit dan toleransi risiko kredit..Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko kredit, antara lain melakukan penilaian terhadap kecukupan kualitas dan kuantitas kebijakan serta prosedur dengan peraturan OJK dan praktek umum terbaik sesuai kapasitas bank ..Dewan Komisaris mampu mengimplementasikan kompetensinya pada bidang manajemen risiko dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko perkreditan dan memberikan arahan perbaikan yang harus dilakukan oleh Direksi..Dewan Komisaris telah mempertimbangkan masukan dan rekomendasi tertulis dari Komite Pemantau Risiko yang disampaikan secara berkala. Sampai dengan periode penilaian, telah dilaksanakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 13 kali dan Rapat Komite Pemantau Risiko sebanyak 15 Kali..Dewan Komisaris telah mempertimbangkan masukan dari Komite Pemantau Risiko. Komite Pemantau Risiko secara berkala telah menyampaikan laporan dan rekomendasi secara tertulis kepada Dewan Komisaris.
3	Y	D01	Single	+	1312	Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	3	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban Direksi dalam penerapan manajemen risiko kredit secara tertulis dan dalam forum rapat (terdapat notulen).Dewan Komisaris telah memberikan masukan dan pengarahan dan dukungan terhadap tranformasi digital melalui ketersediaan sistem informasi manajemen di bidang manajemen risiko kredit, yang disampaikan dalam Forum Rapat Pengurus..Dewan Komisaris telah melakukan monitoring tindak lanjut penerapan manajemen risiko dari Direksi terkait dengan capaian kredit, kualitas kredit, ketersediaan sumber daya manusia, peningkatan kompetensi analis kredit dan pemutus kredit, program penyelesaian kredit macet..Dewan Komisaris secara konsisiten telah mendukung pengembangan budaya manajemen risiko kredit dengan memastikan seluruh ketentuan perkreditan telah dipenuhi, meskipun implementasi belu optimal namun direksi mengawal implementasinya dengan melakukan kunjungan ke cabang, memantau tindaklanjut hasil kunjungan SKMR dan SKAI, mendorong terpenuhinya kecukupan SDM . Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris
4	Y	D01	Single	+	1313	Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kredit, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	3	Direksi cukup optimal dalam mengimplementasikan kompetensinya terkait manajemen risiko kredit, namun rendahnya kualitas aset (rasio NPL tinggi), dan pertumbuhan portfolio tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ditambah dengan pada saat ini posisi Direktur Pemasaran masih mengalami kekosongan..Direksi telah menetapkan kebijakan manajemen risiko kredit antara lain PKPB, SK Dokumen Kredit, BWMK, Limit dan toleransi risiko, Produk Kredit, AYDA, Penetapan Kualitas Aset..Direksi telah melakukan evaluasi kebijakan dan ketentuan manajemen risiko kredit secara berkala berdasarkan temuan - temuan implementasi kebijakan yang bersumber dari temuan OJK, temuan SKAI, laporan profil risiko atau kaji ulang oleh pihak internal atau eksternal. .

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Sandi	Nama Komponen	Nilai	Keterangan
5	Y	D01	Single	+	1314	Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko kredit, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko kredit terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	3	Direksi telah melakukan tindakan mitigasi risiko antara lain melalui pembahasan dalam forum Komite Kredit dan Komite Manajemen Risiko secara berkala. Direksi juga melakukan tindakan pengendalian risiko kredit dalam exit meeting pemeriksaan SKAI pada setiap Unit Kerja .Direksi telah menyampaikan kepada seluruh unit kerja khususnya Kepala Cabang dan Pejabat Eksekutif melalui forum evaluasi setiap bulan tindakan dan kebijakan pengendalian risiko kredit, kepada jenjang organisasi lain dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan kegiatan monitoring, mentoring dan advising ke cabang..Direksi secara konsisten mengembangkan budaya risiko kredit dengan melakukan pemenuhan dan/atau pengkinian ketentuan, sosialisasi, pemantauan implementasi serta penilaian profil risiko kredit secara berkala, melakukan evaluasi dan menyusun langkah - langkah perbaikan terhadap hasil penilaian profil risiko. (penilaian profil risiko setiap triwulan dan melakukan evaluasi hasil penilaian).Direksi melakukan review terhadap delegasi wewenang memutus kredit berdasarkan evaluasi hasil penerapan kebijakan manajemen risiko kredit secara berkala (triwulanan) antara lain memperhatikan rasio NPL berdasarkan kewenangan memutus kredit masing - masing kantor cabang melalui forum komite BWMK..Direksi melakukan evaluasi atas usulan transaksi sebelum memberikan persetujuan bidang perkreditan melalui pembahasan bersama dengan unit terkait, penyusunan kajian, dan pemberian opini.
6	Y	D01	Single	+	1315	Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi kredit dan fungsi Manajemen Risiko kredit?	4	Satuan Kerja Pengendalian (Second Line) telah terpisah dan memiliki Pejabat Setingkat Kepala Divisi dan Pejabat Struktural yang terpisah dan independen dalam melaksanakan tugasnya. Namun kompetensi dan kecukupan sumber daya manusia masih terbatas dan perlu ditingkatkan. SKK terdapat 6 pegawai dan SKMR terdapat 5 pegawai.Kecukupan organisasi Unit Kerja perkreditan masih belum terpenuhi, baik dari jumlah SDM, kelengkapan pejabat, maupun kompetensinya. Terdapat kekurangan SDM dan kekosongan pejabat di Cabang antara lain pegawai setingkat Kepala Bidang, Analis, tenaga pemasaran, dan tenaga remedial. Kompetensi pegawai belum merata di setiap unit kerja. .Satuan Kerja Manajemen Risiko memiliki jumlah SDM yang cukup memadai, namun masih perlu peningkatan kompetensi. Sedang kecukupan kompetensi terkait manajemen risiko pada jenjang organisasi perkreditan, masih belum memadai, sehingga perlu adanya peningkatan kompetensi melalui berbagai metode yang sesuai dengan kondisi SDM yang ada..Proses perkreditan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan dan setiap unit kerja dapat menjalankan fungsinya, namun masih terdapat kelemahan dalam hal proses perkreditan, realisasi kredit, monitoring dan pengawasan kredit..
7	Y	D01	Single	+	1316	Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko kredit?	3	Ketentuan SOTK yang berlaku telah sesuai dengan penerapan manajemen risiko kredit, telah dilakukan pemisahan unit yang menangani proses perkreditan dengan unit yang menangani realisasi kredit atau pencairan kredit. Meskipun di beberapa cabang untuk unit kerja perkreditan masih terdapat kekosongan di beberapa bagian.Dalam periode penilaian telah dilakukan review terhadap pedoman pengelolaan SDM. Bank telah melakukan pengembangan MSDM, Analisa beban kerja dan Career Path.Direksi telah melakukan evaluasi terkait dengan kecukupan jumlah SDM bidang perkreditan, namun hasil evaluasi tersebut belum sepenuhnya ditindaklanjuti karena masih terdapat beberapa jenjang organisasi yang belum terpenuhi jumlah SDM nya, juga belum ada pemerataan SDM berdasarkan analisa beban kerja SDM perkreditan dan rencana strategis dalam mengembangkan bisnis pada masing - masing kantor cabang .
8	Y	D01	Single	+	1320	Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	3	Bank telah memiliki ketentuan, prosedur, dan penetapan limit risiko kredit serta telah ditetapkan melalui forum rapat komite serta melibatkan seluruh unit kerja. Bank juga telah melakukan pengkinian dan review atas ketentuan prosedur perkreditan dan disosialisasikan oleh unit kerja terkait. Namun pelaksanaan ketentuan dan prosedur penerapan manajemen risiko kredit masih belum optimal dan pemahaman unit kerja terhadap ketentuan tersebut masih lemah terbukti masih ditemukannya pelanggaran dan atas setiap kebijakan dan keputusan kredit yang ditetapkan belum sepenuhnya mendasarkan pada limit dan toleransi kredit yang ditetapkan secara berulang. Cakupan kebijakan pengelolaan risiko kredit tergolong cukup memadai di BPP Manajemen Risiko namun implementasi belum dilakukan oleh unit kerja perkreditan dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Proses penetapan limit risiko kredit cukup memadai namun dokumentasinya belum lengkap dan cukup sulit untuk dilakukan audit trail.
9	Y	D01	Single	+	1321	Apakah BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kredit yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	3	Bank telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko Kredit yang merujuk pada visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis dan kecukupan SDM. Rencana bisnis bank disusun berdasarkan strategi penerapan manajemen risiko mengacu pada hasil penerapan / profil risiko kredit .Penyusunan rencana bisnis bank telah berdasarkan pada hasil penilaian profil risiko dimasa lalu, dan strategi serta kerangka manajemen risiko yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi profil risiko kredit. .Kebijakan manajemen risiko kredit dilakukan kaji ulang oleh SKMR, namun belum dilakukan pnegkinian dan kaji ulang oleh SKAI atau pihak eksternal serta dilaporkan kepada Direksi dan Komisaris.Kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko kredit telah tersedia untuk seluruh area Manajemen Risiko untuk risiko kredit. Meskipun demikian belum secara keseluruhan pegawai memiliki pemahaman dan penerapan yang baik. Perusahaan terus melakukan monitoring dan pendampingan untuk mengupayakan hal tersebut terealisasi dengan baik.Perumusan penetapan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko telah berdasarkan kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan berdasarkan hasil penilaian profil risiko kredit, namun dalam pelaksanaannya masih perlu mendapatkan perhatian oleh seluruh risk owner dan satuan kerja pengendali, agar limit risiko yang ditetapkan aktif dilakukan monitoring untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi dan menetapkan strategi perbaikan yang harus dilakukan..

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Sandi	Nama Komponen	Nilai	Keterangan
10	Y	D01	Single	+	1322	Apakah BPR: - Memiliki prosedur manajemen risiko kredit dan penetapan limit risiko kredit yang ditetapkan oleh Direksi; - Melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit risiko kredit secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan - Melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit risiko kredit secara berkala?	3	BPP Manajemen Risiko telah mengatur mekanisme dan tata cara penetapan limit dan toleransi risiko kredit, namun dalam pelaksanaannya masing - masing fungsi yang berkaitan dengan risiko kredit belum optimal dalam memahami dan menjalankan seluruh aktivitas perkreditan termasuk menetapkan limit risiko kredit untuk seluruh aktivitas fungsional perkreditan..Seluruh unit kerja belum melakukan pengawasan dan monitoring limit dan toleransi risiko kredit secara optimal, sehingga upaya - upaya pencegahan dan perbaikan yang harus dilakukan juga tidak tepat waktu lebih dini. Saat ini monitoring terhadap limit dan toleransi risiko kredit masih dilakukan oleh Risk Residence Area pada masing-masing Kanwil..Bank belum optimal melakukan evaluasi terhadap pelampauan limit dan toleransi risiko kredit serta penyebab terjadinya pelampauan limit..Sebagian besar SDM perkreditan belum memahami ketentuan limit dan toleransi risiko yang telah ditetapkan sebagai dasar acuan. Satuan kerja manajemen risiko terus melakukan pendampingan melalui Risk Residence MR dalam meningkatkan pemahaman setiap SDM di masing-masing kanwil.Bank telah melakukan evaluasi dan mengkinikan ketentuan limit dan toleransi kredit berdasarkan kondisi usaha dan perkembangan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap proses perkreditan.Penetapan Limit dan toleransi risiko kredit telah memperhatikan antara aspek identifikasi, pengukuran, dan pengendalian risiko kredit serta limit secara komposit dengan merujuk pada Laporan Profil Risiko dan sesuai arah strategi perkreditan..Penetapan limit risiko belum sepenuhnya sesuai prosedur yang ditetapkan karena masing - masing risk owner perkreditan belum menyampaikan penetapan limit secara komprehensif. Penyusunan penetapan limit masih terfokus pelaksanaannya oleh SKMR.Penetapan Limit dan toleransi risiko kredit telah meliputi limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per aktivitas fungsional pada tiap - tiap risk owner.
11	Y	D01	Single	+	1323	Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko kredit sesuai dengan ketentuan?	3	Unit kerja perkreditan belum sepenuhnya memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan /atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risikonya.Bank telah memiliki kebijakan penerbitan produk dan/atau aktivitas kredit baru yang diatur dalam BPP Manajemen Risiko tersebut, belum menjelaskan secara lengkap kriteria produk dan layanan baru, sistem dan prosedur kewenangan pengelolaan mulai dari unit kerja atau organisasi, tata kerja persiapan produk dan atau aktivitas kredit baru, uji coba, pelaksanaan, dan laporan pelaksanaannya. .Kebijakan produk dan aktivitas baru dilakukan evaluasi secara berkala sesuai ketentuan. Pada periode penilaian semua kebijakan produk kredit dan aktivitas baru dilakukan evaluasi dan pengkinian yang telah diterbitkan pada Bulan Maret lalu..
12	Y	D01	Single	+	1330	Kecukupan Proses dan Sistem	4	Proses manajemen risiko kredit mencakup kegiatan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko kredit. Identifikasi dilakukan terhadap seluruh kegiatan untuk mengetahui sumber penyebab risiko kredit. Dalam melakukan pengukuran, parameter yang dikembangkan disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas bank, agar hasil pengukuran mencerminkan kondisi yang riil. Selanjutnya dilakukan pemantauan terhadap komposisi dan kondisi debitur, portfolio kredit, identifikasi kredit bermasalah,persyaratan kredit, kecukupan agunan dan kepatuhan terhadap limit. Pengendalian dilakukan secara aktif dengan pengelolaan portfolio kredit, batasan konsentrasi, penetapan kewenangan memutus kredit, memisahkan fungsi penyaluran kredit dengan fungsi yang menangani kredit bermasalah. Sistem informasi diperlukan untuk mendukung proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian, namun belum sepenuhnya mampu mendukung proses manajemen risiko kredit.
13	Y	D01	Single	+	1331	Apakah BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kredit yang melekat pada kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko kredit?	4	SDM telah melaksanakan proses manajemen risiko kredit, tetapi masih terdapat kekurangan dalam pengukuran sensitivitas produk kredit, stresstesting perubahan kondisi, serta kurangnya laporan yang komprehensif untuk mitigasi risiko kredit. .Belum seluruh jenjang organisasi memiliki pemahaman dan kemampuan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian aktivitas perkreditan secara komprehensif dan optimal.Proses perkreditan telah dilakukan verifikasi dual control, namun dalam pelaksanaan proses verifikasi kurang dapat dilakukan secara mendetail..Proses pengambilan keputusan bidang perkreditan dilakukan melalui pembahasan dalam forum komite kredit namun belum sepenuhnya mencerminkan transparansi kondisi debitur karena kelemahan faktor SDM dalam melakukan pemenuhan dokumen dan informasi, analisa terkait dengan calon debitur dan usahanya..Proses Manajemen risiko kredit yang dilakukan terkadang masih belum didukung dengan data kredit yang informatif akurat dan komprehensif, namun perbaikan terus dilakukan untuk menunjang proses Manajemen Risiko yang akurat..Bank telah memiliki jenis-jenis produk kredit sesuai dengan karakteristik masing - masing, namun sejauh ini belum dilakukan analisa secara komprehensif terhadap risiko yang melekat pada masing - masing jenis produk..Evaluasi terhadap kesesuaian asumsi, data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko kredit sudah dilakukan, namun belum secara menyeluruh.Dalam melakukan pengukuran risiko kredit, belum dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan yang material pada kegiatan layanan, produk, dan faktor risiko. .Pemantauan risiko kredit dilakukan dengan penetapan limit dan toleransi risiko pada aktivitas fungsional dan jenis risiko, namun belum dilakukan stresstesting terhadap exposure risiko yang ada..Perubahan yang material terhadap faktor risiko kredit belum dilakukan penyesuaian pelaporan, namun demikian akan terus dilakukan pengawasan untuk mengoptimalkan pelaporan-pelaporan jika terjadi perubahan..

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Sandi	Nama Komponen	Nilai	Keterangan
14	Y	D01	Single	+	1332	Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko kredit serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	4	Bank telah memiliki sistem informasi pelaporan Manajemen Risiko untuk Risiko kredit yang dikembangkan oleh pihak eksternal dan SKMR..Sistem informasi Manajemen Risiko telah dapat diakses oleh seluruh unit kerja dan Satuan kerja manajemen risiko, namun sistem informasi risiko kredit belum sepenuhnya dapat memberikan laporan yang lengkap terkait dengan risiko perkreditan disetiap unit dan tingkat exposure risikonya..Informasi yang dapat disajikan masih terbatas pada data kuantitatif dan belum terdapat data penunjang laporan secara cepat dan terkini per aktivitas fungsional dari setiap unit kerja. Saat ini sudah dikembangkan sistem informasi Monitoring Limit dan toleransi risiko serta Profil Risiko untuk mendukung pelaporan risiko kredit, kedepan akan di kembangkan sistem informasi penilaian tingkat kesehatan Bank..Sistem informasi yang telah dikembangkan bank belum sepenuhnya dapat mendukung meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen risiko kredit, antara lain dalam SIM belum dapat disajikan rencana tindak lanjut dan residual risk sehingga apabila terjadi pelampauan maka risk owner akan melakukan pelaporan kepada SKMR dan menyusun strategi yang akan dilakukan untuk perbaikan..Sistem informasi yang dimiliki saat ini belum menyajikan informasi secara lengkap terkait penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Saat ini masih dikembangkan ke arah tersebut untuk menyempurnakan sistem informasi yang sudah ada..
15	Y	D01	Single	+	1340	Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	3	Satuan kerja pengendalian yang meliputi Risk Management Unit (SKK dan SKMR) dan Risk Assurance (SKAI). Satuan Kerja Pengendalian telah memiliki pedoman kerja, namun demikian pelaksanaan pengendalian yang dilakukan belum sepenuhnya mengacu pada pedoman yang ditetapkan. Satuan kerja pengendalian melakukan rapat secara berkala untuk membahas pelaksanaan pengendalian yang dilakukan, namun belum menyampaikan rekomendasi secara tertulis kepada Direksi terkait dengan pengendalian risiko kredit. Risk Manajemen belum melakukan pengendalian secara khusus terhadap unit kerja dan atau aktifitas fungsional yang melanggar kepatuhan dan memiliki exposure risiko kredit tinggi. Risk assurance dalam melakukan pengendalian masih belum komprehensif, sehingga potensi risiko kredit yang ada belum terdeteksi lebih dini. Hasil temuan pemeriksaan masih bersifat umum didominasi temuan pelanggaran regulasi perkreditan, belum optimalnya governance proses, prinsip kehati-hatian kurang optimal dijalankan ,terdapat side streaming.
16	Y	D01	Single	+	1341	Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko kredit, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindaklanjut atas temuan pemeriksaan?	3	SKAI telah melakukan pemeriksaan penerapan manajemen risiko kredit pada Beberapa Divisi di Kantor Pusat dan 11 Kantor Cabang, mencakup evaluasi terhadap implementasi kebijakan, prosedur, proses dan mekanisme mitigasi risiko untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan internal. Hasil pemeriksaan menunjukkan beberapa temuan fundamental terkait kurang memadainya pengendalian internal..SKAI telah melakukan monitoring tindak lanjut temuan dengan mengirimkan progress tindak lanjut kepada Kepala Cabang maksimal tanggal 5 setiap bulannya dan telah melaporkan kepada Direktur Utama.SKAI melakukan pengawasan terhadap setiap unit kerja dan individu yang terlibat dalam kebijakan manajemen risiko kredit terhadap pemahaman dan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang ditetapkan serta pemisahan tugas tanggungjawab yang jelas pada proses perkreditan..SKAI memastikan integritas dan efektivitas proses manajemen risiko dengan melakukan pengawasan yang mencakup verifikasi pemisahan fungsi secara jelas untuk mencegah konflik kepentingan, kelengkapan struktur organisasi, fungsi pelaporan yang efektif, dokumentasi yang komprehensif dalam penerapan kebijakan manajemen risiko..SKAI belum sepenuhnya melakukan verifikasi dan review terhadap sistem pengendalian internal manajemen risiko kredit, yang antara lain mencakup satuan kerja perkreditan berfungsi secara memadai, exposure risiko terjaga sesuai limit, pengelolaan posisi dan portfolio kredit, fungsi penyelesaian kredit bermasalah terpisah dengan fungsi penyaluran kredit, review terhadap agunan, dan melakukan evaluasi metode dan kecukupan CKPN. .
17	Y	D01	Single	+	1342	Apakah sistem pengendalian intern terhadap risiko kredit telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	3	Unit kerja pengendalian telah terpisah secara jelas dari unit kerja operasional perkreditan untuk memastikan independensi, mencegah konflik kepentingan dan meningkatkan efektivitas pengendalian internal. .Unit kerja perkreditan belum sepenuhnya memahami dan menjalankan tugas serta tanggung jawabnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang telah ditetapkan. Pemahaman terhadap penerapan kebijakan dan prosedur manajemen risiko kredit, evaluasi terhadap kelayakan kredit, serta pemantauan dan mitigasi risiko yang efektif masih kurang memadai. ..
18	Y	D01	Single	+	1350	Tingkat KPMR	4	Dalam Penerapan manajemen risiko kredit Dewan Komisaris dan Direksi memiliki komitmen yang sangat kuat melalui kebijakan dan kerangka kerja yang terstruktur. Namun, implementasinya belum merata, dengan kelemahan pada pengelolaan SDM, pemahaman kebijakan, dan pelaksanaan prosedur. Proses manajemen risiko telah berjalan mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian, tetapi terkendala oleh sistem informasi yang belum optimal. Temuan menunjukkan pelanggaran regulasi, tata kelola yang lemah, dan kurangnya prinsip kehati-hatian. Satuan kerja pengendalian memiliki pedoman kerja dan rutin melakukan evaluasi, tetapi efektivitas pengendalian masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan manajemen risiko kredit. Mendasarkan dari hal tersebut penilaian KPMR kredit pada periode penilaian memiliki nilai risiko 3.35 dengan peringkat Kurang Memadai.



PT BPR BKK JATENG
(Perseroda)

RISIKO OPERASIONAL

Form Analisis Risiko Operasional

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Sandi	Nama Komponen	Nilai	Analisis
1	Y	D01	Single	+	2100	Tingkat Risiko	3	Tingkat Risiko Operasional pada periode Semester I 2025 merupakan peringkat Sedang dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Operasional pada peringkat Kurang Memadai, sehingga perlu dilakukan kaji ulang secara terbatas dengan menyusun rencana tindak tiap triwulanan yang dilakukan oleh internal bank. Telah terjadi peningkatan pada frekuensi, jenis, dan sebaran fraud. Kecukupan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas pada penerapan manajemen risiko operasional menjadi skala prioritas untuk dilakukan pemenuhan utamanya pada pemahaman, kompetensi, kepatuhan terhadap penerapan manajemen risiko. Budaya risiko dan budaya kepatuhan belum mampu diserap dan dipahami oleh seluruh jenjang organisasi, perlu dilakukan kegiatan dan tindakan yang mendukung pengembangan budaya risiko dan budaya patuh. Berdasarkan hasil exit meeting pemeriksaan SKAI selama periode penilaian terdapat tindakan fraud yang dilakukan oleh pegawai dari mulai tingkatan terendah sampai dengan pejabat struktural. Permasalahan fraud dan kualitas pegawai menjadi permasalahan kunci dari seluruh risiko bank di periode penilaian ini yang berdampak pada hasil penilaian risiko yang lain.
2	Y	D01	Single	+	2200	Tingkat Risiko Inheren	3	Risiko inheren operasional menunjukkan bahwa bank yang telah beroperasi selama 6 tahun ini menghadapi berbagai capaian dan tantangan dalam pengelolaan risiko. Konsolidasi yang mempengaruhi strategi bisnis dan budaya perusahaan menjadi salah satu faktor risiko utama. Meskipun kebijakan dan prosedur manajemen risiko operasional telah ditetapkan, pelaksanaannya belum optimal, terutama dalam pemerataan dan kecukupan SDM. Kekurangan SDM ini berkontribusi pada peningkatan human error yang tidak terdeteksi dini akibat lemahnya monitoring dan pengawasan. Selama periode penilaian masih ditemukan penyimpangan, sebagian besar terjadi pada perkreditan serta kas, dana, dan operasional . Penyimpangan ini disebabkan oleh lemahnya fungsi Maker, Checker, & Approval, serta analisis dan monitoring yang belum optimal. Meskipun terjadi penurunan dalam jenis penyimpangan, masih dibutuhkan penguatan tata kelola, monitoring, serta evaluasi untuk memitigasi risiko operasional secara lebih efektif. Di sektor teknologi informasi (TI), bank telah meningkatkan keamanan server dengan tiga lapis pengamanan, tetapi belum melakukan uji ketahanan. Keterbatasan SDM baik dari segi jumlah maupun kompetensi juga menjadi kendala dalam pengelolaan sistem yang lebih efektif. Sosialisasi modul Core Banking System (CBS) telah dilakukan, tetapi masih diperlukan pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan penguasaan teknologi. Mendasarkan pada hal itu maka nilai tingkat risiko operasional pada periode Semester I Tahun 2025 adalah 3,17 atau termasuk pada peringkat risiko kategori sedang.
3	Y	D01	Single	+	2300	Tingkat KPMR	4	Dewan Komisaris dan Direksi telah menyusun kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko kredit dalam Buku Pedoman Perusahaan yang dilakukan review secara berkala. Ketentuan penetapan Limit dan Toleransi risiko dilakukan review berkala melalui forum rapat Komite sesuai ketentuan. Bank juga telah memiliki kecukupan sumber daya manusia di bidang perkreditan termasuk satuan kerja pengendalian yang bertugas dan menjalankan kewenangan sesuai dengan ketentuan walaupun secara kompetensi dapat dikategorikan kurang memadai. SDM di bidang fungsional perkreditan telah terpisah antara pejabat pemutus dan pejabat yang melakukan proses. Bank telah didukung dengan sistem yang cukup memadai yang memudahkan fungsi monitoring dan pengukuran risiko kredit secara lebih akurat. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan ketentuan perkreditan telah dilakukan secara berkala. Bank juga telah menetapkan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang tegas antara Risk Taking Unit, Risk Management Unit, dan Risk Assurance. Namun demikian penerapan prinsip kehati-hatian perkreditan belum diterapkan secara menyeluruh oleh pemangku kewenangan memutus. Pemahaman regulasi internal maupun eksternal oleh pegawai perkreditan masih lemah yang dibuktikan temuan pelanggaran yang dilakukan oleh seluruh Satuan Kerja.

Form Kertas Kerja Risiko Inheren Operasional

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Sandi	Nama Komponen	Nilai	Keterangan
1	Y	D01	Single	+	2210	Kompleksitas bisnis dan kelembagaan	3	Bank merupakan hasil konsolidasi dan telah berjalan selama 6 tahun, memiliki 28 jaringan kantor cabang dan 102 kantor kas. Proses konsolidasi berpengaruh terhadap strategi bisnis dan budaya perusahaan. Strategi pengembangan diantaranya dengan jenis produk kredit dan produk simpanan yang cukup beragam. Ketidakterpenuhan struktur organisasi yang Direktur Kepatuhan dan Pemasaran serta 1 PE berdampak signifikan terhadap jalannya perusahaan. Ketidakkukupan SDM dan kurangnya pemerataan juga menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya exposure risiko operasional. Pada Periode Semester I 2025 untuk pilar 1 exposure risiko operasional memiliki peringkat risiko Sedang.
2	Y	D01	Single	+	2211	Skala usaha dan struktur organisasi	4	Skala usaha BPR tergolong besar dengan status BPR KU 3 dengan modal inti sebesar Rp 404,15 miliar dan berada pada kelompok 5 BPR dengan asset terbesar di Indonesia, namun demikian, masih terdapat kekosongan SOTK pada level Direksi yakni Direktur Kepatuhan dan Direktur Pemasaran, kekosongan Direktur Pemasaran diisi oleh Direktur Utama dan akan dilengkapi pada periode berikutnya. Dan masih terdapat 18 kekosongan jabatan di level kabis, kasubid, residen area, kepala kantor kas dan kepala cabang.
3	Y	D01	Single	+	2212	Jaringan kantor, Rentang kendali dan lokasi kantor cabang	3	Jumlah maksimal jaringan kantor cabang yang diperkenankan untuk BPR KU 3 adalah 70 Kantor Cabang, dengan jumlah Kantor Cabang saat ini sebanyak 28 Kantor Cabang atau 28,5% dari yang diperkenankan. Dengan jumlah Kantor Kas sebanyak 102 Kantor Kas, selain itu Bank tidak memiliki Kantor Cabang diluar provinsi. Rentang kendali cukup kecil dengan 28 Kantor Cabang berada pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, namun demikian terdapat lokasi kantor layanan yang sulit diakses karena berada pada wilayah kecamatan yang memakan waktu tempu lebih dari 1 jam dari Kantor Cabang. Hal ini tidak dapat dihindari karena menjadi komitmen Bank untuk meningkatkan akses literasi keuangan pada daerah yang masih minim akses perbankan. 90% Jaringan Kantor Memiliki Peringkat Risiko Cukup. Beberapa Kabis memiliki rentang kendali yang luas karena akses telekomunikasi juga kurang stabil antara lain : Petungkriyono, Kandangserang, Paninggaran (KC Kab Pekalongan), KKas Salem (KC Brebes), KKas Pulosari (KC Pemalang), KKas Batur (KC Banjarnegara).
4	Y	D01	Single	+	2213	Keberagaman produk dan/atau jasa	3	Bank memiliki produk yang termasuk dalam kegiatan usaha utama yakni Bank memiliki 13 jenis produk kredit dan 5 jenis produk simpanan. Produk tersebut telah disesuaikan dengan karakter dan potensi wilayah seluruh jaringan kantor cabang, serta kerjasama dengan pihak ketiga sebagai agen uang elektronik speedcash dengan cobranding K-ERIS. Tingkat pemahaman risk taking unit terhadap keberagaman produk cukup baik didukung dengan adanya monitoring berkala yang dilakukan oleh Kantor Pusat terkait dengan evaluasi ketentuan setiap tahunnya. Produk Bank memiliki jenis dan kompleksitas yang beragam dan telah dilengkapi dengan sistem dan prosedur yang cukup memadai, namun dalam pelaksanaannya belum berjalan optimal sesuai ketentuan. Jenis transaksi Bank kurang kompleks dan volume transaksi harian dapat tercover oleh kapasitas layanan SDM dan CBS.
5	Y	D01	Single	+	2214	Tindakan korporasi	3	Bank merupakan hasil konsolidasi dan telah berjalan selama 5 tahun. Proses konsolidasi berpengaruh terhadap strategi bisnis dan budaya perusahaan dari strategi bisnis yang bersifat lokal (Kabupaten/Kota) menjadi strategi bisnis yang mencakup seluruh wilayah di Jawa Tengah. Strategi bisnis juga menyesuaikan dengan besarnya jumlah modal inti dengan lebih intens pada penyaluran kredit dan pengelolaan dana di sektor usaha menengah dan besar. Corporate Plan disusun dalam jangka pendek (RBB), jangka menengah (3 tahun) dan jangka panjang (5 tahun), dengan menetapkan langkah - langkah strategis untuk pengembangan dan penguatan bank ke depan.

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Sandi	Nama Komponen	Nilai	Keterangan
6	Y	D01	Single	+	2220	Sumber daya manusia (SDM)	3	Bank telah menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko operasional, melakukan sosialisasi dan pendampingan, namun belum pada seluruh RTU dan/atau pegawai, belum dilakukan asesmen sebagai sarana evaluasi terhadap kompetensi SDM dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga belum dapat diukur apakah telah dilakukan penempatan pegawai pada fungsi yang sesuai dengan kompetensi. Hal ini mengakibatkan terjadinya human error yang tidak terdeteksi dini, karena fungsi monitoring dan pengawasan langsung dari atasan juga masih lemah. Human error ini berdampak pada meningkatnya exposure risiko - risiko lainnya, sehingga perlu segera dilakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kecukupan SDM. Kecukupan kuantitas dan kualitas SDM masih menjadi evaluasi yang perlu dilakukan tindak lanjut dengan cepat untuk memitigasi dan mengurangi risiko Operasional.
7	Y	D01	Single	+	2221	Kecukupan kuantitas dan kualitas SDM	4	Jumlah SDM Semester I 2025 sebanyak 1.481 orang. Masih terdapat kekosongan SOTK sebanyak 18 orang..Terdapat kekosongan SOTK pada fungsi yang signifikan yakni Direktur Pemasaran, Direktur Kepatuhan dan 18 kekosongan pada posisi jabatan Kadiv, Kabid, Kasubid, Kacab, Residen Area dan KanKas.Sebagian besar telah memenuhi kecukupan SDM secara kuantitas, namun masih terdapat beberapa unit kerja yang terdapat kekosongan SDM seperti Kantor Pusat, Kantor Wilayah, 7 Kantor Cabang.Terdapat 1.213 pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dari jumlah total pegawai sebanyak 1.481 orang (81,90%).Terdapat 12 pegawai mengundurkan diri pada periode penilaian, Dimana alasan resign pegawai diantaranya fokus mengurus keluarga, melanjutkan pendidikan, memilih berwirausaha dan bekerja ditempat lain.Pada periode penilaian terdapat 256 pegawai dengan usia di atas 50 tahun atau pegawai (19.98%) dari jumlah pegawai 1.481.Divisi SDM telah melakukan proses analisa beban kerja, namun belum sepenuhnya proses selesai sehingga keseimbangan beban kerja pada masing- masing unit kerja belum terukur.NOA Kredit Juni 2025 sebesar 37.325 Jumlah SDM di bidang kredit sebesar 519 pegawai. Prosentase NOA Kredit terhadap SDM sebesar 0,014.Pada periode penilaian sedang dilakuka proses analisa beban kerja, meskipun belum seluruh proses selesai..Belum dilaksanakan pengukuran kinerja pegawai berbasis manajemen risiko operasional pada periode penilaian.Budaya kerja wajib memperhatikan pemberian penghargaan dan sanksi secara tepat, juga peningkatan kompetensi yang berkelanjutan.Rotasi pegawai telah dilakukan namun dalam skala yang sangat kecil, sebagian besar pegawai belum dilakukan rotasi.Rotasi PE menjalankan tugas 1 tahun dan selambat-lambatnya 4 tahun. Sebagian besar PE telah dilakukan rotasi.Jumlah Pelatihan Semester I 2025 43 kali. Jumlah evaluasi yang telah dijalankan 1 kali. Refreshment yang telah dijalankan 1 kali.Evaluasi dilakukan efektif setiap 3 bulan sekali pada tiap Triwulan
8	Y	D01	Single	+	2222	Permasalahan operasional karena faktor manusia (human error)	3	Masih terdapat kesalahan - kesalahan operasional yang bersumber dari human error, yang meliputi kesalahan administrasi, kesalahan dalam melakukan penilaian (kegiatan lapangan oleh AO kredit dan/atau analis), kesalahan dalam melakukan tindakan pengawasan melekat dan/atau berjenjang yang berdampak pada kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung.
9	Y	D01	Single	+	2230	Penyelenggaraan teknologi informasi (TI)	2	Pada periode penilaian terdapat perbaikan server secara menyeluruh bertujuan untuk lebih menguatkan sistem keamanan Database. Sudah terdapat 3 lapis pengamanan pada server Database yang meliputi 1. Radio Wireless; 2. VPN; 3. Firewall. Namun belum dilakukan uji coba ketahanan keamanannya. Bank masih membutuhkan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM di Bidang TI mengingat Pada Unit Kerja Kantor Pusat baru terdapat 2 Pegawai di bidang TI, berkurang 1 Pegawai dibanding periode sebelumnya. SDM belum sepenuhnya memiliki pemahaman yang baik mengenai TI, namun cukup mampu mengoperasikan modul CBS. Sosialisasi terkait Core banking terus dilakukan agar Pegawai lebih paham dan menguasai CBS, Selama periode 2023 sudah dilakukan 2x sosialisasi terkait Core Banking Sistem dan sudah tersedia Manual Book yang akan dilakukan pembaruan berkelanjutan. Bank sudah mempunyai DRC yang terletak di Kantor Cabang Sukoharjo dan pada periode penilaian sedang dalam pengembangan. Bank belum menyediakan alokasi anggaran untuk pengembangan IT untuk meningkatkan pelayanan dalam rangka peningkatan bisnis. Bank mempersiapkan jaringan komunikasi bekerjasama dengan 1. Hypernet; 2. Iconnet; 3. Risc Com; 4. Telkom untuk mengoptimalkan support jaringan untuk mendukung kelancaran pekerjaan dan pelayanan. Bank sudah memiliki koneksi backup jaringan dengan sistem "Fail Over" pada mikrotik yang terpasang di seluruh jaringan Kantor Cabang maupun Kantor Kas.
10	Y	D01	Single	+	2240	Pilar penyimpangan (Fraud)	3	Pada periode penilaian terjadi peningkatan Penyimpangan frekuensi yakni dilakukan oleh 10 orang, Frekuensi Indeks Fraud dalam tingkatan yang cenderung sedang. Pada periode penilaian Terjadi peningkatan sebaran penyimpangan dibanding dengan periode sebelumnya, pada periode semester II 2024 terjadi di 2 cabang sedangkan pada semester I 2025 terjadi di 6 cabang yang meliputi KC Demak, KC Boyolali, KC Wonogiri, KC Sragen, KC Brebes dan KC Banjarnegara.

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Sandi	Nama Komponen	Nilai	Keterangan
11	Y	D01	Single	+	2250	Faktor eksternal	3	Pada periode penilain terdapat regulasi dari OJK, POJK 1 tahun 2024, POJK 7 Tahun 2024, POJK 9 Tahun 2024 yang berdampak pada kinerja bank, utamanya pojk 1 tahun 2024 tentang kualitas aset BPR, dimana fasilitas debitur pada bank lain akan mempengaruhi kualitas fasilitas pada bank. Terdapat kejadian banjir pada beberapa jaringan kantor pada kantor cabang Demak, Brebes, Pekalongan dan Kota Pekalongan yang mengganggu aktivitas layanan pada beberapa kantor kas.
12	Y	D01	Single	+	2299	Lainnya	2	Bank telah memberikan fasilitas jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja bagi pegawai melalui BPJS. Selama periode penilaian, terdapat delapan kasus kecelakaan kerja ringan yang terjadi di beberapa kantor cabang, dengan pegawai yang terlibat telah teridentifikasi. Selain itu, terdapat empat pengaduan nasabah yang semuanya telah diselesaikan. Dari segi operasional, bank telah memiliki ketentuan dan pedoman yang mengatur operasionalnya, namun belum dilakukan pembaruan selama periode penilaian. Fungsi pengawasan di bank dibagi menjadi tiga lini, dengan lini pertama sebagai pengawasan langsung antar pegawai dan atasan. Sayangnya, pengawasan pada lini pertama belum berjalan dengan optimal, sehingga menyebabkan kelemahan dan penyimpangan yang meningkatkan risiko operasional. Pengawasan oleh lini kedua dan ketiga juga masih belum optimal.
13	Y	D01	Single	+	2292	Tingkat Risiko Inheren Operasional	3	Risiko inheren operasional menunjukkan bahwa bank yang telah beroperasi selama 6 tahun ini menghadapi berbagai capaian dan tantangan dalam pengelolaan risiko. Konsolidasi yang mempengaruhi strategi bisnis dan budaya perusahaan menjadi salah satu faktor risiko utama. Meskipun kebijakan dan prosedur manajemen risiko operasional telah ditetapkan, pelaksanaannya belum optimal, terutama dalam pemerataan dan kecukupan SDM. Kekurangan SDM ini berkontribusi pada peningkatan human error yang tidak terdeteksi dini akibat lemahnya monitoring dan pengawasan. Selama periode penilaian masih ditemukan penyimpangan, sebagian besar terjadi pada perkreditan serta kas, dana, dan operasional . Penyimpangan ini disebabkan oleh lemahnya fungsi Maker, Checker, & Approval, serta analisis dan monitoring yang belum optimal. Meskipun terjadi penurunan dalam jenis penyimpangan, masih dibutuhkan penguatan tata kelola, monitoring, serta evaluasi untuk memitigasi risiko operasional secara lebih efektif. Di sektor teknologi informasi (TI), bank telah meningkatkan keamanan server dengan tiga lapis pengamanan, tetapi belum melakukan uji ketahanan. Keterbatasan SDM baik dari segi jumlah maupun kompetensi juga menjadi kendala dalam pengelolaan sistem yang lebih efektif. Sosialisasi modul Core Banking System (CBS) telah dilakukan, tetapi masih diperlukan pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan penguasaan teknologi. Mendasarkan pada hal itu maka nilai tingkat risiko operasional pada periode Semester I Tahun 2025 adalah 3,17 atau termasuk pada peringkat risiko kategori sedang.

Form Kertas Kerja KPMR Operasional

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Sandi	Nama Komponen	Nilai	Keterangan
1	Y	D01	Single	+	2310	Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris	3	Dewan Komisaris dan Direksi memiliki komitmen yang tinggi dalam penerapan kebijakan Manajemen Risiko operasional dengan menetapkan kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko operasional, melakukan review secara berkala, menetapkan langkah - langkah untuk memastikan. Pengurus telah menindaklanjuti komitmen pemeriksaan OJK tentang penerapan kebijakan manajemen risiko operasional meskipun belum secara menyeluruh diterapkan. Masih terdapat kelemahan antara lain pemenuhan dan pengelolaan sumber daya manusia, pelaksanaan dan penerapan atas kebijakan manajemen risiko operasional yang ditetapkan, implementasi, maupun pengawasan rencana strategi manajemen risiko operasional di setiap unit kerja.
2	Y	D01	Single	+	2311	Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko operasional yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	2	Dewan Komisaris telah menyetujui kebijakan operasional dan ketentuan - ketentuan lain yang meliputi SOP, Penyelenggaraan TI, pengadaan pegawai, mutasi rotasi dan promosi, budaya perusahaan, peraturan kepegawaian, strategi dan kerangka manajemen operasional, serta limit dan toleransi risiko operasional..Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko operasional, antara lain dengan melakukan penilaian terhadap kecukupan kualitas dan kuantitas kebijakan serta prosedur dengan peraturan OJK dan praktek umum terbaik sesuai kapasitas dan kompleksitas bank ..Dewan Komisaris mampu mengimplementasikan kompetensinya pada bidang manajemen risiko dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko operasional dan memberikan arahan perbaikan yang harus dilakukan oleh Direksi..Dewan Komisaris telah memastikan penerapan kebijakan manajemen risiko operasional kepada Direksi dan jajarannya antara lain dengan mengikuti kegiatan exit meeting dan kegiatan MMA untuk mencermati temuan - temuan hasil pemeriksaan atau temuan pada proses kerja terhadap penerapan kebijakan manajemen risiko operasional. selain itu, juga dilakukan pertemuan bersama dengan Satuan Kerja Pengendalian, juga pernah melakukan pertemuan khusus dengan RTU risiko operasional yaitu divisi SDM dan divisi operasional..Dewan Komisaris telah mempertimbangkan masukan dari Komite Pemantau Risiko. Komite Pemantau Risiko secara berkala telah menyampaikan laporan dan rekomendasi secara tertulis kepada Dewan Komisaris. .
3	Y	D01	Single	+	2312	Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko operasional secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	3	Pada periode penilaian Direksi belum melaporkan pertanggungjawaban penerapan kebijakan manajemen risiko operasional kepada Dewan Komisaris secara tertulis. Laporan yang disampaikan adalah laporan hasil pemeriksaan SKAI, sehingga pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris tidak optimal karena belum tersaji informasi yang komprehensif terhadap pertanggungjawaban penerapan kebijakan manajemen risiko operasional..Dewan Komisaris telah memberikan masukan penerapan manajemen risiko operasional dengan melakukan pertemuan bersama Divisi Operasional tentang rencana migrasi Core Banking System, yang diampaikan dalam Forum Rapat Pengurus.Dewan Komisaris telah melakukan monitoring tindak lanjut penerapan manajemen risiko operasional dari Direksi terkait dengan capaian RBB, kejadian yang berdampak kerugian, ketersediaan sumber daya manusia, peningkatan kompetensi SDM,pengisian pejabat, keamanan TI.Dewan Komisaris secara konsisiten telah mengembangkan budaya manajemen risiko operasional dengan memastikan seluruh ketentuan operasional telah dipenuhi, mengawal implementasinya dengan melakukan kunjungan ke cabang, memantau tindaklanjut hasil kunjungan SKMR dan SKAI, mendorong terpenuhinya kecukupan SDM .Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan transaksi pembelian tanah untuk rencana pembangunan gedung kantor pusat dan kegiatan pendukung operasional lainnya.
4	Y	D01	Single	+	2313	Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko operasional,melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	3	Direksi belum optimal dalam mengimplementasikan kompetensinya terkait manajemen risiko operasional, sehingga berdampak pada rendahnya tidak terpenuhinya kecukupan SDM, kesulitan dalam melakukan regenerasi kepemimpinan, keamanan penyelenggaraan TI dan informasi, terjadinya fraud dan kurang optimalnya sistem..Ketentuan dan kebijakan manajemen risiko operasional yang disetujui dan ditetapkan oleh Direksi diantaranya dalam bentuk SK Direksi, SOP Operasional dan SE Direksi terkait pemenuhan kebijakan manajemen risiko operasional yang diberlakukan di seluruh kantor cabang. .Direksi telah melakukan evaluasi kebijakan dan ketentuan manajemen risiko operasional secara berkala berdasarkan temuan - temuan implementasi kebijakan yang bersumber dari temuan OJK, temuan SKAI, laporan profil risiko atau kaji ulang oleh pihak internal atau eksternal .

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Sandi	Nama Komponen	Nilai	Keterangan
5	Y	D01	Single	+	2314	Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko operasional, dan melakukan komunikasi kebijakan manajemen risiko operasional terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	3	Direksi telah melakukan tindakan mitigasi risiko antara lain melalui pembahasan dalam forum Komite Manajemen Risiko secara berkala. Direksi juga melakukan tindakan pengendalian risiko operasional dalam exit meeting pemeriksaan SKAI pada setiap Unit Kerja .Direksi telah menyampaikan kepada seluruh unit kerja khususnya Kepala Cabang dan Pejabat Eksekutif melalui forum evaluasi setiap bulan tindakan dan kebijakan pengendalian risiko operasional, kepada jenjang organisasi lain dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan kegiatan monitoring, mentoring dan advising ke cabang..Direksi secara konsisten mengembangkan budaya risiko operasional dengan melakukan pemenuhan dan/atau pengkinian ketentuan, sosialisasi, pemantauan implementasi serta penilaian profil risiko operasional secara berkala, mengembangkan budaya perusahaan, mencontohkan sebagai sosok panutan, melakukan evaluasi dan menyusun langkah - langkah perbaikan terhadap hasil penilaian profil risiko. .Direksi melakukan review terhadap delegasi wewenang memutus transaksi operasional dan transaksi bisnis, wewenang melakukan tindakan hukum kepada pejabat eksekutif, dan kewenangan lain berdasarkan prinsip kehati-hatian terhadap risiko operasional..Direksi telah melakukan evaluasi terhadap usulan transaksi yang diterima sebelum memberikan persetujuan..
6	Y	D01	Single	+	2315	Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi operasional dan fungsi manajemen risiko operasional?	3	Fungsi second line SKMR dan SKK telah terpisah dari unit kerja operasional dan melaksanakan tugasnya secara independen.Kecukupan organisasi Unit Kerja masih belum terpenuhi, baik dari jumlah SDM, kelengkapan pejabat, maupun kompetensinya. Terdapat kekurangan SDM dan kekosongan pejabat di Cabang antara lain pegawai setingkat Kepala Bidang dan staf. Terdapat kekurangan 2 Direksi. Kompetensi pegawai belum merata di setiap unit kerja. .Unit kerja yang mengelola risiko operasional belum sepenuhnya memiliki jumlah SDM yang cukup, baik dari kualitas maupun kuantitas. Sedang kecukupan kompetensi terkait manajemen risiko pada semua jenjang organisasi , masih belum memadai, sehingga perlu adanya peningkatan kompetensi melalui berbagai metode yang sesuai dengan kondisi SDM yang ada..Proses operasional telah dijalankan secara independen namun masih terdapat kelemahan, diantaranya belum dilakukan penilaian kinerja individu, belum terdapat reward dan punishment secara tegas, belum optimal dalam rotasi pegawai. .
7	Y	D01	Single	+	2316	Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan manajemen risiko operasional?	4	SOTK telah sesuai dengan kebijakan manajemen risiko operasional, namun masih terjadi rangkap jabatan pada fungsi Direktur Kepatuhan, Kepala Cabang..Pada periode penilaian telah dilaksanakan pengembangan pedoman pengelolaan SDM melalui pengembangan MSDM, analisa beban kerja dan career path..Pada periode pelaporan, belum dilakukan evaluasi ketercukupan SDM, sehingga bebarapa unit kerja / kantor cabang masih kekurangan SDM..
8	Y	D01	Single	+	2320	Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	3	Bank telah memiliki ketentuan, prosedur, dan penetapan limit. Limit risiko operasional serta telah ditetapkan melalui forum rapat komite serta melibatkan seluruh unit kerja namun belum dilakukan review secara berkala. Bank belum melakukan pengkinian dan review atas setiap ketentuan prosedur operasional dan disosialisasikan oleh unit kerja terkait. Namun pelaksanaan ketentuan dan prosedur penerapan manajemen risiko operasional masih belum optimal dan pemahaman unit kerja terhadap ketentuan tersebut masih lemah terbukti masih ditemukannya pelanggaran dan atas kebijakan operasional yang ditetapkan. Belum sepenuhnya dilakukan monitoring pada limit dan toleransi risiko operasional yang ditetapkan.. Cakupan kebijakan pengelolaan risiko operasional cukup memadai di BPP Manajemen Risiko namun implementasi belum dilakukan oleh unit kerja operasional dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Proses penetapan limit risiko operasional cukup memadai namun dokumentasinya belum lengkap dan cukup sulit untuk dilakukan audit trail. Mendasarkan hal tersebut maka penilaian pilar 2 adalah 2,93 (Cukup Memadai)

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Sandi	Nama Komponen	Nilai	Keterangan
9	Y	D01	Single	+	2321	Apakah BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko operasional yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	3	Rencana bisnis bank disusun berdasarkan strategi penerapan manajemen risiko mengacu pada hasil penerapan / profil risiko operasional..Penyusunan rencana bisnis bank telah berdasarkan pada hasil penilaian profil risiko dimasa lalu, dan strategi serta kerangka manajemen risiko yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi profil risiko operasional .Kebijakan manajemen risiko operasional dilakukan kaji ulang oleh SKMR, namun belum dilakukan kaji ulang oleh SKAI atau pihak eksternal..Kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko operasional telah tersedia untuk seluruh area Manajemen Risiko untuk risiko operasional. Meskipun demikian belum secara keseluruhan pegawai memiliki pemahaman dan penerapan yang baik. Perusahaan terus melakukan monitoring dan pendampingan untuk mengupayakan hal tersebut terealisasi dengan baik..Perumusan penetapan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko telah berdasarkan kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan berdasarkan hasil penilaian profil risiko operasional, namun dalam pelaksanaannya masih perlu mendapatkan perhatian oleh seluruh risk owner dan satuan kerja pengendali, agar limit risiko yang ditetapkan aktif dilakukan monitoring untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi dan menetapkan strategi perbaikan yang harus dilakukan.
10	Y	D01	Single	+	2322	Apakah BPR: ● Memiliki prosedur manajemen risiko operasional dan penetapan limit risiko operasional yang ditetapkan oleh Direksi; ● Melaksanakan prosedur manajemen risiko operasional dan penetapan limit risiko operasional secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan ● Melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur manajemen risiko operasional dan penetapan limit risiko operasional secara berkala?	3	BPP Manajemen Risiko telah mengatur mekanisme dan tata cara penetapan limit dan toleransi risiko operasional, namun dalam pelaksanaannya masing - masing fungsi belum optimal dalam memahami dan menjalankan seluruh aktivitas termasuk menetapkan limit risiko untuk seluruh aktivitas operasional..Bank telah melaksanakan prosedur manajemen risiko operasional dan penetapan limit dan toleransi risiko. Seluruh unit kerja belum melakukan pengawasan dan monitoring limit dan toleransi risiko operasional secara optimal, sehingga pencegahan dan perbaikan yang harus dilakukan juga tidak tepat waktu/ lebih dini..Bank belum optimal melakukan evaluasi terhadap pelampauan limit dan toleransi risiko operasional serta penyebab terjadinya pelampauan limit..Sebagian besar SDM belum memahami ketentuan limit dan toleransi risiko yang telah ditetapkan sebagai dasar acuan dalam pengendalian risiko. Satuan kerja manajemen risiko terus melakukan pendampingan dalam meningkatkan pemahaman setiap SDM..Bank telah melakukan evaluasi dan mengkinikan ketentuan limit dan toleransi risiko o[perasional berdasarkan kondisi usaha dan perkembangan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap proses operasional, antara lain perubahan POJK 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat...Penetapan limit risiko telah memperhatikan data history serta memperhitungkan kemampuan Bank dalam menyerap risiko kredit., kemampuan SDM dan faktor eksternal serta arah strategi bisnis bank..Penetapan limit risiko belum sepenuhnya sesuai prosedur yang ditetapkan karena masing - masing risk owner operasional belum menyampaikan penetapan limit secara komprehensif. Penyusunan penetapan limit masih terfokus pelaksanaannya oleh SKMR..Penetapan Limit dan toleransi risiko kredit telah meliputi limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per aktivitas fungsional pada tiap - tiap risk owner operasional berdasar hasil penilaian profil risiko pada masing - masing risk owner..
11	Y	D01	Single	+	2323	Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko operasional sesuai ketentuan?	3	Unit kerja operasional belum sepenuhnya memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan /atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risikonya.Bank telah memiliki kebijakan penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang diatur dalam BPP Manajemen Risiko namun ketentuan tersebut belum ditetapkan dalam ketentuan dan pedoman tersendiri. BPP Manajemen Risiko tersebut juga belum menjelaskan secara lengkap kriteria produk dan layanan baru, sistem dan prosedur kewenangan pengelolaan mulai dari unit kerja atau organisasi, tata kerja persiapan produk dan atau aktivitas kredit baru, uji coba, pelaksanaan, dan laporan pelaksanaannya. . Kebijakan produk dan aktivitas baru dilakukan evaluasi secara berkala sesuai ketentuan, namun pada periode penilaian belum melakukan evaluasi terhadap kebijakan produk dan aktivitas baru..

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Sandi	Nama Komponen	Nilai	Keterangan
12	Y	D01	Single	+	2330	Kecukupan Proses dan Sistem	3	Proses manajemen risiko operasional mencakup kegiatan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko operasional. Identifikasi dilakukan terhadap seluruh kegiatan untuk mengetahui sumber penyebab risiko operasional. Dalam melakukan pengukuran, parameter yang dikembangkan disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas bank, agar hasil pengukuran mencerminkan kondisi yang riil. Selanjutnya dilakukan pemantauan terhadap identifikasi kesalahan ini, pemrosesan dan penyelesaian transaksi secara efisien, akurat dan tepat waktu, kerahasiaan, kebenaran dan keamanan transaksi, pengamanan proses TI, keamanan pemrosesan data elektronik, prosedur back up dan rencana darurat dan kepatuhan terhadap limit. Pengendalian dilakukan secara aktif dengan pengelolaan SDM, penetapan kewenangan memutus transaksi, memisahkan fungsi. Sistem informasi diperlukan untuk mendukung proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian, namun belum sepenuhnya mampu mendukung proses manajemen risiko operasional.
13	Y	D01	Single	+	2331	Apakah BPR telah melaksanakan proses manajemen risiko operasional yang melekat pada kegiatan usaha BPR?	3	SDM telah melaksanakan proses manajemen risiko operasional, tetapi masih terdapat kekurangan dalam pengukuran potensi kerugian akibat fraud, stres testing perubahan kondisi, serta kurangnya laporan yang komprehensif untuk mitigasi risiko operasional. .Belum seluruh jenjang organisasi memiliki pemahaman dan kemampuan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian aktivitas operasional. Masih sering terjadi kegiatan operasional belum mengacu pada penerapan prinsip kehati-hatian..Bank telah melaksanakan proses manajemen risiko operasional, namun pelaksanaan proses tersebut belum dilakukan secara menyeluruh, termasuk dalam hal verifikasi dual control dan dukungan dokumen yang memadai..Proses pengambilan keputusan bidang operasional dilakukan melalui pembahasan dalam forum komite SDM, Komite Pengadaan Barang jasa, Komite Penghapusan Aset..Proses Manajemen risiko operasional yang dilakukan terkadang masih belum didukung dengan data yang informatif akurat dan komprehensif, namun perbaikan terus dilakukan..Bank telah memiliki jenis-jenis produk dan layanan sesuai dengan karakteristik masing - masing, namun sejauh ini belum dilakukan analisa terhadap risiko yang melekat pada masing - masing jenis produk..Evaluasi terhadap kesesuaian asumsi, data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko operasional sudah dilakukan, namun belum secara menyeluruh..Pengukuran risiko operasional, belum dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan yang material pada kegiatan layanan, produk, dan faktor risiko..Pemantauan risiko operasional dilakukan dengan penetapan limit dan toleransi risiko pada aktivitas fungsional dan jenis risiko, namun belum dilakukan stres testing terhadap exposure risiko yang ada..Perubahan yang material terhadap faktor risiko operasional belum dilakukan penyesuaian pelaporan, namun akan terus dilakukan pengawasan untuk mengoptimalkan pelaporan-pelaporan jika terjadi perubahan..
14	Y	D01	Single	+	2332	Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko operasional serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	3	Sistem Informasi yang dimiliki oleh SKMR sebagai aplikasi bantu diantaranya E-Semar, Si-moli, Simpro Dashboard limit risiko. Saat ini sedang dalam pengembangan Sitangkas (sistem informasi tingkat kesehatan bank)..Sistem informasi Manajemen Risiko operasional (data fraud, SDM, TI) belum sepenuhnya dapat diakses dengan mudah oleh seluruh unit kerja dan Satuan kerja manajemen risiko..Informasi yang dapat disajikan masih terbatas pada data kuantitatif dan belum terdapat data penunjang laporan secara cepat dan terkini per aktivitas fungsional dari setiap unit kerja. Saat ini sedang dikembangkan sistem informasi Monitoring Limit dan toleransi risiko untuk mendukung pelaporan risiko operasional oleh SKMR.Sistem informasi yang telah dikembangkan bank belum sepenuhnya dapat mendukung meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen risiko operasional, antara lain dalam SIM belum dapat disajikan limit risiko yang ditetapkan sehingga apabila terjadi pelampauan maka risk owner akan melakukan pelaporan kepada SKMR dan menyusun strategi yang akan dilakukan untuk perbaikan..Sistem informasi yang dimiliki saat ini belum menyajikan informasi secara lengkap terkait penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Saat ini masih dikembangkan ke arah tersebut untuk menyempurnakan sistem informasi yang sudah ada..
15	Y	D01	Single	+	2333	Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI?	3	Bank telah memiliki kebijakan penyelenggaraan TI sesuai dengan ketentuan OJK, menjabarkan prosedur pelaksanaan operasional TI, tanggungjawab, akuntabilitas, pemberian wewenang. Penetapan standar perangkat keras dan perangkat lunak , contingency plan dan disaster recovery plan apabila terjadi situasi krisis bencana namun belum pernah dilakukan tahapan uji coba secara berkala. Dalam menjalankan kegiatan operasional belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI.Pada periode penilaian Bank belum melakukan review berkala terhadap kebijakan TI.Dalam menjalankan kegiatan operasional belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI, karena kurangnya pemahaman dengan baik..

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Sandi	Nama Komponen	Nilai	Keterangan
16	Y	D01	Single	+	2334	Apakah BPR telah melakukan langkah mitigasi risiko terkait kejadian eksternal?	3	Bank mengembangkan program untuk pengendalian dan mitigasi risiko, antara lain pengamanan proses TI dan asuransi. Untuk pengamanan TI, bank memastikan tingkat keamanan pemrosesan data elektronik. Disamping itu bank juga telah memiliki DRC, prosedur back up dan rencana darurat. Pemrosesan dan penyelesaian seluruh transaksi secara akurat dan tepat waktu. Kerahasiaan, kebenaran dan keamanan transaksi..Kebijakan dan pedoman pengendalian risiko operasional belum sepenuhnya disosialisasikan pada seluruh pegawai..Untuk DRC baru uji coba sekali dan belum dilakukan evaluasi secara berkala..
17	Y	D01	Single	+	2340	Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	4	Bank telah memiliki kecukupan organisasi yang bertugas sebagai pengendali di internal yaitu sebagai Risk Management Unit dan Risk Assurance yang terpisah. Satuan Kerja Pengendalian secara berkala melakukan pembahasan dalam forum rapat dengan memberikan rekomendasi kepada Direksi dengan agenda hasil pengawasan atas penerapan manajemen risiko operasional yang dilakukan di unit kerja operasional. Satuan Kerja Pengendalian telah memiliki ketentuan dan pedoman kerja yang cukup dan dilakukan review secara berkala. Meskipun demikian proses pengendalian yang dilakukan oleh fungsi Risk Control dan Risk Assurance belum secara optimal menurunkan tingkat risiko operasional. Hal ini tampak dari hasil temuan pemeriksaan masih didominasi temuan pelanggaran regulasi aktivitas kegiatan rutin operasional yang telah ditetapkan. Risk Awareness tidak dijalankan pejabat bidang operasional yang tampak masih ditemukannya pelanggaran yang sifatnya kegiatan rutin hampir di seluruh kantor cabang yang telah dilakukan pemeriksaan. Mendasarkan hal tersebut penilaian pilar 4 adalah Kurang Memadai.
18	Y	D01	Single	+	2341	Apakah SKAI atau PE Audit Intern telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko operasional, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindaklanjut atas temuan pemeriksaan?	3	SKAI telah melakukan pemeriksaan penerapan manajemen risiko kredit pada Beberapa Divisi di Kantor Pusat dan 8 Kantor Cabang, mencakup evaluasi terhadap implementasi kebijakan, prosedur, proses dan mekanisme mitigasi risiko untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan internal. Hasil pemeriksaan menunjukkan beberapa temuan fundamental terkait kurang memadainya pengendalian internal, diantaranya tidak dilakukannya penilaian risiko secara berkala oleh unit kerja utama..SKAI melakukan monitoring terhadap tindaklanjut temuan penerapan kebijakan manajemen risiko operasional, namun tindaklanjut yang dilakukan oleh risk owner (SDM, SKK) belum optimal. SKAI telah melaporkan kepada Direktur Utama..SKAI melakukan pengawasan terhadap setiap unit kerja dan individu yang terlibat dalam kebijakan manajemen risiko operasional terhadap wewenang dan tanggungjawab, pemahaman dan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang ditetapkan untuk manajemen risiko operasional..SKAI memastikan integritas dan efektivitas proses manajemen risiko dengan melakukan pengawasan yang mencakup verifikasi pemisahan fungsi secara jelas untuk mencegah konflik kepentingan, kelengkapan struktur organisasi, fungsi pelaporan yang efektif, dokumentasi yang komprehensif dalam penerapan kebijakan manajemen risiko operasional..SKAI belum sepenuhnya melakukan verifikasi dan review terhadap sistem pengendalian internal manajemen risiko operasional, yang antara lain mencakup satuan kerja operasional berfungsi secara memadai, exposure risiko terjaga sesuai limit, pengelolaan TI, identifikasi kesalahan dini, penyelesaian transaksi tepat waktu, kerahasiaan dan keamanan data..
19	Y	D01	Single	+	2342	Apakah sistem pengendalian intern terhadap risiko operasional telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	4	Unit kerja pengendalian telah terpisah secara jelas dari unit kerja operasional untuk memastikan independensi, mencegah konflik kepentingan dan meningkatkan efektivitas pengendalian internal. Unit kerja operasional belum sepenuhnya memahami dan menjalankan tugas serta tanggung jawabnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang telah ditetapkan. Pemahaman terhadap penerapan kebijakan dan prosedur manajemen risiko operasional serta pemantauan dan mitigasi risiko yang efektif masih kurang memadai.
20	Y	D01	Single	+	2350	Tingkat KPMR	4	Penerapan kualitas manajemen risiko operasional menunjukkan bahwa secara umum telah sesuai dengan visi dan misi bank. Direksi dan Dewan Komisaris telah menjalankan tugasnya dalam menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka kerja, meskipun masih terdapat kekurangan dalam kualitas dan kuantitas SDM. Proses manajemen risiko dilakukan dengan identifikasi eksposur risiko, pemantauan berkala oleh berbagai unit terkait, serta pemeriksaan oleh SKAI. Meskipun sistem informasi telah dikembangkan, namun belum sepenuhnya mampu memberikan informasi yang akurat dan lengkap. Serta Kekosongan beberapa SOTK pada Fungsi yang signifikan (2 Direksi dan 1 PE) dan Frekuensi pelanggaran yang masih berulang berdampak pada tingkat kualitas penerapan manajemen risiko Operasional. Secara keseluruhan, penerapan manajemen risiko operasional dinilai dengan skor 3.35 (Kurang Memadai).



PT BPR BKK JATENG
(Perseroda)

RISIKO KEPATUHAN

Form Analisis Risiko Kepatuhan

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Sandi	Nama Komponen	Nilai	Analisis
1	Y	D01	Single	+	3100	Tingkat Risiko	3	Hasil Penilaian Tingkat Risiko Inheren Kepatuhan pada peringkat Sedang dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kurang Memadai sehingga harus dilakukan kaji ulang terbatas dan menyusun rencana tindak secara triwulanan. Berdasarkan penilaian tersebut menunjukkan bawah implementasi risiko kepatuhan oleh pegawai masih menjadi perhatian utama dalam pengelolaan risiko. Budaya sadar kepatuhan dan implementasi dari kegiatan sosialisasi, pendidikan, maupun pendampingan belum mampu menekan terjadinya pelanggaran. Seluruh jajaran Pengurus dan pegawai bersama-sama harus memantau dan mengendalikan aktivitas yang menyimpang/ melanggar ketentuan perundang-undangan dan perilaku organisasi yang menyimpang dari standar yang berlaku secara umum untuk meminimalkan dampak negatif. Pemenuhan ketentuan internal, sosialisasi, pendampingan dan fungsi konsultasi, monitoring perlu dilakukan terus menerus agar tidak terjadi pelanggaran/ penyimpangan terhadap ketentuan atau komitmen Bank kepada pihak stake holder. Teladan pimpinan dan penegakan disiplin wajib dilaksanakan dengan tegas dan cepat sebagai upaya preventif dalam pengendalian risiko kepatuhan.
2	Y	D01	Single	+	3200	Tingkat Risiko Inheren	3	Risiko kepatuhan yang dihadapi Bank saat ini berupa pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, serta kekosongan posisi Direktur Kepatuhan. Keterbatasan SDM di unit kepatuhan menyebabkan fungsi kepatuhan belum berjalan optimal. Beberapa komitmen hasil pemeriksaan OJK dan monitoring regulasi baru juga belum ditindaklanjuti dengan baik. Divisi Legal telah dibentuk, namun belum optimal dalam memberikan kajian hukum akibat keterbatasan SDM. Meski terdapat permasalahan hukum dari sebelum konsolidasi, tidak ada putusan hukum yang berdampak material bagi bank. Sosialisasi kepatuhan telah dilakukan, tetapi belum diikuti evaluasi yang memadai. Bank juga belum memiliki standar kompetensi SDM yang jelas. Mendasarkan pada hasil penilaian maka risiko kepatuhan inheren ditetapkan sebesar 2.71 tingkat risiko Sedang.
3	Y	D01	Single	+	3300	Tingkat KPMR	4	Hasil penilaian secara self assesment yang dilakukan oleh unit kerja kantor Cabang untuk Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan didominasi hasilnya di tingkat Kurang Memadai. Dewan Komisaris dan Direksi telah menyusun kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dalam Buku Pedoman Perusahaan yang dilakukan review secara berkala. Ketentuan penetapan Limit dan Toleransi risiko dilakukan review berkala melalui forum rapat Komite sesuai ketentuan. Mempertimbangkan cakupan kegiatan operasional di 28 cabang dan kantor kas sebanyak 102, Satuan Kerja Kepatuhan masih belum mencukupi walau terdapat penambahan jumlah karyawan menjadi 3 pegawai. 1 kepala bidang, dan 1 pejabat Kepala Satuan Kerja Kepatuhan. Fungsi pengawasan dilakukan melalui kunjungan langsung melalui kegiatan MMA di unit kerja berdasarkan jadwal yang telah ditentukan dan hasilnya dilaporkan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti. Namun demikian penerapan prinsip kehati-hatian dan budaya sadar risiko belum dapat diterapkan secara menyeluruh pejabat dan jajaran di bawahnya. Pemahaman regulasi internal maupun eksternal oleh pegawai masih lemah yang dibuktikan temuan pelanggaran yang dilakukan Satuan Kerja Pengendalian yang masih terdapat temuan pelanggaran ketentuan dasar. Fungsi Satuan Kerja Pengendalian belum optimal berdasarkan hasil temuan pelanggaran yang terjadi di Cabang. Bank belum memiliki kecukupan proses dan sistem utamanya terkait pemantauan dan alat bantu Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko kepatuhan. Mendasarkan hal tersebut maka penilaian KPMR risiko operasional adalah Kurang Memadai.

Form Kertas Kerja Risiko Inheren Kepatuhan

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Sandi	Nama Komponen	Nilai	Keterangan
1	Y	D01	Single	+	3210	Pilar pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain	3	Terdapat pelanggaran pelaporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK, kekosongan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan melanggar POJK Tata Kelola. Kecukupan SDM yang menangani fungsi kepatuhan, baik di SKK maupun di unit kerja yang lain masih sangat kurang, sehingga fungsi SKK belum berjalan dengan baik. Terdapat komitmen hasil pemeriksaan OJK yang belum ditindaklanjuti , antara lain KPI, review produk kredit, review strategi anti fraud. Monitoring terhadap ketentuan baru yang diterbitkan oleh OJK belum ditindaklanjuti (POJK 1 tahun 2024, POJK 7 tahun 2024). Monitoring komitmen kepada Pemegang saham dan OJK dalam bentuk RBB th 2025, belum optimal dilaksanakan, tercermin dalam tidak terealisasinya rencana pemindahan jaringan kantor cabang, pengadaan pegawai dan capaian target kuantitatif dan kualitatif keuangan utama.
2	Y	D01	Single	+	3211	Jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran yang dilakukan	3	Tidak terdapat pelanggaran thd ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ketentuan lain dari otoritas dan pihak eksternal pada periode penilaian. Terdapat pelanggaran ketentuan internal berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh SKAI dengan frekuensi pelanggaran sedang. Terdapat pelanggaran POJK Tata Kelola terkait kekosongan Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, pelanggaran terkait laporan kepada PPATK.Ada 10 pelanggaran terkait fraud selama Semester I 2025 dengan frekuensi rendah dan berdampak pada kerugian financial dan tuntutan hukum, Frekuensi rendah ditentukan sebesar 0,50 - 0,75 % dari jumlah SDM.Pengkinian Ketentuan Internal rata-rata dilakukan tiap setahun sekali, namun ada beberapa ketentuan yang dilakukan pengkinian lebih dari 1 tahun.Fungsi Kepatuhan Tidak Rangkap Jabatan Pada Fungsi Bisnis dan Fungsi Kepatuhan Independent.Monitoring terhadap ketentuan belum berjalan secara konsisten , beberapa kali dilakukan setiap bulan sekali, namun terdapat ketentuan yang dilakukan monitoring dalam waktu triwulan sekali.Terdapat 1 Pelanggaran Kewajiban Pelaporan Kepada OJK terlambat melaporkan LTKM ke PPATK.Pelanggaran terhadap ketentuan internal dan prosedur masih terjadi. Pada tahun 2024 sebanyak 80 penerbitan SP sedangkan pada periode Semester I tahun 2025 tercatat ada penerbitan teguran maupun SP sebanyak 18 SP..Pada periode penilaian, jenis pelanggaran ketentuan internal dan prosedur menyebar hingga maksimal 80% dari jumlah sebaran jenis pelanggaran tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat beragam bentuk ketidakpatuhan di sejumlah unit kerja. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kepatuhan terhadap prosedur operasional belum terstandarisasi secara menyeluruh dan konsisten di seluruh cabang/unit. Dibutuhkan peningkatan pengawasan, audit internal tematik, serta penekanan pada pelatihan berbasis kasus nyata (case-based training).
3	Y	D01	Single	+	3212	Signifikansi tindak lanjut atas temuan pelanggaran	3	Adanya temuan berulang yang sama dalam dua periode sebelumnya, meskipun frekuensinya mengalami penurunan pada periode terbaru. Evaluasi ini melibatkan identifikasi jenis temuan yang sama yang terjadi secara berulang, serta analisis terhadap faktor-faktor yang menyebabkan penurunan frekuensi pelanggaran. Penurunan ini dapat menunjukkan adanya tindakan korektif yang telah diimplementasikan untuk memperbaiki kepatuhan terhadap regulasi dan mengurangi risiko terkait. Namun demikian, SKAI tetap memfokuskan pada kepatuhan yang lebih baik dan upaya untuk mencegah temuan serupa di masa depan guna meminimalkan dampak negatifnya terhadap reputasi dan operasional perusahaan..Setiap unit kerja terdapat pejabat struktural dan pegawai yang memahami fungsi kepatuhan.Dilakukan sosialisasi dan pendampingan ke seluruh cabang. Untuk relalisasi MMA sebagai wujud pendampingan, divisi kepatuhan sampai dengan akhir Juni 2025 telah melakukan kunjungan ke 7 Cabang yaitu KC Utama, KC Salatiga, KC Semarang, KC Kendal, KC Rembang, KC Demak, KC Sukoharjo..Review terhadap produk dilakukan setiap setahun sekali, Melakukan Review Eksposure Risiko yang Melekat Secara Berkala Setiap Tahun Melakukan Review Terhadap Seluruh Risiko Pada Pelaksanaan Produk dan Aktivitas Baru dan Melakukan Uji Coba Terhadap Metode Pengukuran Risiko Setiap 6 Bulan..Terdapat 1 (Satu) Kali Pemberian Sanksi Administratif Dari Pihak Eksternal Namun Tidak Signifikan.Terdapat 1 (Satu) Kali Pemberian Sanksi Administratif Dari Pihak Eksternal Namun Tidak Signifikan.Tindak lanjut atas hasil pemeriksaan sesuai batas waktu komitmen.Capaian RBB dilakukan monitoring dan dilakukan evaluasi atas capaian setiap bulannya, namun belum memperlihatkan hasil capaian yang signifikan .Pemberian sanksi dilakukan kepada pegawai yang tidak paham dan/ atau melakukan pelanggaran dan dilakukan monitoring dan pengawasan untuk memperbaiki kualitas kinerja pegawai.

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Sandi	Nama Komponen	Nilai	Keterangan
4	Y	D01	Single	+	3220	Faktor kelemahan aspek hukum	2	Bank telah membentuk Divisi Legal yang telah cukup optimal memberikan pernyataan hukum terhadap kejadian hukum untuk menjaga image positif bank. Bank juga telah melakukan kerjasama pendampingan hukum dengan kejaksaan setempat di setiap daerah. Terdapat permasalahan hukum yang belum terselesaikan namun terjadi di masa sebelum konsolidasi dengan tuntutan tingkat kerugian yang minim dan tidak mengganggu kinerja bank. Tidak terdapat putusan hukum berkekuatan hukum tetap yang berdampak kerugian material kepada Bank selama periode penilaian maupun periode sebelumnya. Penilaian pada pilar 2 ditetapkan risiko Rendah.
5	Y	D01	Single	+	3221	Kelemahan dalam perikatan	3	Bidang Hukum, Kerja Sama dan Hub. Kelembagaan telah menyusun Perjanjian Kredit dan Perjanjian Kerja Sama Lainnya dalam bentuk baku dan telah disosialisasikan ke seluruh Kantor Cabang. Perjanjian Kredit dan Perjanjian Lainnya telah melalui pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan tidak terdapat permasalahan dari substansi Perjanjian Kredit tersebut. Masih terdapat kelemahan dalam aspek yuridis terhadap perikatan - perikatan / perjanjian kredit lama yang belum berakhir..Bank sudah membentuk unit kerja legal, tercatat ada 5 SDM di unit kerja legal. SDM Bidang Legal terus dilakukan pengembangan kemampuan dengan pelatihan pelatihan, dan belajar dari para narasumber yang kompeten.
6	Y	D01	Single	+	3222	litigasi terkait nominal gugatan atau estimasi kerugian yang dialami BPR akibat gugatan	2	Terdapat nominal gugatan atau estimasi kerugian akibat gugatan dengan nilai tidak signifikan dibanding modal BPR..Pada periode penilaian terdapat kerjasama dengan kejaksaan namun belum ada pendampingan hukum dari bag legal. Kerjasama yang telah berjalan merupakan kerjasama untuk dapat memberikan pendampingan hukum terutama terkait dengan penanganan litigasi.
7	Y	D01	Single	+	3223	Litigasi terkait kerugian yang dialami karena putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap	1	Selama Periode penilaian tidak terdapat gugatan atau tidak terdapat estimasi kerugian yang dialami BPR akibat gugatan. Selama periode penilaian tidak ada kerugian dari putusan pengadilan berkekuatan hukum
8	Y	D01	Single	+	3299	Lainnya	3	Pengukuran terhadap index kepatuhan dilakukan 4x dalam setahun, Belum dilakukan pengukuran index kepatuhan.Atas capaian target RBB, sampai dengan periode penilaian masih terdapat capaian yang belum tercapai yaitu pada pencapaian Laba rugi, rasio ROA, NIM.Pucuk Pimpinan Memiliki Sikap, Perilaku, Kompetensi dan Komitmen Sesuai Kualifikasi.Ketentuan internal terpenuhi, masih terdapat beberapa ketentuan yang dalam proses pengkinian .Assesment dilakukan sebelum dan sesudah pegawai menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.Dilakukan sosialisasi dan pendampingan ke seluruh cabang. Untuk relalisasi MMA sebagai wujud pendampingan, divisi kepatuhan sampai dengan akhir Juni 2025 telah melakukan kunjungan ke 7 Cabang yaitu KC Utama, KC Salatiga, KC Semarang, KC Kendal, KC Rembang, KC Demak, KC Sukoharjo..Dilakukan penyusunan ketentuan Baru dan review ketentuan lama. Per Juni 2025 terdapat 8 ketentuan baru dan 16 pengkinian ketentuan lama.
9	Y	D01	Single	+	3292	Tingkat Risiko Inheren Kepatuhan	3	Risiko kepatuhan yang dihadapi Bank saat ini berupa pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, serta kekosongan posisi Direktur Kepatuhan. Keterbatasan SDM di unit kepatuhan menyebabkan fungsi kepatuhan belum berjalan optimal. Beberapa komitmen hasil pemeriksaan OJK dan monitoring regulasi baru juga belum ditindaklanjuti dengan baik. Divisi Legal telah dibentuk, namun belum optimal dalam memberikan kajian hukum akibat keterbatasan SDM. Meski terdapat permasalahan hukum dari sebelum konsolidasi, tidak ada putusan hukum yang berdampak material bagi bank. Sosialisasi kepatuhan telah dilakukan, tetapi belum diikuti evaluasi yang memadai. Bank juga belum memiliki standar kompetensi SDM yang jelas. Mendasarkan pada hasil penilaian maka risiko kepatuhan inheren ditetapkan sebesar 2.71 tingkat risiko Sedang.

Form Kertas Kerja KPMR Kepatuhan

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Sandi	Nama Komponen	Nilai	Keterangan
1	Y	D01	Single	+	3310	Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris	3	Dewan Komisaris dan Direksi memiliki komitmen yang tinggi dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan dengan telah menetapkan ketentuan dan kebijakan serta melakukan review secara berkala, melakukan langkah untuk memastikan telah menetapkan dan melakukan review atas kebijakan penerapan manajemen risiko kepatuhan. Pengurus telah menindaklanjuti komitmen pemeriksaan OJK tentang penerapan kebijakan manajemen risiko kepatuhan yang menjadi temuan pemeriksaan. Meskipun belum sepenuhnya temuan OJK tentang penerapan manajemen risiko kepatuhan telah ditindaklanjuti, namun demikian masih terdapat kelemahan antara lain pemenuhan sumber daya manusia, pelaksanaan dan penerapan atas kebijakan yang ditetapkan, dan penetapan, implementasi, maupun pengawasan rencana strategi penerapan budaya kepatuhan di seluruh unit kerja. Ditetapkan penilaian Pilar 1 adalah Cukup Memadai.
2	Y	D01	Single	+	3311	Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko kepatuhan yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	3	Dewan Komisaris telah menyetujui kebijakan manajemen risiko kepatuhan dan ketentuan - ketentuan lain yang meliputi SOP, Penyelenggaraan TI, pengadaan pegawai, mutasi rotasi dan promosi, budaya perusahaan, peraturan kepegawaian, strategi dan kerangka manajemen operasional, serta limit dan toleransi risiko operasional, kebijakan perkreditan, penetapan kualitas aset, dokumen kredit, dan lain lainnya.Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko kepatuhan, antara lain dengan melakukan penilaian terhadap kecukupan kualitas dan kuantitas kebijakan serta prosedur dengan peraturan OJK dan praktek umum terbaik sesuai size dan kompleksitas bank ..Dewan Komisaris mampu mengimplementasikan kompetensinya pada bidang manajemen risiko dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko kepatuhan dan memberikan arahan perbaikan yang harus dilakukan oleh Direksi..Dewan Komisaris telah memastikan penerapan kebijakan manajemen risiko kepatuhan kepada Direksi dan jajarannya antara lain dengan mengikuti kegiatan exit meeting dan kegiatan MMA untuk mencermati temuan - temuan hasil pemeriksaan atau temuan pada proses kerja terhadap penerapan kebijakan manajemen risiko. Selain itu, juga dilakukan pertemuan bersama dengan Satuan Kerja Pengendalian, melakukan pertemuan khusus dengan RTU risiko operasional yaitu divisi, satker dan kepada cabang / wilayah.Dewan Komisaris telah mempertimbangkan masukan dan rekomendasi tertulis dari Komite Pemantau Risiko yang disampaikan secara berkala kepada Dewan Komisaris..
3	Y	D01	Single	+	3312	Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kepatuhan secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	3	Pada periode penilaian Direksi belum melaporkan pertanggungjawaban penerapan kebijakan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris secara tertulis. Laporan yang disampaikan adalah laporan hasil pemeriksaan SKAI, sehingga pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris tidak optimal karena belum tersaji informasi yang komprehensif terhadap pertanggungjawaban penerapan kebijakan manajemen risiko kepatuhan..Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit telah memberikan masukan terhadap penerapan manajemen risiko kepatuhan dengan melakukan pertemuan bersama SKK, SKMR dan SKAI.Dewan Komisaris telah melakukan monitoring tindak lanjut penerapan manajemen risiko kepatuhan dari Direksi terkait dengan capaian RBB, pemenuhan SDM, pemenuhan anggota komite dibawah Dekom, pemenuhan standar TI.Dewan Komisaris secara konsisiten telah mengembangkan budaya manajemen risiko kepatuhan dengan memastikan seluruh ketentuan operasional telah dipenuhi, mengawal implementasinya dengan melakukan kunjungan ke cabang, memantau tindaklanjut hasil kunjungan SKMR dan SKAI, mendorong terpenuhinya kecukupan SDM.Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan transaksi pembelian tanah untuk rencana pembangunan gedung kantor pusat, pemberian krdeit kepada pihak terkait

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Sandi	Nama Komponen	Nilai	Keterangan
4	Y	D01	Single	+	3313	Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko kepatuhan, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	3	Direksi telah mengimplementasikan kompetensinya terkait manajemen risiko kepatuhan, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, RBB, pemenuhan komitmen hasil pemeriksaan OJK , belum terpenuhinya Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan..Ketentuan dan kebijakan manajemen risiko kepatuhan yang disetujui Direksi adalah SOP mulai dari front office sampai dengan fungsional dan UKK, Pedoman Kebijakan Pelaksanaan Tata Kelola, Pedoman Tata Tertib Pegawai, Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Budaya Kerja Perusahaan, Kebijakan Benturan Kepentingan, Kebijakan Penerapan Anti Fraud, Peraturan dan Sanksi Disiplin Pegawai, WBS, dll. Namun untuk pelaksanaan masih terdapat beberapa ketentuan yang pengkinian terakhir dilakukan pada tahun 2022.Direksi telah melakukan evaluasi kebijakan dan ketentuan manajemen risiko kepatuhan secara berkala berdasarkan temuan - temuan implementasi kebijakan yang bersumber dari temuan OJK, temuan SKAI, laporan profil risiko atau kaji ulang oleh pihak internal atau eksternal .
5	Y	D01	Single	+	3314	Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko kepatuhan, dan melakukan komunikasi kebijakan manajemen risiko kepatuhan terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	3	Direksi telah melakukan tindakan mitigasi risiko antara lain melalui pembahasan dalam forum Komite Manajemen Risiko secara berkala. Direksi juga melakukan tindakan pengendalian risiko kepatuhan dengan memastikan realisasi RBB, penyelesaian komitmen kepada OJK, pelaksanaan kewajiban pelaporan, dan lainnya.Direksi telah menyampaikan kepada seluruh unit kerja khususnya Kepala Cabang dan Pejabat Eksekutif melalui forum evaluasi setiap bulan tindakan dan kebijakan pengendalian risiko kepatuhan, kepada jenjang organisasi lain dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan kegiatan monitoring, mentoring dan advising ke cabang. Memberikan teguran dan / atau punishment kepada pelaku pelanggaran / yang tidak berkinerja baik..Direksi secara konsisten mengembangkan budaya risiko kepatuhan dengan melakukan pemenuhan dan/atau pengkinian ketentuan, sosialisasi, pemantauan implementasi serta penilaian profil risiko secara berkala, mengembangkan budaya perusahaan, mencontohkan sebagai sosok panutan, melakukan evaluasi dan menyusun langkah - langkah perbaikan terhadap hasil penilaian profil risiko. .Direksi melakukan review terhadap delegasi wewenang memutus transaksi operasional dan transaksi bisnis, wewenang melakukan tindakan hukum kepada pejabat eksekutif, dan kewenangan lain berdasarkan prinsip kehati-hatian terhadap risiko kepatuhan..Direksi telah melakukan evaluasi terhadap usulan transaksi yang diterima sebelum memberikan persetujuan..
6	Y	D01	Single	+	3315	Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko kepatuhan?	3	Fungsi second line SKMR dan SKK telah terpisah dari unit kerja operasional dan bisnis, melaksanakan tugasnya secara independen.Kecukupan organisasi Unit Kerja masih belum terpenuhi, baik dari jumlah SDM, kelengkapan pejabat, maupun kompetensinya. Terdapat kekurangan SDM dan kekosongan pejabat di Cabang antara lain pegawai setingkat Kepala Bidang dan staf. Terdapat kekurangan satu pejabat Koordinator Wilayah. Kompetensi pegawai belum merata di setiap unit kerja. .Unit kerja yang mengelola risiko kepatuhan belum sepenuhnya memiliki jumlah SDM yang cukup, baik dari kualitas maupun kuantitas. Sedang kecukupan kompetensi terkait manajemen risiko pada semua jenjang organisasi , masih belum memadai, sehingga perlu adanya peningkatan kompetensi melalui berbagai metode yang sesuai dengan kondisi SDM yang ada..Proses operasional telah dijalankan secara independen namun masih terdapat kelemahan, diantaranya belum dilakukan penilaian kinerja individu, belum terdapat reward dan punishment secara tegas, belum optimal dalam rotasi pegawai. .
7	Y	D01	Single	+	3316	Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko kepatuhan?	4	SOTK telah sesuai dengan kebijakan manajemen risiko kepatuhan, namun masih terjadi rangkap jabatan pada fungsi Direktur Kepatuhan, Kepala Cabang..Pada periode penilaian belum dilakukan review berkala terhadap pedoman pengelolaan SDM..Pada periode pelaporan, belum dilakukan evaluasi ketercukupan SDM, sehingga bebarapa unit kerja / kantor cabang masih kekurangan SDM..
8	Y	D01	Single	+	3317	Apakah Direksi telah menyusun kebijakan internal yang mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan, memberikan perhatian terhadap	3	SOTK telah sesuai dengan kebijakan manajemen risiko kepatuhan, namun masih terjadi rangkap jabatan pada fungsi Direktur Kepatuhan, Kepala Cabang..Pada periode penilaian belum dilakukan review berkala terhadap pedoman pengelolaan SDM..Pada periode pelaporan, belum dilakukan evaluasi ketercukupan SDM, sehingga bebarapa unit kerja / kantor cabang masih kekurangan SDM..

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Sandi	Nama Komponen	Nilai	Keterangan
9	Y	D01	Single	+	3320	Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	3	Bank telah memiliki kecukupan sistem dan pelaksanaan proses manajemen risiko kepatuhan yang cukup baik namun mempertimbangkan kompleksitas bisnis yang sangat luas maka ketersediaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan proses manajemen risiko kepatuhan masih kurang. Dalam penerapan manajemen risiko kepatuhan Bank juga telah mengembangkan parameter pengukuran risiko kepatuhan selain yang ditetapkan dari otoritas. Pengukuran yang dikembangkan Bank telah menyesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas Bank. Namun pelaksanaan proses manajemen risiko belum dilakukan secara menyeluruh dan belum terdokumentasinya sejak tahapan identifikasi sampai dengan pengendalian risiko kepatuhan.
10	Y	D01	Single	+	3321	Apakah BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko kepatuhan yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	3	Rencana bisnis bank disusun berdasarkan strategi penerapan manajemen risiko mengacu pada hasil penerapan manajemen risiko dan profil risiko kepatuhan..Penyusunan rencana bisnis bank telah berdasarkan pada hasil penilaian profil risiko dimasa lalu, dan strategi serta kerangka manajemen risiko yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi profil risiko kepatuhan..Kebijakan manajemen risiko kepatuhan dilakukan kaji ulang oleh SKMR, namun belum dilakukan kaji ulang oleh SKAI atau pihak eksternal..Kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko kepatuhan telah tersedia untuk seluruh area Manajemen Risiko untuk risiko kepatuhan. Meskipun demikian belum secara keseluruhan pegawai memiliki pemahaman dan penerapan yang baik. Perusahaan terus melakukan monitoring dan pendampingan untuk mengupayakan hal tersebut terealisasi dengan baik..Perumusan penetapan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko telah berdasarkan kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan berdasarkan hasil penilaian profil risiko kepatuhan namun dalam pelaksanaannya masih perlu mendapatkan perhatian oleh seluruh risk owner dan satuan kerja pengendali, agar limit risiko yang ditetapkan aktif dilakukan monitoring untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi dan menetapkan strategi perbaikan yang harus dilakukan.
11	Y	D01	Single	+	3322	Apakah BPR: ● Memiliki prosedur manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit risiko kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi; ● Melaksanakan prosedur manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit risiko kepatuhan secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan ● Melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit risiko kepatuhan secara berkala?	3	BPP Manajemen Risiko telah mengatur mekanisme dan tata cara penetapan limit dan toleransi risiko kepatuhan, namun dalam pelaksanaannya masing - masing fungsi yang berkaitan dengan risiko kepatuhan belum optimal dalam memahami dan menjalankan seluruh aktivitas termasuk menetapkan limit risiko untuk seluruh aktivitas kepatuhan..Bank telah melaksanakan prosedur manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit dan toleransi risiko, namun seluruh unit kerja belum melakukan pengawasan dan monitoring limit dan toleransi risiko kepatuhan secara optimal, sehingga pencegahan dan perbaikan yang harus dilakukan juga tidak tepat waktu / lebih dini..Bank belum optimal melakukan evaluasi terhadap pelampauan limit dan toleransi risiko kepatuhan serta penyebab terjadinya pelampauan limit..Sebagian besar SDM belum memahami ketentuan limit dan toleransi risiko yang telah ditetapkan sebagai dasar acuan dalam pengendalian risiko. Satuan kerja manajemen risiko terus melakukan pendampingan dalam meningkatkan pemahaman setiap SDM..Bank telah melakukan evaluasi dan mengkinikan ketentuan limit dan toleransi risiko kepatuhan berdasarkan kondisi usaha dan perkembangan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap proses kepatuhan, antara lain perubahan POJK 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat...Penetapan limit risiko telah memperhatikan data history serta memperhitungkan kemampuan Bank dalam menyerap risiko, kemampuan SDM dan faktor eksternal serta arah strategi bisnis bank..Penetapan limit risiko belum sepenuhnya sesuai prosedur yang ditetapkan karena masing - masing risk owner belum menyampaikan penetapan limit secara komprehensif. Penyusunan penetapan limit masih terfokus pelaksanaannya oleh SKMR..Penetapan Limit dan toleransi risiko kepatuhan telah meliputi limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per aktivitas fungsional pada tiap - tiap risk owner kepatuhan berdasar hasil penilaian profil risiko..
12	Y	D01	Single	+	3323	Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko kepatuhan sesuai dengan ketentuan?	3	Unit kerja kepatuhan belum sepenuhnya memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan /atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risikonya.Bank telah memiliki kebijakan penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang diatur dalam BPP Manajemen Risiko namun ketentuan tersebut belum ditetapkan dalam ketentuan dan pedoman tersendiri. BPP Manajemen Risiko tersebut juga belum menjelaskan secara lengkap kriteria produk dan layanan baru, sistem dan prosedur kewenangan pengelolaan mulai dari unit kerja atau organisasi, tata kerja persiapan produk dan atau aktivitas kredit baru, uji coba, pelaksanaan, dan laporan pelaksanaannya. .Kebijakan produk dan aktivitas baru dilakukan evaluasi secara berkala sesuai ketentuan. Pada periode penilaian telah dilakukan evaluasi dan pengkinian terhadap kebijakan masing-masing produk kredit.

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Sandi	Nama Komponen	Nilai	Keterangan
13	Y	D01	Single	+	3330	Kecukupan Proses dan Sistem	4	Bank telah memiliki kecukupan proses dan sistem untuk mendukung manajemen risiko kepatuhan melalui aplikasi bantu, ketentuan dan regulasi yang ditetapkan, ketersediaan pegawai di fungsi kepatuhan. Namun berdasarkan pada kompleksitas usaha dan pemenuhan regulasi baik dari otoritas maupun institusi pemerintahan ketersediaan jumlah pegawai di fungsi kepatuhan harus dilengkapi. Jumlah frekuensi dan signifikansi pelanggaran belum dapat dilakukan perbaikan dan pengawasan melalui sistem informasi. Berdasarkan hal tersebut peringkat kecukupan proses dan sistem ditetapkan pada peringkat Kurang Memadai.
14	Y	D01	Single	+	3331	Apakah BPR telah melaksanakan proses manajemen risiko kepatuhan yang melekat pada kegiatan usaha BPR?	4	SDM telah melaksanakan proses manajemen risiko kepatuhan, namun terdapat kekurangan dalam pengukuran potensi kerugian akibat fraud, stress testing perubahan kondisi, serta kurangnya laporan yang komprehensif untuk mitigasi risiko kepatuhan. .Belum seluruh jenjang organisasi memiliki pemahaman dan kemampuan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian aktivitas operasional dan bisnis. Masih terjadi kegiatan operasional belum mengacu pada penerapan prinsip kehati-hatian..Bank telah melaksanakan proses manajemen risiko kepatuhan, namun belum dilakukan secara menyeluruh, termasuk dalam hal verifikasi dual control dan dukungan dokumen yang memadai..Proses pengambilan keputusan bidang kepatuhan dilakukan melalui pembahasan dalam forum komite SDM, Komite Pengadaan Barang jasa, Komite Penghapusan Aset, Komite Kredit, ALCO, dll.Proses Manajemen risiko kepatuhan yang dilakukan terkadang masih belum didukung dengan data yang informatif akurat dan komprehensif, namun perbaikan terus dilakukan untuk menunjang proses Manajemen Risiko yang akurat..Bank telah memiliki jenis-jenis produk dan layanan sesuai dengan karakteristik masing - masing, namun sejauh ini belum dilakukan analisa secara komprehensif terhadap risiko yang melekat pada masing - masing jenis produk..Evaluasi terhadap kesesuaian asumsi, data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko kepatuhan sudah dilakukan, namun belum secara menyeluruh..Dalam melakukan pengukuran risiko kepatuhan, belum dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan yang material pada kegiatan layanan, produk, dan faktor risiko..Pemantauan risiko kepatuhan dilakukan dengan penetapan limit dan toleransi risiko pada aktivitas fungsional dan jenis risiko, namun belum dilakukan stres testing terhadap exposure risiko yang ada..Perubahan yang material terhadap faktor risiko kepatuhan belum dilakukan penyesuaian pelaporan, akan terus dilakukan pengawasan untuk mengoptimalkan pelaporan-pelaporan jika terjadi perubahan..
15	Y	D01	Single	+	3332	Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko kepatuhan serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	4	Sistem Informasi yang dimiliki oleh SKMR sebagai aplikasi bantu diantaranya E-Semar, Si-moli, Dashboard limit risiko, SKK belum mengembangkan aplikasi khusus sebagai aplikasi bantu..Sistem informasi Manajemen Risiko kepatuhan belum sepenuhnya dapat diakses dengan mudah oleh seluruh unit kerja dan Satuan Kerja Kepatuhan, mencakup informasi pelanggaran pelaporan, informasi pelaksanaan RBB secara rinci, informasi komitmen kepada OJK dan lainnya..Informasi yang dapat disajikan masih terbatas pada data kuantitatif dan belum terdapat data penunjang laporan secara cepat dan terkini per aktivitas fungsional dari setiap unit kerja. Saat ini sedang dikembangkan sistem informasi Monitoring Limit dan toleransi risiko untuk mendukung pelaporan risiko kepatuhan oleh SKMR.Sistem informasi yang telah dikembangkan bank belum sepenuhnya dapat mendukung meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen risiko, antara lain dalam SIM belum dapat disajikan limit risiko yang ditetapkan sehingga apabila terjadi pelanggaran maka risk owner akan melakukan pelaporan kepada SKMR dan menyusun strategi yang akan dilakukan untuk perbaikan..Sistem informasi yang dimiliki saat ini belum menyajikan informasi secara lengkap terkait penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Saat ini masih dikembangkan ke arah tersebut untuk menyempurnakan sistem informasi yang sudah ada..

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Sandi	Nama Komponen	Nilai	Keterangan
16	Y	D01	Single	+	3340	Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	3	Bank telah memiliki kecukupan sistem pengendalian internal dan melakukan langkah pelaksanaan audit terhadap risiko kepatuhan di cabang secara berkala. Kecukupan organisasi yang bertugas sebagai pengendali di internal yaitu sebagai Risk Management Unit dan Risk Assurance yang terpisah. Satuan Kerja Pengendalian secara berkala melakukan pembahasan dalam forum rapat dengan memberikan rekomendasi kepada Direksi dengan agenda hasil pengawasan atas penerapan manajemen risiko kepatuhan yang dilakukan Satuan Kerja Kepatuhan. Satuan Kerja Pengendalian telah memiliki ketentuan dan pedoman kerja yang cukup dan dilakukan review secara berkala. Meskipun demikian proses pengendalian yang dilakukan oleh fungsi Risk Control dan Risk Assurance belum secara optimal menurunkan tingkat risiko kepatuhan. Hal ini tampak hasil temuan pemeriksaan masih didominasi temuan pelanggaran regulasi Risk Awareness tidak dijalankan di unit kerja. Mendasarkan hal tersebut penilaian pilar 4 adalah Cukup memadai.
17	Y	D01	Single	+	3341	Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko kepatuhan, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindaklanjut atas temuan pemeriksaan?	3	SKAI telah melakukan pemeriksaan penerapan manajemen risiko kredit pada Beberapa Divisi di Kantor Pusat dan 11 Kantor Cabang, mencakup evaluasi terhadap implementasi kebijakan, prosedur, proses dan mekanisme mitigasi risiko untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan internal. Hasil pemeriksaan menunjukkan beberapa temuan fundamental terkait kurang memadainya pengendalian internal, diantaranya tidak dilakukannya penilaian risiko secara berkala oleh unit kerja utama..SKAI telah melakukan monitoring tindak lanjut temuan dengan mengirimkan progress tindak lanjut kepada Kepala Cabang maksimal tanggal 5 setiap bulannya dan telah melaporkan kepada Direktur Utama.SKAI melakukan pengawasan terhadap setiap unit kerja dan individu yang terlibat dalam kebijakan manajemen risiko kepatuhan terhadap wewenang dan tanggungjawab , pemahaman dan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang ditetapkan untuk manajemen risiko kepatuhan..SKAI telah melakukan pengawasan pada pemisahan fungsi, struktur organisasi,fungsi pelaporan, dan dokumentasi penerapan manajemen risiko kepatuhan dalam pemeriksaan yang dilakukan di kantor cabang yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan..SKAI telah melakukan verifikasi dan review terhadap sistem pengendalian intern manajemen risiko kepatuhan dalam pemeriksaan yang dilakukan di kantor cabang yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan..
18	Y	D01	Single	+	3342	Apakah sistem pengendalian intern terhadap risiko kepatuhan telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	3	unit kerja pengendalian telah terpisah dari unit kerja operasional kepatuhan.Unit kerja kepatuhan belum sepenuhnya memahami dan menjalankan tugas serta tanggung jawabnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang telah ditetapkan. Pemahaman terhadap penerapan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta pemantauan dan mitigasi risiko yang efektif masih belum optimal. .
19	Y	D01	Single	+	3350	Tingkat KPMR	4	Hasil penilaian secara self assesment yang dilakukan oleh unit kerja kantor Cabang untuk Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan didominasi hasilnya di tingkat Kurang Memadai. Dewan Komisaris dan Direksi telah menyusun kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dalam Buku Pedoman Perusahaan yang dilakukan review secara berkala. Ketentuan penetapan Limit dan Toleransi risiko dilakukan review berkala melalui forum rapat Komite sesuai ketentuan. Mempertimbangkan cakupan kegiatan operasional di 28 cabang dan kantor kas sebanyak 102, Satuan Kerja Kepatuhan masih belum mencukupi walau terdapat penambahan jumlah karyawan menjadi 3 pegawai. 1 kepala bidang, dan 1 pejabat Kepala Satuan Kerja Kepatuhan. Fungsi pengawasan dilakukan melalui kunjungan langsung melalui kegiatan MMA di unit kerja berdasarkan jadwal yang telah ditentukan dan hasilnya dilaporkan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti. Namun demikian penerapan prinsip kehati-hatian dan budaya sadar risiko belum dapat diterapkan secara menyeluruh pejabat dan jajaran di bawahnya. Pemahaman regulasi internal maupun eksternal oleh pegawai masih lemah yang dibuktikan temuan pelanggaran yang dilakukan Satuan Kerja Pengendalian yang masih terdapat temuan pelanggaran ketentuan dasar. Fungsi Satuan Kerja Pengendalian belum optimal berdasarkan hasil temuan pelanggaran yang terjadi di Cabang. Bank belum memiliki kecukupan proses dan sistem utamanya terkait pemantauan dan alat bantu Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko kepatuhan. Mendasarkan hal tersebut maka penilaian KPMR risiko operasional adalah Kurang Memadai.



PT BPR BKK JATENG
(Perseroda)

RISIKO LIKUIDITAS

Form Analisis Risiko Likuiditas

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Sandi	Nama Komponen	Nilai	Analisis
1	Y	D01	Single	+	4100	Tingkat Risiko	2	Hasil penilaian periode Semester I 2025 tingkat risiko likuiditas inheren pada peringkat risiko Rendah sedangkan nilai kualitas penerapan manajemen risiko memiliki peringkat Cukup Memadai, sama dengan hasil penilaian pada periode sebelumnya. Salah satu faktor yang mempengaruhi risiko likuiditas antara lain adalah kinerja pertumbuhan dana pihak ketiga. Masih terdapat kekurangan dan kelemahan proses penerapan manajemen risiko likuiditas yaitu antara lain SKMR belum sepenuhnya melakukan identifikasi dan evaluasi risk events, produk dan jasa bank, metode dan teknik mitigasi risiko likuiditas, analisis trend kebutuhan likuiditas serta sumber pendanaan apabila dalam kondisi memburuk dengan menyusun stresstest, telah membuat alat ukur dalam menghitung maturity profil dan proyeksi arus kas namun belum dilakukan analisa dan strategi yang ditetapkan. Bank juga belum memiliki sistem informasi manajemen yang utuh dan cepat yang dapat digunakan oleh Direksi dalam pengambilan keputusan pengelolaan risiko likuiditas. Pada periode penilaian, Satuan Kerja Manajemen Risiko telah mengembangkan aplikasi yang memungkinkan untuk mengetahui besaran lost event yang terjadi dan berdampak pada permodalan.
2	Y	D01	Single	+	4200	Tingkat Risiko Inheren	2	Berdasarkan hasil penilaian risiko likuiditas inheren di seluruh pilar yang ditetapkan hasil nilai dan peringkat risiko likuiditas inheren pada tingkat 2 atau risiko rendah. Penilaian ini sama dengan hasil penilaian periode sebelumnya. Struktur dana dalam kondisi yang baik. Pengelolaan dana simpanan masih perlu mendapatkan perhatian mengingat selama ini kinerja pemasaran di bidang dana tidak atau belum dilakukan secara optimal dan konsisten sehingga sangat rentan nasabah memindahkan dananya ke lembaga keuangan lain, apalagi komposisi tabungan dan deposito adalah sebesar 78 : 22 yang sangat memungkinkan nasabah untuk dapat memindahkan dananya sewaktu-waktu walau kewajiban bunga simpanan menjadi lebih rendah. Hasil penilaian risiko likuiditas inheren di seluruh pilar, baik parameter yang telah ditetapkan otoritas maupun parameter tambahan yang ditetapkan Bank, menunjukkan hasil nilai dan peringkat risiko likuiditas inheren pada tingkat 2.17 atau risiko rendah.
3	Y	D01	Single	+	4300	Tingkat KPMR	3	Pengawasan atas pengelolaan likuiditas oleh Komisaris dan Direksi telah dilakukan melalui penerbitan Surat Keputusan Direksi dan Surat Edaran. Pengaturan mengenai manajemen likuiditas dievaluasi secara berkala. Direksi juga telah membentuk tim ALCO dan mengadakan pertemuan secara rutin. Bank telah menetapkan batas dan toleransi risiko likuiditas yang diperbarui secara berkala. Prosedur pengelolaan dana dan risiko likuiditas telah disosialisasikan kepada semua unit kerja oleh unit kerja treasury dan satuan kepatuhan. Fungsi pengawasan melalui pemeriksaan periodik atas risiko likuiditas di unit kerja cabang oleh satuan kegiatan independen. Namun, terdapat kekurangan dalam penerapan ALMA dan pemahaman yang belum sepenuhnya oleh unit kerja, serta ALCO belum secara konsisten mengadakan pertemuan sesuai jadwal yang ditetapkan. Oleh karena itu, penilaian KPMR risiko likuiditas adalah cukup memadai.

Form Kertas Kerja Risiko Inheren Likuiditas

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Sandi	Nama Komponen	Rasio	Nilai	Keterangan
1	Y	D01	Single	+	4210	Komposisi dan konsentrasi aset dan kewajiban		2	Pada pilar 1 risiko likuiditas memiliki penilaian yang sama dengan periode sebelumnya secara keseluruhan tingkat risiko yang ditetapkan yaitu sebesar 1,51. Berdasarkan parameter OJK, rasio aset likuid terhadap total aset turun dari 15,64% pada Semester II 2024 menjadi 13,26% pada Semester I 2025. Rasio aset likuid terhadap kewajiban lancar lebih rendah dari 19,26% di semester II 2024 menjadi 16,21% di Semester I 2025. Rasio LDR lebih tinggi dari 82,14% pada periode semester II 2024 menjadi 85,53 % pada Semester I 2025. Rasio 25 deposan dan penabung terbesar terhadap total DPK sebesar 5,34% di semester II 2024 menjadi 5,19% di Semester I 2025. Rasio pendanaan non inti terhadap total pendanaan turun dari 4,19% pada semester II 2024 menjadi 1.30% di Semester I 2025. Mendasarkan pada rasio tersebut pada Pilar 1 Risiko Likuiditas memiliki tingkat risiko inheren Rendah.
2	Y	D01	Single	+	4211	Rasio aset likuid terhadap total aset	13.26	1	Komposisi aset likuid terhadap total aset sebesar 13,26%, lebih rendah dari limit 15%, lebih rendah dari penilaian pada periode Semester II 2024 yang mencapai 15,64%. Aset likuid dihitung dari jumlah kas dan penempatan di bank lain dalam bentuk giro dan tabungan. Ketiga komponen tersebut lebih rendah dari periode sebelumnya. Total aset mengalami penurunan dari periode sebelumnya.Rasio aset likuid perlu diperhatikan mengingat dalam periode 1 tahun terakhir terus mengalami penurunan dan telah melampaui ambang batas yang ditentukan yakni harus lebih dari 15%.
3	Y	D01	Single	+	4212	Rasio aset likuid terhadap kewajiban lancar	16.21	1	Komposisi aset likuid terhadap total aset sebesar 13,26%, lebih rendah dari limit 15%, lebih rendah dari penilaian pada periode Semester II 2024 yang mencapai 15,64%. Aset likuid dihitung dari jumlah kas dan penempatan di bank lain dalam bentuk giro dan tabungan. Ketiga komponen tersebut lebih rendah dari periode sebelumnya. Total aset mengalami penurunan dari periode sebelumnya.Rasio aset likuid perlu diperhatikan mengingat dalam periode 1 tahun terakhir terus mengalami penurunan dan telah melampaui ambang batas yang ditentukan yakni harus lebih dari 15%.
4	Y	D01	Single	+	4213	Rasio kredit yang diberikan terhadap total dana pihak ketiga bukan bank (Loan to Deposit Ratio/LDR)	85.53	2	Rasio kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga lebih tinggi dari penilaian periode sebelumnya yaitu 85.53% dari sebelumnya sebesar 82,14%. Meski terjadi peningkatan, namun rasio ini masih pada batasan yang aman dan sehat.
5	Y	D01	Single	+	4214	Rasio 25 deposan dan penabung terbesar terhadap total dana pihak ketiga	5.19	2	Rasio penabung terbesar turun dari periode sebelumnya namun masih berada dibawah ambang batas yang ditetapkan. Sementara itu untuk 25 penabung terbesar mengalami kenaikan sebesar. Penurunan pada rasio ini juga dipengaruhi oleh naiknya aspek pembagi yaitu total DPK yang meningkat dari periode sebelumnya.
6	Y	D01	Single	+	4215	Rasio Pendanaan non inti terhadap total pendanaan	1.30	1	Rasio pendanaan non inti juga turun pada periode penilaian. Sama halnya dengan periode sebelumnya, pendanaan non inti dinilai dari dana yang rentan terhadap penarikan sewaktu-waktu seperti deposan dengan suku bunga dan nominal diatas ketentuan LPS serta nasabah korporasi. Rasio sebesar 1,30% masih dibawah batasan yang ditetapkan yaitu sebesar 10% yang menunjukkan bahwa ketersediaan dana untuk penarikan sewaktu-waktu masih mencukupi.

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Sandi	Nama Komponen	Rasio	Nilai	Keterangan
7	Y	D01	Single	+	4220	Kerentanan pada kebutuhan pendanaan serta akses pada sumber pendanaan		2	Bank memiliki dukungan dan komitmen yang tinggi dari Pemegang saham pengendali, meskipun mendapatkan dukungan likuiditas dalam kondisi krisis atau mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan lain memerlukan proses dan birokrasi yang cukup panjang. Bank juga mendapat dukungan yang baik dari perusahaan terkait saat menghadapi kondisi krisis, yang mencerminkan reputasi baiknya. Walaupun bank belum diuji dalam situasi krisis yang berdampak pada risiko likuiditas, hasil penilaian menetapkan nilai risiko likuiditas pilar 2 tetap memiliki nilai 2 atau rendah, konsisten dengan penilaian sebelumnya.
8	Y	D01	Single	+	4221	Penilaian kebutuhan pendanaan BPR pada situasi normal maupun krisis, dan kemampuan BPR untuk memenuhi Kebutuhan pendanaan		2	Bank belum pernah teruji pada kondisi krisis, namun bank memiliki akses yang sangat memadai untuk pemenuhan terhadap kebutuhan pendanaan. Dukungan pemegang saham sangat tinggi meskipun membutuhkan proses dan birokrasi yang cukup panjang
9	Y	D01	Single	+	4222	Penilaian terhadap seberapa luas atau seberapa besar BPR memiliki komitmen pendanaan yang dapat digunakan jika dibutuhkan.		2	Akses BPR pada sumber pendanaan memadai dibuktikan dengan reputasi BPR adalah baik, meskipun untuk pengajuan pinjaman ke bank lain tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu. Terdapat komitmen/dukungan likuiditas dari pemegang saham pengendali dan dukungan dari perusahaan terkait
10	Y	D01	Single	+	4299	Lainnya		2	Pilar penilaian lainnya menggunakan beberapa parameter yang mempengaruhi risiko inheren likuiditas antara lain khususnya penyusunan profil maturitas yang dilakukan setiap bulan, penyusunan proyeksi arus kas yang dilakukan setiap bulan, penyusunan stresstest kemampuan yang dilakukan setiap bulan, identifikasi risk events yang mempengaruhi likuiditas dilakukan 3 bulan sekali, identifikasi dan evaluasi terhadap jenis risiko yang meningkatkan risiko likuiditas dilakukan setiap 3 bulan sekali dan monitoring tingkat suku bunga dilakukan setiap 1 minggu sekali. Mendasarkan hal tersebut ditetapkan peringkat risiko pada Pilar tersebut adalah risiko Rendah.
11	Y	D01	Single	+	4292	Tingkat Risiko Inheren Likuiditas		2	Berdasarkan hasil penilaian risiko likuiditas inheren di seluruh pilar yang ditetapkan hasil nilai dan peringkat risiko likuiditas inheren pada tingkat 2 atau risiko rendah. Penilaian ini sama dengan hasil penilaian periode sebelumnya. Struktur dana dalam kondisi yang baik. Pengelolaan dana simpanan masih perlu mendapatkan perhatian mengingat selama ini kinerja pemasaran di bidang dana tidak atau belum dilakukan secara optimal dan konsisten sehingga sangat rentan nasabah memindahkan dananya ke lembaga keuangan lain, apalagi komposisi tabungan dan deposito adalah sebesar 78 : 22 yang sangat memungkinkan nasabah untuk dapat memindahkan dananya sewaktu-waktu walau kewajiban bunga simpanan menjadi lebih rendah. Hasil penilaian risiko likuiditas inheren di seluruh pilar, baik parameter yang telah ditetapkan otoritas maupun parameter tambahan yang ditetapkan Bank, menunjukkan hasil nilai dan peringkat risiko likuiditas inheren pada tingkat 2.17 atau risiko rendah.

Form Kertas Kerja KPMR Likuiditas

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Sandi	Nama Komponen	Nilai	Keterangan
1	Y	D01	Single	+	4310	Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris	3	Pengurus dalam hal ini Dewan Komisaris dan Direksi memiliki komitmen yang tinggi dalam rangka penerapan Manajemen Risiko likuiditas dengan telah menetapkan ketentuan dan kebijakan serta melakukan review secara berkala, melakukan langkah untuk memastikan telah menetapkan dan melakukan review atas kebijakan penerapan manajemen risiko likuiditas. Pengurus telah menindaklanjuti komitmen pemeriksaan OJK tentang penerapan kebijakan manajemen risiko likuiditas yang menjadi temuan pemeriksaan. Meskipun demikian masih terdapat kelemahan antara lain belum sepenuhnya penerapan manajemen risiko likuiditas temua OJK dapat ditindaklanjuti, pemenuhan sumber daya manusia dalam hal ini kecukupan tenaga pemasaran di bidang dana, pegawai yang melakukan monitoring aktivitas di bagian dana, evaluasi kinerja tenaga pemasaran di bidang dana, penetapan strategi kinerja di bagian dana.
2	Y	D01	Single	+	4311	Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko likuiditas yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	3	Dewan Komisaris telah menyetujui kebijakan manajemen risiko likuiditas dan ketentuan - ketentuan lain yang meliputi SOP, Penyaluran kredit, penempatan antar bank, suku bunga kredit, suku bunga simpanan, strategi dan kerangka manajemen likuiditas, serta limit dan toleransi risiko likuiditas, dan lain lainnya.Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko likuiditas, antara lain dengan melakukan penilaian terhadap kecukupan kualitas dan kuantitas kebijakan serta prosedur dengan peraturan OJK dan praktek umum terbaik sesuai size dan kompleksitas bank ..Dewan Komisaris mampu mengimplementasikan kompetensinya pada bidang manajemen risiko dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko likuiditas dan memberikan arahan perbaikan yang harus dilakukan oleh Direksi..Dewan Komisaris telah memastikan penerapan kebijakan manajemen risiko likuidiitas kepada Direksi dan jajarannya antara lain dengan mengikuti kegiatan exit meeting dan kegiatan MMA untuk mencermati temuan - temuan hasil pemeriksaan atau temuan pada proses kerja terhadap penerapan kebijakan manajemen risiko . selain itu, juga dilakukan pertemuan bersama dengan Satuan Kerja Pengendalian, juga pernah melakukan pertemuan khusus dengan RTU risiko likuiditas yaitu divisi, satker dan kepada cabang / wilayah.Dewan Komisaris telah mempertimbangkan masukan dan rekomendasi tertulis dari Komite Pemantau Risiko yang disampaikan secara berkala. Jumlah anggota Komite Pemantau Risiko pada periode penilaian belum sesuai ketentuan sehingga pelaksanaan fungsi Komite Pemantau Risiko juga kurang optimal, antara lain tercermin pada tidak adanya Rapat bersama antara Dewan Komisaris dengan Komite Pemantau Risiko selama periode penilaian..
3	Y	D01	Single	+	4312	Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko likuiditas secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	3	Pada periode penilaian Direksi belum melaporkan pertanggungjawaban penerapan kebijakan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris secara tertulis. Laporan yang disampaikan adalah laporan hasil pemeriksaan SKAI, sehingga pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris tidak optimal karena belum tersaji informasi yang komprehensif terhadap pertanggungjawaban penerapan kebijakan manajemen risiko likuiditas..Dewan Komisaris telah memberikan masukan penerapan manajemen risiko likuiditas dengan melakukan pertemuan bersama satuan kerja, divisi, kepala cabang dan Direksi..Dewan Komisaris telah melakukan monitoring tindak lanjut penerapan manajemen risiko likuiditas dari Direksi terkait dengan capaian RBB, pemenuhan SDM, pemenuhan anggota komite dibawah Dekom dan lainnya..Dewan Komisaris secara konsisten telah mengembangkan budaya manajemen risiko likuiditas dengan memastikan seluruh ketentuan operasional telah dipenuhi, mengawal implementasinya dengan melakukan kunjungan ke cabang, memantau tindaklanjut hasil kunjungan SKMR dan SKAI, mendorong terpenuhinya kecukupan SDM, mendorong tercapainya target RBB..Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan transaksi pembelian tanah untuk rencana pembangunan gedung kantor pusat, pemberian kredit kepada pihak terkait.

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Sandi	Nama Komponen	Nilai	Keterangan
4	Y	D01	Single	+	4313	Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko likuiditas, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	3	Direksi cukup optimal dalam mengimplementasikan kompetensinya terkait manajemen risiko likuiditas, sehingga pemenuhan seluruh kewajiban bank kepada pihak ketiga dapat dipenuhi dengan baik, dan terjadi kecukupan likuiditas pada masa krisis maupun pada masa normal..Direksi telah menetapkan kebijakan manajemen risiko likuiditas antara dengan menetapkan pedoman penempatan dana antar bank, ketentuan suku bunga, penetapan rasio keuangan dan lainnya..Direksi telah melakukan evaluasi kebijakan dan ketentuan manajemen risiko likuiditas secara berkala berdasarkan temuan - temuan implementasi kebijakan yang bersumber dari temuan OJK, temuan SKAI, laporan profil risiko atau kaji ulang oleh pihak internal atau eksternal .
5	Y	D01	Single	+	4314	Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko likuiditas, dan melakukan komunikasi kebijakan manajemen risiko likuiditas terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	3	Direksi telah melakukan tindakan mitigasi risiko antara lain melalui pembahasan dalam forum Komite Manajemen Risiko, rapat ALCO secara berkala. Direksi juga melakukan tindakan pengendalian risiko likuiditas dengan memastikan realisasi RBB, penyelesaian kredit bermasalah untuk meningkatkan arus kas masuk, capaian penghimpunan dana pihak ketiga, kewajiban pembayaran kepada pihak internal dan eksternal..Direksi telah menyampaikan kepada seluruh unit kerja khususnya Kepala Cabang dan Pejabat Eksekutif melalui forum evaluasi setiap bulan tindakan dan kebijakan pengendalian risiko likuiditas, kepada jenjang organisasi lain dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan kegiatan monitoring, mentoring dan advising ke cabang. Memberikan teguran dan / atau punishment kepada pelaku pelanggaran / yang tidak berkinerja baik..Direksi secara konsisten mengembangkan budaya risiko likuiditas dengan melakukan pemenuhan dan/atau pengkinian ketentuan, sosialisasi, pemantauan implementasi serta penilaian profil risiko secara berkala, mengembangkan budaya perusahaan, mencontohkan sebagai sosok panutan, melakukan evaluasi dan menyusun langkah - langkah perbaikan terhadap hasil penilaian profil risiko. .Direksi melakukan review terhadap delegasi wewenang memutus transaksi operasional dan transaksi bisnis, wewenang melakukan tindakan hukum kepada pejabat eksekutif, dan kewenangan lain berdasarkan prinsip kehati-hatian terhadap risiko likuiditas..Direksi telah melakukan evaluasi terhadap usulan transaksi yang diterima sebelum memberikan persetujuan, terkait dengan penarikan dana ABA, kewenangan memutus kredit dan lainnya..
6	Y	D01	Single	+	4315	Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi likuiditas dan fungsi manajemen risiko likuiditas?	3	Fungsi second line SKMR dan SKK telah terpisah dari unit kerja operasional dan bisnis , melaksanakan tugasnya secara independen.Kecukupan organisasi Unit Kerja masih belum terpenuhi, baik dari jumlah SDM, kelengkapan pejabat, maupun kompetensinya. Terdapat kekurangan SDM dan kekosongan pejabat di Cabang antara lain pegawai setingkat Kepala Bidang dan staf. Terdapat kekurangan satu pejabat Koordinator Wilayah. Kompetensi pegawai belum merata di setiap unit kerja. .Unit kerja yang mengelola risiko likuiditas belum sepenuhnya memiliki jumlah SDM yang cukup, baik dari kualitas maupun kuantitas. Sedang kecukupan kompetensi terkait manajemen risiko pada semua jenjang organisasi , masih belum memadai, sehingga perlu adanya peningkatan kompetensi melalui berbagai metode yang sesuai dengan kondisi SDM yang ada..Proses operasional telah dijalankan secara independen namun masih terdapat kelemahan, diantaranya belum dilakukan penilaian kinerja individu, belum terdapat reward dan punishment secara tegas, belum optimal dalam rotasi pegawai. .
7	Y	D01	Single	+	4316	Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan manajemen risiko likuiditas?	3	SOTK telah sesuai dengan kebijakan manajemen risiko likuiditas, namun masih terjadi rangkap jabatan pada fungsi Direktur Kepatuhan, Kepala Cabang..Pada periode penilaian belum dilakukan review berkala terhadap pedoman pengelolaan SDM..Pada periode pelaporan, belum dilakukan evaluasi ketercukupan SDM, sehingga bebarapa unit kerja / kantor cabang masih kekurangan SDM..

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Sandi	Nama Komponen	Nilai	Keterangan
8	Y	D01	Single	+	4320	Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	3	Bank telah memiliki kecukupan sistem dan pelaksanaan proses manajemen risiko likuiditas yang cukup baik namun mempertimbangkan kompleksitas bisnis yang sangat luas maka ketersediaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan proses manajemen risiko likuiditas masih kurang. Dalam penerapan manajemen risiko likuiditas Bank juga telah mengembangkan parameter pengukuran risiko likuiditas selain yang ditetapkan dari otoritas. Pengukuran yang dikembangkan Bank telah menyesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas Bank. Namun pelaksanaan proses manajemen risiko belum dilakukan secara menyeluruh dan belum terdokumentasinya sejak tahapan identifikasi sampai dengan pengendalian risiko kepatuhan. Unit kerja treasury bersama dengan Satuan kerja Manajemen Risiko belum sepenuhnya melakukan identifikasi atas produk dan layanan eksisting maupun baru.
9	Y	D01	Single	+	4321	Apakah BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko likuiditas yang memadai antara lain penilaian kondisi pasar, penanganan permasalahan risiko konsentrasi likuiditas, pencegahan ketergantungan terhadap sumber pendanaan tertentu, dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	3	Rencana bisnis bank disusun berdasarkan strategi penerapan manajemen risiko mengacu pada hasil penerapan / profil risiko likuiditas. Penyusunan rencana bisnis bank telah berdasarkan pada hasil penilaian profil risiko dimasa lalu, dan strategi serta kerangka manajemen risiko yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi profil risiko likuiditas..Kebijakan manajemen risiko kepatuhan dilakukan kaji ulang oleh SKMR, namun belum dilakukan kaji ulang oleh SKAI atau pihak eksternal..Kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko likuiditas telah tersedia untuk seluruh area Manajemen Risiko untuk risiko likuiditas. Meskipun demikian belum secara keseluruhan pegawai memiliki pemahaman dan penerapan yang baik. Perusahaan terus melakukan monitoring dan pendampingan untuk mengupayakan hal tersebut terealisasi dengan baik..Perumusan penetapan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko telah berdasarkan kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan berdasarkan hasil penilaian profil risiko likuiditas namun dalam pelaksanaannya masih perlu mendapatkan perhatian oleh seluruh risk owner dan satuan kerja pengendali, agar limit risiko yang ditetapkan aktif dilakukan monitoring untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi dan menetapkan strategi perbaikan yang harus dilakukan.
10	Y	D01	Single	+	4322	Apakah BPR: • Memiliki prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi; • Melaksanakan prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan • Melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas secara berkala?	3	BPP Manajemen Risiko telah mengatur mekanisme dan tata cara penetapan limit dan toleransi risiko likuiditas, namun masing - masing fungsi yang berkaitan dengan risiko kepatuhan belum optimal dalam memahami dan menjalankan seluruh aktivitas termasuk menetapkan limit risiko untuk seluruh aktivitas likuiditas..Bank telah melaksanakan prosedur manajemen risiko likuiditas dan penetapan limit dan toleransi risiko, namun belum konsisten dalam melakukan pengawasan terhadap monitoring limit dan toleransi risiko likuiditas. .Bank belum optimal melakukan evaluasi terhadap pelampauan limit dan toleransi risiko likuiditas serta penyebab terjadinya pelampauan limit, sehingga upaya - upaya pencegahan dan perbaikan yang harus dilakukan juga tidak tepat waktu / lebih dini..Sebagian besar SDM belum memahami ketentuan limit dan toleransi risiko yang telah ditetapkan sebagai dasar acuan dalam pengendalian risiko. Satuan kerja manajemen risiko melakukan pendampingan dalam meningkatkan pemahaman setiap SDM..Bank telah melakukan evaluasi dan mengkinikan ketentuan limit dan toleransi risiko likuiditas berdasarkan kondisi usaha dan perkembangan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap proses kepatuhan, antara lain perubahan POJK 1 Tahun 2024 tentang kualitas aset BPR, suku bunga penjaminan LPS..Penetapan limit risiko telah memperhatikan data history serta memperhitungkan kemampuan Bank dalam menyerap risiko, kemampuan SDM dan faktor eksternal serta arah strategi bisnis bank..Penetapan limit risiko belum sepenuhnya sesuai prosedur yang ditetapkan karena masing - masing risk owner belum menyampaikan penetapan limit secara komprehensif. Penyusunan penetapan limit masih terfokus pelaksanaannya oleh SKMR..Penetapan Limit dan toleransi risiko likuiditas telah meliputi limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per aktivitas fungsional pada tiap - tiap risk owner kepatuhan berdasar hasil penilaian profil risiko pada masing - masing risk owner..

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Sandi	Nama Komponen	Nilai	Keterangan
11	Y	D01	Single	+	4323	Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko likuiditas sesuai dengan ketentuan?	3	Unit kerja belum sepenuhnya memiliki pemahaman yang baik mengenai kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan /atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risikonya.Bank telah memiliki kebijakan penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang diatur dalam BPP Manajemen Risiko namun ketentuan tersebut belum ditetapkan dalam ketentuan dan pedoman tersendiri. BPP Manajemen Risiko tersebut juga belum menjelaskan secara lengkap kriteria produk dan layanan baru, sistem dan prosedur kewenangan pengelolaan mulai dari unit kerja atau organisasi, tata kerja persiapan produk dan atau aktivitas kredit baru, uji coba, pelaksanaan, dan laporan pelaksanaannya. .Kebijakan produk dan aktivitas baru dilakukan evaluasi secara berkala sesuai ketentuan, namun pada periode penilaian belum melakukan evaluasi terhadap kebijakan produk dan aktivitas baru..
12	Y	D01	Single	+	4330	Kecukupan Proses dan Sistem	3	Bank telah memiliki kecukupan proses dan sistem untuk mendukung manajemen risiko likuiditas melalui aplikasi bantu, dukungan data dari aplikasi inti bank, serta ketentuan dan regulasi yang ditetapkan, ketersediaan pegawai di fungsi treasury. Kebutuhan sistem informasi manajemen risiko likuiditas untuk bank secara utuh, terkini, lengkap, dan akurat belum dapat terpenuhi dengan baik. Sistem pelaporan kepada unit kerja atas proses manajemen risiko likuiditas belum dijalankan secara rutin dan konsisten.
13	Y	D01	Single	+	4331	Apakah BPR telah melaksanakan proses manajemen risiko likuiditas yang melekat pada kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko likuiditas?	3	SDM telah melaksanakan proses manajemen risiko likuiditas, namun terdapat kekurangan dalam pengukuran potensi kerugian akibat fraud, stress testing perubahan kondisi, serta kurangnya laporan yang komprehensif untuk mitigasi risiko kepatuhan. .Belum seluruh jenjang organisasi memiliki pemahaman dan kemampuan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian aktivitas operasional dan bisnis. Masih sering terjadi kegiatan operasional belum mengacu pada penerapan prinsip kehati-hatian..Bank telah melaksanakan proses manajemen risiko likuiditas, dalam pelaksanaan belum dilakukan secara menyeluruh, termasuk dalam hal verifikasi dual control dan dukungan dokumen yang memadai terhadap setiap kewajiban likuiditas..Proses pengambilan keputusan bidang likuiditas dilakukan melalui pembahasan dalam forum komite SDM, Komite Pengadaan Barang jasa, Komite Penghapusan Aset, Komite Kredit, ALCO, dll.Proses Manajemen risiko likuiditas terkadang belum didukung dengan data yang informatif akurat dan komprehensif, namun perbaikan terus dilakukan untuk menunjang proses Manajemen Risiko yang akurat..Bank telah memiliki jenis produk dan layanan sesuai dengan karakteristik masing - masing, namun sejauh ini belum dilakukan analisa terhadap risiko yang melekat pada masing - masing jenis produk..Evaluasi terhadap kesesuaian asumsi, data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko likuiditas sudah dilakukan, namun belum secara menyeluruh..Pengukuran risiko likuiditas, belum dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan yang material pada kegiatan layanan, produk, dan faktor risiko..Pemantauan risiko likuiditas dilakukan dengan penetapan limit dan toleransi risiko pada aktivitas fungsional dan jenis risiko, namun belum dilakukan stres testing terhadap exposure risiko yang ada..Perubahan yang material terhadap faktor risiko likuiditas belum dilakukan penyesuaian pelaporan, namun akan terus dilakukan pengawasan untuk mengoptimalkan pelaporan-pelaporan jika terjadi perubahan..
14	Y	D01	Single	+	4332	Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko likuiditas serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	3	Sistem Informasi yang dimiliki oleh SKMR sebagai aplikasi bantu diantaranya E-Semar, Si-moli, Dashboard limit risiko dan dalam pengembangan aplikasi Simpro, SKK belum mengembangkan aplikasi khusus sebagai aplikasi bantu, unit kerja yang berkaitan dengan risiko likuiditas belum memiliki aplikasi bantu untuk monitoring..Sistem informasi Manajemen Risiko likuiditas belum sepenuhnya dapat diakses dengan mudah oleh seluruh unit kerja, mencakup informasi maturity profil, kewajiban pembayaran jangka pendek, posisi rinci daftar alat likuid, capaian dana pihak ketiga, rencana ekspansi dan pembayaran tunai lainnya..Informasi yang dapat disajikan masih terbatas pada data kuantitatif dan belum terdapat data penunjang laporan secara cepat dan terkini per aktivitas fungsional dari setiap unit kerja. Saat ini sedang dikembangkan sistem informasi Monitoring Limit dan toleransi risiko untuk mendukung pelaporan risiko likuiditas oleh SKMR.Sistem informasi yang telah dikembangkan bank belum sepenuhnya dapat mendukung meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen risiko, antara lain dalam SIM belum dapat disajikan limit risiko yang ditetapkan sehingga apabila terjadi pelampauan maka risk owner akan melakukan pelaporan kepada SKMR dan menyusun strategi yang akan dilakukan untuk perbaikan..Sistem informasi yang dimiliki saat ini belum menyajikan informasi secara lengkap terkait penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Saat ini masih dikembangkan ke arah tersebut untuk menyempurnakan sistem informasi yang sudah ada..

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Sandi	Nama Komponen	Nilai	Keterangan
15	Y	D01	Single	+	4340	Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	3	Bank telah memiliki sistem pengendalian internal dan melakukan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan baik reguler maupun khusus oleh SKAI. Kecukupan organisasi dengan telah memisahkan satuan kerja kepatuhan, manajemen risiko, dan audit internal. Demikian juga fungsi treasury yang ada di kantor pusat dengan fungsi operasional atau transaksional. Satuan Kerja Pengendalian secara berkala melakukan pembahasan dalam forum rapat dengan memberikan rekomendasi kepada Direksi dengan agenda hasil pengawasan atas penerapan manajemen risiko likuiditas. Forum rapat ALCO dilakukan bersama antara Direksi dan Unit Kerja secara berkala. Meskipun demikian proses pengendalian yang dilakukan oleh fungsi Risk Control dan Risk Assurement belum secara optimal menurunkan tingkat risiko likuiditas dalam aspek kepatuhan ketentuan pengelolaan likuiditas.Temuan pelanggaran ketentuan pengelolaan likuiditas masih terjadi di beberapa unit kerja cabang.
16	Y	D01	Single	+	4341	Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko likuiditas, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	3	SKAI telah melakukan pemeriksaan penerapan manajemen risiko kredit pada Beberapa Divisi di Kantor Pusat dan 8 Kantor Cabang mencakup evaluasi terhadap implementasi kebijakan, prosedur, proses dan mekanisme mitigasi risiko untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan internal. Hasil pemeriksaan menunjukkan beberapa temuan fundamental terkait kurang memadainya pengendalian internal, diantaranya tidak dilakukannya penilaian risiko secara berkala oleh unit kerja utama..SKAI melakukan monitoring terhadap tindaklanjut temuan penerapan kebijakan manajemen risiko likuiditas, namun tindaklanjut yang dilakukan oleh risk owner belum optimal. SKAI telah melaporkan kepada Direktur Utama..SKAI melakukan pengawasan terhadap setiap unit kerja dan individu yang terlibat dalam kebijakan manajemen risiko likuiditas terhadap wewenang dan tanggungjawab , pemahaman dan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang ditetapkan untuk manajemen risiko likuiditas.SKAI memastikan integritas dan efektivitas proses manajemen risiko dengan melakukan pengawasan yang mencakup verifikasi pemisahan fungsi secara jelas untuk mencegah konflik kepentingan, kelengkapan struktur organisasi, fungsi pelaporan yang efektif, dokumentasi yang komprehensif dalam penerapan kebijakan manajemen risiko likuiditas..SKAI belum sepenuhnya melakukan verifikasi dan review terhadap sistem pengendalian internal manajemen risiko likuiditas, yang antara lain mencakup satuan kerja berfungsi secara memadai, exposure risiko terjaga sesuai limit, kualitas aset yang memburuk, konsentrasi dana, peningkatan biaya dana, arus kas yang memburuk, info publik terhadap bank, peningkatan penarikan simpanan, maturity profile..
17	Y	D01	Single	+	4342	Apakah sistem pengendalian intern terhadap risiko likuiditas telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	3	Unit kerja pengendalian telah terpisah secara jelas dari unit kerja operasional dan bisnis untuk memastikan independensi, mencegah konflik kepentingan dan meningkatkan efektivitas pengendalian internal. .Unit kerja likuiditas belum sepenuhnya memahami dan menjalankan tugas serta tanggung jawabnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang telah ditetapkan. Pemahaman terhadap penerapan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta pemantauan dan mitigasi risiko yang efektif masih kurang memadai. .
18	Y	D01	Single	+	4350	Tingkat KPMR	3	Pengawasan atas pengelolaan likuiditas oleh Komisaris dan Direksi telah dilakukan melalui penerbitan Surat Keputusan Direksi dan Surat Edaran. Pengaturan mengenai manajemen likuiditas dievaluasi secara berkala. Direksi juga telah membentuk tim ALCO dan mengadakan pertemuan secara rutin. Bank telah menetapkan batas dan toleransi risiko likuiditas yang diperbarui secara berkala. Prosedur pengelolaan dana dan risiko likuiditas telah disosialisasikan kepada semua unit kerja oleh unit kerja treasury dan satuan kepatuhan. Fungsi pengawasan melalui pemeriksaan periodik atas risiko likuiditas di unit kerja cabang oleh satuan kegiatan independen. Namun, terdapat kekurangan dalam penerapan ALMA dan pemahaman yang belum sepenuhnya oleh unit kerja, serta ALCO belum secara konsisten mengadakan pertemuan sesuai jadwal yang ditetapkan. Oleh karena itu, penilaian KPMR risiko likuiditas adalah cukup memadai.



PT BPR BKK JATENG
(Perseroda)

RISIKO REPUTASI

Form Analisis Risiko Reputasi

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Sandi	Nama Komponen	Nilai	Analisis
1	Y	D01	Single	+	5100	Tingkat Risiko	2	Hasil evaluasi profil Risiko Reputasi untuk Semester I 2025 didapatkan penilaian tingkat Risiko Sedang dengan nilai Risiko Inhern 2.17 (Rendah) dan nilai Penerapan Manajemen Risiko 3.00 (Cukup Memadai). Bank saat ini sedang meningkatkan kontrol risiko reputasi di unit-unit cabang dengan mengacu pada hasil temuan, terutama dalam menangani masalah kredit dengan mengikuti prosedur dan ketentuan dalam perjanjian kredit. Penting untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam pemahaman produk serta transparansi terkait risiko yang melekat pada setiap produk dan layanan. Bank masih perlu meningkatkan sistem informasi untuk memantau progres pengaduan dan penyelesaiannya secara real-time, serta memperluas akses media yang mudah dijangkau oleh nasabah untuk menyampaikan permasalahan atau pengaduan. Evaluasi risiko telah dilakukan di semua cabang dengan fokus pada dampak reputasi, yang menunjukkan bahwa hampir tidak ada dampak signifikan terhadap reputasi bank dari risiko yang teridentifikasi.
2	Y	D01	Single	+	5200	Tingkat Risiko Inheren	2	PT BPR BKK Jateng menghadapi beberapa tantangan reputasi, terutama dari pemberitaan negatif terkait beberapa BPR di Jawa Tengah yang dicabut ijin oleh OJK, meskipun dampaknya minimal. Klarifikasi media masih terbatas pada pemegang saham. Pengaduan nasabah diadministrasikan dengan baik, menggunakan aplikasi APPK dari OJK dan media sosial, dengan prosedur sederhana dan respon cepat. Informasi keuangan yang disampaikan lengkap dan akurat, meskipun laporan pengaduan nasabah belum tercantum di website. Pengadaan pegawai dilakukan transparan. Produk kredit dan simpanan disampaikan secara transparan, namun pengetahuan produk oleh pegawai perlu ditingkatkan. SKAI menangani risiko reputasi dengan serius, mengidentifikasi kurang dari 10 kejadian eksposur risiko reputasi dan lebih dari 10 pemberitaan positif selama periode penilaian, menunjukkan citra perusahaan secara keseluruhan masih baik. Mendasarkan pada penilaian tersebut maka nilai risiko inheren pada Risiko reputasi sebesar 2.17 (Risiko Rendah).
3	Y	D01	Single	+	5300	Tingkat KPMR	3	Pengawasan oleh Komisaris dan Direksi telah dilakukan dengan menerbitkan ketentuan dalam bentuk Surat Keputusan Direksi dan Surat Edaran. Penatausahaan dan pelaporan dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan batasan waktu tindak lanjut yang ditetapkan. Langkah tindak lanjut dan penyelesaiannya juga telah disusun dan memastikan unit kerja terkait telah menindaklanjuti atas setiap pengaduan nasabah. Ketersediaan sistem yang terintegrasi belum cukup memadai dan masih mengandalkan proses secara tertulis. SKAI melakukan pemeriksaan terhadap unit kerja secara berkala dan telah dapat mengidentifikasi potensi terjadi risiko reputasi. Bank selalu menanggapi atas setiap terdapatnya pengaduan dan dilaporkan melalui media dari OJK secara tepat waktu. Koordinasi tindak lanjut pengaduan berjalan dengan baik. Namun demikian bank masih memiliki kelemahan dikarenakan bank belum sepenuhnya menyediakan media yang secara luas dapat dan mudah diakses oleh nasabah yang memungkinkan terdapatnya pengaduan yang belum dapat tersalurkan dan dapat diterima lengkap oleh bank. Bank menetapkan peringkat KPMR risiko reputasi pada tingkat Cukup memadai

Form Kertas Kerja Risiko Inheren Reputasi

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Sandi	Nama Komponen	Nilai	Keterangan
1	Y	D01	Single	+	5210	Pengaruh reputasi pihak yang berasosiasi dengan BPR	2	Pengaruh Reputasi terkait dengan pemberitaan negatif pada BPR BKK Jateng maupun pada pihak yang berasosiasi dengan BPR, secara keseluruhan pemberitaan mengenai pencabutan ijin OJK di beberapa BPR di Jawa Tengah, baik BPR milik Pemerintah daerah maupun swasta, dampak pemberitaan tersebut tidak berpengaruh signifikan dengan dampak reputasi BPR BKK Jateng, klarifikasi hanya dilakukan oleh pemegang saham terhadap BPR dengan kepemilikan BUMD. Mendasarkan pada penilaian tersebut maka nilai risiko inhern pada pilar 1 sebesar 1,80 (risiko Rendah)
2	Y	D01	Single	+	5211	Kredibilitas BPR dan pihak yang berasosiasi dengan BPR	2	Pada Periode penilaian tidak terdapat pemberitaan negatif yang terkait langsung dengan BKK Jateng. Hanya terdapat beberapa pemberitaan pencabutan ijin OJK kepada beberapa BPR yang terdapat di wilayah Jawa Tengah pada awal periode Semester I 2025. Pemberitaan tersebut tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap kredibilitas BPR BKK Jateng. Dampak pemberitaan negatif kepada bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah tidak terlalu signifikan. Reputasi industri BPR secara umum masih berjalan dengan baik. Kerjasama dengan notaris masih terdapat proses yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Tidak terdapat pemberitaan negatif dari mitra bisnis. Perjanjian kerjasama dengan notaris jangka waktu 1 tahun dan dapat berhenti setiap saat. Terdapat notaris yg sudah berhenti namun masih memiliki tugas/order. Sudah terdapat media melalui web bkk, WA broadcast, call centre. Namun belum terdapat upaya aktif dari divisi terkait untuk mendapatkan informasi tentang reputasi kepada para nasabah maupun masyarakat luas. WA blast masih terbatas dari nasabah internal BKK dan belum ada evaluasi layanan diberikan kepada nasabah luas. Belum terdapat penunjukan dan pengelolaan PIC yang bertanggung jawab dalam pengelolaan nomor wa blast. Sekper mengelola web, media sosial, pengelolaan oleh bagian Pubdok Sekper. Skala masih menggunakan ketentuan 2023 dan belum dilakukan pengkinikan. Penunjukan dan fungsi PIC menjadi skala penilaian Exposure Risiko Reputasi
3	Y	D01	Single	+	5212	Signifikansi dan materialitas dampak yang ditimbulkan akibat kejadian reputasi	2	Dampak yang diakibatkan dari kejadian reputasi pada periode penilaian terjadi kejadian pemalsuan dokumen dan pembobolan rekening nasabah, namun respon tindakan cepat dalam upaya penangkapan pelaku dilakukan secara cepat sehingga tidak sampai meluas dan berdampak pada reputasi bank Beberapa kejadian Reputasi yang terjadi merupakan kejadian pembobolan rekening dan pemalsuan dokumen nasabah yang terjadi pada 1 nasabah, namun dilakukan penanganan dan penggantian rugi secara cepat Kejadian yang terjadi tidak sampai berdampak pada pemberitaan negatif atau penyebaran reputasi negatif Terjadi 1 kejadian yang berpotensi berdampak pada reputasi yakni kejadian pembobolan rekening dan pemalsuan dokumen nasabah Terjadi 1 kejadian yang berpotensi berdampak pada reputasi yakni kejadian pembobolan rekening dan pemalsuan dokumen nasabah
4	Y	D01	Single	+	5220	Frekuensi dan signifikansi pengaduan nasabah	2	Pengaduan nasabah diadministrasikan dengan baik, dengan 4 pengaduan pada periode sebelum yang telah selesai. Pengaduan dilakukan melalui aplikasi APPK dari OJK dan media sosial bank. Analisa informasi dari media sosial dilakukan setiap kurang dari 3 bulan. Prosedur pengaduan sederhana dengan respon maksimal 15 hari kerja. Pengaduan tidak berdampak material pada kinerja keuangan, dengan tingkat signifikansi rendah. Terdapat 4 aduan terkait perhitungan angsuran dan sistem layanan informasi keuangan, yang telah selesai, namun ada aduan aktif menunggu tanggapan konsumen. Mendasarkan pada penilaian tersebut maka nilai risiko inhern pada pilar 2 sebesar 1.63 (risiko Rendah).
5	Y	D01	Single	+	5221	Administrasi dan tindak lanjut pengaduan nasabah	2	Pengaduan nasabah diadministrasikan dengan cukup baik dan tertib, terdapat 4 pengaduan nasabah pada periode sebelum dan keduanya sudah selesai dan status aduan ditutup.Metode pengaduan masih menggunakan aplikasi APPK dari OJK dan tidak terdapat metode pengaduan diluar jalur yang melanggar ketentuan. Jikapun ada pengaduan tersebut di sampaikan melalui sosial media yang dimiliki oleh Bank.kurang dari 3 (Tiga) bulan Dilakukan Analisa Informasi pada Media atau Jejaring Sosial.Informasi dari Lembaga Perlindungan Konsumen dan Konsumen tidak sampai 10 informasi.Prosedur Pengaduan Sederhana dan Respon Paling Lama 15 (Limabelas) hari Kerja Setelah Tanggal Pengaduan.

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Sandi	Nama Komponen	Nilai	Keterangan
6	Y	D01	Single	+	5222	Signifikansi dan materialitas pengaduan nasabah	2	Pengaduan nasabah baik melalui APPK tidak berdampak pada kinerja keuangan secara material dan tingkat signifikansi dari pengaduan tergolong rendah mengingat pengaduan nasabah melalui APPK merupakan pengaduan dari nasabah yang sudah memiliki keputusan hukum berkekuatan tetap. Frekuensi pengaduan nasabah minimal yaitu hanya 4 aduan dan tidak material. Jenis pengaduan nasabah hanya 4 jenis, dan masing - masing jenis pengaduan tidak material yaitu masalah ketidaksesuaian perhitungan angsuran dan permasalahan sistem layanan informasi keuangan. Semua aduan sebanyak 4 aduan sudah dapat terselesaikan dengan baik dan saat ini status pengaduan sudah ditutup.
7	Y	D01	Single	+	5230	Pelanggaran etika bisnis	2	Informasi keuangan PT BPR BKK Jateng yang disampaikan kepada pihak berkepentingan lengkap, akurat, dan terkini. Laporan posisi keuangan dipublikasikan di website, namun belum lengkap. Informasi dan publikasi dilakukan secara transparan, tetapi laporan pengaduan nasabah belum tercantum di website sesuai POJK 18 Tahun 2018. Pengadaan pegawai diumumkan secara transparan melalui media internal dan dilakukan dengan pihak ketiga independen. Terdapat pengaduan dari pegawai Salatiga menggunakan pengacara yang telah ditindaklanjuti oleh sekretaris perusahaan. Produk kredit dan simpanan bank disampaikan secara transparan kepada nasabah dan mitra bisnis. Tidak ada pemberitaan negatif atau komplain dari pihak sejenis. Penguasaan pengetahuan produk oleh pegawai perlu ditingkatkan, dan risiko produk belum sepenuhnya disampaikan kepada nasabah, meskipun tindakan bank dalam menyelesaikan kredit bermasalah sudah sesuai prosedur. Mendasarkan pada penilaian tersebut maka nilai risiko inheren pada pilar 3 sebesar 2.17 (risiko Rendah).
8	Y	D01	Single	+	5231	Transparansi informasi keuangan	2	Informasi keuangan Bank yang disampaikan kepada pihak yang berkepentingan sudah lengkap, akurat dan terkini. Publikasi laporan posisi keuangan sudah ditampilkan pada website PT BPR BKK Jateng namun masih belum lengkap. Informasi dan Publikasi sudah terpublish secara transparan melalui website bank. Namun terkait Laporan Pengaduan nasabah sesuai POJK 18 Tahun 2018 tentang "Layanan Pengaduan Nasabah" telah tercantum dalam website bank pada menu Informasi Pengaduan Bank melakukan pemberitahuan melalui papan pengumuman atau media internal terkait dengan adanya pengadaan pegawai. Pengadaan pegawai dilaksanakan secara transparan dan bekerjasama dengan pihak ketiga yang independen. Dalam hal terdapat pemutusan hubungan kerja, Bank menjalankan prosedur dan memberikan hak kepada pegawai sesuai ketentuan yang berlaku disesuaikan dengan kemampuan perusahaan.
9	Y	D01	Single	+	5232	Transparansi produk dan layanan BPR	3	Bank memiliki produk kredit dan simpanan dengan skema sederhana, dan telah dilakukan pemberian informasi secara transparan kepada nasabah atau mitra bisnis dan melalui website bank. Tidak terdapat pemberitaan dari BKK yg menyudutkan pihak atau kompetitor. Tidak terdapat komplain dari pihak atau industri sejenis atau pihak manapun. Penguasaan product knowledge dari pegawai juga masih harus ditingkatkan meskipun sosialisasi dan pendampingan telah dilakukan. Pegawai belum sepenuhnya menyampaikan risiko-risiko yang melekat pada produk kepada nasabah. Hal ini mendasarkan terdapatnya pengaduan nasabah akibat tindakan yang dilakukan Bank dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah meskipun tindakan tersebut telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan bank.
10	Y	D01	Single	+	5299	Lainnya	2	Risiko reputasi yang diidentifikasi terkait dengan kegiatan atau kebijakan yang tidak memenuhi standar atau dapat mempengaruhi citra perusahaan secara minimal. Meskipun demikian, SKAI tetap memperhatikan temuan ini dengan serius untuk mengurangi dampaknya terhadap reputasi perusahaan, dengan memastikan bahwa tindakan korektif yang sesuai diambil untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan manajemen risiko reputasi secara keseluruhan. Terdapat < 10 (Sepuluh) Kejadian Eksposure Risiko Reputasi pada Hasil Monitoring Satuan Kerja Kepatuhan. Lebih dari 10 (Delapan) Pemberitaan positif pada periode penilaian.
11	Y	D01	Single	+	5292	Tingkat Risiko Inheren Reputasi	2	PT BPR BKK Jateng menghadapi beberapa tantangan reputasi, terutama dari pemberitaan negatif terkait beberapa BPR di Jawa Tengah yang dicabut ijin oleh OJK, meskipun dampaknya minimal. Klarifikasi media masih terbatas pada pemegang saham. Pengaduan nasabah diadministrasikan dengan baik, menggunakan aplikasi APPK dari OJK dan media sosial, dengan prosedur sederhana dan respon cepat. Informasi keuangan yang disampaikan lengkap dan akurat, meskipun laporan pengaduan nasabah belum tercantum di website. Pengadaan pegawai dilakukan transparan. Produk kredit dan simpanan disampaikan secara transparan, namun pengetahuan produk oleh pegawai perlu ditingkatkan. SKAI menangani risiko reputasi dengan serius, mengidentifikasi kurang dari 10 kejadian eksposur risiko reputasi dan lebih dari 10 pemberitaan positif selama periode penilaian, menunjukkan citra perusahaan secara keseluruhan masih baik. Mendasarkan pada penilaian tersebut maka nilai risiko inheren pada Risiko reputasi sebesar 2.17 (Risiko Rendah).

Form Kertas Kerja KPMR Reputasi

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Sandi	Nama Komponen	Nilai	Keterangan
1	Y	D01	Single	+	5310	Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris	3	Dewan Komisaris dan Direksi PT BPR BKK Jateng telah mengambil langkah signifikan untuk mengelola risiko reputasi melalui kebijakan yang komprehensif dan evaluasi berkala. Pelaksanaan kebijakan ini perlu ditingkatkan terutama dalam hal kompetensi dan kesadaran SDM mengenai risiko reputasi.Manajemen memiliki komitmen yang tinggi dalam melakukan upaya untuk meningkatkan citra dan reputasi perusahaan menjadi lebih baik.
2	Y	D01	Single	+	5311	Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko reputasi yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	2	Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko Reputasi dan ketentuan ketentuan lain yakni terhadap BPP Manajemen Risiko yang merupakan komitmen dari hasil pemeriksaan OJK tahun 2023. Serta limit dan toleransi risiko reputasi..Dewan komisaris juga melakukan evaluasi terhadap SK Direksi tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang baru dimana adanya pembentukan corporate secretary, Pedoman Perlindungan Konsumen, Pedoman kegiatan tanggung jawab sosial atau CSR, serta ketersediaan media atau situs resmi bank maupun media sosial untuk menyampaikan pemberitaan positif kegiatan Bank.Dewan Komisaris Mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen risiko reputasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.Dewan Komisaris telah memastikan Direksi dan jajarannya dalam penerapan manajemen risiko Reputasi sesuai kebijakan manajemen risiko yang ditetapkan.Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi telah mempertimbangkan masukan dari Komite Pemantau Risiko.
3	Y	D01	Single	+	5312	Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko reputasi secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	3	Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko reputasi dengan membahas risiko reputasi pada forum rapat Pengurus, rapat dengan Pejabat Eksekutif, rapat Komite Manajemen Risiko, rapat Komite Pemantau Risiko, forum exit meeting hasil pemeriksaan SKAI dan memantau tindak lanjut evaluasi penerapan manajemen risiko reputasi .Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi antara lain peningkatan mutu layanan dengan meningkatkan kompetensi SDM, peningkatan integritas dan performance SDM, harus tegas dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi, sosialisasi ulang untuk meningkatkan pemahaman, dan memastikan tindaklanjut hasil temuan pelanggaran yang terkait risiko reputasi. .Dewan Komisaris telah melakukan monitoring tindak lanjut evaluasi pertanggungjawaban Direksi penerapan manajemen risiko Reputasi.Dewan Komisaris secara konsisiten telah mengembangkan budaya manajemen risiko reputasi dengan memastikan seluruh ketentuan reputasi telah dipenuhi, mengawal implementasinya dengan melakukan kunjungan ke cabang, memantau tindaklanjut hasil kunjungan SKMR dan SKAI..Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
4	Y	D01	Single	+	5313	Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko reputasi, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	3	Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen risiko Reputasi Namun demikian belum optimalnya pelaksanaan atas kebijakan Manajemen Risiko reputasi, karena kompetensi tentang penguasaan produk dan risiko yang melekat, kesadaran akan budaya kerja, budaya patuh, budaya risiko masih belum memadai, sehingga masih perlu terus dilakukan peningkatan terhadap kualitas SDM guna mengurangi potensi risiko reputasi.Direksi telah menyusun Buku Pedoman Perusahaan Manajemen Risiko Reputasi dan pedoman kebijakan lainnya seperti Peraturan Kepegawaian, Disiplin dan Sanksi Pegawai, Kebijakan Anti Fraud, Ketentuan Standar Etika Pegawai, Ketentuan Budaya Kerja Perusahaan, Ketentuan Standar Penampilan Pegawai, ketentuan Standar Pelayanan, ketentuan Benturan Kepentingan, ketentuan Perlindungan Konsumen..Direksi telah melakukan evaluasi ketentuan dan kebijakan manajemen risiko Reputasi yang disetujui Direksi dilakukan secara berkala setiap tahunnya..
5	Y	D01	Single	+	5314	Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko reputasi, dan melakukan komunikasi kebijakan manajemen risiko reputasi terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	3	Direksi secara berkala telah mengambil tindakan untuk memitigasi risiko dan mengkomunikasikan kebijakan tersebut kepada seluruh jenjang organisasi serta hasil evaluasinya melalui forum rapat, tindakan yang diambil antara lain melakukan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan integritas SDM, mengkampanyekan slogan slogan kepatuhan, melakukan sosialisasi terus menerus, melakukan kegiatan MMA ke Kantor Cabang (Monitoring, Mentoring, Advising), melengkapi kebijakan dan prosedur dalam rangka pengawasan dan pengendalian internal, melakukan diskusi terkait dengan budaya kerja perusahaan. .Direksi secara berkala menyampaikan tindakan dan kebijakan dalam rangka pengendalian dan mitgasi risiko kepada seluruh unit kerja namun kebijakan Manajemen Risiko reputasi masih belum mampu dipahami oleh seluruh jenjang organisasi. Unit kerja belum sepenuhnya dapat melakukan tahapan proses manajemen risiko khususnya proses identifikasi risiko..Direksi secara konsisten telah mengembangkan budaya sadar risiko Reputasi kepada seluruh unit kerja..Direksi secara berkala melakukan review atas kebijakan pendelegasian kewenangan yang diberikan.Direksi telah melakukan evaluasi terhadap usulan transaksi yang diterima sebelum memberikan persetujuan. .

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Sandi	Nama Komponen	Nilai	Keterangan
6	Y	D01	Single	+	5315	Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi reputasi dan fungsi manajemen risiko reputasi?	3	Bank telah memiliki dan membentuk unit kerja yang menangani fungsi reputasi yaitu Divisi SDM dan Umum, Satuan Kerja Kepatuhan, Divisi Corporate secretary, dan fungsi Manajemen Risiko reputasi oleh SKMR..Dukungan pegawai di unit Satuan Kerja Pengendalian belum memadai mempertimbangkan luasnya cakupan yang harus dilakukan proses dan pengendalian manajemen risiko reputasi.Kecukupan organisasi di satuan manajemen risiko perReputasian belum didukung dengan kompetensi yang baik karena belum adanya pelatihan yang didapatkan khususnya pada risiko reputasi..Proses perReputasian dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan oleh masing-masing unit kerja secara independen.
7	Y	D01	Single	+	5316	Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko reputasi?	3	Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Reputasi antara lain melalui peningkatan kompetensi, integritas dan performance, pemenuhan standar kinerja SDM, penilaian kinerja, mutasi dan rotasi, pemberian sanksi secara tegas, penunjukan pegawai pada fungsi yang tepat sesuai kompetensi dan kualifikasinya. .kebijakan dan ketentuan pedoman pengelolaan SDM belum sepenuhnya direalisasikan secara berkala..Direksi melakukan evaluasi ketercukupan jumlah SDM bidang perReputasian secara berkala.
8	Y	D01	Single	+	5320	Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	3	Bank telah mengimplementasikan kebijakan Manajemen Risiko Reputasi yang komprehensif, mencakup berbagai aspek penting seperti disiplin pegawai, kebijakan anti fraud, dan perlindungan konsumen. Kebijakan ini diawasi oleh KAP dan OJK, serta dibahas dalam forum internal. Namun, pelaksanaan monitoring dan pemahaman SDM terhadap limit dan toleransi risiko masih perlu ditingkatkan. Selain itu, kebijakan penerbitan produk baru belum sepenuhnya dipahami di seluruh unit kerja, meskipun evaluasi berkala sudah dilakukan. Secara keseluruhan, meski ada area yang perlu diperbaiki, langkah-langkah yang diambil menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pengelolaan risiko reputasi. Berdasarkan hal tersebut penilaian pada pilar ini ditetapkan pada tingkat 2,59 atau cukup memadai.
9	Y	D01	Single	+	5321	Apakah BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko reputasi yang memadai antara lain menerapkan prinsip transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan nasabah, dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	3	Bank telah menyusun dan memiliki kebijakan Manajemen Risiko reputasi dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan pegawai antara lain Peraturan Kepegawaian, Disiplin dan Sanksi Pegawai, Kebijakan Anti Fraud, Ketentuan APU PPT, Ketentuan Benturan Kepentingan, Ketentuan Perlindungan Konsumen, Ketentuan Standar Penampilan Pegawai, Ketentuan Standar Pelayanan Nasabah. .Dalam penyusunan rencana kerja telah berdasarkan pada pengalaman dan capaian sebelumnya dengan tetap memperhatikan pengelolaan dan mitigasi risiko Reputasi.kebijakan manajemen risiko Reputasi dilakukan kaji ulang oleh pihak yang independen yaitu KAP dan OJK dan dilaporkan ke Dewan Komisaris dan Direksi.Bank telah melakukan pembahasan pada forum rapat komite pemantau risiko dan komite manajemen risiko tentang risiko reputasi yang tertuang dalam penilaian profil risiko dan penetapan limit risiko maupun pembahasan exit meeting hasil pemeriksaan dari SKAI di setiap cabang. Meskipun demikian unit kerja belum melakukan monitoring atas limit dan toleransi risiko reputasi yang ditetapkan.perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko ditetapkan telah sesuai dengan sasaran strategi dan strategi bisnis.
10	Y	D01	Single	+	5322	Apakah BPR: ● Memiliki prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit Risiko reputasi yangditetapkan oleh Direksi; ● Melaksanakan prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit Risiko reputasi secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan ● Melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen	3	Bank telah memiliki prosedur Manajemen Risiko Reputasi dalam BPP Manajemen Risiko dan telah mengatur mekanisme dan tata cara penetapan limit dan toleransi risiko seperti metode penilaiannya dan mekanisme apabila terjadi pelampauan limit dan toleransi risiko. .Bank telah melakukan identifikasi dan monitoring risiko reputasi secara berkala dan melakukan pembahasan bersama melalui forum rapat Komite. .Bank telah melakukan evaluasi dan mengkinikan ketentuan limit dan toleransi risiko reputasi. Ketentuan limit dan toleransi risiko telah dibahas dalam forum rapat komite dan disosialisasikan kepada seluruh unit kerja. Meskipun demikian Bank dalam pelaksanaannya belum optimal dan belum melakukan identifikasi risiko reputasi termasuk menetapkan limit risiko reputasi untuk seluruh aktivitas fungsional..SDM belum terlalu memahami ketentuan limit dan toleransi risiko yang ditetapkan dan menjadi acuan dalam pengendalian manajemen risiko Reputasi.Kebijakan penetapan limit dan toleransi risiko dilakukan pengkinian setahun sekali sesuai dengan kondisi usaha dan perkembangan faktor eksternal yang berpengaruh pada ketentuan limit yang telah ditetapkan.Perumusan untuk penentuan limit dan toleransi risiko dilakukan sesuai dengan arah dan strategi perReputasian.Penetapan limit telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan didokumentasikan sehingga memudahkan untuk dilakukan audit trail.Penetapan limit dan toleransi risiko meliputi penetapan limit secara keseluruhan, per jenis risiko, dan per aktivitas fungsional yang memiliki exposure risiko.

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Sandi	Nama Komponen	Nilai	Keterangan
11	Y	D01	Single	+	5323	Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko reputasi sesuai dengan	3	Bank telah memiliki kebijakan penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang diatur dalam BPP Manajemen Risiko namun ketentuan penerbitan produk/aktivitas baru tersebut belum ditetapkan dalam ketentuan dan pedoman tersendiri sehingga pemahaman akan hal tersebut tidak sampai kepada unit kerja..Ketentuan kebijakan produk dan aktivitas belum sepenuhnya didukung dengan ketentuan dan petunjuk kerja yang lengkap.Ketentuan kebijakan produk dilakukan evaluasi secara berkala.
12	Y	D01	Single	+	5330	Kecukupan Proses dan Sistem	3	Bank telah memiliki kecukupan sistem dan pelaksanaan proses manajemen risiko reputasi dan Bank juga telah mengembangkan parameter pengukuran risiko reputasi selain yang ditetapkan dari otoritas. Pengukuran yang dikembangkan Bank telah menyesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas Bank. Namun pelaksanaan proses manajemen risiko belum dilakukan secara menyeluruh dan belum terdokumentasinya sejak tahapan identifikasi sampai dengan pengendalian risiko reputasi. Unit kerja telah menindaklanjuti setiap terjadinya pengaduan dan dilakukan monitoring tindak lanjutnya sesuai ketentuan untuk dilaporkan melalui aplikasi dari OJK. Bank telah menetapkan pejabat khusus untuk setiap terjadinya pengaduan dan langkah pelaporannya ke kantor pusat atau pejabat/unit kerja pengaduan nasabah yang ditetapkan. Bank juga telah menyampaikan ke Direksi hasil dan progress tindak lanjut pengaduan sebelum dikirimkan ke OJK. Namun demikian Bank belum memasang di papan pengumuman progress pengaduan nasabah termasuk di web resmi bank sesuai ketentuan. Tingkat risiko yang ditetapkan pada pilar Kecukupan Proses dan Sistem adalah pada tingkat 2,55 atau cukup memadai
13	Y	D01	Single	+	5331	Apakah BPR telah melaksanakan proses manajemen risiko reputasi yang melekat pada kegiatan usaha BPR?	3	Dalam aktivitas perReputasian seluruh SDM telah berpedoman pada penerapan manajemen risiko Reputasi seperti standar pelayanan dan penampilan, perlindungan konsumen, dan lain lain..Seluruh organisasi mampu dan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas perReputasian.Dalam proses menjaga Reputasi Bank dilakukan verifikasi dual control seperti pengaduan nasabah akan melalui Satuan Kerja Kepatuhan untuk melakukan monitoring dan didukung dengan dokumen yang memadai.Dalam proses pengambilan keputusan bidang perReputasian dilakukan secara pembahasan bersama dan dilakukan secara transparan.Dalam proses manajemen risiko Reputasi telah didukung dengan data Reputasi yang akurat dan informatif.Dalam proses manajemen risiko Reputasi telah dilakukan analisa karakteristik risiko Reputasi yang melekat pada produk dan layanan.Kesesuaian asumsi, data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko Reputasi telah dilakukan evaluasi melalui komite manajemen risiko.Dalam melakukan pengukuran risiko Reputasi telah dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan yang material pada kegiatan layanan, produk, dan faktor risiko.Dalam melakukan pemantauan risiko Reputasi telah dilakukan evaluasi terhadap eksposur risiko Reputasi.Penyusunan pelaporan akan dilakukan jika terdapat perubahan yang material dalam faktor risiko Reputasi.
14	Y	D01	Single	+	5332	Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko reputasi serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	3	Bank telah menetapkan Sistem pengendalian internal terhadap risiko reputasi antara lain dari aplikasi dari otoritas, ketersediaan media informasi di kantor cabang apabila nasabah mengajukan pengaduan baik lisan maupun tertulis. Bank telah memiliki ketentuan dan telah tersedia informasi di halaman web resmi bank dan media sosial. .Bank belum memasang di papan pengumuman progress pengaduan nasabah termasuk di web resmi bank sesuai ketentuan.Unit kerja telah menindaklanjuti setiap terjadinya pengaduan dan dilakukan monitoring tindak lanjutnya sesuai ketentuan untuk dilaporkan melalui aplikasi dari OJK. Bank telah menetapkan pejabat khusus untuk setiap terjadinya pengaduan dan langkah pelaporannya ke kantor pusat atau pejabat/unit kerja pengaduan nasabah yang ditetapkan. Bank juga telah menyampaikan ke Direksi hasil dan progress tindak lanjut pengaduan sebelum dikirimkan ke OJK. .sistem informasi yang dimiliki belum secara optimal mampu meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen risiko Reputasi (terkait produk, layanan, limit, penilaian, contingency plan, dan fungsi pengawasan).sistem informasi yang dimiliki menyajikan informasi realisasi penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan (Risk Control dan tindak lanjut perbaikannya).

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Sandi	Nama Komponen	Nilai	Keterangan
15	Y	D01	Single	+	5340	Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	3	Bank telah memiliki kecukupan organisasi yang bertugas sebagai pengendali di internal yaitu sebagai Risk Management Unit (SKK dan SKMR) dan Risk Assurance (SKAI) yang terpisah. Satuan Kerja Pengendalian secara berkala melakukan pembahasan dalam forum rapat dengan memberikan rekomendasi kepada Direksi dengan agenda hasil pengawasan atas penerapan manajemen risiko reputasi meskipun belum terdokumentasi dengan lengkap. Bank telah memiliki ketentuan pedoman perlindungan nasabah dan prosedur penyelesaiannya oleh unit kerja yang ditetapkan untuk pengendalian risiko reputasi. Bank telah menatausahakan setiap pengaduan dan tindak lanjut sampai dengan pelaporan sesuai ketentuan. Namun belum sepenuhnya dapat menyediakan media yang lebih luas dan mudah diakses oleh nasabah apabila akan mengajukan pengaduan ke bank. Ketersediaan ketentuan mekanisme identifikasi dan pemantauan risiko reputasi belum disusun oleh Bank dan selama pelaksanaan sekedar langkah tindak lanjut tanpa melakukan evaluasi penyebab terjadinya pengaduan nasabah yang memungkinkan terjadinya pengaduan nasabah yang sama dan berulang. Mendasarkan hal tersebut penilaian pada pilar ini ditetapkan pada tingkat 3,00 atau cukup memadai.
16	Y	D01	Single	+	5341	Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko reputasi, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	3	Selama periode penilaian, Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) telah melakukan pemeriksaan penerapan manajemen risiko reputasi di cabang atau unit kerja sesuai dengan rencana kerja tahunan SKAI. Hasil dari pemeriksaan ini akan memberikan wawasan mengenai kepatuhan dan efektivitas strategi yang diterapkan untuk menjaga reputasi perusahaan secara konsisten di seluruh operasional..Setiap temuan SKAI dalam penerapan manajemen risiko reputasi telah dipantau untuk memastikan bahwa semua tindak lanjut yang diperlukan telah diimplementasikan secara tepat waktu dan efektif. Semua hasil monitoring dan pelaksanaan tindak lanjut ini dilaporkan kepada Direktur Utama untuk memastikan keterlibatan dan kesadaran manajemen tertinggi terhadap isu-isu reputasi yang mungkin mempengaruhi citra dan operasi perusahaan secara keseluruhan..SKAI dalam penerapan manajemen risiko reputasi telah melaksanakan pengawasan yang teliti terhadap penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen risiko reputasi yang telah ditetapkan. Evaluasi ini mencakup pengawasan terhadap struktur organisasi yang mendukung pemisahan tugas yang jelas, serta pemantauan terhadap implementasi kebijakan dan prosedur yang relevan..SKAI telah melakukan pengawasan yang komprehensif terhadap pemisahan fungsi, struktur organisasi, fungsi pelaporan, dan dokumentasi dalam penerapan manajemen risiko reputasi. SKAI juga memastikan bahwa fungsi pelaporan terkait risiko reputasi beroperasi secara efektif, dengan dokumentasi yang lengkap dan sesuai standar untuk mempertahankan integritas dan keandalan informasi terkait manajemen risiko reputasi..SKAI telah melaksanakan verifikasi dan review menyeluruh terhadap sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko reputasi, mencakup evaluasi terhadap kecukupan kebijakan dan prosedur pengendalian yang telah ditetapkan. SKAI juga meninjau efektivitas mekanisme pemantauan dan evaluasi risiko reputasi yang telah diimplementasikan. .
17	Y	D01	Single	+	5342	Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko reputasi telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	3	Unit kerja pengendalian telah sepenuhnya terpisah dari unit kerja operasional yang terlibat dalam manajemen risiko reputasi. Pemisahan ini dirancang untuk memastikan bahwa fungsi pengendalian intern dapat beroperasi secara independen dan objektif dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan efektivitas kontrol yang diterapkan untuk mengelola risiko reputasi perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dapat mengoptimalkan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang ditetapkan, serta meminimalkan potensi konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi citra dan kepercayaan publik terhadap perusahaan..Unit kerja yang terlibat dalam manajemen risiko reputasi telah memahami dan menjalankan tugas serta tanggung jawab mereka sesuai dengan tupoksinya. Hal ini mencakup implementasi kebijakan dan prosedur yang relevan untuk menjaga dan memperbaiki reputasi perusahaan. SKAI telah memverifikasi bahwa unit kerja tersebut dilengkapi dengan sumber daya yang sesuai dan memiliki kapasitas untuk mengelola risiko reputasi secara efektif..
18	Y	D01	Single	+	5350	Tingkat KPMR	3	Pengawasan oleh Komisaris dan Direksi telah dilakukan dengan menerbitkan ketentuan dalam bentuk Surat Keputusan Direksi dan Surat Edaran. Penatausahaan dan pelaporan dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan batasan waktu tindak lanjut yang ditetapkan. Langkah tindak lanjut dan penyelesaiannya juga telah disusun dan memastikan unit kerja terkait telah menindaklanjuti atas setiap pengaduan nasabah. Ketersediaan sistem yang terintegrasi belum cukup memadai dan masih mengandalkan proses secara tertulis. SKAI melakukan pemeriksaan terhadap unit kerja secara berkala dan telah dapat mengidentifikasi potensi terjadi risiko reputasi. Bank selalu menanggapi atas setiap terdapatnya pengaduan dan dilaporkan melalui media dari OJK secara tepat waktu. Koordinasi tindak lanjut pengaduan berjalan dengan baik. Namun demikian bank masih memiliki kelemahan dikarenakan bank belum sepenuhnya menyediakan media yang secara luas dapat dan mudah diakses oleh nasabah yang memungkinkan terdapatnya pengaduan yang belum dapat tersalurkan dan dapat diterima lengkap oleh bank. Bank menetapkan peringkat KPMR risiko reputasi pada tingkat Cukup memadai



PT BPR BKK JATENG
(Perseroda)

RISIKO STRATEJIK

Form Analisis Risiko Stratejik

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Sandi	Nama Komponen	Nilai	Analisis
1	Y	D01	Single	+	6100	Tingkat Risiko	4	Hasil penilaian Tingkat risiko Stratejik pada Semester I 2025 adalah Risiko Tinggi dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko memiliki tingkat Cukup Memadai. Pencapaian target bisnis secara kuantitatif maupun kualitatif masih terdapat beberapa deviasi pada beberapa indikator keungan utama. Hal ini tentunya akan menjadi evaluasi dan tindak lanjut perbaikan yang utama untuk memperbaiki tingkat risiko Stratejik bank menjadi lebih baik. Perlu ditingkatkan kompetensi pegawai dalam pemahaman produk dan transparansi terkait risiko pada setiap produk dan layanan. Meskipun belum memiliki sistem informasi yang dapat memantau perkembangan pengaduan dan penyelesaiannya secara real-time, bank sedang mengembangkan sistem informasi dan aplikasi untuk meningkatkan efisiensi strategi perStratejikan di lingkungan BPR. Evaluasi risiko aktifitas telah dilakukan di semua cabang, termasuk penilaian untuk mengukur dan memantau perkembangan strategi bisnis bank. Dengan adanya evaluasi ini, risiko stratejik bank dapat lebih terkendali.
2	Y	D01	Single	+	6200	Tingkat Risiko Inheren	4	Hasil Penilaian Tingkat Risiko Inheren Risiko Reputasi pada peringkat Tinggi. Pada penetapan strategi bisnis Bank tidak memiliki produk baru, pilihan strategi yang sesuai sumber daya yang dimiliki dengan tingkat keberhasilan yang tinggi, penyusunan strategi BPR telah mempertimbangan seluruh faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis BPR baik faktor internal maupun faktor eksternal, pencapaian target bisnis BPR memiliki deviasi yang rendah dibanding target kuantitatif dan sebagian besar target kualitatif telah tercapai.Bank BKK Jateng telah berhasil menerapkan lima strategi bisnis utama dalam Rencana Bisnis Bank (RBB), termasuk penguatan likuiditas, SDM, inovasi digital, efisiensi, dan fokus pada bisnis UKM. Meskipun capaian target kuantitatif belum optimal, sebagian besar target kualitatif tercapai. Bank perlu meningkatkan teknologi informasi untuk akses publik dan respons terhadap perubahan eksternal. Evaluasi ulang terhadap kebijakan tukin diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan.
3	Y	D01	Single	+	6300	Tingkat KPMR	3	Rencana kerja telah disusun dengan mempertimbangkan pengalaman sebelumnya dan fokus pada pengelolaan risiko, perlu perbaikan dalam kaji ulang independen terhadap kebijakan yang dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko stratejik, dinilai memadai dan telah diterapkan di seluruh area manajemen risiko dengan pemahaman yang baik dari pegawai. Sistem informasi untuk penilaian dan monitoring rencana stratejik masih dalam pengembangan dan belum optimal. Evaluasi monitoring kinerja telah dilakukan oleh Pengurus secara berkala namun belum memberikan dampak perbaikan kinerja secara keseluruhan. Arahkan dan strategi telah disusun dan disampaikan kepada seluruh unit kerja namun implementasi pelaksanaan masih lemah.

Form Kertas Kerja Risiko Inheren Strategik

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Sandi	Nama Komponen	Nilai	Keterangan
1	Y	D01	Single	+	6210	Penetapan strategi bisnis	3	Bank sudah melakukan 5 strategi bisnis yang dituangkan dalam RBB yaitu penguatan likuiditas, penguatan SDM, inovasi digital, efisiensi dan fokus pada bisnis UMKM, Pertanian, Joglo (Rumah), Perikanan dan mulai membuka pasar mikro Bank sudah menggunakan beanchmarking dengan industri sejenis baik Bank dan BPR lain dalam menentukan strategi bisnis. Terutama dalam melihat GRC, aset, damas, kredit dan laba. Bank sudah mempersiapkan kajian produk unggulan sesuai dengan masing-masing cabang di kabupaten yang disesuaikan dengan visi misi kepala daerah. Dari sisi layanan dan jaringan bank telah melakukan kajian lokasi untuk menentukan lokasi terbaik bagi bisnis Bank dan nasabah Sudah terpenuhi SDM pada sebagian besar unit kerja. Bank sudah membuat Cetak Biru Pengembangan SDM 2024-2028 dan memiliki kecukupan sumber daya yang memadai dalam mendukung pelaksanaan rencana strategis, yang tercermin dari kualitas dan kuantitas SDM yang terus ditingkatkan melalui program pelatihan berkelanjutan, serta ketersediaan infrastruktur dan teknologi yang mendukung operasional secara efisien. Dari sisi permodalan dan sumber dana, bank mampu menjaga likuiditas dan struktur pendanaan yang sehat untuk mendukung ekspansi bisnis dan pengembangan layanan. Bank telah melakukan analisa beban kerja pada seluruh unit kerja, minimal satu kali dalam setahun, untuk memastikan keseimbangan antara kapasitas SDM dengan target kinerja yang ditetapkan. Analisa ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait penyesuaian alokasi tugas, kebutuhan rekrutmen, serta pengembangan kompetensi pegawai guna mendukung pencapaian rencana strategis. Contoh kegiatan meliputi pengisian instrumen analisa beban kerja oleh masing-masing unit, evaluasi output kerja dibandingkan target, serta penyusunan rekomendasi perbaikan struktur kerja oleh tim SDM atau perencanaan. Akan dilakukan setiap triwulan terkait analisis potensi pasar. Dan akan berkoordinasi dengan divisi terkait
2	Y	D01	Single	+	6220	Penyusunan rencana bisnis	3	Bank BKK Jateng telah mengimplementasikan lima strategi bisnis dalam Rencana Bisnis Bank (RBB), termasuk penguatan likuiditas, SDM, inovasi digital, efisiensi, dan fokus pada bisnis UKM. Bank telah menggunakan benchmarking dengan lima BPR lainnya dalam menentukan strategi, terutama terkait dengan riset. Selanjutnya, bank telah melakukan kajian dengan menggunakan analisis pasar, seperti SWOT, Demand Supply Analysis, dan Cost and Benefit Analysis, termasuk dalam kajian pindah kantor yang mencakup analisis bisnis dan potensi bisnis. Meskipun SDM telah terpenuhi di beberapa unit kerja, ada kebutuhan untuk mengisi posisi kosong. Bank telah menyusun Cetak Biru Pengembangan SDM 2024-2028 dan telah melaksanakan sertifikasi kompetensi diri bagi PE di kantor pusat. Namun, bank masih perlu meningkatkan teknologi informasi yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Bank juga memiliki mekanisme pengawasan untuk mendeteksi kelemahan dan penyimpangan dalam pencapaian rencana strategis, meskipun perlu peningkatan dalam respons terhadap perubahan faktor eksternal.
3	Y	D01	Single	+	6221	Pertimbangan faktor eksternal dan internal dalam menyusun rencana dan model bisnis	3	Dalam menyusun strategi dan model bisnis telah mempertimbangkan faktor internal seperti kesiapan infrastruktur bisnis, SDM, permodalan dan juga dari faktor eksternal seperti kompetitor, bunga di pasar, isu dan pertumbuhan ekonomi, inflasi dll Bank telah menyiapkan 5 produk unggulan dalam berkompetisi dalam market yang disesuaikan dengan demand di masyarakat, Bank juga senantiasa melakukan upgrade kompetensi SDM untuk meningkatkan Jumlah SDM unggul. Serta penerapan KPI individu untuk mendapatkan SDM unggul (talent pool) Bank memiliki teknologi yang mengikuti perkembangan jama, seperti E wallet (keris) QRIS payment, Qris merchant dan proses untuk persetujuan mobile banking PT BPR BKK Jateng (Perseroda) pada dasarnya telah memiliki struktur organisasi yang lengkap dan mendukung pelaksanaan rencana strategis, dengan pengisian jabatan inti yang sesuai dengan kebutuhan operasional. Namun, masih terdapat perbaikan dalam hal pemerataan kualitas SDM, terutama pada aspek kompetensi dan pemenuhan kuota personel di unit-unit kerja Fungsi four eyes akan dilakukan untuk memenuhi fungsi preventif atau pencegahan. Pemeriksaan berkala pada Internal Audit mampu mendeteksi penyimpangan yang terjadi namun pemeriksaan post audit membuat waktu terdeteksi penyimpangan setelah kejadian terjadi Melakukan Penelitian Produk Terhadap Kinerja (Wilayah, NOA, OSC, NPL) dan Survey Pasar Setiap Triwulan Hal ini akan diupayakan dilakukan di triwulan keempat Melakukan Penelitian Terhadap Potensi Pasar (SWOT), Cost and Benefit, Identifikasi dan mitigasi 6 (Enam) Risiko Setiap Tahun Sampai dengan periode penilaian belum pernah dilakukan stresstest, periode ini Bank akan Menyusun Stresstest Dampak Perubahan Lingkungan Bisnis 1 (Satu) Kali Dalam Setahun Kesesuaian dan implementasi kebijakan dilakukan evaluasi Setiap Triwulan sekali atau minimal satu tahun sekali
4	Y	D01	Single	+	6222	Keunggulan kompetitif BPR dan ancaman dari kompetitor	3	Pertumbuhan DPK yang tergolong rendah, dibandingkan dengan kompetitor. Dan pertumbuhan kredit menurun dibandingkan periode sebelumnya. Hal tersebut dapat berdampak pada kinerja keuangan BPR. Bank telah menentukan target posisi Bank ditengah persaingan dan melakukan evaluasi capaian target posisi yg telah ditetapkan. Telah melakukan survei langsung terhadap nasabah dan masyarakat untuk mengetahui tingkat kepuasan, kebutuhan layanan, serta harapan terhadap fitur produk, Analisis penutupan rekening nasabah, serta BKK Jateng mulai menyiapkan pengembangan Layanan Digital seperti mobile banking. Analisa regionalnya dengan menggunakan tools analisis yaitu Identifikasi dan Penetapan Peer Group, Pengumpulan Data Kinerja Peer Group, Analisa Indikator Kinerja. Utama, Benchmarking Posisi Bisnis Bank, serta Identifikasi Faktor Pendukung dan Penghambat Kinerja

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Sandi	Nama Komponen	Nilai	Keterangan
5	Y	D01	Single	+	6230	Pencapaian target bisnis	4	Capaian target kuantitatif rendah dengan sebagian besar target kualitatif tercapai belum memberikan kesejahteraan bagi pegawai. Perlu dilakukan evaluasi ulang terhadap kebijakan tukin untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. BPR memiliki rekam jejak yang baik dalam menerapkan keputusan strategis terkait keempat faktor penilaian. Beberapa target kuantitatif seperti CAR, CR, BOPO, ROA, dan NIM tidak mencapai target, yang berdampak pada aspek kualitatif dalam pencapaian target.
6	Y	D01	Single	+	6231	Perbandingan realisasi dan target indikator keuangan utama sesuai ketentuan rencana bisnis BPR	3	Deviasi tinggi karena laba masih rendah dan jauh dari target.Pencapaian target Aset, damas, kredit, pendapatan, biaya, dan Laba telah berjalan efektif. Namun demikian, realisasi pendapatan dan laba belum optimal. Hal tersebut akibat adanya peningkatan biaya, khususnya dari pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).Rasio modal inti tercapai sebesar 99,54% dari RBB.Saldo Kredit bermasalah pada Juni 2025 tercapai 110% dari RBB.Laba sebelum pajak periode Juni 2025 tercapai 106,62% dari RBB.Capaian NIM periode Juni 2025 tercapai 81,10% dari RBB.Realisasi Tabungan periode Juni 2025 sebesar Rp 1.478.227.518.523,43, realisasi damas sebesar Rp 1.896.100.530.074,43. Komposisi sebesar 77,96%.Realisasi Deposito periode Juni 2025 sebesar Rp 417.873.011.551, realisasi damas sebesar Rp 1.896.100.530.074,43. Komposisi sebesar 22,04%.Pendapatan Bunga Kontraktual sebesar Rp 113.603.813.502,54 dan Total Aset Produktif 1.120.225.780.772,57 komposisinya sebesar 10,14%.Pendapatan Bunga Kontraktual sebesar Rp 113.603.813.502,54 dan pendapatan sebesar Rp 194.132.207.977,31 komposisinya sebesar 58,52%.Biaya Tenaga Kerja sebesar Rp 65.680.062.621,66 dan Beban Operasional sebesar 220.943.961.753,67 komposisinya sebesar 29,73%.Aset bulan Juni 2025 sebesar Rp. 2.328.631.007.760,96. Maret 2025 sebesar Rp. 2.282.714.150.142,36 Terjadi kenaikan sebesar 2,01%.Kredit bulan Juni 2025 sebesar Rp. 1.621.685.615.803,19 Maret 2025 sebesar Rp. 2.282.714.150.142,36. Terjadi penurunan sebesar -1,79%.Damas bulan Juni 2025 sebesar Rp. 1.896.100.530.074,43 Maret 2025 sebesar Rp. 1.861.598.902.197,12. Terjadi kenaikan 1,85%.Laba bulan Juni 2025 sebesar Rp. -27.755.061.968,039 Maret 2025 sebesar Rp. -46.861.591.660,99. Terjadi penurunan -40,77%.Pertumbuhan Penyaluran pada Sektor Usaha Produktif periode Juni 2025 sebesar Rp 1.040.937.108.834,24 periode Maret 2025 sebesar Rp 1.056.421.533.639,99, Terjadi penurunan -1,47%.Realisasi penerimaan hapus buku periode Juni 2025 tercapai 96,87% dari RBB.
7	Y	D01	Single	+	6232	Rekam jejak (track record) keberhasilan BPR dalam menerapkan keputusan strategis terkait dengan faktor pengembangan produk/jasa baru, perubahan sasaran bisnis, investasi strategis, rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, serta pencapaian target bisnis	4	BPR memiliki rekam jejak yang cukup baik dalam menerapkan keputusan strategis terkait keempat faktor penilaian rekam jejakTerdapat beberapa target kuantitatif atas CAR, CR, BOPO, ROA, NIM yang tidak mencapai target Terhadap beberapa target kualitatif yang tidak mencapai target, berdampak pada aspek kualitatif lain dalam pencapaian targetRealisasi Pemenuhan Jumlah SDM Terhadap Target RBB yaitu tercapai 10 dari 12 sdm atau sebesar 83,33% dari RBB (Sumber : Divisi SDM dan Umum).Realisasi Waktu pemenuhan yaitu triwulan 2 dan sesuai target (Sumber : Divisi SDM dan Umum).Sampai dengan Juni 2025 terdapat 1.213 pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dari jumlah total pegawai sebanyak 1.481 orang (81,90%)Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Usaha Baru Terhadap Target masih tercapai sebesar < 70% dari RBB Penyaluran kredit masih terfokus pada kegiatan usaha pada sektor ekonomi yang dikuasai.Realisasi pemindahan jaringan kantor tercapai 4 kantor yg telah selesai di relokasi, diantaranya yaitu KC Rembang, KC Boyolali, Kankas Margasari KC Tegal, dan Kankas Kedungbanteng KC Tegal. persentase pencapaian 19,05% dari total 21 kantor yang seharusnya di relokasi
8	Y	D01	Single	+	6299	Lainnya	3	Evaluasi Isu Strategik Akibat Perubahan Lingkungan Bisnis dilakukan setiap TriwulanEvaluasi Pelaksanaan Tugas Core dan Supporting RTU dilakukan setiap TriwulanEvaluasi Capaian Target RBB dilakukan setiap 1 bulanEvaluasi Penyusunan dan Penerapan Rencana Kontinjensi dilakukan setiap Triwulan
9	Y	D01	Single	+	6292	Tingkat Risiko Inheren Strategik	4	Hasil Penilaian Tingkat Risiko Inheren Risiko Reputasi pada peringkat Tinggi. Pada penetapan strategi bisnis Bank tidak memiliki produk baru, pilihan strategi yang sesuai sumber daya yang dimiliki dengan tingkat keberhasilan yang tinggi, penyusunan strategi BPR telah mempertimbangan seluruh faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis BPR baik faktor internal maupun faktor eksternal, pencapaian target bisnis BPR memiliki deviasi yang rendah dibanding target kuantitatif dan sebagian besar target kualitatif telah tercapai.Bank BKK Jateng telah berhasil menerapkan lima strategi bisnis utama dalam Rencana Bisnis Bank (RBB), termasuk penguatan likuiditas, SDM, inovasi digital, efisiensi, dan fokus pada bisnis UKM. Meskipun capaian target kuantitatif belum optimal, sebagian besar target kualitatif tercapai. Bank perlu meningkatkan teknologi informasi untuk akses publik dan respons terhadap perubahan eksternal. Evaluasi ulang terhadap kebijakan tukin diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan.

Form Kertas Kerja KPMR Stratejik

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Sandi	Nama Komponen	Nilai	Keterangan
1	Y	D01	Single	+	6310	Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris	3	Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan Manajemen Risiko Stratejik melalui berbagai forum rapat dan monitoring tindak lanjutnya, namun belum optimal terutama dalam pembahasan dan penetapan strategi pengelolaan risiko. Evaluasi tersebut melibatkan Direksi dan jajaran serta didukung dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
2	Y	D01	Single	+	6311	Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko stratejik yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	3	Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Stratejik pada forum rapat Pengurus, rapat dengan Pejabat Eksekutif, rapat Komite Manajemen Risiko, rapat Komite Pemantau Risiko, forum exit meeting hasil pemeriksaan SKAI dan memantau tindak lanjut evaluasi penerapan manajemen risiko stratejik namun pelaksanaan dari evaluasi tersebut belum optimal khususnya pembahasan dan penetapan strategi pengelolaan manajemen risiko dengan merujuk pada surat keputusan tentang penetapan limit risiko dan toleransi yang telah diputuskan..Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Stratejik pada forum rapat Pengurus, rapat dengan Pejabat Eksekutif, rapat Komite Manajemen Risiko, rapat Komite Pemantau Risiko, forum exit meeting hasil pemeriksaan SKAI dan memantau tindak lanjut evaluasi penerapan manajemen risiko stratejik namun pelaksanaan dari evaluasi tersebut belum optimal khususnya pembahasan dan penetapan strategi pengelolaan manajemen risiko dengan merujuk pada surat keputusan tentang penetapan limit risiko dan toleransi yang telah diputuskan.Dewan Komisaris telah mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen risiko Stratejik dalam menjalankan tugas dan fungsinya.Dewan Komisaris telah memastikan Direksi dan jajarannya dalam penerapan manajemen risiko Stratejik sesuai kebijakan manajemen risiko yang ditetapkan.
3	Y	D01	Single	+	6312	Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko stratejik secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban Direksi dalam penerapan manajemen risiko Stratejik secara tertulis dan dalam forum rapat .Dewan Komisaris cukup memberikan masukan dan pengarahannya penerapan manajemen risiko Stratejik kepada Direksi secara tertulis dan forum rapat.Dewan Komisaris melakukan monitoring tindak lanjut evaluasi pertanggungjawaban Direksi penerapan manajemen risiko Stratejik.Dewan Komisaris secara konsisten mengembangkan budaya sadar risiko Stratejik.Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
4	Y	D01	Single	+	6313	Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko stratejik, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	3	Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen risiko Stratejik .Ketentuan dan kebijakan manajemen risiko Stratejik telah disetujui dan ditetapkan oleh Direksi meliputi PKPB, SK Direksi, SOP PerStratejikan, SE Direksi, SK BWMK.Direksi telah melakukan evaluasi ketentuan dan kebijakan, melalui rapat serta melakukan kunjungan langsung ke kantor cabang secara berkala untuk memantau capaian kinerja dari aspek kuantitatif maupun kualitatif. Evaluasi capaian cabang juga dilakukan setiap triwulanan.
5	Y	D01	Single	+	6314	Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi Risiko stratejik, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko stratejik terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	2	Direksi secara konsisten mengambil tindakan yang perlu dilakukan dalam mitigasi risiko Stratejik.Secara berkala Direksi menyampaikan tindakan dan kebijakan dalam rangka pengendalian dan mitigasi risiko kepada seluruh unit kerja.Secara konsisten Direksi telah mengembangkan budaya sadar risiko Stratejik kepada seluruh unit kerja.Secara berkala Direksi melakukan review atas kebijakan pendelegasian kewenangan yang diberikan.Direksi telah melakukan evaluasi terhadap usulan transaksi yang diterima sebelum memberikan persetujuan. .
6	Y	D01	Single	+	6315	Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi stratejik dan fungsi manajemen risiko stratejik?	3	Fungsi Second Line seperti SKMR dan SKK telah terpisah dari Unit Kerja perStratejikan dan melaksanakan tugasnya secara independen.Kecukupan organisasi di unit kerja perStratejikan telah didukung dengan kompetensi yang cukup baik.Kecukupan organisasi di satuan manajemen risiko perStratejikan telah didukung dengan kompetensi yang cukup baik.Proses perstratejikan telah dijalankan dan cukup sesuai dengan ketentuan oleh masing-masing unit kerja secara independen.

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Sandi	Nama Komponen	Nilai	Keterangan
7	Y	D01	Single	+	6316	Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko stratejik?	3	SOTK dan pengelolaan SDM telah sesuai dengan penerapan manajemen risiko stratejik perusahaan yang berlaku. Meskipun saat ini masih terdapat kekosongan di beberapa posisi jabatan..Pedoman pengelolaan SDM dilakukan review secara berkala.Direksi telah melakukan evaluasi ketercukupan jumlah SDM bidang perStratejikan .
8	Y	D01	Single	+	6320	Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	3	Rencana kerja telah disusun dengan merujuk pada penerapan manajemen risiko stratejik, mempertimbangkan pengalaman dan capaian sebelumnya serta fokus pada pengelolaan dan mitigasi risiko. Namun, terdapat kekurangan dalam kaji ulang independen terhadap kebijakan manajemen risiko stratejik yang akan dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko stratejik dianggap memadai dan telah tersedia untuk semua area manajemen risiko, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai. Unit kerja telah memahami dan melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap limit dan toleransi risiko yang telah ditetapkan, termasuk mengenai produk dan aktivitas baru serta risiko yang terkait. Selain itu, kebijakan penetapan limit dan toleransi risiko telah diperbaharui sesuai dengan kondisi usaha dan perubahan faktor eksternal yang relevan, serta didokumentasikan dengan baik untuk audit trail.
9	Y	D01	Single	+	6321	Apakah BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko stratejik yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	2	Dalam penyusunan rencana kerja sudah merujuk pada penerapan manajemen risiko Stratejik.Pada penyusunan rencana kerja sudah mendasarkan pada pengalaman dan capaian sebelumnya dengan tetap memperhatikan pengelolaan dan mitigasi risiko Stratejik.Kurang adanya kaji ulang oleh pihak yang independen pada kebijakan manajemen risiko Stratejik yang akan dilaporkan ke Dewan Komisaris dan Direksi.Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko Stratejik memadai dan telah tersedia untuk seluruh area Manajemen Risiko untuk Risiko Stratejik, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai.Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko ditetapkan telah sesuai dengan sasaran strategi dan strategi bisnis.
10	Y	D01	Single	+	6322	Apakah BPR: ● Memiliki prosedur Manajemen Risiko stratejik dan penetapan limit Risiko stratejik yang ditetapkan oleh Direksi; ● Melaksanakan prosedur Manajemen Risiko stratejik dan penetapan limit Risiko stratejik secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan ● Melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko stratejik dan penetapan limit Risiko stratejik secara berkala?	2	Unit Kerja cukup memahami penerapan limit dan toleransi risiko Stratejik yang ditetapkan dalam SK Direksi. Unit Kerja melakukan pengawasan monitoring limit dan toleransi risiko Stratejik.Unit Kerja melakukan evaluasi apabila terjadi pelampauan limit dan toleransi risiko yang ditetapkan.SDM cukup memahami ketentuan limit dan toleransi risiko yang ditetapkan dan menjadi acuan dalam pengendalian manajemen risiko Stratejik.Kebijakan penetapan limit dan toleransi risiko telah dilakukan pengkinian sesuai dengan kondisi usaha dan perkembangan faktor eksternal yang berpengaruh pada ketentuan limit yang telah ditetapkan.Perumusan penentuan limit dan toleransi risiko dilakukan sesuai dengan arah dan strategi perStratejikan.penetapan limit telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan didokumentasikan sehingga memudahkan untuk dilakukan audit trail.Penetapan limit dan toleransi risiko meliputi penetapan limit secara keseluruhan, per jenis risiko, dan per aktivitas fungsional yang memiliki exposure risiko.
11	Y	D01	Single	+	6323	Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko stratejik sesuai dengan ketentuan?	3	Unit kerja cukup memahami ketentuan dan prosedur produk dan aktivitas baru dan risiko yang melekat pada setiap produk dan mitigasinya.Ketentuan kebijakan produk dan aktivitas cukup didukung dengan ketentuan dan petunjuk kerja yang lengkap.Ketentuan kebijakan produk dilakukan evaluasi secara berkala.

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Sandi	Nama Komponen	Nilai	Keterangan
12	Y	D01	Single	+	6330	Kecukupan Proses dan Sistem	3	Sistem informasi untuk penilaian dan rencana perstrategikan masih dalam pengembangan dan belum matang sepenuhnya, meskipun sistem informasi risiko strategik cukup mudah diakses dengan laporan yang lengkap. Kemampuan sistem informasi ini diharapkan dapat mendukung pelaporan risiko strategik secara cepat dan lengkap, serta meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen risiko, termasuk produk, layanan, limit, penilaian, contingency plan, dan fungsi pengawasan. Meskipun demikian, aktivitas perStrategikan oleh seluruh SDM masih kurang berpedoman pada penerapan manajemen risiko strategik, meskipun organisasi secara umum mengedepankan prinsip kehati-hatian. Proses perStrategikan didukung dengan verifikasi dual control dan dokumen yang memadai, serta pengambilan keputusan dilakukan secara transparan. Manajemen risiko strategik telah didukung dengan data strategis yang akurat dan informatif, dengan analisis karakteristik risiko strategik pada produk dan layanan. Evaluasi terhadap asumsi, data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko strategik telah dilakukan, termasuk penyesuaian jika terdapat perubahan material pada layanan, produk, dan faktor risiko. Pemantauan terhadap eksposur risiko strategik telah dilakukan dengan evaluasi, dan perubahan material dalam faktor risiko strategik mengharuskan penyesuaian dalam pelaporan.
13	Y	D01	Single	+	6331	Apakah BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko strategik yang melekat pada kegiatan usaha BPR?	3	Seluruh SDM yang melakukan aktivitas perStrategikan kurang berpedoman pada penerapan manajemen risiko Strategik.Seluruh organisasi cukup mampu dan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas perStrategikan.Dalam proses perStrategikan sudah dilakukan verifikasi dual control dan didukung dengan dokumen yang memadai.Dalam proses pengambilan keputusan bidang perStrategikan dilakukan secara pembahasan bersama dan dilakukan secara transparan .Dalam proses manajemen risiko Strategik telah didukung dengan data Strategik yang akurat dan informatif.Dalam proses manajemen risiko Strategik telah melakukan analisa karakteristik risiko Strategik yang melekat pada produk dan layanan.Kesesuaian asumsi, data, dan prosedur yang digunkan untuk mengukur risiko Strategik telah dilakukan evaluasi.Dalam melakukan pengukuran risiko Strategik telah dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan yang material pada kegiatan layanan, produk, dan faktor risiko.Dalam melakukan pemantauan risiko Strategik telah dilakukan evaluasi terhadap eksposur risiko Strategik.Terdapat perubahan yang material dalam faktor risiko Strategik apakah juga dilakukan penyesuaian pelaporan.
14	Y	D01	Single	+	6332	Apakah BPR telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko strategik serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	3	Sistem informasi untuk mendukung proses penilaian dan rencana perstrategikan masih dalam pengembangan dan belum matang sepenuhnya.Sistem informasi risiko Strategik cukup mudah diakses serta memiliki laporan yang lengkap meskipun masih dalam pengembangan.Sistem informasi yang dimiliki nantinya akan mampu mendukung pelaporan risiko Strategik yang lengkap dan cepat.Sistem informasi yang dimiliki cukup mampu meingkatkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen risiko Strategik (terkait produk, layanan, limit, penilaian, contingency plan, dan fungsi pengawasan).Sistem informasi yang dimiliki menyajikan informasi realisasi penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan (Risk Control dan tindak lanjut perbaikannya).

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Sandi	Nama Komponen	Nilai	Keterangan
15	Y	D01	Single	+	6340	Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	3	Tingkat Risiko yang ditetapkan pada Penilaian Sistem Pengendalian yang Menyeluruh pada BPR adalah 2,70
16	Y	D01	Single	+	6341	Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko stratejik, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	3	SKAI telah melakukan audit dan evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko strategis di seluruh cabang atau unit kerja yang relevan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa strategi manajemen risiko telah diterapkan secara konsisten dan efektif sesuai dengan kebijakan perusahaan..SKAI telah melaksanakan proses monitoring terhadap semua temuan yang diidentifikasi. Langkah-langkah tindak lanjut yang telah diambil harus terdokumentasi secara jelas, serta dilakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan bahwa rekomendasi perbaikan atau tindakan pencegahan telah dilaksanakan secara efektif. Laporan hasil monitoring dan implementasi tindak lanjut harus disampaikan secara rutin kepada Direktur Utama untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen risiko strategis organisasi..SKAI telah memastikan adanya proses yang jelas dalam penetapan wewenang dan tanggung jawab terkait manajemen risiko strategis. Pengawasan ini tidak hanya memastikan akuntabilitas yang tepat dalam manajemen risiko, tetapi juga memungkinkan untuk peningkatan terus-menerus dalam praktik dan kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan..SKAI memastikan bahwa semua aspek tersebut telah rutin diaudit dan dievaluasi secara menyeluruh. Pengawasan terhadap pemisahan fungsi memastikan tidak adanya konflik kepentingan yang merugikan, sementara pengawasan terhadap struktur organisasi memastikan bahwa tanggung jawab dan wewenang terdistribusi dengan jelas dan sesuai..SKAI telah melakukan verifikasi dan review terhadap sistem pengendalian intern dalam manajemen risiko Stratejik. SKAI dapat memastikan bahwa pengendalian intern yang ada cukup kuat dan sesuai dengan standar terbaik, sehingga membantu organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya dengan lebih baik dan mengurangi potensi risiko yang dapat mempengaruhi kinerja jangka panjang..
17	Y	D01	Single	+	6342	Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko stratejik telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	3	Unit kerja pengendalian telah sepenuhnya terpisah dari unit kerja operasional yang terlibat dalam strategi perusahaan. Pemisahan ini penting untuk memastikan bahwa fungsi pengendalian intern dapat beroperasi secara independen dan obyektif dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan efektivitas kontrol yang diterapkan untuk mendukung strategi perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dapat mengoptimalkan pelaksanaan strategi dan meminimalkan risiko konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan strategis jangka panjangnya..Unit kerja yang bertanggung jawab atas strategi perusahaan agar lebih mampu memahami dan menjalankan tugas serta tanggung jawab mereka sesuai dengan tupoksinya. Hal ini mencakup implementasi dan eksekusi rencana strategis yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan perusahaan dalam jangka panjang. SKAI telah memverifikasi bahwa unit kerja tersebut perlu mengembangkan pemahaman yang mendalam mengenai strategi perusahaan dan mampu mengeksekusinya dengan tepat sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Dengan memastikan konsistensi dalam penerapan tupoksi mereka, unit kerja perstrategian dapat memainkan peran kritis dalam mengelola risiko strategis dan mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan secara efektif..
18	Y	D01	Single	+	6350	Tingkat KPMR	3	Rencana kerja telah disusun dengan mempertimbangkan pengalaman sebelumnya dan fokus pada pengelolaan risiko, perlu perbaikan dalam kaji ulang independen terhadap kebijakan yang dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko stratejik, dinilai memadai dan telah diterapkan di seluruh area manajemen risiko dengan pemahaman yang baik dari pegawai. Sistem informasi untuk penilaian dan monitoring rencana stratejik masih dalam pengembangan dan belum optimal. Evaluasi monitoring kinerja telah dilakukan oleh Pengurus secara berkala namun belum memberikan dampak perbaikan kinerja secara keseluruhan. Arahan dan strategi telah disusun dan disampaikan kepada seluruh unit kerja namun implementasi pelaksanaan masih lemah.



PT BPR BKK JATENG
(Perseroda)

TINGKAT KESEHATAN BANK

Form Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Sandi	Faktor/Komponen Penilaian	Penilaian Posisi Laporan				Penilaian Posisi Sebelumnya			
							Rasio (%)	Peringkat	Bobot (%)	Nilai Faktor	Rasio (%)	Peringkat	Bobot (%)	Nilai Faktor
1	Y	D01	Single	+	7100	Profil Risiko		4	25	1.00		4	25	1.00
2	Y	D01	Single	+	7200	Tata Kelola		2	30	0.60		3	30	0.90
3	Y	D01	Single	+	7300	Rentabilitas		4	15	0.60		2	15	0.30
4	Y	D01	Single	+	7310	ROA	-2.36	5			2.03	1		
5	Y	D01	Single	+	7311	BOPO	113.86	5			82.87	1		
6	Y	D01	Single	+	7312	NIM	8.29	2			8.11	2		
7	Y	D01	Single	+	7400	Permodalan		3	30	0.90		2	30	0.60
8	Y	D01	Single	+	7410	KPMM	43.34	1			43.14	1		
9	Y	D01	Single	+	7411	Modal Inti/Aset Produktif Bermasalah Netto	91.89	5			161.77	3		
10	Y	D01	Single	+	7500	Nilai Komposit				3.10				2.80
11	Y	D01	Single	+	7600	Peringkat Komposit				3.00				3.00
12	Y	F01	Peringkat Komposit 3 (PK-3) mencerminkan kondisi BPR dan BPRS yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain. Hal ini tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan tata kelola, rentabilitas, dan permodalan, yang secara umum cukup baik. Jika terdapat kelemahan baik dari sisi internal maupun eksternal maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan jika tidak berhasil diatasi dengan baik oleh manajemen maka dapat mengganggu kelangsungan usaha BPR dan BPRS.											
13	Y	F02	Penyusunan Laporan Profil Risiko melibatkan seluruh RTU melalui pembahasan forum Rapat Komite Manajemen Risiko serta direview oleh Komite Pemantau Risiko untuk menetapkan peringkat risiko komposite yang wajar. Berdasarkan hasil penilaian diperoleh penilaian Profil Risiko Semester I 2025 sebesar 3.40 dengan Peringkat Risiko Tinggi. Nilai Risiko mengalami penurunan dari periode Semester II 2024 merujuk pada hasil penilaian yang disampaikan OJK 3,64 (risiko tinggi). Risiko Kredit memiliki peringkat Sangat Tinggi sedangkan Risiko Operasional dan Risiko Kepatuhan memiliki peringkat Sedang mengalami perbaikan dibandingkan periode Semester II 2024. Risiko Likuiditas dan Risiko Reputasi stabil di peringkat Rendah, dan Risiko Stratejik menjadi peringkat Risiko Tinggi. Profil Risiko Kredit menjadi faktor utama yang mempengaruhi risiko stratejik, pilar kualitas kredit sangat mempengaruhi Risiko Kredit secara keseluruhan. Manajemen harus menyusun rencana tindak perbaikan kualitas kredit dan kualitas monitoring kredit mencegah migrasi penurunan kualitas kredit. Pada Risiko Operasional dipengaruhi kekosongan jabatan yakni Direktur Pemasaran dan Direktur Kepatuhan, sehingga berpengaruh pada kualitas kinerja struktur dibawahnya dan penerapan Tata Kelola perusahaan. Pemenuhan pejabat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu dilakukan untuk memperbaiki risiko Operasional. Pada Risiko Kepatuhan perlu dilakukan perbaikan pada peningkatan penerapan budaya sadar risiko dan perbaikan proses rule making the rule. Risiko Stratejik mengalami kenaikan, khususnya kualitas aset yang berdampak keuangan dibandingkan peer group BPR, meskipun target indikator rasio keuangan di Semester I 2025 telah sesuai dengan RBB di Semester I. Mitigasi risiko di tahun 2025 harus difokuskan pada strategi perbaikan kualitas kredit khususnya pada debitur inti dan penurunan beban CKPN selain perbaikan kualitas SDM dengan menerapkan pedoman pengelolaan manajemen SDM.											

14	Y	F03	Penerapan Tata Kelola oleh PT BPR BKK Jateng (Perseroda) pada Semester I Tahun 2025 dinilai baik, dengan pemenuhan yang memadai terhadap prinsip-prinsip dasar tata kelola. Beberapa kelemahan struktural, seperti kekosongan pada posisi Direksi serta penguatan fungsi pengawasan internal dan kepatuhan, perlu segera ditindaklanjuti. Bank menyadari perlunya perbaikan dan komitmen berkelanjutan untuk mengimplementasikan tata kelola secara menyeluruh dalam setiap proses bisnis dan operasional, guna memastikan keberlangsungan usaha yang sehat dan berkelanjutan.
15	Y	F04	Rentabilitas Kurang Memadai dengan Peringkat 4 dengan kondisi Sumber Pendapatan Utama (Core Earning) dibandingkan Non Pendapatan Utama (Non Core Earning) memiliki Sumber pendapatan utama dari Core Earnings Dominan yaitu > 80% sd ≤ 90% yaitu 81.53%, Kualitas Core Earning (NPL Gross) memiliki Pendukung Core Earnings Tidak Stabil NPL Gross > 20% yaitu 26.84%, Sumber Utama Pendapatan atau Core Earnings dari Bunga Kontraktual Kredit terhadap Total Core Earnings Per Periode Penilaian memiliki Sumber Pendapatan Bunga Kontraktual Kredit di Core Earnings Dominan mencapai > 80% sd ≤ 90% yaitu 84.65%, Rata-rata Pertumbuhan NIM, BOPO, ROA, dan ROE 3 tahun terakhir (per periode penilaian) memiliki Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Bunga terhadap Biaya Bunga (NIM) 3 tahun terakhir (per akhir periode penilaian) 4.5% dan Tingkat Kesehatan NIM per periode penilaian Sehat, Rata-rata Rasio Pertumbuhan Biaya Operasional Dibanding Pendapatan Operasional (BOPO) 3 tahun terakhir (per akhir periode penilaian) 12.5% dan Tingkat Kesehatan rasio BOPO periode penilaian tergolong Tidak Sehat, Rata-rata Pertumbuhan Rasio Return On Aset (ROA) 3 tahun terakhir (per akhir periode penilaian) -118.05% dan Tingkat Kesehatan ROA per periode penilaian tergolong Tidak Sehat, Rata-rata Pertumbuhan Rasio Laba Kotor Terhadap Modal Sendiri (ROE) 3 tahun terakhir (per akhir periode penilaian) -40.63% dan Tingkat Kesehatan ROE tergolong Tidak Sehat, Rata-rata Pertumbuhan Laba Kotor (Disetahunkan) Terhadap Saldo Aset Produktif (Aset Produktif per periode penilaian) selama 3 tahun terakhir memiliki Rasio Laba Kotor Terhadap Aset Produktif Menurun ≤ -3% yaitu -1.38%, Rasio ROA, BOPO, dan NIM dibandingkan dengan Peer Group (PT BPR Bank BAPAS 69, PT BPR BKK Purwodadi, dan PT BPR Gunung Rizki Pusaka Utama) memiliki Rasio ROA BPR Lebih Rendah > -50% dari Rasio ROA Peer Group, dan Rasio ROA tergolong Minimal Kurang Sehat. Hasil Penilaian Perbandingan ROA BPR terhadap Peer Group -174.45% dan Tingkat Kesehatan ROA BPR Tergolong Tidak Sehat, Rasio BOPO BPR Lebih Tinggi > 20% dari Rasio BOPO Peer Group dan Rasio BOPO Minimal Tidak Sehat. Hasil Penilaian Rasio BOPO BPR Terhadap Peer Group 48.82% dan Tingkat Kesehatan BOPO BPR Tergolong Tidak Sehat, Rasio NIM BPR Setidaknya Seiring Sama Dengan Rasio NIM Peer Group dan Rasio NIM BPR tergolong Minimal Cukup Sehat Hasil Penilaian Rasio NIM BPR Terhadap Peer Group -1.43% dan Tingkat Kesehatan NIM BPR Tergolong Sehat, Pencapaian Target Laba Sebelum Pajak (Gross) memiliki Realisasi Laba Tidak Melampaui target sebesar ≥ 90% sd < 100% dari RBB. Terdapat Tekanan Terhadap Kinerja Laba yang Berpotensi Menyebabkan Penurunan Laba yaitu 93.79%, dan terkait Perbandingan Pertumbuhan Kredit yang Diberikan dengan Pertumbuhan Kredit yang Diberikan Peer Group, per Periode Penilaian (atau minimal dalam 6 bulan terakhir) memiliki Realisasi Pertumbuhan Kredit (KYD) Negatif atau Lebih Rendah dari Rata-rata Pertumbuhan Kredit Peer Group yaitu -2.62%
16	Y	F05	Permodalan Cukup Memadai dengan Peringkat 3 dengan kondisi Rata-rata Pengelolaan ATMR Selama Periode Penilaian (Saldo KYD Neto dengan Bobot 100% terhadap Aset Tertimbang) memiliki Saldo Kredit Bobot Risiko di ATMR 100% netto Terhadap ATMR > 25% yaitu 30.68%, Pertumbuhan KPMM selama periode penilaian memiliki Rasio Permodalan (KPMM) Selama Periode Penilaian Pertumbuhan Stabil ≤ 10% yaitu 0.48%, Rata-rata Rasio Aset Kualitas Tinggi Terhadap ATMR memiliki Rasio Kredit Kualitas Tinggi terhadap ATMR > 90% yaitu 166.4%, Akses Permodalan memiliki Akses sumber pendanaan permodalan BPR Sangat Memadai, Terdapat 2 (dua) Sumber Pendanaan yang Dapat Ditarik Dalam Kurun Waktu Pendek Sampai Dengan 3 (tiga) bulan, dan terkait Dukungan Permodalan Terdapat Tambahan Setoran Modal dari Pemegang Saham Setiap Tahun > 0.3% dari Modal BPR dengan rata-rata 2.27%



PT BPR BKK JATENG
(Perseroda)

PROFIL RISIKO FINAL KONSOLIDASI



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

(PROFIL NILAI)

Risiko Kredit							
Periode pelaporan				Periode Sebelumnya			
Risiko Inheren	Risiko KPMR	Tingkat Risiko	Kualitas Manrisk	Risiko Inheren	Risiko KPMR	Tingkat Risiko	Kualitas Manrisk
4.39	3.35	4.63	Risiko Sangat Tinggi (Dilakukan kaji ulang menyeluruh, rencana tindak dilaporkan bulanan)	3.92	3.35	4.00	Risiko Tinggi (Dilakukan kaji ulang menyeluruh, rencana tindak dilaporkan triwulanan)
Sangat Tinggi	Kurang Memadai	Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi (Dilakukan kaji ulang menyeluruh, rencana tindak dilaporkan bulanan)	Tinggi	Kurang Memadai	Tinggi	Risiko Tinggi (Dilakukan kaji ulang menyeluruh, rencana tindak dilaporkan triwulanan)

Risiko Operasional							
Periode pelaporan				Periode Sebelumnya			
Risiko Inheren	Risiko KPMR	Tingkat Risiko	Kualitas Manrisk	Risiko Inheren	Risiko KPMR	Tingkat Risiko	Kualitas Manrisk
3.17	3.35	3.08	Risiko Sedang (Dilakukan kaji ulang terbatas, rencana tindak dilaporkan triwulanan)	3.29	3.35	4.00	Risiko Tinggi (Dilakukan kaji ulang menyeluruh, rencana tindak dilaporkan triwulanan)
Sedang	Kurang Memadai	Sedang	Risiko Sedang (Dilakukan kaji ulang terbatas, rencana tindak dilaporkan triwulanan)	Tinggi	Kurang Memadai	Tinggi	Risiko Tinggi (Dilakukan kaji ulang menyeluruh, rencana tindak dilaporkan triwulanan)

Risiko Kepatuhan							
Periode pelaporan				Periode Sebelumnya			
Risiko Inheren	Risiko KPMR	Tingkat Risiko	Kualitas Manrisk	Risiko Inheren	Risiko KPMR	Tingkat Risiko	Kualitas Manrisk
2.71	3.35	3.08	Risiko Sedang (Dilakukan kaji ulang terbatas, rencana tindak dilaporkan triwulanan)	3.37	3.30	4.00	Risiko Tinggi (Dilakukan kaji ulang menyeluruh, rencana tindak dilaporkan triwulanan)



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

Sedang	Kurang Memadai	Sedang	Risiko Sedang (Dilakukan kaji ulang terbatas, rencana tindak dilaporkan triwulanan)	Tinggi	Kurang Memadai	Tinggi	Risiko Tinggi (Dilakukan kaji ulang menyeluruh, rencana tindak dilaporkan triwulanan)
---------------	-----------------------	---------------	--	---------------	-----------------------	---------------	--



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

Risiko Likuiditas

Periode pelaporan				Periode Sebelumnya			
Risiko Inheren	Risiko KPMR	Tingkat Risiko	Kualitas Manrisk	Risiko Inheren	Risiko KPMR	Tingkat Risiko	Kualitas Manrisk
2.17	2.96	1.96	Risiko Rendah	2.17	2.96	1.96	Risiko Rendah
Rendah	Cukup Memadai	Rendah	Risiko Rendah	Rendah	Cukup Memadai	Rendah	Risiko Rendah

Risiko Reputasi

Periode pelaporan				Periode Sebelumnya			
Risiko Inheren	Risiko KPMR	Tingkat Risiko	Kualitas Manrisk	Risiko Inheren	Risiko KPMR	Tingkat Risiko	Kualitas Manrisk
2.17	3.00	1.96	Risiko Rendah	2.17	3.00	1.96	Risiko Rendah
Rendah	Cukup Memadai	Rendah	Risiko Rendah	Rendah	Cukup Memadai	Rendah	Risiko Rendah

Risiko Strategik

Periode pelaporan				Periode Sebelumnya			
Risiko Inheren	Risiko KPMR	Tingkat Risiko	Kualitas Manrisk	Risiko Inheren	Risiko KPMR	Tingkat Risiko	Kualitas Manrisk
3.37	2.70	3.50	Risiko Tinggi (Dilakukan kaji ulang terbatas, rencana tindak dilaporkan triwulanan)	3.04	2.80	2.92	Risiko Sedang (Dilakukan kaji ulang terbatas, rencana tindak dilaporkan semesteran)
Tinggi	Cukup Memadai	Tinggi	Risiko Tinggi (Dilakukan kaji ulang terbatas, rencana tindak dilaporkan triwulanan)	Sedang	Cukup Memadai	Sedang	Risiko Sedang (Dilakukan kaji ulang terbatas, rencana tindak dilaporkan semesteran)
Peringkat Risiko		3.40	Tinggi	Dikutip dari laporan sebelumnya		3.64	Tinggi

Uraian

Penyusunan Laporan Profil Risiko melibatkan seluruh RTU melalui pembahasan forum Rapat Komite Manajemen Risiko serta direview oleh Komite Pemantau Risiko untuk menetapkan peringkat risiko komposit yang wajar. Berdasarkan hasil penilaian diperoleh penilaian Profil Risiko Semester I 2025 sebesar 3.40 dengan Peringkat Risiko Tinggi. Nilai Risiko mengalami penurunan dari periode Semester II 2024 merujuk pada hasil penilaian yang disampaikan OJK 3,64 (risiko tinggi). Risiko Kredit memiliki peringkat Sangat Tinggi sedangkan Risiko Operasional dan Risiko Kepatuhan memiliki peringkat Sedang mengalami perbaikan dibandingkan periode Semester II 2024. Risiko Likuiditas dan Risiko Reputasi stabil di peringkat Rendah, dan Risiko Strategik menjadi peringkat Risiko Tinggi. Profil Risiko Kredit menjadi faktor utama yang mempengaruhi risiko strategik, pilar kualitas kredit sangat mempengaruhi Risiko Kredit secara keseluruhan. Manajemen harus menyusun rencana tindak perbaikan kualitas kredit dan kualitas monitoring kredit mencegah migrasi penurunan kualitas kredit. Pada Risiko Operasional dipengaruhi kekosongan jabatan yakni Direktur Pemasaran dan Direktur Kepatuhan, sehingga berpengaruh pada kualitas kinerja struktur dibawahnya dan penerapan Tata Kelola perusahaan. Pemenuhan pejabat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu dilakukan untuk memperbaiki risiko Operasional. Pada Risiko Kepatuhan perlu dilakukan perbaikan pada peningkatan penerapan budaya sadar risiko dan perbaikan proses rule making the rule. Risiko Strategik mengalami kenaikan, khususnya kualitas aset yang berdampak keuangan dibandingkan peer group BPR, meskipun target indikator rasio keuangan di Semester I 2025 telah sesuai dengan RBB di Semester I. Mitigasi risiko di tahun 2025 harus difokuskan pada strategi perbaikan kualitas kredit khususnya pada debitur inti dan penurunan beban CKPN selain perbaikan kualitas SDM dengan menerapkan pedoman pengelolaan manajemen SDM



PT BPR BKK JATENG
(Perseroda)

RISIKO KREDIT



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman1 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

HASIL LAPORAN PROFIL RISIKO

Tahun Realisasi 2025

Triwulan 2 / Semester 1

Profil Risiko Kantor Pusat

Sehubungan dengan telah dilaksanakan pengisian aplikasi simpro, pada tanggal : 21 Juli 2025

Tingkat risiko yang telah ditetapkan mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana diatur dalam kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko. Maka kami informasikan hasil pengukuran sebagai berikut:

(RISIKO KREDIT)

INHEREN KREDIT

No	Parameter	Nilai	Keterangan
PILAR 1 : Komposisi Portofolio Aset Dan Tingkat Konsentrasi Kredit			
1	Aset Produktif / Total Aset	3.00	Komposisi Aset produktif pada periode penilaian didominasi oleh KYD sebesar 68,11 %, Komposisi KYD meningkat dari periode penilaian Semester II Th 2024 (65,88%). Sedangkan penempatan Antar Bank sebesar 31,89%. Penyerapan kredit masih belum cukup optimal dimana penempatan bank lain masih diatas total aset produktif (31,89%) melebihi ambang batas yang ditetapkan (30%), saldo PPAP melebihi ambang batas hal ini seiring dengan meningkatnya tunggakan kredit dan masih terdapat pengikatan APHT di notaris yang belum terselesaikan. Penyaluran kredit masih disalurkan dalam 11 produk utama dengan komposisi tertinggi di kredit KUB sebesar 29,76% lebih rendah dari Semester II 2024 sebesar 35,7%. Terjadi penurunan NOA secara konsolidasi dari 37.984 di Semester I 2024 menjadi 37.325 di Semester I 2025 yang akan menjadi fokus perbaikan pada periode berikutnya.
	Penempatan Bank Lain / Total Aset	0.25	
	Aba Pada 1 Bank Tertinggi / Penempatan Bank Lain	0.13	
	Aba Pada BPR / Penempatan Bank Lain	0.13	
	NOA Kredit fon s/d 150 juta / NOA KYD	0.38	
	Kredit PEP / Total KYD	0.13	
	Kredit fon > 350jt / Total KYD	0.38	
	Saldo PPAP / Total KYD	0.63	
	AYDA / KYD	0.13	
2	Kredit Yang Diberikan / Aset Produktif	1.45	Kredit yang diberikan terhadap aset produktif telah lebih kecil dari ambang batas (75%) namun terdapat beberapa skema kredit yang masih perlu disoroti seperti kredit jangka menengah dan jangka panjang melebihi ambang batas, sedangkan untuk kredit jangka pendek masih lebih kecil dari ambang batas yang ditetapkan, Ekspansi kredit akan terus dilakukan dengan menyesuaikan komposisi skema kredit dengan evaluasi-evaluasi dan penyesuaian yang akan dilakukan pada setiap produk kredit. Dalam penilaian parameter ini secara konsisten di bawah limit yang ditetapkan atau peringkat 1, Dari seluruh parameter tersebut didapatkan nilai/peringkat kategori peringkat Rendah. Parameter tambahan untuk menentukan skema kredit antara lain parameter Kredit Jangka Pendek, Menengah, dan Jangka Panjang, NOA/number of account kredit dengan plafon di atas Rp.150 juta, Kredit dengan agunan tanah dan bangunan, kredit dengan agunan kendaraan bermotor, dan komposisi produk kredit KUB. Mendasarkan hal tersebut meskipun berdasarkan tabel ketentuan rasio Kredit yang Diberikan di bawah limit ketentuan OJK atau pada peringkat 1 (Sangat Rendah) namun memperhatikan penilaian tambahan berada pada tingkat risiko Sedang atau tergolong kredit sebagian besar atau seluruhnya sederhana dengan jenis yang beragam. Maka untuk Parameter 2 ditetapkan pada peringkat risiko Rendah.
	Kredit Skema Potong Gaji / Total Kredit	0.09	



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman2 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

	Kredit Musiman (Grace Period) / Total KYD	0.09	
	Kredit Jangka Pendek / Total KYD	0.45	
	Kredit Jangka Menengah / Total KYD	0.45	
	Kredit Jangka Panjang / Total KYD	0.27	
	Kredit Dengan Agunan Tanah dan Bangunan / Total KYD	0.09	
	Kredit Agunan Kendaraan Bermotor / Total KYD	0.09	
	Kredit Agunan Kendaraan Roda 2 / KYD	0.09	
	OSC Produk KUB / Total KYD	0.09	
	Kredit Tanpa Agunan / Total KYD	0.09	
	Kredit Korporasi (Non Perorangan) / Total KYD	0.09	
3	25 Debitur Inti / Total Kredit	2.00	Komposisi kredit kepada 25 debitur terbesar/inti berdasarkan saldo baki debit per periode penilaian di bawah limit ketentuan dan secara konsisten selama tahun berjalan selalu berada di bawah limit yang ditetapkan atau tergolong peringkat 2 atau Rendah. Debitur Inti didominasi oleh kredit pada perusahaan korporasi sebesar 79,61% sedangkan sisanya 20,39% oleh perorangan, komposisi 25 debitur inti masih cukup kecil atau jauh dari ambang batas yang ditetapkan. Debitur inti baik perorangan maupun badan hukum memiliki jenis usaha dan peruntukan yang sangat beragam dan seluruh kredit tersebut dipergunakan untuk modal kerja dan investasi. Kredit kepada debitur inti didominasi mulai tahun 2022 setelah bank mendapatkan ijin operasional. Debitur inti terbesar saat ini mendapatkan fasilitas restruktur.
4	Kredit Per Sektor Ekonomi / Total Kredit	2.00	Exposure kredit persektor ekonomi masih perlu pendalaman lebih lanjut dikarenakan terdapat kelemahan identifikasi sektor ekonomi pada core banking yang masih belum akurat, Bank telah melakukan langkah sosialisasi dan pelatihan kepada unit kerja di cabang untuk melakukan pengkinian dan verifikasi data sektor ekonomi dengan tujuan mendapatkan data yang lebih akurat khususnya data sektor ekonomi. 3 Sektor Ekonomi terbesar antara lain Bukan Lapangan Usaha lainnya, Rumah Tangga untuk Keperluan Multiguna Lainnya, Aktivitas jasa perorangan lainnya menjadi sektor ekonomi 3 terbesar di seluruh kantor cabang. Berdasarkan penilaian rasio sektor ekonomi berada pada nilai 1 atau tingkat risiko rendah meskipun demikian mempertimbangkan kualitas data serta strategi pemasaran yang belum berdasarkan target sektor usaha tertentu maka penilaian parameter ini dilakukan penyesuaian nilai pada tingkat 3 (Risiko Sedang) atau tidak berubah untuk jangka waktu yang lama. Sehingga parameter 4 ditetapkan pada peringkat 2 atau Rendah. Peringkat risiko Rendah tersebut sama dengan kondisi di periode penilaian sebelumnya.
Rekapitulasi penilaian tingkat risiko untuk pilar 1		2.11	Pilar 1 berdasarkan metode penilaian internal dengan tetap merujuk pada parameter baku sesuai ketentuan peringkat risiko tertinggi di parameter 1 (Risiko Rendah). Pada Pilar 1 ditetapkan peringkat risiko berdasarkan nilai rata-rata dari 21 parameter (termasuk 4 utama sesuai ketentuan di SEOJK) sehingga didapatkan hasil nilai 2,11 (Risiko Rendah). Kredit yang perlu mendapatkan perhatian adalah kredit tanpa agunan untuk tujuan apapun sedangkan kredit berdasarkan jangka waktu menunjukkan rasio yang cukup ideal dengan kecenderungan terjadi pergeseran dari jangka waktu pendek ke jangka waktu menengah, kedepan pada Semester II akan dilakukan evaluasi pada skema jangka waktu kredit dengan meningkatkan portofolio kredit dengan jangka waktu pendek untuk mencapai ambang batas ideal yang ditentukan.
PILAR 2 : Kualitas Aset			



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 3 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

1	Aset Produktif Bermasalah / Total Aset Produktif	5.00	Rasio Aset Produktif bermasalah di atas limit ketentuan yaitu 18,28% dan lebih tinggi dibandingkan periode penilaian sebelumnya 14,64%. Secara konsisten selama tahun berjalan dan di periode tahun sebelumnya tidak terdapat penempatan Antar Bank yang bermasalah. Bank telah membentuk CKPN yang cukup mendasarkan pada ketentuan internal berdasarkan Produk Kredit. Meskipun demikian belum dilakukan evaluasi atas skema perhitungan CKPN saat ini dikarenakan kebijakan yang baru berlaku di awal tahun 2025. Terjadi peningkatan NPL gross dibandingkan periode sebelumnya (22,23%) menjadi 26,49% di periode penilaian. Aset produktif bermasalah secara keseluruhan berasal dari kredit yang disalurkan. Pemburukan atau migrasi juga terjadi setiap bulannya sementara ekspansi kredit belum berkinerja sesuai dengan target yang ditetapkan. Realisasi kredit tiga terbesar berdasarkan produk terdapat di produk kredit KUB, BKK Joglo, dan Mikro BKK. Mendasarkan pada hasil penilaian tercatat rasio aset produktif bermasalah yang lebih tinggi dari limit ketentuan serta identifikasi kondisi kredit selama periode penilaian maka Parameter 1 ditetapkan pada peringkat risiko Sangat Tinggi.
2	Kredit Bermasalah Neto / Total Kredit	4.17	Rasio kredit bermasalah netto terhadap total kredit adalah 19,17% atau melebihi ambang batas yang ditetapkan dan lebih tinggi dari periode sebelumnya (16,49%). Hal ini masih berpotensi terjadi pemburukan apabila tidak dapat dilakukan monitoring dengan tepat. Bank telah melakukan pengkinian data khususnya data yang terkait langsung dengan perhitungan CKPN. Pada 6 parameter tambahan kesemuanya membutuhkan perhatian lebih dikarenakan 6 parameter tersebut melebihi ambang batas yang ditetapkan, kredit yang menjadi wewenang kantor cabang (kredit dibawah Rp. 150 juta) mempunyai exposure NPL yang Tinggi, dan pada Semester II akan segera dilakukan evaluasi, begitu juga dengan NPL pada total kredit dengan nilai agunan yang lebih rendah dari baki debit melebihi ambang batas yang telah ditetapkan.
	NPL Kredit plafond s/d 150 juta / Total KYD plafond s/d 150 jt	0.67	
	NPL Kredit plafond diatas 50 juta / Total KYD plafond diatas 50 juta	0.83	
	NPL Kredit Dengan Perikatan APHT / Total KYD	0.83	
	NPL Kredit Dengan Perikatan SKMHT / Total KYD	0.50	
	NPL Nilai Agunan Lebih Rendah Dari Baki Debet / Total Kredit Nilai Agunan Lebih Rendah dari Baki Debet	0.83	
	Kredit Macet sudah jatuh tempo / Total KYD	0.67	
3	Kredit Kualitas Rendah / Total Kredit	4.00	Kredit yang diberikan terhadap aset produktif telah lebih kecil dari ambang batas (75%) namun terdapat beberapa skema kredit yang masih perlu disoroti seperti kredit jangka menengah dan jangka panjang melebihi ambang batas, sedangkan untuk kredit jangka pendek masih lebih kecil dari ambang batas yang ditetapkan, Ekspansi kredit akan terus dilakukan dengan menyesuaikan komposisi skema kredit dengan evaluasi-evaluasi dan penyesuaian yang akan dilakukan pada setiap produk kredit. Dalam penilaian parameter ini secara konsisten di bawah limit yang ditetapkan atau peringkat 1, Dari seluruh parameter tersebut didapatkan nilai/peringkat kategori peringkat Rendah. Parameter tambahan untuk menentukan skema kredit antara lain parameter Kredit Jangka Pendek, Menengah, dan Jangka Panjang, NOA/number of account kredit dengan plafon di atas Rp.150 juta, Kredit dengan agunan tanah dan bangunan, kredit dengan agunan kendaraan bermotor, dan komposisi produk kredit KUB. Mendasarkan hal tersebut meskipun berdasarkan tabel ketentuan rasio Kredit yang Diberikan di bawah limit ketentuan OJK atau pada peringkat 1 (Sangat Rendah) namun memperhatikan penilaian tambahan berada pada tingkat risiko Sedang atau tergolong kredit sebagian besar atau seluruhnya sederhana dengan jenis yang beragam. Maka untuk Parameter 2 ditetapkan pada peringkat risiko Rendah.
	Kredit Par 4 / Total Kredit	0.25	
	Kredit DP (PAR 3 + PAR 4) / Total Kredit	0.75	



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman4 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

	NOA FPD 6 Bulan Terakhir / NOA Ekspansi 6 Bulan Terakhir	1.25	
	Nominal FPD 6 Bulan Terakhir / plafond Ekspansi 6 Bulan Terakhir	1.25	
	Rekapitulasi penilaian tingkat risiko untuk pilar 2	4.39	Pilar 2 berdasarkan metode penilaian internal dengan tetap merujuk pada parameter baku sesuai ketentuan peringkat risiko tertinggi di parameter 1 (Risiko Sangat tinggi). Pada Pilar 2 ditetapkan peringkat risiko berdasarkan nilai rata-rata dari seluruh parameter (termasuk 4 utama sesuai ketentuan di SEOJK) sehingga didapatkan hasil nilai 4,39 (Risiko Sangat Tinggi). Pemantauan dan monitoring kredit pasca pencairan merupakan salah satu hal yang perlu dilakukan evaluasi. Dari penilaian parameter diatas didapatkan bahwa kualitas aset dari periode ke periode semakin memburuk. Banyaknya account kredit yang flow terutama pada kredit PAR 3 dan PAR 4 menjadi NPL. Hal tersebut akan menjadi evaluasi dan perhatian untuk dilakukan perbaikan.
PILAR 3 : Strategi Penyediaan Dana			
1	Strategi Penyediaan Dana	4.00	Penurunan kinerja outstanding Kredit berdampak pada komposisi pertumbuhan sektor ekonomi yang dikuasai mengalami penurunan, Pada pertumbuhan sektor ekonomi yang tidak dikuasai dan NPL terus mengalami pemburukan.
	Pertumbuhan sektor ekonomi yang tidak dikuasai	3.00	
	Pertumbuhan sektor ekonomi yang dikuasai	3.50	
	Pertumbuhan OSC dan NPL	3.50	
	Penempatan dana antar bank	2.00	
	Konsentrasi Penempatan ABA	1.50	
	Rekapitulasi penilaian tingkat risiko untuk pilar 3	2.92	Pada Pilar 3 seperti penilaian periode sebelumnya telah ditambahkan parameter-parameter tambahan yang mendukung penilaian pada pilar utama. Peer group industri sejenis yang digunakan adalah 3 BPR yang memiliki aset diatas 1 triliun dan tercatat memiliki pertumbuhan aset selama periode penilaian. Pertumbuhan BKK Jateng per Semester I 2025 sebesar -1,02% berada dibawah rata-rata pertumbuhan industri BPR sebesar 2,24%. Terhadap strategi penyaluran dana BKK Jateng menyalurkan ke sektor yang sebagian besar telah dikuasai. Penurunan OSC terjadi pada sektor yang dikuasai dengan kualitas kredit kecenderungan meningkat. Sektor ekonomi yang tidak dikuasai memiliki kecenderungan menurun dibanding periode sebelumnya. Terdapat pertumbuhan kredit yang negatif dengan kecenderungan peningkatan NPL selama periode penilaian. Terdapat penempatan antar bank di BPR dalam batasan yang moderat. Mendasarkan pada hal tersebut peringkat risiko untuk Pilar 3 adalah risiko Sedang.
PILAR 4 : Faktor Eksternal			
1	Faktor Eksternal	1.00	Sampai periode Semester I 2025 belum terdapat ancaman dari kompetitor BPR dalam layanan digital, terlebih pada layanan digital marketing dimana PT BPR BKK Jateng telah mempunyai layanan digital (E-Wallet) untuk memberikan manfaat-manfaat pada user account dalam bertransaksi. Sampai periode Semester I tahun 2025 belum ditemukan kejadian luar biasa yang dapat berpengaruh atau berdampak pada usaha dan kemampuan debitur Persaingan layanan antar BPR atau peer group terus meningkat namun hal tersebut tidak berdampak pada kinerja dan layanan namun menimbulkan keluhan nasabah, Bank akan terus meningkatkan layanan perbankan yang terus dinamis dengan mengutamakan kepuasan nasabah. Regulasi pemerintah seperti fasilitas kredit KUR yang digulirkan oleh pemerintah melalui bank-bank umum menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pada capaian target NOA, namun Bank akan melakukan upaya pada Semester II untuk meningkat NOA baru dengan meluncurkan program-program baru yang dapat merangsang NOA baru pada sektor perorangan dan UMKM.
	Layanan Digital Kompetitor	0.25	
	Kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap kinerja Bank	0.25	



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman5 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

	Persaingan Layanan antar BPR	0.25	
	Regulasi Pemerintah	0.25	
	Rekapitulasi penilaian tingkat risiko untuk pilar 4	1.00	Pada pilar 4 faktor Eksternal Bank menetapkan tingkat risiko Sangat rendah dimana pada setiap sub-pilar Layanan Digital Kompetitor, kejadian luar biasa yang beroengaruh terhadap kinerja bank, Persaingan layanan antar BPR, dan Regulasi pemerintah dalam penilaian rendah. Bank akan selalu mengedepankan Customer Service Excellence untuk merespon persaingan layanan antar BPR dengan meningkatkan kualitas SDM yang berkesinambungan dengan pendidikan/pelatihan-pelatihan berjenjang pada karyawan internal. Inovasi produk dan layanan akan terus dikembangkan dengan pengoptimalisasi Divisi Litbang dengan selalu mengedepankan kebutuhan masyarakat dengan fokus pada UMKM dan Digitalisasi perbankan yang terus akan dikembangkan. Dengan pengumpulan data-data analisis pasar strategi-strategi pemasaran akan dirumuskan guna merespon persaingan layanan antar bank dan merespon regulasi-regulasi pemerintah seperti fasilitas kredit KUR yang digulirkan pemerintah melalui bank-bank umum penyalur program KUR tersebut.
LAINNYA			



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 6 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

1	Faktor Lainnya	3.00	Kompetensi AO pada penilaian sebelumnya pada peringkat 4, pada periode penilaian Account Officer memiliki kompetensi dan hasil kinerja yang kurang baik, tercermin pada penurunan pada OSC, NOA dan Kualitas Kredit. Divisi SDM akan terus melakukan peningkatan kualitas karyawan internal bank, dan karyawan pada posisi Account Officer akan terus dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan tentang perbankan dan pengetahuan teknik Selling Skill secara berkesinambungan Analisis memiliki kompetensi yang cukup baik, namun peningkatan kompetensi Analisis kredit harus terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan dunia usaha yang terus bergerak dinamis dituntut Analisis kredit dapat merespon atau menguasai usaha-usaha yang digeluti oleh para calon nasabah, Analisis kredit juga harus dapat memitigasi risiko-risiko kredit yang melekat yang nantinya dapat mengganggu kualitas kredit Komite kredit melakukan pembahasan pada semua aspek perkreditan meliputi 5C dan memitigasi risiko-risiko yang melekat. Bank telah mengatur kebijakan terkait komite kredit secara berjenjang dari tingkat kantor cabang, kantor wilayah, Kantor Pusat (Divisi Pemasaran) hingga tingkat Direksi. Komite kredit telah dilaksanakan dengan baik dan tercatat dalam risalah Notulen komite kredit. Keputusan dan realisasi kredit pada periode penilaian masih sama dengan periode sebelumnya dimana Keputusan kredit maksimal adalah 1 hari kerja setelah komite, dan realisasi dilakukan apabila persyaratan utama telah terpenuhi Monitoring penggunaan dana adalah 20 hari setelah terjadinya realisasi kredit, dimana telah dibentuk struktur atau job desk admin monitoring kredit dengan tujuan untuk memonitoring fasilitas kredit dari penggunaan kredit, kepatuhan terhadap pemenuhan dokumen kredit dan kepatuhan terhadap pembayaran angsuran setiap bulannya Pengawasan kredit dilakukan utamanya oleh Account Officer dan Admin Monitoring kredit dimana setiap debitur mendapatkan kunjungan (Daring/Luring) Minimal 1 kali dalam sebulan, kecuali debitur tanpa tunggakan maksimal 2 bulan 1 kali kunjungan, hal ini perlu dilakukan untuk menjaga kualitas kredit setiap debitur dalam kualitas yang baik Kecukupan jumlah SDM Perkreditan masih menjadi konsen utama Divisi pemasaran maupun Divisi SDM dan Umum, hal ini dikarenakan masih terdapat kekosongan SOTK pada formasi non struktural bidang perkreditan yang berdampak pada produktivitas capaian KYD yang belum optimal sesuai dengan Rencana Bisnis Bank yang telah ditetapkan Kompetensi SDM dalam bidang perkreditan telah mengikuti pelatihan modul secara berjenjang dari tingkat Account Officer dan Admin Monitoring kredit hingga Kepala Bidang pemasaran yang diselenggarakan Divisi SDM dan Umum Kelengkapan Ketentuan dan pedoman perkreditan telah dilakukan review 1 kali dalam setahun mulai dari PKPB, SK setiap produk kredit, SK Bunga Kredit dan SK perkreditan lainnya. SIM (Sistem Informasi Manajemen) telah tersedia dengan cukup baik dimana setiap divisi telah mempunyai Sistem Informasi manajemen yang dapat menunjang kinerja setiap harinya dengan baik, Divisi pemasaran sudah memiliki SIAM (Sistem Informasi Analisa Kredit) untuk memudahkan analisis kredit menyusun proposal pengajuan kredit dan memudahkan Pemutus kredit untuk memberikan keputusan kredit dengan mengedepankan aspek kehati-hatian Pengawasan Internal berkala telah dilakukan minimal 2 minggu sekali yang dilakukan Risk Taking Unit yang disupervisi oleh satuan kerja pengendalian kantor pusat
	Kompetensi AO	0.27	
	Kompetensi Analisis	0.27	
	Komite Kredit	0.27	
	Keputusan dan Realisasi Kredit	0.27	
	Monitoring Penggunaan Dana Kredit	0.27	
	Pengawasan Kredit	0.27	



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 7 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

	Kecukupan Jumlah SDM Perkreditan	0.27	
	Kompetensi SDM Perkreditan	0.27	
	Kelengkapan Ketentuan & Pedoman Perkreditan	0.27	
	Ketersediaan Sistem Informasi Manajemen	0.27	
	Pengawasan Internal (Risk Taking Unit dan Satuan Kerja Pengendalian) di Bidang Perkreditan	0.27	
	Rekapitulasi penilaian tingkat risiko untuk pilar 5	3.00	Pilar penilaian lainnya menggunakan beberapa parameter yang mempengaruhi risiko inherent kredit antara lain khususnya kompetensi account officer dan analisis kredit, fungsi dan peranan komite kredit, proses keputusan dan realisasi kredit, monitoring atas penggunaan dana kredit, pengawasan dan monitoring kewajiban, kecukupan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia di pemasaran. Berdasarkan hal tersebut ditetapkan peringkat risiko pada Pilar 5 adalah risiko Sedang.

REKAP PENILAIAN INHEREN KREDIT

Hasil Penilaian Pilar 1 - Komposisi Portofolio Aset Dan Tingkat Konsentrasi Kredit	2.11
Hasil Penilaian Pilar 2 - Kualitas Aset	4.39
Hasil Penilaian Pilar 3 - Strategi Penyediaan Dana	2.92
Hasil Penilaian Pilar 4 - Faktor Eksternal	1.00
Hasil Penilaian Lainnya	3.00
Hasil Penilaian Inheren	4.39
	Sangat Tinggi

URAIAN INHEREN KREDIT

Berdasarkan kertas kerja penilaian profil risiko secara konsolidasi nilai risiko inherent kredit di Laporan Profil Risiko adalah 4,39 atau peringkat Risiko Sangat Tinggi. Nilai risiko ditetapkan berdasarkan penilaian Risiko tertinggi yaitu di Pilar 2 kualitas aset. Hasil penilaian ini sama dengan periode penilaian sebelumnya. Kualitas kredit masih menjadi fokus dan titik risiko tertinggi selama periode tahun berjalan. Migrasi kredit masih terjadi pada tingkatan yang tinggi. Meskipun kredit dengan plafon besar telah dilakukan analisa dan review oleh second line dengan melakukan komite kredit secara berjenjang yang diputuskan oleh kantor pusat. Dalam memutuskan kredit masih ditemukan kesalahan dalam menentukan skema kredit yang tepat. Kelemahan dalam melakukan analisa repayment capacity dan memahami bisnis proses dari usaha calon debitur. kedepan bidang atau Divisi pemasaran akan merumuskan program-program yang dapat merangsang penyerapan NOA baru yang berfokus pada sektor UMKM dengan jangka waktu pendek dan menengah dengan mengedepankan data-data analisis yang tepat dan fokus pada kepuasan nasabah dalam layanan perbankan. Digitalisasi perbankan akan terus dikembangkan dimana hal ini menjadi nilai lebih bank dalam tingkat persaingan peer group BPR.



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 8 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

KPMR KREDIT

No	Parameter KPMR	Peringkat Risiko	Keterangan
PILAR 1 : Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris			
1	Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	2.00	Dewan Komisaris telah menyetujui kebijakan perkreditan dan ketentuan - ketentuan lain yang meliputi SOP, surat keputusan, surat edaran serta kebijakan di bidang perkreditan, strategi dan kerangka manajemen risiko, serta limit dan toleransi risiko kredit. Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko kredit, antara lain melakukan penilaian terhadap kecukupan kualitas dan kuantitas kebijakan serta prosedur dengan peraturan OJK dan praktek umum terbaik sesuai kapasitas bank . Dewan Komisaris mampu mengimplementasikan kompetensinya pada bidang manajemen risiko dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko perkreditan dan memberikan arahan perbaikan yang harus dilakukan oleh Direksi. Dewan Komisaris telah mempertimbangkan masukan dan rekomendasi tertulis dari Komite Pemantau Risiko yang disampaikan secara berkala. Sampai dengan periode penilaian, telah dilaksanakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 13 kali dan Rapat Komite Pemantau Risiko sebanyak 15 Kali. Dewan Komisaris telah mempertimbangkan masukan dari Komite Pemantau Risiko. Komite Pemantau Risiko secara berkala telah menyampaikan laporan dan rekomendasi secara tertulis kepada Dewan Komisaris.
	Apakah ketentuan dan kebijakan manajemen risiko kredit yang disetujui Dewan Komisaris apa saja yang telah ditetapkan (PKPB, SK Direksi, SOP Perkreditan, SE Direksi, SK BWMK, SK Limit dan Toleransi Risiko)	2	
	Apakah evaluasi ketentuan dan kebijakan manajemen risiko kredit yang disetujui Dewan Komisaris telah dilakukan (Ketentuan perkreditan yang diterbitkan selama periode penilaian) dan kapan dilakukan secara periodik serta dilakukan kepada siapa saja	2	
	Apakah Dewan Komisaris mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen risiko kredit dalam menjalankan tugas dan fungsinya	2	
	Apakah Dewan Komisaris telah memastikan Direksi dan jajarannya dalam penerapan manajemen risiko kredit sesuai kebijakan manajemen risiko yang ditetapkan	2	
	Apakah Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi telah mempertimbangkan masukan dari Komite Pemantau Risiko	2	



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 9 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

2	Apakah Dewan komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud ?	2.40	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban Direksi dalam penerapan manajemen risiko kredit secara tertulis dan dalam forum rapat (terdapat notulen) Dewan Komisaris telah memberikan masukan dan pengarahan dan dukungan terhadap transformasi digital melalui ketersediaan sistem informasi manajemen di bidang manajemen risiko kredit, yang disampaikan dalam Forum Rapat Pengurus. Dewan Komisaris telah melakukan monitoring tindak lanjut penerapan manajemen risiko dari Direksi terkait dengan capaian kredit, kualitas kredit, ketersediaan sumber daya manusia, peningkatan kompetensi analis kredit dan pemutus kredit, program penyelesaian kredit macet. Dewan Komisaris secara konsisten telah mendukung pengembangan budaya manajemen risiko kredit dengan memastikan seluruh ketentuan perkreditan telah dipenuhi, meskipun implementasi belum optimal namun direksi mengawal implementasinya dengan melakukan kunjungan ke cabang, memantau tindak lanjut hasil kunjungan SKMR dan SKAI, mendorong terpenuhinya kecukupan SDM Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris
	Apakah Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban Direksi dalam penerapan manajemen risiko kredit secara tertulis dan dalam forum rapat (terdapat notulen)	2	
	Apakah Dewan Komisaris memberikan masukan dan pengarahan penerapan manajemen risiko kredit kepada Direksi secara tertulis dan forum rapat	2	
	Dewan Komisaris melakukan monitoring tindak lanjut evaluasi pertanggungjawaban Direksi penerapan manajemen risiko kredit	2	
	Apakah Dewan Komisaris secara konsisten mengembangkan budaya sadar risiko kredit	3	
	Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris	3	
3	Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kredit, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	2.33	Direksi cukup optimal dalam mengimplementasikan kompetensinya terkait manajemen risiko kredit, namun rendahnya kualitas aset (rasio NPL tinggi), dan pertumbuhan portfolio tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ditambah dengan pada saat ini posisi Direktur Pemasaran masih mengalami kekosongan. Direksi telah menetapkan kebijakan manajemen risiko kredit antara lain PKPB, SK Dokumen Kredit, BWMK, Limit dan toleransi risiko, Produk Kredit, AYDA, Penetapan Kualitas Aset. Direksi telah melakukan evaluasi kebijakan dan ketentuan manajemen risiko kredit secara berkala berdasarkan temuan - temuan implementasi kebijakan yang bersumber dari temuan OJK, temuan SKAI, laporan profil risiko atau kaji ulang oleh pihak internal atau eksternal.



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman10 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

	Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen risiko kredit (Pelatihan tentang manajemen risiko kredit yang diikuti, pengalaman di bidang yang berkaitan dengan manajemen risiko kredit)	3	
	Ketentuan dan kebijakan manajemen risiko kredit yang disetujui Direksi apa saja yang telah ditetapkan (PKPB, SK Direksi, SOP Perkreditan, SE Direksi, SK BWMK)	2	
	Kapan evaluasi ketentuan dan kebijakan manajemen risiko kredit yang disetujui Direksi dilakukan (Ketentuan perkreditan yang diterbitkan selama periode penilaian)	2	
4	Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi Risiko kredit, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko kredit terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	2.60	Direksi telah melakukan tindakan mitigasi risiko antara lain melalui pembahasan dalam forum Komite Kredit dan Komite Manajemen Risiko secara berkala. Direksi juga melakukan tindakan pengendalian risiko kredit dalam exit meeting pemeriksaan SKAI pada setiap Unit Kerja Direksi telah menyampaikan kepada seluruh unit kerja khususnya Kepala Cabang dan Pejabat Eksekutif melalui forum evaluasi setiap bulan tindakan dan kebijakan pengendalian risiko kredit, kepada jenjang organisasi lain dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan kegiatan monitoring, mentoring dan advising ke cabang. Direksi secara konsisten mengembangkan budaya risiko kredit dengan melakukan pemenuhan dan/atau pengkinian ketentuan, sosialisasi, pemantauan implementasi serta penilaian profil risiko kredit secara berkala, melakukan evaluasi dan menyusun langkah - langkah perbaikan terhadap hasil penilaian profil risiko. (penilaian profil risiko setiap triwulan dan melakukan evaluasi hasil penilaian) Direksi melakukan review terhadap delegasi wewenang memutus kredit berdasarkan evaluasi hasil penerapan kebijakan manajemen risiko kredit secara berkala (triwulan) antara lain memperhatikan rasio NPL berdasarkan kewenangan memutus kredit masing - masing kantor cabang melalui forum komite BWMK. Direksi melakukan evaluasi atas usulan transaksi sebelum memberikan persetujuan bidang perkreditan melalui pembahasan bersama dengan unit terkait, penyusunan kajian, dan pemberian opini
	Apakah Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban Direksi dalam penerapan manajemen risiko kredit secara tertulis dan dalam forum rapat (terdapat notulen)	2	
	Apakah Direksi secara konsisten mengambil tindakan yang perlu dilakukan dalam mitigasi risiko kredit	3	
	Apakah Direksi secara konsisten telah mengembangkan budaya sadar risiko kredit kepada seluruh unit kerja	3	
	Apakah Direksi secara berkala melakukan review atas kebijakan pendelegasian kewenangan yang diberikan	2	
	Apakah Direksi telah melakukan evaluasi terhadap usulan transaksi yang diterima sebelum memberikan persetujuan.	3	



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman11 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

5	Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi kredit dan fungsi Manajemen Risiko kredit?	3.50	Satuan Kerja Pengendalian (Second Line) telah terpisah dan memiliki Pejabat Setingkat Kepala Divisi dan Pejabat Struktural yang terpisah dan independen dalam melaksanakan tugasnya. Namun kompetensi dan kecukupan sumber daya manusia masih terbatas dan perlu ditingkatkan. SKK terdapat 6 pegawai dan SKMR terdapat 5 pegawai Kecukupan organisasi Unit Kerja perkreditan masih belum terpenuhi, baik dari jumlah SDM, kelengkapan pejabat, maupun kompetensinya. Terdapat kekurangan SDM dan kekosongan pejabat di Cabang antara lain pegawai setingkat Kepala Bidang, Analis, tenaga pemasaran, dan tenaga remedial. Kompetensi pegawai belum merata di setiap unit kerja. Satuan Kerja Manajemen Risiko memiliki jumlah SDM yang cukup memadai, namun masih perlu peningkatan kompetensi. Sedang kecukupan kompetensi terkait manajemen risiko pada jenjang organisasi perkreditan, masih belum memadai, sehingga perlu adanya peningkatan kompetensi melalui berbagai metode yang sesuai dengan kondisi SDM yang ada. Proses perkreditan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan dan setiap unit kerja dapat menjalankan fungsinya, namun masih terdapat kelemahan dalam hal proses perkreditan, realisasi kredit, monitoring dan pengawasan kredit.
	Fungsi Second Line (SKMR dan SKK) apakah telah terpisah dari Unit Kerja perkreditan dan melaksanakan tugasnya secara independen	4	
	Apakah kecukupan organisasi di unit kerja perkreditan telah didukung dengan kompetensi yang baik	4	
	Apakah kecukupan organisasi di satuan manajemen risiko perkreditan telah didukung dengan kompetensi yang baik	3	
	Apakah proses perkreditan dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan oleh masing-masing unit kerja secara independen	3	
6	Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko kredit?	2.67	Ketentuan SOTK yang berlaku telah sesuai dengan penerapan manajemen risiko kredit, telah dilakukan pemisahan unit yang menangani proses perkreditan dengan unit yang menangani realisasi kredit atau pencairan kredit. Meskipun di beberapa cabang untuk unit kerja perkreditan masih terdapat kekosongan di beberapa bagian Dalam periode penilaian telah dilakukan review terhadap pedoman pengelolaan SDM. Bank telah melakukan pengembangan MSDM, Analisa beban kerja dan Career Path Direksi telah melakukan evaluasi terkait dengan kecukupan jumlah SDM bidang perkreditan, namun hasil evaluasi tersebut belum sepenuhnya ditindaklanjuti karena masih terdapat beberapa jenjang organisasi yang belum terpenuhi jumlah SDM nya, juga belum ada pemerataan SDM berdasarkan analisa beban kerja SDM perkreditan dan rencana strategis dalam mengembangkan bisnis pada masing - masing kantor cabang
	Apakah ketentuan SOTK telah sesuai dengan penerapan manajemen risiko kredit, tidak terdapat perangkapan jabatan, independen	3	
	Apakah pedoman pengelolaan SDM dilakukan review secara berkala	2	
	Apakah Direksi melakukan evaluasi ketercukupan jumlah SDM bidang perkreditan	3	



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman12 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

Hasil Penilaian Pilar 1 -Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris		2.58	Dewan Komisaris dan Direksi memiliki komitmen yang tinggi dalam rangka penerapan kebijakan Manajemen Risiko kredit dengan menetapkan kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko kredit, melakukan review secara berkala, menetapkan langkah - langkah untuk memastikan. Pengurus telah menindaklanjuti komitmen pemeriksaan OJK tentang penerapan kebijakan manajemen risiko perkreditan meskipun belum secara menyeluruh diterapkan. Masih terdapat kelemahan antara lain pemenuhan dan pengelolaan sumber daya manusia bidang perkreditan, pelaksanaan dan penerapan atas kebijakan manajemen risiko kredit yang ditetapkan, implementasi, maupun pengawasan rencana strategi manajemen perkreditan di setiap unit kerja perkreditan.
PILAR 2 : Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Limit			
1	Apakah BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kredit yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	3.00	Bank telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko Kredit yang merujuk pada visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis dan kecukupan SDM. Rencana bisnis bank disusun berdasarkan strategi penerapan manajemen risiko mengacu pada hasil penerapan / profil risiko kredit Penyusunan rencana bisnis bank telah berdasarkan pada hasil penilaian profil risiko dimasa lalu, dan strategi serta kerangka manajemen risiko yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi profil risiko kredit. Kebijakan manajemen risiko kredit dilakukan kaji ulang oleh SKMR, namun belum dilakukan pnegkinian dan kaji ulang oleh SKAI atau pihak eksternal serta dilaporkan kepada Direksi dan Komisaris Kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko kredit telah tersedia untuk seluruh area Manajemen Risiko untuk risiko kredit. Meskipun demikian belum secara keseluruhan pegawai memiliki pemahaman dan penerapan yang baik. Perusahaan terus melakukan monitoring dan pendampingan untuk mengupayakan hal tersebut terealisasi dengan baik Perumusan penetapan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko telah berdasarkan kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan berdasarkan hasil penilaian profil risiko kredit, namun dalam pelaksanaannya masih perlu mendapatkan perhatian oleh seluruh risk owner dan satuan kerja pengendali, agar limit risiko yang ditetapkan aktif dilakukan monitoring untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi dan menetapkan strategi perbaikan yang harus dilakukan.
	Apakah dalam penyusunan rencana kerja telah merujuk pada penerapan manajemen risiko kredit	2	
	Apakah dalam menyusun rencana kerja telah mendasarkan pada pengalaman dan capaian sebelumnya dengan tetap memperhatikan pengelolaan dan mitigasi risiko kredit	3	
	Apakah kebijakan manajemen risiko kredit dilakukan kaji ulang oleh pihak yang independen dan dilaporkan ke Dewan Komisaris dan Direksi	4	
	Apakah kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko kredit memadai dan telah tersedia untuk seluruh area Manajemen Risiko untuk Risiko kredit, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai	3	
	Apakah perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko ditetapkan telah sesuai dengan sasaran strategi dan strategi bisnis	3	



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman13 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

2	Apakah BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kredit yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	3.13	BPP Manajemen Risiko telah mengatur mekanisme dan tata cara penetapan limit dan toleransi risiko kredit, namun dalam pelaksanaannya masing - masing fungsi yang berkaitan dengan risiko kredit belum optimal dalam memahami dan menjalankan seluruh aktivitas perkreditan termasuk menetapkan limit risiko kredit untuk seluruh aktivitas fungsional perkreditan. Seluruh unit kerja belum melakukan pengawasan dan monitoring limit dan toleransi risiko kredit secara optimal, sehingga upaya - upaya pencegahan dan perbaikan yang harus dilakukan juga tidak tepat waktu/ lebih dini. Saat ini monitoring terhadap limit dan toleransi risiko kredit masih dilakukan oleh Risk Residence Area pada masing-masing Kanwil yang menyampaikan laporan kepada kepala Kanwil tiap bulannya. Bank belum optimal melakukan evaluasi terhadap pelampauan limit dan toleransi risiko kredit serta penyebab terjadinya pelampauan limit. Sebagian besar SDM perkreditan belum memahami ketentuan limit dan toleransi risiko yang telah ditetapkan sebagai dasar acuan dalam pengendalian risiko. Satuan kerja manajemen risiko terus melakukan pendampingan melalui Risk Residence MR dalam meningkatkan pemahaman setiap SDM di masing-masing kanwil. Bank telah melakukan evaluasi dan mengkinikan ketentuan limit dan toleransi kredit berdasarkan kondisi usaha dan perkembangan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap proses perkreditan, antara lain perubahan POJK 33 tentang KAP menjadi POJK nomor 1 tahun 2024. Penetapan Limit dan toleransi risiko kredit telah memperhatikan antara aspek identifikasi, pengukuran, dan pengendalian risiko kredit serta limit secara komposit dengan merujuk pada Laporan Profil Risiko dan sesuai arah strategi perkreditan. Penetapan limit risiko belum sepenuhnya sesuai prosedur yang ditetapkan karena masing - masing risk owner perkreditan belum menyampaikan penetapan limit secara komprehensif berdasarkan hasil penilaian profil risiko serta strategi perbaikan yang akan dilakukan. Penyusunan penetapan limit masih terfokus pelaksanaannya oleh SKMR. Penetapan Limit dan toleransi risiko kredit telah meliputi limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per aktivitas fungsional pada tiap - tiap risk owner.
	Apakah Unit Kerja telah memahami penetapan limit dan toleransi risiko kredit yang ditetapkan dalam SK Direksi	3	
	Apakah Unit Kerja melakukan pengawasan monitoring limit dan toleransi risiko kredit	3	
	Apakah Unit Kerja melakukan evaluasi apabila terjadi pelampauan limit dan toleransi risiko yang ditetapkan	4	
	Apakah SDM telah memahami ketentuan limit dan toleransi risiko yang ditetapkan dan menjadi acuan dalam pengendalian manajemen risiko kredit	3	
	Apakah kebijakan penetapan limit dan toleransi risiko dilakukan pengkinian sesuai dengan kondisi usaha dan perkembangan faktor eksternal yang berpengaruh pada ketentuan limit yang telah ditetapkan	3	
	Apakah perumusan untuk penentuan limit dan toleransi risiko dilakukan sesuai dengan arah dan strategi perkreditan	3	



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman14 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

	Apakah penetapan limit telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan didokumentasikan sehingga memudahkan untuk dilakukan audit trail	3	
	Apakah penetapan limit dan toleransi risiko meliputi penetapan limit secara keseluruhan, per jenis risiko, dan per aktivitas fungsional yang memiliki exposure risiko	3	
3	Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko kredit sesuai dengan ketentuan?	3.00	Unit kerja perkreditan belum sepenuhnya memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan /atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risikonya Bank telah memiliki kebijakan penerbitan produk dan/atau aktivitas kredit baru yang diatur dalam BPP Manajemen Risiko tersebut, belum menjelaskan secara lengkap kriteria produk dan layanan baru, sistem dan prosedur kewenangan pengelolaan mulai dari unit kerja atau organisasi, tata kerja persiapan produk dan atau aktivitas kredit baru, uji coba, pelaksanaan, dan laporan pelaksanaannya. Kebijakan produk dan aktivitas baru dilakukan evaluasi secara berkala sesuai ketentuan. Pada periode penilaian semua kebijakan produk kredit dan aktivitas baru dilakukan evaluasi dan pengkinian yang telah diterbitkan pada Bulan Maret lalu.
	Apakah unit kerja telah memahami ketentuan dan prosedur produk dan aktivitas baru dan risiko yang melekat pada setiap produk dan mitigasinya	4	
	Apakah ketentuan kebijakan produk dan aktivitas telah didukung dengan ketentuan dan petunjuk kerja yang lengkap	3	
	Apakah ketentuan kebijakan produk dilakukan evaluasi secara berkala	2	
Hasil Penilaian Pilar 2 - Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Limit		3.04	Bank telah memiliki ketentuan, prosedur, dan penetapan limit risiko kredit serta telah ditetapkan melalui forum rapat komite serta melibatkan seluruh unit kerja. Bank juga telah melakukan pengkinian dan review atas ketentuan prosedur perkreditan dan disosialisasikan oleh unit kerja terkait. Namun pelaksanaan ketentuan dan prosedur penerapan manajemen risiko kredit masih belum optimal dan pemahaman unit kerja terhadap ketentuan tersebut masih lemah terbukti masih ditemukannya pelanggaran dan atas setiap kebijakan dan keputusan kredit yang ditetapkan belum sepenuhnya mendasarkan pada limit dan toleransi kredit yang ditetapkan secara berulang. Cakupan kebijakan pengelolaan risiko kredit tergolong cukup memadai di BPP Manajemen Risiko namun implementasi belum dilakukan oleh unit kerja perkreditan dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Proses penetapan limit risiko kredit cukup memadai namun dokumentasinya belum lengkap dan cukup sulit untuk dilakukan audit trail.
PILAR 3 : Kecukupan Proses dan Sistem			



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 15 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

1	Apakah BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kredit yang melekat pada kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko kredit?	3.30	SDM telah melaksanakan proses manajemen risiko kredit, tetapi masih terdapat kekurangan dalam pengukuran sensitivitas produk kredit, stresstesting perubahan kondisi, serta kurangnya laporan yang komprehensif untuk mitigasi risiko kredit. Belum seluruh jenjang organisasi memiliki pemahaman dan kemampuan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian aktivitas perkreditan secara komprehensif dan optimal Proses perkreditan telah dilakukan verifikasi dual control, namun dalam pelaksanaan proses verifikasi kurang dapat dilakukan secara mendetail. Proses pengambilan keputusan bidang perkreditan dilakukan melalui pembahasan dalam forum komite kredit namun belum sepenuhnya mencerminkan transparansi kondisi debitur karena kelemahan faktor SDM dalam melakukan pemenuhan dokumen dan informasi, analisa terkait dengan calon debitur dan usahanya. Proses Manajemen risiko kredit yang dilakukan terkadang masih belum didukung dengan data kredit yang informatif akurat dan komprehensif, namun perbaikan terus dilakukan untuk menunjang proses Manajemen Risiko yang akurat. Bank telah memiliki jenis-jenis produk kredit sesuai dengan karakteristik masing - masing, namun sejauh ini belum dilakukan analisa secara komprehensif terhadap risiko yang melekat pada masing - masing jenis produk. Evaluasi terhadap kesesuaian asumsi, data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko kredit sudah dilakukan, namun belum secara menyeluruh. Dalam melakukan pengukuran risiko kredit, belum dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan yang material pada kegiatan layanan, produk, dan faktor risiko. Pemantauan risiko kredit dilakukan dengan penetapan limit dan toleransi risiko pada aktivitas fungsional dan jenis risiko, namun belum dilakukan stresstesting terhadap exposure risiko yang ada. Perubahan yang material terhadap faktor risiko kredit belum dilakukan penyesuaian pelaporan, namun demikian akan terus dilakukan pengawasan untuk mengoptimalkan pelaporan-pelaporan jika terjadi perubahan.
	Apakah dalam aktivitas perkreditan seluruh SDM telah berpedoman pada penerapan manajemen risiko kredit	4	
	Apakah seluruh organisasi mampu dan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas perkreditan	4	
	Apakah dalam proses perkreditan dilakukan verifikasi dual control dan didukung dengan dokumen yang memadai	3	
	Apakah dalam proses pengambilan keputusan bidang perkreditan dilakukan secara pembahasan bersama dan dilakukan secara transparan	3	
	Apakah dalam proses manajemen risiko kredit telah didukung dengan data kredit yang akurat dan informatif	3	
	Apakah dalam proses manajemen risiko kredit telah melakukan analisa karakteristik risiko kredit yang melekat pada produk dan layanan	3	
	Apakah kesesuaian asumsi, data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko kredit telah dilakukan evaluasi	3	



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman16 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

	Apakah dalam melakukan pengukuran risiko kredit telah dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan yang material pada kegiatan layanan, produk, dan faktor risiko	4	
	Apakah dalam melakukan pemantauan risiko kredit telah dilakukan evaluasi terhadap eksposur risiko kredit	3	
	Apabila terdapat perubahan yang material dalam faktor risiko kredit apakah juga dilakukan penyesuaian pelaporan	3	
2	Apakah BPR telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko kredit serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	3.40	Bank telah memiliki sistem informasi pelaporan Manajemen Risiko untuk Risiko kredit yang dikembangkan oleh pihak eksternal dan SKMR. Sistem informasi Manajemen Risiko telah dapat diakses oleh seluruh unit kerja dan Satuan kerja manajemen risiko, namun sistem informasi risiko kredit belum sepenuhnya dapat memberikan laporan yang lengkap terkait dengan risiko perkreditan disetiap unit dan tingkat exposure risikonya. Informasi yang dapat disajikan masih terbatas pada data kuantitatif dan belum terdapat data penunjang laporan secara cepat dan terkini per aktivitas fungsional dari setiap unit kerja. Saat ini sudah dikembangkan sistem informasi Monitoring Limit dan toleransi risiko serta Profil Risiko untuk mendukung pelaporan risiko kredit, kedepan akan di kembangkan sistem informasi penilaian tingkat kesehatan Bank. Sistem informasi yang telah dikembangkan bank belum sepenuhnya dapat mendukung meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen risiko kredit, antara lain dalam SIM belum dapat disajikan rencana tindak lanjut dan residual risk sehingga apabila terjadi pelampauan maka risk owner akan melakukan pelaporan kepada SKMR dan menyusun strategi yang akan dilakukan untuk perbaikan. Sistem informasi yang dimiliki saat ini belum menyajikan informasi secara lengkap terkait penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Saat ini masih dikembangkan ke arah tersebut untuk menyempurnakan sistem informasi yang sudah ada.
	Sistem Informasi apa saja yang telah dimiliki termasuk dukungan CBS dan aplikasi bantu lainnya	3	
	Apakah sistem informasi risiko kredit dapat dan mudah diakses serta laporan yang lengkap	4	
	Apakah sistem informasi yang dimiliki mampu mendukung pelaporan risiko kredit yang lengkap dan cepat	3	
	Apakah sistem informasi yang dimiliki mampu meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen risiko kredit (terkait produk, layanan, limit, penilaian, contingency plan, dan fungsi pengawasan)	4	
	Apakah sistem informasi yang dimiliki menyajikan informasi realisasi penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan (Risk Control dan tindak lanjut perbaikannya)	3	



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman17 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

Hasil Penilaian Pilar 3 - Kecukupan Proses dan Sistem		3.35	Proses manajemen risiko kredit mencakup kegiatan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko kredit. Identifikasi dilakukan terhadap seluruh kegiatan untuk mengetahui sumber penyebab risiko kredit. Dalam melakukan pengukuran, parameter yang dikembangkan disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas bank, agar hasil pengukuran mencerminkan kondisi yang riil. Selanjutnya dilakukan pemantauan terhadap komposisi dan kondisi debitur, portfolio kredit, identifikasi kredit bermasalah, persyaratan kredit, kecukupan agunan dan kepatuhan terhadap limit. Pengendalian dilakukan secara aktif dengan pengelolaan portfolio kredit, batasan konsentrasi, penetapan kewenangan memutus kredit, memisahkan fungsi penyaluran kredit dengan fungsi yang menangani kredit bermasalah. Sistem informasi diperlukan untuk mendukung proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian, namun belum sepenuhnya mampu mendukung proses manajemen risiko kredit.
PILAR 4 : Sistem Pengendalian yang Menyeluruh			
1	Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko kredit, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	3.00	SKAI telah melakukan pemeriksaan penerapan manajemen risiko kredit pada Beberapa Divisi di Kantor Pusat dan 11 Kantor Cabang, mencakup evaluasi terhadap implementasi kebijakan, prosedur, proses dan mekanisme mitigasi risiko untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan internal. Hasil pemeriksaan menunjukkan beberapa temuan fundamental terkait kurang memadainya pengendalian internal. SKAI telah melakukan monitoring tindak lanjut temuan dengan mengirimkan progress tindak lanjut kepada Kepala Cabang maksimal tanggal 5 setiap bulannya dan telah melaporkan kepada Direktur Utama SKAI melakukan pengawasan terhadap setiap unit kerja dan individu yang terlibat dalam kebijakan manajemen risiko kredit terhadap pemahaman dan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang ditetapkan serta pemisahan tugas tanggungjawab yang jelas pada proses perkreditan. SKAI memastikan integritas dan efektivitas proses manajemen risiko dengan melakukan pengawasan yang mencakup verifikasi pemisahan fungsi secara jelas untuk mencegah konflik kepentingan, kelengkapan struktur organisasi, fungsi pelaporan yang efektif, dokumentasi yang komprehensif dalam penerapan kebijakan manajemen risiko. SKAI belum sepenuhnya melakukan verifikasi dan review terhadap sistem pengendalian internal manajemen risiko kredit, yang antara lain mencakup satuan kerja perkreditan berfungsi secara memadai, exposure risiko terjaga sesuai limit, pengelolaan posisi dan portfolio kredit, fungsi penyelesaian kredit bermasalah terpisah dengan fungsi penyaluran kredit, review terhadap agunan, dan melakukan evaluasi metode dan kecukupan CKPN.
	Apakah selama periode penilaian SKAI telah melakukan pemeriksaan penerapan manajemen risiko kredit di berapa cabang atau unit kerja di bidang manajemen risiko kredit? Apakah dalam aktivitas perkreditan seluruh SDM telah berpedoman pada penerapan manajemen risiko kredit	3	
	Apakah setiap temuan SKAI dalam penerapan manajemen risiko kredit telah dilakukan monitoring tindak lanjutnya dan telah dilaporkan kepada Direktur Utama	3	
	Apakah SKAI dalam penerapan manajemen risiko kredit telah melakukan pengawasan atas penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk kepatuhan kebijakan manajemen risiko kredit	3	



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman18 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

	Apakah SKAI telah melakukan pengawasan pada pemisahan fungsi, struktur organisasi, fungsi pelaporan, dan dokumentasi penerapan manajemen risiko kredit	3	
	Apakah SKAI telah melakukan verifikasi dan review terhadap sistem pengendalian intern manajemen risiko kredit	3	
2	Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko kredit telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	3.00	Unit kerja pengendalian telah terpisah secara jelas dari unit kerja operasional perkreditan untuk memastikan independensi, mencegah konflik kepentingan dan meningkatkan efektivitas pengendalian internal. Unit kerja perkreditan belum sepenuhnya memahami dan menjalankan tugas serta tanggung jawabnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang telah ditetapkan. Pemahaman terhadap penerapan kebijakan dan prosedur manajemen risiko kredit, evaluasi terhadap kelayakan kredit, serta pemantauan dan mitigasi risiko yang efektif masih kurang memadai.
	Apakah unit kerja pengendalian telah terpisah dari unit kerja operasional perkreditan	3	
	Apakah unit kerja perkreditan telah memahami dan menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tupoksi	3	
Hasil Penilaian Pilar 4 - Sistem Pengendalian yang Menyeluruh		3.00	Satuan kerja pengendalian yang meliputi Risk Management Unit (SKK dan SKMR) dan Risk Assurance (SKAI). Satuan Kerja Pengendalian telah memiliki pedoman kerja, namun demikian pelaksanaan pengendalian yang dilakukan belum sepenuhnya mengacu pada pedoman yang ditetapkan. Satuan kerja pengendalian melakukan rapat secara berkala untuk membahas pelaksanaan pengendalian yang dilakukan, namun belum menyampaikan rekomendasi secara tertulis kepada Direksi terkait dengan pengendalian risiko kredit. Risk Manajemen belum melakukan pengendalian secara khusus terhadap unit kerja dan atau aktifitas fungsional yang melanggar kepatuhan dan memiliki eksposur risiko kredit tinggi. Risk assurance dalam melakukan pengendalian masih belum komprehensif, sehingga potensi risiko kredit yang ada belum terdeteksi lebih dini. Hasil temuan pemeriksaan masih bersifat umum didominasi temuan pelanggaran regulasi perkreditan, belum optimalnya governance proses, prinsip kehati-hatian kurang optimal dijalankan, terdapat side streaming.

REKAP PENILAIAN KPMR KREDIT

Hasil Penilaian Pilar 1 - Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris	2.58
Hasil Penilaian Pilar 2 - Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Limit	3.04
Hasil Penilaian Pilar 3 - Kecukupan Proses dan Sistem	3.35
Hasil Penilaian Pilar 4 - Sistem Pengendalian yang Menyeluruh	3.00
Hasil Penilaian KPMR	3.35
	Kurang Memadai

URAIAN KPMR KREDIT

Dalam Penerapan manajemen risiko kredit Dewan Komisaris dan Direksi memiliki komitmen yang sangat kuat melalui kebijakan dan kerangka kerja yang terstruktur. Namun, implementasinya belum merata, dengan kelemahan pada pengelolaan SDM, pemahaman kebijakan, dan pelaksanaan prosedur. Proses manajemen risiko telah berjalan mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian, tetapi terkendala oleh sistem informasi yang belum optimal. Temuan menunjukkan pelanggaran regulasi, tata kelola yang lemah, dan kurangnya prinsip kehati-hatian. Satuan kerja pengendalian memiliki pedoman kerja dan rutin melakukan evaluasi, tetapi efektivitas pengendalian masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan manajemen risiko kredit. Berdasarkan dari hal tersebut penilaian KPMR kredit pada periode penilaian memiliki nilai risiko 3.35 dengan peringkat Kurang Memadai.
--



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 19 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

PROFIL NILAI KREDIT

Periode pelaporan				Periode Sebelumnya			
Risiko Inheren	Risiko KPMR	Tingkat Risiko	Kualitas Manrisk	Risiko Inheren	Risiko KPMR	Tingkat Risiko	Kualitas Manrisk
4.39	3.35	4.63	Risiko Sangat Tinggi (Dilakukan kaji ulang menyeluruh, rencana tindak dilaporkan bulanan)	3.92	3.35	4.00	Risiko Tinggi (Dilakukan kaji ulang menyeluruh, rencana tindak dilaporkan triwulanan)
Sangat Tinggi	Kurang Memadai	Sangat Tinggi	Risiko Sangat Tinggi (Dilakukan kaji ulang menyeluruh, rencana tindak dilaporkan bulanan)	Tinggi	Kurang Memadai	Tinggi	Risiko Tinggi (Dilakukan kaji ulang menyeluruh, rencana tindak dilaporkan triwulanan)

Komponen	Keterangan
Tingkat Risiko	Risiko Kredit menunjukkan bahwa pada Semester I 2025, tingkat risiko kredit berada pada peringkat Sangat Tinggi. Faktor utama yang menyebabkan risiko kredit ini memiliki peringkat Tinggi adalah kualitas kredit dan kredit bermasalah (NPL) yang masih sangat tinggi sehingga berdampak pada kualitas aset yang kurang baik. Beberapa permasalahan utama yang berkontribusi terhadap tingginya eksposur risiko kredit meliputi ekspansi kredit yang tidak sesuai target, dominasi konsentrasi kredit pada sektor berisiko tinggi, serta lemahnya penguasaan dan pelaksanaan bisnis proses. Selain itu, kompetensi SDM di bidang perkreditan masih belum memadai, khususnya dalam pemasaran dan observasi awal terhadap calon debitur. Unit kerja perkreditan juga masih menghadapi tantangan dalam menyalurkan kredit dengan plafon besar, terutama dalam kegiatan lapangan, analisis, dan monitoring. Faktor lain yang memperburuk risiko adalah kegagalan restrukturisasi kredit, keterlambatan dalam penanganan kredit bermasalah, serta strategi penyelesaian yang belum efektif akibat agunan yang tidak marketable dan appraisal yang tidak sesuai. Kekurangan SDM serta kekosongan jabatan struktural di unit perkreditan semakin memperburuk situasi. Evaluasi pendidikan belum dilakukan sehingga tidak ada alat ukur efektivitas pelatihan. Selain itu, monitoring, pendampingan, serta pengawasan dari atasan belum berjalan optimal. Masing-masing risk owner juga belum melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian profil risiko serta belum menyusun rencana perbaikan yang jelas. Penerapan Key Performance Indicator (KPI) serta sistem reward dan punishment terhadap kinerja individu maupun target kepala cabang yang belum optimal semakin memperlemah upaya mitigasi risiko kredit. Dengan berbagai permasalahan tersebut, diperlukan langkah strategis dan perbaikan yang sistematis agar risiko kredit dapat dikelola lebih efektif serta menurunkan tingkat NPL.
Risiko Inheren	Berdasarkan kertas kerja penilaian profil risiko secara konsolidasi nilai risiko inheren kredit di Laporan Profil Risiko adalah 4,39 atau peringkat Risiko Sangat Tinggi. Nilai risiko ditetapkan berdasarkan penilaian Risiko tertinggi yaitu di Pilar 2 kualitas aset. Hasil penilaian ini sama dengan periode penilaian sebelumnya. Kualitas kredit masih menjadi fokus dan titik risiko tertinggi selama periode tahun berjalan. Migrasi kredit masih terjadi pada tingkatan yang tinggi. Meskipun kredit dengan plafon besar telah dilakukan analisa dan review oleh second line dengan melakukan komite kredit secara berjenjang yang diputuskan oleh kantor pusat. Dalam memutuskan kredit masih ditemukan kesalahan dalam menentukan skema kredit yang tepat. Kelemahan dalam melakukan analisa repayment capacity dan memahami bisnis proses dari usaha calon debitur. kedepan bidang atau Divisi pemasaran akan merumuskan program-program yang dapat merangsang penyerapan NOA baru yang berfokus pada sektor UMKM dengan jangka waktu pendek dan menengah dengan mengedepankan data-data analisis yang tepat dan fokus pada kepuasan nasabah dalam layanan perbankan. Digitalisasi perbankan akan terus dikembangkan dimana hal ini menjadi nilai lebih bank dalam tingkat persaingan peer group BPR.
Tingkat Kualitas MR	Dalam Penerapan manajemen risiko kredit Dewan Komisaris dan Direksi memiliki komitmen yang sangat kuat melalui kebijakan dan kerangka kerja yang terstruktur. Namun, implementasinya belum merata, dengan kelemahan pada pengelolaan SDM, pemahaman kebijakan, dan pelaksanaan prosedur. Proses manajemen risiko telah berjalan mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian, tetapi terkendala oleh sistem informasi yang belum optimal. Temuan menunjukkan pelanggaran regulasi, tata kelola yang lemah, dan kurangnya prinsip kehati-hatian. Satuan kerja pengendalian memiliki pedoman kerja dan rutin melakukan evaluasi, tetapi efektivitas pengendalian masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan manajemen risiko kredit. Mendasarkan dari hal tersebut penilaian KPMR kredit pada periode penilaian memiliki nilai risiko 3.35 dengan peringkat kurang Memadai.



PT BPR BKK JATENG
(Perseroda)

RISIKO OPERASIONAL



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman20 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

(RISIKO OPERASIONAL)

INHEREN OPERASIONAL

No	Parameter	Nilai	Keterangan
PILAR 1 : Kompleksitas Bisnis Dan Kelembagaan			
1	Skala Usaha dan Struktur Organisasi	4.00	Skala usaha BPR tergolong besar dengan status BPR KU 3 dengan modal inti sebesar Rp 404,15 miliar dan berada pada kelompok 5 BPR dengan asset terbesar di Indonesia, namun demikian, masih terdapat kekosongan SOTK pada level Direksi yakni Direktur Kepatuhan dan Direktur Pemasaran, kekosongan Direktur Pemasaran diisi oleh Direktur Utama dan akan dilengkapi pada periode berikutnya. Dan masih terdapat 18 kekosongan jabatan di level kabisid, kasubid, residen area, kepala kantor kas dan kepala cabang.
2	Jaringan Kantor, rentang Kendali dan Lokasi Kantor Cabang	3.00	Jumlah maksimal jaringan kantor cabang yang diperkenankan untuk BPR KU 3 adalah 70 Kantor Cabang, dengan jumlah Kantor Cabang saat ini sebanyak 28 Kantor Cabang atau 28,5% dari yang diperkenankan. Dengan jumlah Kantor Kas sebanyak 102 Kantor Kas, selain itu Bank tidak memiliki Kantor Cabang diluar provinsi Rentang kendali cukup kecil dengan 28 Kantor Cabang berada pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, namun demikian terdapat lokasi kantor layanan yang sulit diakses karena berada pada wilayah kecamatan yang memakan waktu tempu lebih dari 1 jam dari Kantor Cabang. Hal ini tidak dapat dihindari karena menjadi komitmen Bank untuk meningkatkan akses literasi keuangan pada daerah yang masih minim akses perbankan 90% Jaringan Kantor Memiliki Peringkat Risiko Cukup. Beberapa Kakas memiliki rentang kendali yang luas karena akses telekomunikasi juga kurang stabil antara lain : Petungkriyono, Kandangserang, Paninggaran (KC Kab Pekalongan), KKas Salem (KC Brebes), KKas Pulosari (KC Pemalang), KKas Batur (KC Banjarnegara)
	Jaringan Kantor, rentang Kendali dan Lokasi Kantor Cabang	3	
	Rentang Kendali dan Lokasi Kantor Cabang	3	
	Jangkauan dan Ruang Kendali Kantor	3	
3	Keberagaman Produk dan atau Jasa	2.75	Bank memiliki produk yang termasuk dalam kegiatan usaha utama yakni Bank memiliki 13 jenis produk kredit dan 5 jenis produk simpanan. Produk tersebut telah disesuaikan dengan karakter dan potensi wilayah seluruh jaringan kantor cabang, serta kerjasama dengan pihak ketiga sebagai agen uang elektronik speedcash dengan cobranding K-ERIS Tingkat pemahaman risk taking unit terhadap keberagaman produk cukup baik didukung dengan adanya monitoring berkala yang dilakukan oleh Kantor Pusat terkait dengan evaluasi ketentuan setiap tahunnya Produk Bank memiliki jenis dan kompleksitas yang beragam dan telah dilengkapi dengan sistem dan prosedur yang cukup memadai, namun dalam pelaksanaannya belum berjalan optimal sesuai ketentuan Jenis transaksi Bank kurang kompleks dan volume transaksi harian dapat tercover oleh kapasitas layanan SDM dan CBS
	Keberagaman Produk dan atau Jasa	3	
	Keberagaman Produk	3	
	Kompleksitas Produk	3	
	Volume Transaksi	2	



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 21 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

4	Tindakan Korporasi	2.50	Bank merupakan hasil konsolidasi dan telah berjalan selama 5 tahun. Proses konsolidasi berpengaruh terhadap strategi bisnis dan budaya perusahaan dari strategi bisnis yang bersifat lokal (Kabupaten/Kota) menjadi strategi bisnis yang mencakup seluruh wilayah di Jawa Tengah. Strategi bisnis juga menyesuaikan dengan besarnya jumlah modal inti dengan lebih intens pada penyaluran kredit dan pengelolaan dana di sektor usaha menengah dan besar Corporate Plan disusun dalam jangka pendek (RBB), jangka menengah (3 tahun) dan jangka panjang (5 tahun), dengan menetapkan langkah-langkah strategis untuk pengembangan dan penguatan bank ke depan
	Tindakan Korporasi	2	
	Corporate Plan	3	
	Hasil Penilaian Pilar 1 - Kompleksitas Bisnis dan Kelembagaan	3.06	Bank merupakan hasil konsolidasi dan telah berjalan selama 6 tahun, memiliki 28 jaringan kantor cabang dan 102 kantor kas. Proses konsolidasi berpengaruh terhadap strategi bisnis dan budaya perusahaan. Strategi pengembangan diantaranya dengan jenis produk kredit dan produk simpanan yang cukup beragam. Ketidakterpenuhan struktur organisasi yang Direktur Kepatuhan dan Pemasaran serta 1 PE berdampak signifikan terhadap jalannya perusahaan. Ketidacukupan SDM dan kurangnya pemerataan juga menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya exposure risiko operasional. Pada Periode Semester I 2025 untuk pilar 1 exposure risiko operasional memiliki peringkat risiko Sedang.
PILAR 2 : Sumber Daya Manusia			
1	Kecukupan Kuantitas dan Kualitas SDM	3.33	Secara kuantitas Jumlah SDM sampai dengan Semester I 2025 sebanyak 1.481 orang. Masih terdapat kekosongan SOTK sebanyak 18 orang. Pada periode penilaian telah dilakukan proses analisa beban kerja dan pengembangan MSDM. Secara Kualitas belum sepenuhnya SDM memiliki kualitas yang memadai. Terdapat kekosongan SOTK pada fungsi yang signifikan yakni Direktur Pemasaran, Direktur Kepatuhan dan 18 kekosongan pada posisi jabatan Kadiv, Kabid, Kasubid, Kacab, Residen Area dan KanKas Sebagian besar telah memenuhi kecukupan SDM secara kuantitas, namun masih terdapat beberapa unit kerja yang terdapat kekosongan SDM seperti Kantor Pusat, Kantor Wilayah, 7 Kantor Cabang Terdapat 1.213 pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dari jumlah total pegawai sebanyak 1.481 orang (81,90%) Terdapat 12 pegawai mengundurkan diri pada periode penilaian, Dimana alasan resign pegawai diantaranya fokus mengurus keluarga, melanjutkan pendidikan, memilih berwirausaha dan bekerja ditempat lain Pada periode penilaian terdapat 256 pegawai dengan usia di atas 50 tahun atau pegawai (19.98%) dari jumlah pegawai 1.481 Masih terdapat kekosongan SOTK. Divisi SDM pada periode penilaian telah melakukan proses analisa beban kerja, namun belum sepenuhnya proses selesai sehingga keseimbangan beban kerja pada masing-masing unit kerja belum terukur NOA Kredit Juni 2025 sebesar 37.325 Jumlah SDM di bidang kredit sebesar 519 pegawai. Prosentase NOA Kredit terhadap SDM di bidang Kredit sebesar 0,014 Pada periode penilaian sedang dilakukakan proses analisa beban kerja, meskipun belum seluruh proses selesai.
			Belum dilaksanakan pengukuran kinerja pegawai berbasis manajemen risiko operasional pada periode penilaian Budaya kerja wajib memperhatikan pemberian penghargaan dan sanksi secara tepat, juga peningkatan kompetensi yang berkelanjutan Rotasi pegawai telah dilakukan namun dalam skala yang sangat kecil, sebagian besar pegawai belum dilakukan rotasi Rotasi PE menjalankan tugas 1 tahun dan selambat-lambatnya 4 tahun. Sebagian besar PE telah dilakukan rotasi. Masih ada beberapa PE yang menduduki jabatan lebih dari 4 tahun Jumlah Pelatihan Semester I 2025 43 kali. Jumlah evaluasi yang telah dijalankan 1 kali. Refreshment yang telah dijalankan 1 kali Evaluasi dilakukan efektif setiap 3 bulan sekali pada tiap Triwulan
	Kecukupan Kuantitas dan Kualitas SDM	4	



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman22 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

	Kecukupan Pegawai	4	
	Kecukupan Jumlah SDM	4	
	Kompetensi SDM	3	
	Tingkat Turn Over Pegawai Diluar Pensiun dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat	3	
	Pegawai yang Mendekati Usia Pensiun (usia 50 tahun ke atas)	2	
	Keseimbangan beban kerja	4	
	Perbandingan NOA Kredit Terhadap Jumlah SDM di Bidang Kredit	2	
	Analisa Beban Kerja Pegawai	3	
	Pengukuran Kinerja Pegawai	4	
	Mengembangkan Budaya Organisasi yang sadar risiko dan mengelola risiko	4	
	Rotasi Pegawai	4	
	Rotasi Pejabat Eksekutif	3	
	Kualitas Pelatihan Pegawai	3	
	Evaluasi Kualitas Pendidikan dan Pelatihan	3	
2	Permasalahan Operasional Karena Faktor Manusia (Human Error)	3.00	Masih terdapat kesalahan - kesalahan operasional yang bersumber dari human error, yang meliputi kesalahan administrasi, kesalahan dalam melakukan penilaian (kegiatan lapangan oleh AO kredit dan/atau analis), kesalahan dalam melakukan tindakan pengawasan melekat dan/atau berjenjang yang berdampak pada kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung.
Hasil Penilaian Pilar 2 - Sumber Daya Manusia		3.17	Bank telah menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko operasional, melakukan sosialisasi dan pendampingan, namun belum pada seluruh RTU dan/atau pegawai, belum dilakukan asesmen sebagai sarana evaluasi terhadap kompetensi SDM dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga belum dapat diukur apakah telah dilakukan penempatan pegawai pada fungsi yang sesuai dengan kompetensi. Hal ini mengakibatkan terjadinya human error yang tidak terdeteksi dini, karena fungsi monitoring dan pengawasan langsung dari atasan juga masih lemah. Human error ini berdampak pada meningkatnya exposure risiko - risiko lainnya, sehingga perlu segera dilakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kecukupan SDM. Kecukupan kuantitas dan kualitas SDM masih menjadi evaluasi yang perlu dilakukan tindak lanjut dengan cepat untuk memitigasi dan mengurangi risiko Operasional.

PILAR 3 : Penyelenggaraan Teknologi Informasi (TI)



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman23 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

1	Penyelenggaraan Teknologi Informasi (TI)	2.24	Penyelenggaraan TI dilakukan dengan vendor PT USSI dan telah dilakukan penilaian kualifikasi yang mencakup lisensi, reputasi kemampuan update arsitektur sistem terhadap perkembangan regulasi dan bisnis Bank telah memiliki infrastruktur untuk menunjang kelancaran kerja dan pengembangan layanan digital Bank telah melakukan pembagian segmentasi jaringan yang efektif untuk meningkatkan keamanan infrastruktur IT termasuk perangkat yang berada di dalam DC dan DRC serta menggunakan perangkat firewall FortiGate pada infrastruktur DC untuk membatasi akses keluar masuk data antara segmen jaringan. Bank telah menunjuk penyedia jasa layanan TI yang memiliki kualifikasi yang dapat menyesuaikan regulasi dan perkembangan teknologi serta memiliki rekam jejak yang baik terhadap bidang usahanya Jumlah SDM TI ada 2 orang, serta terdapat kekosongan Kepala Bidang TI, Sistem dan Jaringan. Jumlah kurang memadai dalam mendukung penyelenggaraan TI. Training untuk mengembangkan SDM sudah dilakukan Sudah tersedia user manual penggunaan CBS dan sudah melakukan sosialisasi dan training terhadap CBS Bank telah memiliki dokumen DRP dan sudah dilakukan pengujian pada DRC, namun belum semua fungsi CBS dilakukan pengujian Bank telah menyediakan anggaran sesuai dengan rencana Bank termasuk juga pengembangan TI Bank telah menunjuk penyedia jasa layanan TI yang memiliki kualifikasi yang dapat menyesuaikan regulasi dan perkembangan teknologi serta memiliki rekam jejak yang baik terhadap bidang usahanya
			Bank telah melakukan audit terhadap TI yang diterapkan namun bank belum sepenuhnya melakukan tindak lanjut atas hasil audit TI Bank telah memiliki kerja sama dengan penyedia jasa untuk menyediakan layanan TI mencakup VA, EDC dan QRIS Terjadi Penyalahgunaan Data Nasabah tapi tidak Berdampak pada Tuntutan Hukum dan reputasi Bank telah memiliki pengamanan mencakup user access, password, antivirus dan pengelolaan firewall Tersedia modul aplikasi inti perbankan yang disesuaikan kebutuhan size dan kompleksitas usaha Pada periode penilaian tidak terdapat gangguan pada CBS Penyedia jasa telah mengembangkan CBS paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku ketentuan Bank telah memiliki SIM, namun saat ini masih dalam proses pendefinisian kebutuhan atas SIM yang dibutuhkan
	Penyelenggaraan Teknologi Informasi (TI)	2	
	Perubahan Proses Pelaksanaan Tugas Dari Konvensional Ke Sistem Digital	2	
	Keamanan Informasi Dan Database TI	2	
	Kualifikasi Dan Rekam Jejak Penyedia Jasa Teknologi Informasi	2	
	Kecukupan Sumber Daya Manusia Bidang IT	4	
	Pemahaman Dan Penguasaan Pegawai Terhadap CBS Yang Digunakan	3	
	Ketersediaan Cbs Ketika Kondisi Darurat (Rencana Pemulihan Bencana)	3	
	Pengembangan Teknologi Informasi	2	
	Kualitas Pelayanan Jaringan Komunikasi TI	2	
	Pelaksanaan Audit Atas TI	2	



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman24 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

	Ketersediaan Fasilitas dan Teknologi Penunjang Layanan (Qris, EDC, Virtual Account, Mobil Kas Keliling, Mobile Banking, Laku Pandai)	3	
	Kualitas Keamanan Data Nasabah	2	
	Kualitas Keamanan Database System (User Access, Data Encrypt, Password, Antivirus, Firewall)	2	
	Kelengkapan Modul Aplikasi IntiPerbankan (CBS) dalam Menunjang Kegiatan Operasional (Modul Data Nasabah, Kredit, Tabungan, Deposito, Agunan, Akuntansi, Pelaporan, Antar Bank, Inventaris/Aset Tetap)	2	
	Gangguan Core Banking	1	
	Pengembangan Teknologi Informasi Terhadap Core Banking System	1	
	Ketersediaan Sistem Informasi Manajemen	3	
	Hasil Penilaian Pilar 3 - Penyelenggaraan Teknologi Informasi (TI)	2.24	Pada periode penilaian terdapat perbaikan server secara menyeluruh bertujuan untuk lebih menguatkan sistem keamanan Database. Sudah terdapat 3 lapis pengamanan pada server Database yang meliputi 1. Radio Wireless; 2. VPN; 3. Firewall. Namun belum dilakukan uji coba ketahanan keamanannya. Bank masih membutuhkan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM di Bidang TI mengingat Pada Unit Kerja Kantor Pusat baru terdapat 2 Pegawai di bidang TI, berkurang 1 Pegawai dibanding periode sebelumnya. SDM belum sepenuhnya memiliki pemahaman yang baik mengenai TI, namun cukup mampu mengoperasikan modul CBS. Sosialisasi terkait Core banking terus dilakukan agar Pegawai lebih paham dan menguasai CBS, Selama periode 2023 sudah dilakukan 2x sosialisasi terkait Core Banking Sistem dan sudah tersedia Manual Book yang akan dilakukan pembaruan berkelanjutan. Bank sudah mempunyai DRC yang terletak di Kantor Cabang Sukoharjo dan pada periode penilaian sedang dalam pengembangan. Bank belum menyediakan alokasi anggaran untuk pengembangan IT untuk meningkatkan pelayanan dalam rangka peningkatan bisnis. Bank mempersiapkan jaringan komunikasi bekerjasama dengan 1. Hypernet; 2. Iconnet; 3. Risc Com; 4. Telkom untuk mengoptimalkan support jaringan untuk mendukung kelancaran pekerjaan dan pelayanan. Bank sudah memiliki koneksi backup jaringan dengan sistem "Fail Over" pada mikrotik yang terpasang di seluruh jaringan Kantor Cabang maupun Kantor Kas.
PILAR 4 : Penyimpangan (Fraud)			
1	Penyimpangan (Fraud)	2.60	Sampai dengan periode Semester I 2025 terdapat penyimpangan fraud oleh 10 orang Karyawan dengan jenis fraud adalah penyalahgunaan aset (uang tunai) Pada periode penilaian terdapat 10 pegawai sebagai pelaku fraud dengan jumlah total pegawai 1481 dengan frekuensi penyimpangan sedang (0,67) dari jumlah SDM Terjadi 1 jenis variasi penyimpangan dan dengan tingkat frekuensi rendah. Berdampak pada kerugian tidak melebihi 0,5 % dari jumlah modal Bank Penyimpangan terjadi pada sejumlah lebih dari 5 % - 10 % dari jumlah unit kerja Terdapat 1 Jenis Tindakan Fraud selama periode Semester I 2025 yakni penyalahgunaan aset (uang tunai)
	Penyimpangan (Fraud)	3	
	Frekuensi Penyimpangan	3	
	Jenis Penyimpangan Pada Pelaksanaan Kegiatan Operasional	2	
	Sebaran Penyimpangan / Fraud	3	
	Jenis Tindakan Fraud	2	



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman25 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

Hasil Penilaian Pilar 4 - Penyimpangan (Fraud)		2.60	Pada periode penilaian terjadi peningkatan Penyimpangan frekuensi yakni dilakukan oleh 10 orang, Frekuensi Indeks Fraud dalam tingkatan yang cenderung sedang. Pada periode penilaian Terjadi peningkatan sebaran penyimpangan dibanding dengan periode sebelumnya, pada periode semester II 2024 terjadi di 2 cabang sedangkan pada semester I 2025 terjadi di 6 cabang yang meliputi KC Demak, KC Boyolali, KC Wonogiri, KC Sragen, KC Brebes dan KC Banjarnegara.
PILAR 5 : Faktor Eksternal			
1	Faktor Eksternal	2.57	Terdapat kejadian banjir pada beberapa jaringan kantor pada kantor cabang Demak, Brebes, Pekalongan dan Kota Pekalongan yang mengganggu aktivitas layanan pada beberapa kantor kas. Pada periode penilaian terdapat regulasi dari OJK, POJK 1 tahun 2024, POJK 7 Tahun 2024, POJK 9 Tahun 2024 yang berdampak pada kinerja bank, utamanya pojk 1 tahun 2024 tentang kualitas aset BPR, dimana fasilitas debitur pada bank lain akan mempengaruhi kualitas fasilitas pada bank. Dibanding kompetitor, sarana prasarana Bank cukup memadai dengan jaringan kantor layanan yang tersebar sampai dengan wilayah kecamatan di kabupaten kota. Bank telah menetapkan Standard dan kualitas layanan pegawai Bank yang dapat bersaing dengan kompetitor, standard kualitas layanan tersebut diterapkan dengan cukup baik oleh setiap pegawai dengan memberikan service excellence kepada nasabah. Seluruh jaringan kantor memiliki tingkat keamanan yang cukup baik, ada security, alat pemadam kebakaran, CCTV dan alarm tanda bahaya.. Pada periode penilaian terdapat gangguan bencana alam banjir yang mengganggu layanan pada Kkas Karanganyar pada KC Demak, KC Brebes, KC Kota Pekalongan.
	Kesehatan Pegawai	2	
	Keselamatan Kerja	2	
	Jumlah Pengaduan Nasabah	3	
	Kelengkapan Ketentuan dan Pedoman Operasional	3	
	Pengawasan Internal	2	
	Kejadian Luar Biasa yang Berpengaruh Terhadap Kegiatan Layanan	3	
Hasil Penilaian Pilar 5 -Faktor Eksternal		2.57	Pada periode penilaian terdapat regulasi dari OJK, POJK 1 tahun 2024, POJK 7 Tahun 2024, POJK 9 Tahun 2024 yang berdampak pada kinerja bank, utamanya pojk 1 tahun 2024 tentang kualitas aset BPR, dimana fasilitas debitur pada bank lain akan mempengaruhi kualitas fasilitas pada bank. Terdapat kejadian banjir pada beberapa jaringan kantor pada kantor cabang Demak, Brebes, Pekalongan dan Kota Pekalongan yang mengganggu aktivitas layanan pada beberapa kantor kas..
LAINNYA			
1	Faktor Lainnya	1.50	Bank memberikan fasilitas jaminan kesehatan serta kecelakaan kerja melalui BPJS yang dapat mengcover biaya kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja pegawai. Selama periode penilaian tidak terjadi kejadian keselamatan kerja Selama periode penilaian terdapat 4 jumlah pengaduan nasabah dengan status akhir sudah ditutup. Bank telah memiliki Ketentuan dan Pedoman Operasional, namun pada periode penilaian belum dilakukan review/pengkinian. Fungsi pengawasan dibagi dalam 3 lini, yang pertama pengawasan langsung dari antar pegawai dan atasan, lini kedua dari SKMR dan SKK, lini ketiga SKAI. Lini yang paling mendasar memiliki pengaruh terhadap fungsi pengawasan adalah lini pertama, dan pada lini ini pengawasan belum berjalan dengan baik sehingga masih terdapat kelemahan dan penyimpangan yang berdampak pada meningkatnya exposure risiko operasional dan risiko lain, sedangkan pelaksanaan pengawasan oleh lini kedua dan ketiga juga belum optimal. Pada periode Semester I tahun 2025 bank tidak pernah mengalami atau tidak terdampak kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap kegiatan layanan.
	Kesehatan Pegawai	1	



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 26 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

Keselamatan Kerja	1	
Jumlah Pengaduan Nasabah	1	
Kelengkapan Ketentuan dan Pedoman Operasional	3	
Pengawasan Internal	2	
Kejadian Luar Biasa yang Berpengaruh Terhadap Kegiatan Layanan	1	
Lainnya	1.50	Bank telah memberikan fasilitas jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja bagi pegawai melalui BPJS. Selama periode penilaian, terdapat delapan kasus kecelakaan kerja ringan yang terjadi di beberapa kantor cabang, dengan pegawai yang terlibat telah teridentifikasi. Selain itu, terdapat empat pengaduan nasabah yang semuanya telah diselesaikan. Dari segi operasional, bank telah memiliki ketentuan dan pedoman yang mengatur operasionalnya, namun belum dilakukan pembaruan selama periode penilaian. Fungsi pengawasan di bank dibagi menjadi tiga lini, dengan lini pertama sebagai pengawasan langsung antar pegawai dan atasan. Sayangnya, pengawasan pada lini pertama belum berjalan dengan optimal, sehingga menyebabkan kelemahan dan penyimpangan yang meningkatkan risiko operasional. Pengawasan oleh lini kedua dan ketiga juga masih belum optimal.

REKAP PENILAIAN INHEREN OPERASIONAL	
Hasil Penilaian Pilar 1 - Kompleksitas Bisnis dan Kelembagaan	3.06
Hasil Penilaian Pilar 2 - Sumber Daya Manusia	3.17
Hasil Penilaian Pilar 3 - Penyelenggaraan Teknologi Informasi (TI)	2.24
Hasil Penilaian Pilar 4 - Penyimpangan (Fraud)	2.60
Hasil Penilaian Pilar 5 - Faktor Eksternal	2.57
Hasil Penilaian Lainnya	1.50
Hasil Penilaian Inheren	3.17
	Sedang

URAIAN INHEREN OPERASIONAL
Risiko inheren operasional menunjukkan bahwa bank yang telah beroperasi selama 6 tahun ini menghadapi berbagai capaian dan tantangan dalam pengelolaan risiko. Konsolidasi yang mempengaruhi strategi bisnis dan budaya perusahaan menjadi salah satu faktor risiko utama. Meskipun kebijakan dan prosedur manajemen risiko operasional telah ditetapkan, pelaksanaannya belum optimal, terutama dalam pemerataan dan kecukupan SDM. Kekurangan SDM ini berkontribusi pada peningkatan human error yang tidak terdeteksi dini akibat lemahnya monitoring dan pengawasan. Selama periode penilaian masih ditemukan penyimpangan, sebagian besar terjadi pada perkreditan serta kas, dana, dan operasional. Penyimpangan ini disebabkan oleh lemahnya fungsi Maker, Checker, & Approval, serta analisis dan monitoring yang belum optimal. Meskipun terjadi penurunan dalam jenis penyimpangan, masih dibutuhkan penguatan tata kelola, monitoring, serta evaluasi untuk memitigasi risiko operasional secara lebih efektif. Di sektor teknologi informasi (TI), bank telah meningkatkan keamanan server dengan tiga lapis pengamanan, tetapi belum melakukan uji ketahanan. Keterbatasan SDM baik dari segi jumlah maupun kompetensi juga menjadi kendala dalam pengelolaan sistem yang lebih efektif. Sosialisasi modul Core Banking System (CBS) telah dilakukan, tetapi masih diperlukan pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan penguasaan teknologi. Berdasarkan pada hal itu maka nilai tingkat risiko operasional pada periode Semester I Tahun 2025 adalah 3,17 atau termasuk pada peringkat risiko kategori sedang



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 27 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

KPMR OPERASIONAL

No	Parameter KPMR	Peringkat Risiko	Keterangan
PILAR 1 : Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris			
1	Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	2.20	Dewan Komisaris telah menyetujui kebijakan operasional dan ketentuan - ketentuan lain yang meliputi SOP, Penyelenggaraan TI, pengadaan pegawai, mutasi rotasi dan promosi, budaya perusahaan, peraturan kepegawaian, strategi dan kerangka manajemen operasional, serta limit dan toleransi risiko operasional. Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko operasional, antara lain dengan melakukan penilaian terhadap kecukupan kualitas dan kuantitas kebijakan serta prosedur dengan peraturan OJK dan praktek umum terbaik sesuai kapasitas dan kompleksitas bank . Dewan Komisaris mampu mengimplementasikan kompetensinya pada bidang manajemen risiko dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko operasional dan memberikan arahan perbaikan yang harus dilakukan oleh Direksi. Dewan Komisaris telah memastikan penerapan kebijakan manajemen risiko operasional kepada Direksi dan jajarannya antara lain dengan mengikuti kegiatan exit meeting dan kegiatan MMA untuk mencermati temuan - temuan hasil pemeriksaan atau temuan pada proses kerja terhadap penerapan kebijakan manajemen risiko operasional. selain itu, juga dilakukan pertemuan bersama dengan Satuan Kerja Pengendalian, juga pernah melakukan pertemuan khusus dengan RTU risiko operasional yaitu divisi SDM dan divisi operasional. Dewan Komisaris telah mempertimbangkan masukan dari Komite Pemantau Risiko. Komite Pemantau Risiko secara berkala telah menyampaikan laporan dan rekomendasi secara tertulis kepada Dewan Komisaris.
	Apakah ketentuan dan kebijakan manajemen risiko operasional yang disetujui Dewan Komisaris apa saja yang telah ditetapkan (PKPB, SK Direksi, SOP operasional, SE Direksi, SK BWMK, SK Limit dan Toleransi Risiko)	2	
	Apakah evaluasi ketentuan dan kebijakan manajemen risiko operasional yang disetujui Dewan Komisaris telah dilakukan (Ketentuan operasional yang diterbitkan selama periode penilaian) dan kapan dilakukan secara periodik serta dilakukan kepada siapa saja	2	
	Apakah Dewan Komisaris mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen risiko operasional dalam menjalankan tugas dan fungsinya	2	
	Apakah Dewan Komisaris telah memastikan Direksi dan jajarannya dalam penerapan manajemen risiko operasional sesuai kebijakan manajemen risiko yang ditetapkan	3	
	Apakah Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi telah mempertimbangkan masukan dari Komite Pemantau Risiko	2	



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 28 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

2	Apakah Dewan komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko operasional secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud ?	2.80	Pada periode penilaian Direksi belum melaporkan pertanggungjawaban penerapan kebijakan manajemen risiko operasional kepada Dewan Komisaris secara tertulis. Laporan yang disampaikan adalah laporan hasil pemeriksaan SKAI, sehingga pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris tidak optimal karena belum tersaji informasi yang komprehensif terhadap pertanggungjawaban penerapan kebijakan manajemen risiko operasional. Dewan Komisaris telah memberikan masukan penerapan manajemen risiko operasional dengan melakukan pertemuan bersama Divisi Operasional tentang optimalisasi Core Banking System, yang disampaikan dalam Forum Rapat Pengurus. Dewan Komisaris telah melakukan monitoring tindak lanjut penerapan manajemen risiko operasional dari Direksi terkait dengan capaian RBB, kejadian yang berdampak kerugian, ketersediaan sumber daya manusia, peningkatan kompetensi SDM, pengisian pejabat, keamanan TI. Dewan Komisaris secara konsisten telah mengembangkan budaya manajemen risiko operasional dengan memastikan seluruh ketentuan operasional telah dipenuhi, mengawal implementasinya dengan melakukan kunjungan ke cabang, memantau tindak lanjut hasil kunjungan SKMR dan SKAI, mendorong terpenuhinya kecukupan SDM Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan transaksi pembelian tanah untuk rencana pembangunan gedung kantor pusat dan kegiatan pendukung operasional lainnya
	Apakah Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban Direksi dalam penerapan manajemen risiko operasional secara tertulis dan dalam forum rapat (terdapat notulen)	3	
	Apakah Dewan Komisaris memberikan masukan dan pengarah penerapan manajemen risiko operasional kepada Direksi secara tertulis dan forum rapat	2	
	Dewan Komisaris melakukan monitoring tindak lanjut evaluasi pertanggungjawaban Direksi penerapan manajemen risiko operasional	3	
	Apakah Dewan Komisaris secara konsisten mengembangkan budaya sadar risiko operasional	3	
	Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris	3	
3	Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko operasional, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	2.33	Direksi telah mengimplementasikan kompetensinya terkait manajemen risiko operasional. Secara keseluruhan telah di implementasikan dalam penerapan manajemen risiko operasional. Namun masih terdapat beberapa risiko operasional yang memerlukan perhatian seperti kekosongan SOTK pada fungsi yang signifikan dan penyimpangan kejadian Fraud. Ketentuan dan kebijakan manajemen risiko operasional yang disetujui dan ditetapkan oleh Direksi diantaranya dalam bentuk SK Direksi, SOP Operasional dan SE Direksi terkait pemenuhan kebijakan manajemen risiko operasional yang diberlakukan di seluruh kantor cabang. Direksi telah melakukan evaluasi kebijakan dan ketentuan manajemen risiko operasional secara berkala berdasarkan temuan - temuan implementasi kebijakan yang bersumber dari temuan OJK, temuan SKAI, laporan profil risiko atau kaji ulang oleh pihak internal atau eksternal



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 29 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

	Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen risiko operasional (Pelatihan tentang manajemen risiko operasional yang diikuti, pengalaman di bidang yang berkaitan dengan manajemen risiko operasional)	3	
	Ketentuan dan kebijakan manajemen risiko operasional yang disetujui Direksi apa saja yang telah ditetapkan (SK Direksi, SOP operasional, SE Direksi)	2	
	Kapan evaluasi ketentuan dan kebijakan manajemen risiko operasional yang disetujui Direksi dilakukan (Ketentuan operasional yang diterbitkan selama periode penilaian)	2	
4	Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi Risiko operasional, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko operasional terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	2.60	Direksi telah melakukan tindakan mitigasi risiko antara lain melalui pembahasan dalam forum Komite Manajemen Risiko secara berkala. Direksi juga melakukan tindakan pengendalian risiko operasional dalam exit meeting pemeriksaan SKAI pada setiap Unit Kerja. Namun implementasi di tingkat RTU belum dilaksanakan dengan optimal sehingga temuan berulang masih terjadi. Direksi telah menyampaikan kepada seluruh unit kerja khususnya Kepala Cabang dan Pejabat Eksekutif melalui forum evaluasi setiap bulan tindakan dan kebijakan pengendalian risiko operasional, kepada jenjang organisasi lain dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan kegiatan monitoring, mentoring dan advising ke cabang. Direksi secara konsisten mengembangkan budaya risiko operasional dengan melakukan pemenuhan dan/atau pengkinian ketentuan, sosialisasi, pemantauan implementasi serta penilaian profil risiko operasional secara berkala, mengembangkan budaya perusahaan, mencontohkan sebagai sosok panutan, melakukan evaluasi dan menyusun langkah - langkah perbaikan terhadap hasil penilaian profil risiko. Direksi melakukan review terhadap delegasi wewenang memutus transaksi operasional dan transaksi bisnis, wewenang melakukan tindakan hukum kepada pejabat eksekutif, dan kewenangan lain berdasarkan prinsip kehati-hatian terhadap risiko operasional. Direksi telah melakukan evaluasi terhadap usulan transaksi yang diterima sebelum memberikan persetujuan.
	Apakah Direksi secara konsisten mengambil tindakan yang perlu dilakukan dalam mitigasi risiko operasional	3	
	Apakah Direksi secara berkala menyampaikan tindakan dan kebijakan dalam rangka pengendalian dan mitigasi risiko kepada seluruh unit kerja	2	
	Apakah Direksi secara konsisten telah mengembangkan budaya sadar risiko operasional kepada seluruh unit kerja	3	
	Apakah Direksi secara berkala melakukan review atas kebijakan pendelegasian kewenangan yang diberikan	2	
	Apakah Direksi telah melakukan evaluasi terhadap usulan transaksi yang diterima sebelum memberikan persetujuan.	3	



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 30 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

5	Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi operasional dan fungsi Manajemen Risiko operasional?	3.25	Fungsi second line SKMR dan SKK telah terpisah dari unit kerja operasional dan melaksanakan tugasnya secara independen Kecukupan organisasi Unit Kerja masih belum terpenuhi, baik dari jumlah SDM, kelengkapan pejabat, maupun kompetensinya. Terdapat kekurangan SDM dan kekosongan pejabat di Cabang antara lain pegawai setingkat Kepala Bidang dan staf. Terdapat kekurangan 2 Direksi. Kompetensi pegawai belum merata di setiap unit kerja. Unit kerja yang mengelola risiko operasional belum sepenuhnya memiliki jumlah SDM yang cukup, baik dari kualitas maupun kuantitas. Sedang kecukupan kompetensi terkait manajemen risiko pada semua jenjang organisasi, masih belum memadai, sehingga perlu adanya peningkatan kompetensi melalui berbagai metode yang sesuai dengan kondisi SDM yang ada. Proses operasional telah dijalankan secara independen namun masih terdapat kelemahan, diantaranya belum dilakukan penilaian kinerja individu, belum terdapat reward dan punishment secara tegas, belum optimal dalam rotasi pegawai.
	Fungsi Second Line (SKMR dan SKK) apakah telah terpisah dari Unit Kerja operasional dan melaksanakan tugasnya secara independen	2	
	Apakah kecukupan organisasi di unit kerja operasional telah didukung dengan kompetensi yang baik	4	
	Apakah kecukupan organisasi di satuan manajemen risiko operasional telah didukung dengan kompetensi yang baik	4	
	Apakah proses operasional dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan oleh masing-masing unit kerja secara independen	3	
6	Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko operasional?	3.33	SOTK telah sesuai dengan kebijakan manajemen risiko operasional, namun masih terjadi rangkap jabatan pada fungsi Direktur Kepatuhan, Kepala Cabang. Pada periode penilaian telah dilaksanakan pengembangan pedoman pengelolaan SDM melalui pengembangan MSDM, analisa beban kerja dan career path. Pada periode pelaporan, belum dilakukan evaluasi ketercukupan SDM, sehingga beberapa unit kerja / kantor cabang masih kekurangan SDM.
	Apakah ketentuan SOTK telah sesuai dengan penerapan manajemen risiko operasional, tidak terdapat perangkapan jabatan, independen	3	
	Apakah pedoman pengelolaan SDM dilakukan review secara berkala	3	
	Apakah Direksi melakukan evaluasi ketercukupan jumlah SDM bidang operasional	4	
Hasil Penilaian Pilar 1 -Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris		2.75	Dewan Komisaris dan Direksi memiliki komitmen yang tinggi dalam penerapan kebijakan Manajemen Risiko operasional dengan menetapkan kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko operasional, melakukan review secara berkala, menetapkan langkah - langkah untuk memastikan. Pengurus telah menindaklanjuti komitmen pemeriksaan OJK tentang penerapan kebijakan manajemen risiko operasional meskipun belum secara menyeluruh diterapkan. Masih terdapat kelemahan antara lain pemenuhan dan pengelolaan sumber daya manusia, pelaksanaan dan penerapan atas kebijakan manajemen risiko operasional yang ditetapkan, implementasi, maupun pengawasan rencana strategi manajemen risiko operasional di setiap unit kerja.

PILAR 2 : Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Limit



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 31 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

1	Apakah BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko operasional yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	2.80	Rencana bisnis bank disusun berdasarkan strategi penerapan manajemen risiko mengacu pada hasil penerapan / profil risiko operasional. Penyusunan rencana bisnis bank telah berdasarkan pada hasil penilaian profil risiko dimasa lalu, dan strategi serta kerangka manajemen risiko yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi profil risiko operasional Kebijakan manajemen risiko operasional dilakukan kaji ulang oleh SKMR, namun belum dilakukan kaji ulang oleh SKAI atau pihak eksternal. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko operasional telah tersedia untuk seluruh area Manajemen Risiko untuk risiko operasional. Meskipun demikian belum secara keseluruhan pegawai memiliki pemahaman dan penerapan yang baik. Perusahaan terus melakukan monitoring dan pendampingan untuk mengupayakan hal tersebut terealisasi dengan baik. Perumusan penetapan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko telah berdasarkan kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan berdasarkan hasil penilaian profil risiko operasional, namun dalam pelaksanaannya masih perlu mendapatkan perhatian oleh seluruh risk owner dan satuan kerja pengendali, agar limit risiko yang ditetapkan aktif dilakukan monitoring untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi dan menetapkan strategi perbaikan yang harus dilakukan
	Apakah dalam penyusunan rencana kerja telah merujuk pada penerapan manajemen risiko operasional	3	
	Apakah dalam menyusun rencana kerja telah mendasarkan pada pengalaman dan capaian sebelumnya dengan tetap memperhatikan pengelolaan dan mitigasi risiko operasional	2	
	Apakah kebijakan manajemen risiko operasional dilakukan kaji ulang oleh pihak yang independen dan dilaporkan ke Dewan Komisaris dan Direksi	3	
	Apakah kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko operasional memadai dan telah tersedia untuk seluruh area Manajemen Risiko untuk Risiko operasional, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai	3	
	Apakah perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko ditetapkan telah sesuai dengan sasaran strategi dan strategi bisnis	3	



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman32 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

2	Apakah BPR: Memiliki prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional yang ditetapkan oleh Direksi Melaksanakan prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan Melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional secara berkala?	3.00	BPP Manajemen Risiko telah mengatur mekanisme dan tata cara penetapan limit dan toleransi risiko operasional, namun dalam pelaksanaannya masing - masing fungsi belum optimal dalam memahami dan menjalankan seluruh aktivitas termasuk menetapkan limit risiko untuk seluruh aktivitas operasional. Bank telah melaksanakan prosedur manajemen risiko operasional dan penetapan limit dan toleransi risiko. Seluruh unit kerja belum melakukan pengawasan dan monitoring limit dan toleransi risiko operasional secara optimal, sehingga pencegahan dan perbaikan yang harus dilakukan juga tidak tepat waktu/ lebih dini. Bank belum optimal melakukan evaluasi terhadap pelampauan limit dan toleransi risiko operasional serta penyebab terjadinya pelampauan limit. Sebagian besar SDM belum memahami ketentuan limit dan toleransi risiko yang telah ditetapkan sebagai dasar acuan dalam pengendalian risiko. Satuan kerja manajemen risiko terus melakukan pendampingan dalam meningkatkan pemahaman setiap SDM. Bank telah melakukan evaluasi dan mengkinikan ketentuan limit dan toleransi risiko operasional berdasarkan kondisi usaha dan perkembangan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap proses operasional, antara lain perubahan POJK 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat.. Penetapan limit risiko telah memperhatikan data history serta memperhitungkan kemampuan Bank dalam menyerap risiko kredit., kemampuan SDM dan faktor eksternal serta arah strategi bisnis bank. Penetapan limit risiko belum sepenuhnya sesuai prosedur yang ditetapkan karena masing - masing risk owner operasional belum menyampaikan penetapan limit secara komprehensif. Penyusunan penetapan limit masih terfokus pelaksanaannya oleh SKMR. Penetapan Limit dan toleransi risiko kredit telah meliputi limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per aktivitas fungsional pada tiap - tiap risk owner operasional berdasar hasil penilaian profil risiko pada masing - masing risk owner.
	Apakah Unit Kerja telah memahami penetapan limit dan toleransi risiko operasional yang ditetapkan dalam SK Direksi	3	
	Apakah Unit Kerja melakukan pengawasan monitoring limit dan toleransi risiko operasional	3	
	Apakah Unit Kerja melakukan evaluasi apabila terjadi pelampauan limit dan toleransi risiko yang ditetapkan	4	
	Apakah SDM telah memahami ketentuan limit dan toleransi risiko yang ditetapkan dan menjadi acuan dalam pengendalian manajemen risiko operasional	3	
	Apakah kebijakan penetapan limit dan toleransi risiko dilakukan pengkinian sesuai dengan kondisi usaha dan perkembangan faktor eksternal yang berpengaruh pada ketentuan limit yang telah ditetapkan	3	
	Apakah perumusan untuk penentuan limit dan toleransi risiko dilakukan sesuai dengan arah dan strategi operasional	3	
	Apakah penetapan limit telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan didokumentasikan sehingga memudahkan untuk dilakukan audit trail	3	



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 33 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

	Apakah penetapan limit dan toleransi risiko meliputi penetapan limit secara keseluruhan, per jenis risiko, dan per aktivitas fungsional yang memiliki exposure risiko	2	
3	Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko operasional sesuai dengan ketentuan?	3.00	Unit kerja operasional belum sepenuhnya memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan /atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risikonya Bank telah memiliki kebijakan penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang diatur dalam BPP Manajemen Risiko namun ketentuan tersebut belum ditetapkan dalam ketentuan dan pedoman tersendiri. BPP Manajemen Risiko tersebut juga belum menjelaskan secara lengkap kriteria produk dan layanan baru, sistem dan prosedur kewenangan pengelolaan mulai dari unit kerja atau organisasi, tata kerja persiapan produk dan atau aktivitas kredit baru, uji coba, pelaksanaan, dan laporan pelaksanaannya. Kebijakan produk dan aktivitas baru dilakukan evaluasi secara berkala sesuai ketentuan, namun pada periode penilaian belum melakukan evaluasi terhadap kebijakan produk dan aktivitas baru.
	Apakah unit kerja telah memahami ketentuan dan prosedur produk dan aktivitas baru dan risiko yang melekat pada setiap produk dan mitigasinya	3	
	Apakah ketentuan kebijakan produk dan aktivitas telah didukung dengan ketentuan dan petunjuk kerja yang lengkap	3	
	Apakah ketentuan kebijakan produk dilakukan evaluasi secara berkala	3	
Hasil Penilaian Pilar 2 - Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Limit		2.93	Bank telah memiliki ketentuan, prosedur, dan penetapan limit. Limit risiko operasional serta telah ditetapkan melalui forum rapat komite serta melibatkan seluruh unit kerja namun belum dilakukan review secara berkala. Bank belum melakukan pengkinian dan review atas setiap ketentuan prosedur operasional dan disosialisasikan oleh unit kerja terkait. Namun pelaksanaan ketentuan dan prosedur penerapan manajemen risiko operasional masih belum optimal dan pemahaman unit kerja terhadap ketentuan tersebut masih lemah terbukti masih ditemukannya pelanggaran dan atas kebijakan operasional yang ditetapkan. Belum sepenuhnya dilakukan monitoring pada limit dan toleransi risiko operasional yang ditetapkan.. Cakupan kebijakan pengelolaan risiko operasional cukup memadai di BPP Manajemen Risiko namun implementasi belum dilakukan oleh unit kerja operasional dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Proses penetapan limit risiko operasional cukup memadai namun dokumentasinya belum lengkap dan cukup sulit untuk dilakukan audit trail. Berdasarkan hal tersebut maka penilaian pilar 2 adalah 2,93 (Cukup Memadai)
PILAR 3 : Kecukupan Proses dan Sistem			



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 34 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

1	Apakah BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko operasional yang melekat pada kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko operasional?	3.20	SDM telah melaksanakan proses manajemen risiko operasional, tetapi masih terdapat kekurangan dalam pengukuran potensi kerugian akibat fraud, stresstesting perubahan kondisi, serta kurangnya laporan yang komprehensif untuk mitigasi risiko operasional. Belum seluruh jenjang organisasi memiliki pemahaman dan kemampuan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian aktivitas operasional. Masih sering terjadi kegiatan operasional belum mengacu pada penerapan prinsip kehati-hatian. Bank telah melaksanakan proses manajemen risiko operasional, namun pelaksanaan proses tersebut belum dilakukan secara menyeluruh, termasuk dalam hal verifikasi dual control dan dukungan dokumen yang memadai. Proses pengambilan keputusan bidang operasional dilakukan melalui pembahasan dalam forum komite SDM, Komite Pengadaan Barang jasa, Komite Penghapusan Aset, Proses Manajemen risiko operasional yang dilakukan terkadang masih belum didukung dengan data yang informatif akurat dan komprehensif, namun perbaikan terus dilakukan. Bank telah memiliki jenis-jenis produk dan layanan sesuai dengan karakteristik masing - masing, namun sejauh ini belum dilakukan analisa terhadap risiko yang melekat pada masing - masing jenis produk. Evaluasi terhadap kesesuaian asumsi, data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko operasional sudah dilakukan, namun belum secara menyeluruh. Pengukuran risiko operasional, belum dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan yang material pada kegiatan layanan, produk, dan faktor risiko. Pemantauan risiko operasional dilakukan dengan penetapan limit dan toleransi risiko pada aktivitas fungsional dan jenis risiko, namun belum dilakukan stres testing terhadap exposure risiko yang ada. Perubahan yang material terhadap faktor risiko operasional belum dilakukan penyesuaian pelaporan, namun akan terus dilakukan pengawasan untuk mengoptimalkan pelaporan-pelaporan jika terjadi perubahan.
	Apakah dalam aktivitas operasional seluruh SDM telah berpedoman pada penerapan manajemen risiko operasional	4	
	Apakah seluruh organisasi mampu dan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas operasional	3	
	Apakah dalam proses operasional dilakukan verifikasi dual control dan didukung dengan dokumen yang memadai	3	
	Apakah dalam proses pengambilan keputusan bidang operasional dilakukan secara pembahasan bersama dan dilakukan secara transparan	3	
	Apakah dalam proses manajemen risiko operasional telah didukung dengan data operasional yang akurat dan informatif	4	
	Apakah dalam proses manajemen risiko operasional telah melakukan analisa karakteristik risiko operasional yang melekat pada produk dan layanan	3	
	Apakah kesesuaian asumsi, data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko operasional telah dilakukan evaluasi	3	



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 35 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

	Apakah dalam melakukan pengukuran risiko operasional telah dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan yang material pada kegiatan layanan, produk, dan faktor risiko	3	
	Apakah dalam melakukan pemantauan risiko operasional telah dilakukan evaluasi terhadap eksposur risiko operasional	3	
	Apabila terdapat perubahan yang material dalam faktor risiko operasional apakah juga dilakukan penyesuaian pelaporan	3	
2	Apakah BPR telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko operasional serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	3.00	Sistem Informasi yang dimiliki oleh SKMR sebagai aplikasi bantu diantaranya E-Semar, Si-moli, Simpro Dashboard limit risiko. Saat ini sedang dalam pengembangan Sitangkas (sistem informasi tingkat kesehatan bank). Sistem informasi Manajemen Risiko operasional (data fraud, SDM, TI) belum sepenuhnya dapat diakses dengan mudah oleh seluruh unit kerja dan Satuan kerja manajemen risiko. Informasi yang dapat disajikan masih terbatas pada data kuantitatif dan belum terdapat data penunjang laporan secara cepat dan terkini per aktivitas fungsional dari setiap unit kerja. Saat ini sedang dikembangkan sistem informasi Monitoring Limit dan toleransi risiko untuk mendukung pelaporan risiko operasional oleh SKMR Sistem informasi yang telah dikembangkan bank belum sepenuhnya dapat mendukung meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen risiko operasional, antara lain dalam SIM belum dapat disajikan limit risiko yang ditetapkan sehingga apabila terjadi pelampauan maka risk owner akan melakukan pelaporan kepada SKMR dan menyusun strategi yang akan dilakukan untuk perbaikan. Sistem informasi yang dimiliki saat ini belum menyajikan informasi secara lengkap terkait penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Saat ini masih dikembangkan ke arah tersebut untuk menyempurnakan sistem informasi yang sudah ada.
	Sistem Informasi apa saja yang telah dimiliki termasuk dukungan CBS dan aplikasi bantu lainnya	3	
	Apakah sistem informasi risiko operasional dapat dan mudah diakses serta laporan yang lengkap	3	
	Apakah sistem informasi yang dimiliki mampu mendukung pelaporan risiko operasional yang lengkap dan cepat	3	
	Apakah sistem informasi yang dimiliki mampu meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen risiko operasional (terkait produk, layanan, limit, penilaian, contingency plan, dan fungsi pengawasan)	3	
	Apakah sistem informasi yang dimiliki menyajikan informasi realisasi penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan (Risk Control dan tindak lanjut perbaikannya)	3	



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 36 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

3	Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI ?	3.00	Bank telah memiliki kebijakan penyelenggaraan TI sesuai dengan ketentuan OJK, menjabarkan prosedur pelaksanaan operasional TI, tanggungjawab, akuntabilitas, pemberian wewenang. Penetapan standar perangkat keras dan perangkat lunak, contingency plan dan disaster recovery plan apabila terjadi situasi krisis bencana namun belum pernah dilakukan tahapan uji coba secara berkala. Dalam menjalankan kegiatan operasional belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI Pada periode penilaian Bank belum melakukan review berkala terhadap kebijakan TI Dalam menjalankan kegiatan operasional belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI, karena kurangnya pemahaman dengan baik.
	Apakah Kebijakan TI telah disusun dan disetujui oleh Direksi	3	
	Apakah Kebijakan TI dilakukan review secara berkala	3	
	Apakah Kebijakan TI dipahami oleh seluruh pegawai dan dijalankan sesuai ketentuan	3	
4	Apakah BPR telah melakukan langkah mitigasi Risiko terkait kejadian eksternal ?	3.00	Bank mengembangkan program untuk pengendalian dan mitigasi risiko, antara lain pengamanan proses TI dan asuransi. Untuk pengamanan TI, bank memastikan tingkat keamanan pemrosesan data elektronik. Disamping itu bank juga telah memiliki DRC, prosedur back up dan rencana darurat. Pemrosesan dan penyelesaian seluruh transaksi secara akurat dan tepat waktu. Kerahasiaan, kebenaran dan keamanan transaksi. Kebijakan dan pedoman pengendalian risiko operasional belum sepenuhnya disosialisasikan pada seluruh pegawai. Untuk DRC baru uji coba sekali dan belum dilakukan evaluasi secara berkala.
	Apakah telah memiliki pedoman pengendalian dan mitigasi risiko operasional penyelenggaraan TI akibat faktor eksternal	3	
	Apakah kebijakan dan pedoman pengendalian risiko operasional akibat faktor eksternal telah disosialisasikan ke seluruh pegawai	3	
	Apakah kebijakan dan pedoman tersebut telah dilakukan uji coba penerapannya dan dilakukan evaluasi secara berkala	3	
Hasil Penilaian Pilar 3 - Kecukupan Proses dan Sistem		3.05	Proses manajemen risiko operasional mencakup kegiatan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko operasional. Identifikasi dilakukan terhadap seluruh kegiatan untuk mengetahui sumber penyebab risiko operasional. Dalam melakukan pengukuran, parameter yang dikembangkan disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas bank, agar hasil pengukuran mencerminkan kondisi yang riil. Selanjutnya dilakukan pemantauan terhadap identifikasi kesalahan dini, pemrosesan dan penyelesaian transaksi secara efisien, akurat dan tepat waktu, kerahasiaan, kebenaran dan keamanan transaksi, pengamanan proses TI, keamanan pemrosesan data elektronik, prosedur back up dan rencana darurat dan kepatuhan terhadap limit. Pengendalian dilakukan secara aktif dengan pengelolaan SDM, penetapan kewenangan memutus transaksi, memisahkan fungsi. Sistem informasi diperlukan untuk mendukung proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian, namun belum sepenuhnya mampu mendukung proses manajemen risiko operasional.

PILAR 4 : Sistem Pengendalian yang Menyeluruh



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 37 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

1	Apakah SKAI atau PE Audit Internal telah melakukan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko operasional, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	3.20	SKAI telah melakukan pemeriksaan penerapan manajemen risiko kredit pada Beberapa Divisi di Kantor Pusat dan 11 Kantor Cabang, mencakup evaluasi terhadap implementasi kebijakan, prosedur, proses dan mekanisme mitigasi risiko untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan internal. Hasil pemeriksaan menunjukkan beberapa temuan fundamental terkait kurang memadainya pengendalian internal, diantaranya tidak dilakukannya penilaian risiko secara berkala oleh unit kerja utama. SKAI melakukan monitoring terhadap tindak lanjut temuan penerapan kebijakan manajemen risiko operasional, namun tindak lanjut yang dilakukan oleh risk owner (SDM, SKK) belum optimal. SKAI telah melaporkan kepada Direktur Utama. SKAI melakukan pengawasan terhadap setiap unit kerja dan individu yang terlibat dalam kebijakan manajemen risiko operasional terhadap wewenang dan tanggungjawab, pemahaman dan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang ditetapkan untuk manajemen risiko operasional. SKAI memastikan integritas dan efektivitas proses manajemen risiko dengan melakukan pengawasan yang mencakup verifikasi pemisahan fungsi secara jelas untuk mencegah konflik kepentingan, kelengkapan struktur organisasi, fungsi pelaporan yang efektif, dokumentasi yang komprehensif dalam penerapan kebijakan manajemen risiko operasional. SKAI belum sepenuhnya melakukan verifikasi dan review terhadap sistem pengendalian internal manajemen risiko operasional, yang antara lain mencakup satuan kerja operasional berfungsi secara memadai, exposure risiko terjaga sesuai limit, pengelolaan TI, identifikasi kesalahan dini, penyelesaian transaksi tepat waktu, kerahasiaan dan keamanan data..
	Apakah selama periode penilaian SKAI telah melakukan pemeriksaan penerapan manajemen risiko operasional di berapa cabang atau unit kerja di bidang manajemen risiko operasional	3	
	Apakah setiap temuan SKAI dalam penerapan manajemen risiko operasional telah dilakukan monitoring tindak lanjutnya dan telah dilaporkan kepada Direktur Utama	4	
	Apakah SKAI dalam penerapan manajemen risiko operasional telah melakukan pengawasan atas penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk kepatuhan kebijakan manajemen risiko operasional	3	
	Apakah SKAI telah melakukan pengawasan pada pemisahan fungsi, struktur organisasi, fungsi pelaporan, dan dokumentasi penerapan manajemen risiko operasional	3	
	Apakah SKAI telah melakukan verifikasi dan review terhadap sistem pengendalian intern manajemen risiko operasional	3	
2	Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko operasional telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	3.50	Unit kerja pengendalian telah terpisah secara jelas dari unit kerja operasional untuk memastikan independensi, mencegah konflik kepentingan dan meningkatkan efektivitas pengendalian internal. Unit kerja operasional belum sepenuhnya memahami dan menjalankan tugas serta tanggung jawabnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang telah ditetapkan. Pemahaman terhadap penerapan kebijakan dan prosedur manajemen risiko operasional serta pemantauan dan mitigasi risiko yang efektif masih kurang memadai.



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 38 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

Apakah unit kerja pengendalian telah terpisah dari unit kerja operasional peroperasionalan	3	
Apakah unit kerja operasional telah memahami dan menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tupoksi	4	
Hasil Penilaian Pilar 4 - Sistem Pengendalian yang Menyeluruh	3.35	Bank telah memiliki kecukupan organisasi yang bertugas sebagai pengendali di internal yaitu sebagai Risk Management Unit dan Risk Assurance yang terpisah. Satuan Kerja Pengendalian secara berkala melakukan pembahasan dalam forum rapat dengan memberikan rekomendasi kepada Direksi dengan agenda hasil pengawasan atas penerapan manajemen risiko operasional yang dilakukan di unit kerja operasional. Satuan Kerja Pengendalian telah memiliki ketentuan dan pedoman kerja yang cukup dan dilakukan review secara berkala. Meskipun demikian proses pengendalian yang dilakukan oleh fungsi Risk Control dan Risk Assurance belum secara optimal menurunkan tingkat risiko operasional. Hal ini tampak dari hasil temuan pemeriksaan masih didominasi temuan pelanggaran regulasi aktivitas kegiatan rutin operasional yang telah ditetapkan. Risk Awareness tidak dijalankan pejabat bidang operasional yang tampak masih ditemukannya pelanggaran yang sifatnya kegiatan rutin hampir di seluruh kantor cabang yang telah dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan hal tersebut penilaian pilar 4 adalah Kurang Memadai.

REKAP PENILAIAN KPMR OPERASIONAL

Hasil Penilaian Pilar 1 -Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris	2.75
Hasil Penilaian Pilar 2 - Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Limit	2.93
Hasil Penilaian Pilar 3 - Kecukupan Proses dan Sistem	3.05
Hasil Penilaian Pilar 4 - Sistem Pengendalian yang Menyeluruh	3.35
Hasil Penilaian KPMR	3.35
	Kurang Memadai

URAIAN KPMR OPERASIONAL

Penerapan kualitas manajemen risiko operasional menunjukkan bahwa secara umum telah sesuai dengan visi dan misi bank. Direksi dan Dewan Komisaris telah menjalankan tugasnya dalam menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka kerja, meskipun masih terdapat kekurangan dalam kualitas dan kuantitas SDM. Proses manajemen risiko dilakukan dengan identifikasi eksposur risiko, pemantauan berkala oleh berbagai unit terkait, serta pemeriksaan oleh SKAI. Meskipun sistem informasi telah dikembangkan, namun belum sepenuhnya mampu memberikan informasi yang akurat dan lengkap. Serta Kekosongan beberapa SOTK pada Fungsi yang signifikan (2 Direksi dan 1 PE) dan Frekuensi pelanggaran yang masih berulang berdampak pada tingkat kualitas penerapan manajemen risiko Operasional. Secara keseluruhan, penerapan manajemen risiko operasional dinilai dengan skor 3.35 (Kurang Memadai).



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 39 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

PROFIL NILAI OPERASIONAL

Periode pelaporan				Periode Sebelumnya			
Risiko Inheren	Risiko KPMR	Tingkat Risiko	Kualitas Manrisk	Risiko Inheren	Risiko KPMR	Tingkat Risiko	Kualitas Manrisk
3.17	3.35	3.08	Risiko Sedang (Dilakukan kaji ulang terbatas, rencana tindak dilaporkan triwulanan)	3.29	3.35	4.00	Risiko Tinggi (Dilakukan kaji ulang menyeluruh, rencana tindak dilaporkan triwulanan)
Sedang	Kurang Memadai	Sedang	Risiko Sedang (Dilakukan kaji ulang terbatas, rencana tindak dilaporkan triwulanan)	Tinggi	Kurang Memadai	Tinggi	Risiko Tinggi (Dilakukan kaji ulang menyeluruh, rencana tindak dilaporkan triwulanan)

Komponen	Keterangan
Tingkat Risiko	Tingkat Risiko Operasional pada periode Semester I 2025 merupakan peringkat Sedang dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Operasional pada peringkat Kurang Memadai, sehingga perlu dilakukan kaji ulang secara terbatas dengan menyusun rencana tindak tiap triwulanan yang dilakukan oleh internal bank. Telah terjadi peningkatan pada frekuensi, jenis, dan sebaran fraud. Kecukupan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas pada penerapan manajemen risiko operasional menjadi skala prioritas untuk dilakukan pemenuhan utamanya pada pemahaman, kompetensi, kepatuhan terhadap penerapan manajemen risiko. Budaya risiko dan budaya kepatuhan belum mampu diserap dan dipahami oleh seluruh jenjang organisasi, perlu dilakukan kegiatan dan tindakan yang mendukung pengembangan budaya risiko dan budaya patuh. Berdasarkan hasil exit meeting pemeriksaan SKAI selama periode penilaian terdapat tindakan fraud yang dilakukan oleh pegawai dari mulai tingkatan terendah sampai dengan pejabat struktural. Permasalahan fraud dan kualitas pegawai menjadi permasalahan kunci dari seluruh risiko bank di periode penilaian ini yang berdampak pada hasil penilaian risiko yang lain.
Risiko Inheren	Risiko inheren operasional menunjukkan bahwa bank yang telah beroperasi selama 6 tahun ini menghadapi berbagai capaian dan tantangan dalam pengelolaan risiko. Konsolidasi yang mempengaruhi strategi bisnis dan budaya perusahaan menjadi salah satu faktor risiko utama. Meskipun kebijakan dan prosedur manajemen risiko operasional telah ditetapkan, pelaksanaannya belum optimal, terutama dalam pemerataan dan kecukupan SDM. Kekurangan SDM ini berkontribusi pada peningkatan human error yang tidak terdeteksi dini akibat lemahnya monitoring dan pengawasan. Selama periode penilaian masih ditemukan penyimpangan, sebagian besar terjadi pada perkreditan serta kas, dana, dan operasional. Penyimpangan ini disebabkan oleh lemahnya fungsi Maker, Checker, & Approval, serta analisis dan monitoring yang belum optimal. Meskipun terjadi penurunan dalam jenis penyimpangan, masih dibutuhkan penguatan tata kelola, monitoring, serta evaluasi untuk memitigasi risiko operasional secara lebih efektif. Di sektor teknologi informasi (TI), bank telah meningkatkan keamanan server dengan tiga lapis pengamanan, tetapi belum melakukan uji ketahanan. Keterbatasan SDM baik dari segi jumlah maupun kompetensi juga menjadi kendala dalam pengelolaan sistem yang lebih efektif. Sosialisasi modul Core Banking System (CBS) telah dilakukan, tetapi masih diperlukan pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan penguasaan teknologi. Mendasarkan pada hal itu maka nilai tingkat risiko operasional pada periode Semester I Tahun 2025 adalah 3,17 atau termasuk pada peringkat risiko kategori sedang
Tingkat Kualitas MR	Penerapan kualitas manajemen risiko operasional menunjukkan bahwa secara umum telah sesuai dengan visi dan misi bank. Direksi dan Dewan Komisaris telah menjalankan tugasnya dalam menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka kerja, meskipun masih terdapat kekurangan dalam kualitas dan kuantitas SDM. Proses manajemen risiko dilakukan dengan identifikasi eksposur risiko, pemantauan berkala oleh berbagai unit terkait, serta pemeriksaan oleh SKAI. Meskipun sistem informasi telah dikembangkan, namun belum sepenuhnya mampu memberikan informasi yang akurat dan lengkap. Serta Kekosongan beberapa SOTK pada Fungsi yang signifikan (2 Direksi dan 1 PE) dan Frekuensi pelanggaran yang masih berulang berdampak pada tingkat kualitas penerapan manajemen risiko Operasional. Secara keseluruhan, penerapan manajemen risiko operasional dinilai dengan skor 3.35 (Kurang Memadai).



PT BPR BKK JATENG
(Perseroda)

RISIKO KEPATUHAN



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 40 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

(RISIKO KEPATUHAN)

INHEREN KEPATUHAN

No	Parameter	Nilai	Keterangan
PILAR 1 : Pelanggaran Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan Lain			
1	Jenis dan Signifikasi Pelanggaran	2.50	Tidak terdapat pelanggaran thd ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ketentuan lain dari otoritas dan pihak eksternal pada periode penilaian. Terdapat pelanggaran ketentuan internal berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh SKAI dengan frekuensi pelanggaran sedang. Terdapat pelanggaran POJK Tata Kelola terkait kekosongan Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, pelanggaran terkait laporan kepada PPATK Ada 10 pelanggaran terkait fraud selama Semester I 2025 dengan frekuensi rendah dan berdampak pada kerugian financial dan tuntutan hukum, Frekuensi rendah ditentukan sebesar 0,50 - 0,75 % dari jumlah SDMPengkinian Ketentuan Internal rata-rata dilakukan tiap setahun sekali, namun ada beberapa ketentuan yang dilakukan pengkinian lebih dari 1 tahun Fungsi Kepatuhan Tidak Rangkap Jabatan Pada Fungsi Bisnis dan Fungsi Kepatuhan Independent Monitoring terhadap ketentuan belum berjalan secara konsisten, beberapa kali dilakukan setiap bulan sekali, namun terdapat ketentuan yang dilakukan monitoring dalam waktu triwulan sekali Terdapat 1 Pelanggaran Kewajiban Pelaporan Kepada OJK terlambat melaporkan LTKM ke PPATK Pelanggaran terhadap ketentuan internal dan prosedur masih terjadi. Pada tahun 2024 sebanyak 80 penerbitan SP sedangkan pada periode Semester I tahun 2025 tercatat ada penerbitan teguran maupun SP sebanyak 18 SP. Pada periode penilaian, jenis pelanggaran ketentuan internal dan prosedur menyebar hingga maksimal 80% dari jumlah sebaran jenis pelanggaran tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat beragam bentuk ketidakpatuhan di sejumlah unit kerja. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kepatuhan terhadap prosedur operasional belum terstandarisasi secara menyeluruh dan konsisten di seluruh cabang/unit. Dibutuhkan peningkatan pengawasan, audit internal tematik, serta penekanan pada pelatihan berbasis kasus nyata (case-based training).
	Jenis dan Signifikasi Pelanggaran	3	
	Frekuensi Pelanggaran	3	
	Pengkinian Ketentuan Internal Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	3	
	Pemisahan Fungsi Kepatuhan dan Fungsi Bisnis	2	
	Monitoring Ketentuan Baru Dari Regulator	3	
	Jumlah Pelanggaran Kewajiban Penyampaian Laporan Kepada OJK/Regulator Lain	2	
	Frekuensi Pelanggaran Ketentuan Internal dan Prosedur	2	
	Sebaran Jenis Pelanggaran Ketentuan Internal dan Prosedur	2	



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 41 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

2	Signifikasi Tindak Lanjut Atas Temuan Pelanggaran	2.89	Adanya temuan berulang yang sama dalam dua periode sebelumnya, meskipun frekuensinya mengalami penurunan pada periode terbaru. Evaluasi ini melibatkan identifikasi jenis temuan yang sama yang terjadi secara berulang, serta analisis terhadap faktor-faktor yang menyebabkan penurunan frekuensi pelanggaran. Penurunan ini dapat menunjukkan adanya tindakan korektif yang telah diimplementasikan untuk memperbaiki kepatuhan terhadap regulasi dan mengurangi risiko terkait. Namun demikian, SKAI tetap memfokuskan pada kepatuhan yang lebih baik dan upaya untuk mencegah temuan serupa di masa depan guna meminimalkan dampak negatifnya terhadap reputasi dan operasional perusahaan. Setiap unit kerja terdapat pejabat struktural dan pegawai yang memahami fungsi kepatuhan. Dilakukan sosialisasi dan pendampingan ke seluruh cabang. Untuk relalisasi MMA sebagai wujud pendampingan, divisi kepatuhan sampai dengan akhir Juni 2025 telah melakukan kunjungan ke 7 Cabang yaitu KC Utama, KC Salatiga, KC Semarang, KC Kendal, KC Rembang, KC Demak, KC Sukoharjo. Review terhadap produk dilakukan setiap setahun sekali, Melakukan Review Eksposure Risiko yang Melekat Secara Berkala Setiap Tahun Melakukan Review Terhadap Seluruh Risiko Pada Pelaksanaan Produk dan Aktivitas Baru dan Melakukan Uji Coba Terhadap Metode Pengukuran Risiko Setiap 6 Bulan. Terdapat 1 (Satu) Kali Pemberian Sanksi Administratif Dari Pihak Eksternal Namun Tidak Signifikan Terdapat 1 (Satu) Kali Pemberian Sanksi Administratif Dari Pihak Eksternal Namun Tidak Signifikan Tindak lanjut atas hasil pemeriksaan sesuai batas waktu komitmen Capaian RBB dilakukan monitoring dan dilakukan evaluasi atas capaian setiap bulannya, namun belum memperlihatkan hasil capaian yang signifikan Pemberian sanksi dilakukan kepada pegawai yang tidak paham dan/ atau melakukan pelanggaran dan dilakukan monitoring dan pengawasan untuk memperbaiki kualitas kinerja pegawai.
	Signifikasi Tindak Lanjut Atas Temuan Pelanggaran	3	
	Kecukupan Pegawai yang Menangani Fungsi Kepatuhan	4	
	Pengembangan Budaya Patuh Pada Semua Jenjang Organisasi	3	
	Implementasi Kebijakan dan Prosedur Penerbitan Produk dan/atau Pelaksanaan Aktivitas Baru	3	
	Frekuensi Sanksi Administratif yang Diterima dari Pihak Eksternal	2	
	Jumlah Denda Sebagai Akibat Dari Pengenaan Sanksi	2	
	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan OJK, Audit KAP	3	
	Monitoring Kewajiban dan Komitmen Bank terhadap OJK, Pemegang Saham dan Otoritas Lain	3	
	Pemberian Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Kepatuhan (Kategori pelanggaran kepatuhan adalah berdasarkan temuan pada saat audit (internal maupun eksternal) maupun temuan oleh Unit kerja yang ada di BKK)	3	



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 42 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

Hasil Penilaian Pilar 1 - Pelanggaran Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan Lain		2.69	Terdapat pelanggaran pelaporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK, kekosongan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan melanggar POJK Tata Kelola. Kecukupan SDM yang menangani fungsi kepatuhan, baik di SKK maupun di unit kerja yang lain masih sangat kurang, sehingga fungsi SKK belum berjalan dengan baik. Terdapat komitmen hasil pemeriksaan OJK yang belum ditindaklanjuti, antara lain KPI, review produk kredit, review strategi anti fraud. Monitoring terhadap ketentuan baru yang diterbitkan oleh OJK belum ditindaklanjuti (POJK 1 tahun 2024, POJK 7 tahun 2024). Monitoring komitmen kepada Pemegang saham dan OJK dalam bentuk RBB th 2025, belum optimal dilaksanakan, tercermin dalam tidak terealisasinya rencana pemindahan jaringan kantor cabang, pengadaan pegawai dan capaian target kuantitatif dan kualitatif keuangan utama.
PILAR 2 : Faktor Kelemahan Aspek Hukum			
1	Kelemahan Dalam Perikatan	3.00	Bidang Hukum, Kerja Sama dan Hub. Kelembagaan telah menyusun Perjanjian Kredit dan Perjanjian Kerja Sama Lainnya dalam bentuk baku dan telah disosialisasikan ke seluruh Kantor Cabang. Perjanjian Kredit dan Perjanjian Lainnya telah melalui pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan tidak terdapat permasalahan dari substansi Perjanjian Kredit tersebut. Masih terdapat kelemahan dalam aspek yuridis terhadap perikatan - perikatan / perjanjian kredit lama yang belum berakhir. Bank sudah membentuk unit kerja legal, tercatat ada 5 SDM di unit kerja legal. SDM Bidang Legal terus dilakukan pengembangan kemampuan dengan pelatihan-pelatihan, dan belajar dari para narasumber yang kompeten.
	Kelemahan Dalam Perikatan	3	
	Corporate Legal	3	
2	Litigasi Terkait Nominal Gugatan Atau Estimasi Kerugian Yang Dialami BPR Akibat Gugatan	2.00	Terdapat nominal gugatan atau estimasi kerugian akibat gugatan dengan nilai tidak signifikan dibanding modal BPR. Pada periode penilaian terdapat kerjasama dengan kejaksaan namun belum ada pendampingan hukum dari bag legal. Kerjasama yang telah berjalan merupakan kerjasama untuk dapat memberikan pendampingan hukum terutama terkait dengan penanganan litigasi.
	Litigasi Terkait Nominal Gugatan Atau Estimasi Kerugian Yang Dialami BPR Akibat Gugatan	2	
	Pendampingan Hukum	2	
3	Litigasi Terkait Kerugian Yang Dialami Karena Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap	1.00	"Selama Periode penilaian tidak terdapat gugatan atau tidak terdapat estimasi kerugian yang dialami BPR akibat gugatan" Selama periode penilaian tidak ada kerugian dari putusan pengadilan berkekuatan hukum
	Litigasi Terkait Kerugian Yang Dialami Karena Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap	1	
	Kerugian Akibat Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap	1	
Hasil Penilaian Pilar 2 - Faktor Kelemahan Aspek Hukum		2.00	Bank telah membentuk Divisi Legal yang telah cukup optimal memberikan pernyataan hukum terhadap kejadian hukum untuk menjaga image positif bank. Bank juga telah melakukan kerjasama pendampingan hukum dengan kejaksaan setempat di setiap daerah. Terdapat permasalahan hukum yang belum terselesaikan namun terjadi di masa sebelum konsolidasi dengan tuntutan tingkat kerugian yang minim dan tidak mengganggu kinerja bank. Tidak terdapat putusan hukum berkekuatan hukum tetap yang berdampak kerugian material kepada Bank selama periode penilaian maupun periode sebelumnya. Penilaian pada pilar 2 ditetapkan risiko Rendah.
PILAR 3 : LAINNYA			



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 43 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

1	Lainnya	2.71	Pengukuran terhadap index kepatuhan dilakukan 4x dalam setahun, Belum dilakukan pengukuran index kepatuhan Atas capaian target RBB, sampai dengan periode penilaian masih terdapat capaian yang belum tercapai yaitu pada pencapaian Laba rugi, rasio ROA, NIM Pucuk Pimpinan Memiliki Sikap, Perilaku, Kompetensi dan Komitmen Sesuai Kualifikasi Ketentuan internal terpenuhi, masih terdapat beberapa ketentuan yang dalam proses pengkinian Assesment dilakukan sebelum dan sesudah pegawai menjalankan tugas dan tanggungjawabnya Dilakukan sosialisasi dan pendampingan ke seluruh cabang. Untuk relalisasi MMA sebagai wujud pendampingan, divisi kepatuhan sampai dengan akhir Juni 2025 telah melakukan kunjungan ke 7 Cabang yaitu KC Utama, KC Salatiga, KC Semarang, KC Kendal, KC Rembang, KC Demak, KC Sukoharjo. Dilakukan penyusunan ketentuan Baru dan review ketentuan lama. Per Juni 2025 terdapat 8 ketentuan baru dan 16 pengkinian ketentuan lama.
	Pengukuran Index Kepatuhan	1	
	Komitmen Capaian Target RBB	4	
	Teladan Pucuk Pimpinan	3	
	Kecukupan Perangkat Lunak Yang Berupa Ketentuan Internal Meliputi Job Desk, SOP, Pedoman Perkreditan dan Ketentuan Lainnya	3	
	Assesment Terhadap Pemahaman dan Implementasi Job Desk dan Tugas Tanggung jawab	3	
	Sosialisasi dan Pendampingan Kepada Pegawai dan Unit Kerja Digunakan	3	
	Kecukupan Ketentuan dan Peraturan Internal Sesuai Ketentuan Regulator dan Bisnis Bank	2	
	Lainnya	2.71	Pengukuran terhadap index kepatuhan dilakukan 4x dalam setahun, Belum dilakukan pengukuran index kepatuhan Atas capaian target RBB, sampai dengan periode penilaian masih terdapat capaian yang belum tercapai yaitu pada pencapaian Laba rugi, rasio ROA, NIM Pucuk Pimpinan Memiliki Sikap, Perilaku, Kompetensi dan Komitmen Sesuai Kualifikasi Ketentuan internal terpenuhi, masih terdapat ketentuan yang dalam proses pengkinian seperti SK tentang Penetapan Kualitas Aset Produktif dalam bentuk Kredit Assesment dilakukan sebelum dan sesudah pegawai menjalankan tugas dan tanggungjawabnya Dilakukan sosialisasi dan pendampingan ke seluruh cabang. Untuk relalisasi MMA sebagai wujud pendampingan, divisi kepatuhan sampai dengan akhir Juni 2025 telah melakukan kunjungan ke 7 Cabang yaitu KC Utama, KC Salatiga, KC Semarang, KC Kendal, KC Rembang, KC Demak, KC Sukoharjo. Saat ini sudah cukup terkait dengan ketentuan internal yang ada. Review terhadap ketentuan internal maupun Perjanjian Kerja Sama sudah dilakukan berkala setiap 3 bulan sekali

REKAP PENILAIAN INHEREN KEPATUHAN	
Hasil Penilaian Pilar 1 - Pelanggaran Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan Lain	2.69
Hasil Penilaian Pilar 2 - Faktor Kelemahan Aspek Hukum	2.00
Hasil Penilaian Lainnya	2.71
Hasil Penilaian Inheren	2.71
	Sedang

URAIAN INHEREN KEPATUHAN
Risiko kepatuhan yang dihadapi Bank saat ini berupa pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, serta kekosongan posisi Direktur Kepatuhan. Keterbatasan SDM di unit kepatuhan menyebabkan fungsi kepatuhan belum berjalan optimal. Beberapa komitmen hasil pemeriksaan OJK dan monitoring regulasi baru juga belum ditindaklanjuti dengan baik. Divisi Legal telah dibentuk, namun belum optimal dalam memberikan kajian hukum akibat keterbatasan SDM. Meski terdapat permasalahan hukum dari sebelum konsolidasi, tidak ada putusan hukum yang berdampak material bagi bank. Sosialisasi kepatuhan telah dilakukan, tetapi belum diikuti evaluasi yang memadai. Bank juga belum memiliki standar kompetensi SDM yang jelas. Mendasarkan pada hasil penilaian maka risiko kepatuhan inheren ditetapkan sebesar 2.71 tingkat risiko Sedang.



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 44 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

KPMR KEPATUHAN

No	Parameter KPMR	Peringkat Risiko	Keterangan
PILAR 1 : Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris			
1	Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	2.40	Dewan Komisaris telah menyetujui kebijakan manajemen risiko kepatuhan dan ketentuan - ketentuan lain yang meliputi SOP, Penyelenggaraan TI, pengadaan pegawai, mutasi rotasi dan promosi, budaya perusahaan, peraturan kepegawaian, strategi dan kerangka manajemen operasional, serta limit dan toleransi risiko operasional, kebijakan perkreditan, penetapan kualitas aset, dokumen kredit, dan lain lainnya. Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko kepatuhan, antara lain dengan melakukan penilaian terhadap kecukupan kualitas dan kuantitas kebijakan serta prosedur dengan peraturan OJK dan praktek umum terbaik sesuai size dan kompleksitas bank. Dewan Komisaris mampu mengimplementasikan kompetensinya pada bidang manajemen risiko dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko kepatuhan dan memberikan arahan perbaikan yang harus dilakukan oleh Direksi. Dewan Komisaris telah memastikan penerapan kebijakan manajemen risiko kepatuhan kepada Direksi dan jajarannya antara lain dengan mengikuti kegiatan exit meeting dan kegiatan MMA untuk mencermati temuan - temuan hasil pemeriksaan atau temuan pada proses kerja terhadap penerapan kebijakan manajemen risiko. Selain itu, juga dilakukan pertemuan bersama dengan Satuan Kerja Pengendalian, melakukan pertemuan khusus dengan RTU risiko operasional yaitu divisi, satker dan kepada cabang / wilayah. Dewan Komisaris telah mempertimbangkan masukan dan rekomendasi tertulis dari Komite Pemantau Risiko yang disampaikan secara berkala kepada Dewan Komisaris.
	Apakah ketentuan dan kebijakan manajemen risiko kepatuhan yang disetujui Dewan Komisaris apa saja yang telah ditetapkan (PKPB, SK Direksi, SOP kepatuhan, SE Direksi, SK BWMK, SK Limit dan Toleransi Risiko)	2	
	Apakah evaluasi ketentuan dan kebijakan manajemen risiko kepatuhan yang disetujui Dewan Komisaris telah dilakukan (Ketentuan kepatuhan yang diterbitkan selama periode penilaian) dan kapan dilakukan secara periodik serta dilakukan kepada siapa saja	2	
	Apakah Dewan Komisaris mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen risiko kepatuhan dalam menjalankan tugas dan fungsinya	2	
	Apakah Dewan Komisaris telah memastikan Direksi dan jajarannya dalam penerapan manajemen risiko kepatuhan sesuai kebijakan manajemen risiko yang ditetapkan	3	
	Apakah Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi telah mempertimbangkan masukan dari Komite Pemantau Risiko	3	



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 45 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

2	Apakah Dewan komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud ?	2.60	Pada periode penilaian Direksi belum melaporkan pertanggungjawaban penerapan kebijakan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris secara tertulis. Laporan yang disampaikan adalah laporan hasil pemeriksaan SKAI, sehingga pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris tidak optimal karena belum tersaji informasi yang komprehensif terhadap pertanggungjawaban penerapan kebijakan manajemen risiko kepatuhan. Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit telah memberikan masukan terhadap penerapan manajemen risiko kepatuhan dengan melakukan pertemuan bersama SKK, SKMR dan SKAI. Dewan Komisaris telah melakukan monitoring tindak lanjut penerapan manajemen risiko kepatuhan dari Direksi terkait dengan capaian RBB, pemenuhan SDM, pemenuhan anggota komite dibawah Dekom, pemenuhan standar TID. Dewan Komisaris secara konsisten telah mengembangkan budaya manajemen risiko kepatuhan dengan memastikan seluruh ketentuan operasional telah dipenuhi, mengawal implementasinya dengan melakukan kunjungan ke cabang, memantau tindak lanjut hasil kunjungan SKMR dan SKAI, mendorong terpenuhinya kecukupan SDM. Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan transaksi pembelian tanah untuk rencana pembangunan gedung kantor pusat, pemberian krdeit kepada pihak terkait
	Apakah Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban Direksi dalam penerapan manajemen risiko kepatuhan secara tertulis dan dalam forum rapat (terdapat notulen)	3	
	Apakah Dewan Komisaris memberikan masukan dan pengarahan penerapan manajemen risiko kepatuhan kepada Direksi secara tertulis dan forum rapat	2	
	Dewan Komisaris melakukan monitoring tindak lanjut evaluasi pertanggungjawaban Direksi penerapan manajemen risiko kepatuhan	3	
	Apakah Dewan Komisaris secara konsisten mengembangkan budaya sadar risiko kepatuhan	3	
	Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris	2	
3	Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	3.00	Direksi telah mengimplementasikan kompetensinya terkait manajemen risiko kepatuhan, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, RBB, pemenuhan komitmen hasil pemeriksaan OJK, belum terpenuhinya Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Ketentuan dan kebijakan manajemen risiko kepatuhan yang disetujui Direksi adalah SOP mulai dari front office sampai dengan fungsional dan UKK, Pedoman Kebijakan Pelaksanaan Tata Kelola, Pedoman Tata Tertib Pegawai, Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Budaya Kerja Perusahaan, Kebijakan Benturan Kepentingan, Kebijakan Penerapan Anti Fraud, Peraturan dan Sanksi Disiplin Pegawai, WBS, dll. Namun untuk pelaksanaan masih terdapat beberapa ketentuan yang pengkinian terakhir dilakukan pada tahun 2022. Direksi telah melakukan evaluasi kebijakan dan ketentuan manajemen risiko kepatuhan secara berkala berdasarkan temuan - temuan implementasi kebijakan yang bersumber dari temuan OJK, temuan SKAI, laporan profil risiko atau kaji ulang oleh pihak internal atau eksternal



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 46 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

	Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen risiko kepatuhan (Pelatihan tentang manajemen risiko kepatuhan yang diikuti, pengalaman di bidang yang berkaitan dengan manajemen risiko kepatuhan)	3	
	Ketentuan dan kebijakan manajemen risiko kepatuhan yang disetujui Direksi apa saja yang telah ditetapkan (SK Direksi, SOP kepatuhan, SE Direksi)	3	
	Kapan evaluasi ketentuan dan kebijakan manajemen risiko kepatuhan yang disetujui Direksi dilakukan (Ketentuan kepatuhan yang diterbitkan selama periode penilaian)	3	
4	Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi Risiko kepatuhan, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	3.00	Direksi telah melakukan tindakan mitigasi risiko antara lain melalui pembahasan dalam forum Komite Manajemen Risiko secara berkala. Direksi juga melakukan tindakan pengendalian risiko kepatuhan dengan memastikan realisasi RBB, penyelesaian komitmen kepada OJK, pelaksanaan kewajiban pelaporan, dan lainnya. Direksi telah menyampaikan kepada seluruh unit kerja khususnya Kepala Cabang dan Pejabat Eksekutif melalui forum evaluasi setiap bulan tindakan dan kebijakan pengendalian risiko kepatuhan, kepada jenjang organisasi lain dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan kegiatan monitoring, mentoring dan advising ke cabang. Memberikan teguran dan / atau punishment kepada pelaku pelanggaran / yang tidak berkinerja baik. Direksi secara konsisten mengembangkan budaya risiko kepatuhan dengan melakukan pemenuhan dan/atau pengkajian ketentuan, sosialisasi, pemantauan implementasi serta penilaian profil risiko secara berkala, mengembangkan budaya perusahaan, mencontohkan sebagai sosok panutan, melakukan evaluasi dan menyusun langkah - langkah perbaikan terhadap hasil penilaian profil risiko. Direksi melakukan review terhadap delegasi wewenang memutus transaksi operasional dan transaksi bisnis, wewenang melakukan tindakan hukum kepada pejabat eksekutif, dan kewenangan lain berdasarkan prinsip kehati-hatian terhadap risiko kepatuhan. Direksi telah melakukan evaluasi terhadap usulan transaksi yang diterima sebelum memberikan persetujuan.
	Apakah Direksi secara konsisten mengambil tindakan yang perlu dilakukan dalam mitigasi risiko kepatuhan	3	
	Apakah Direksi secara berkala menyampaikan tindakan dan kebijakan dalam rangka pengendalian dan mitigasi risiko kepada seluruh jenjang unit kerja	3	
	Apakah Direksi secara konsisten telah mengembangkan budaya sadar risiko kepatuhan kepada seluruh jenjang unit kerja	3	
	Apakah Direksi secara berkala melakukan review atas kebijakan pendelegasian kewenangan yang diberikan	3	
	Apakah Direksi telah melakukan evaluasi terhadap usulan transaksi yang diterima sebelum memberikan persetujuan.	3	



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 47 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

5	Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi kepatuhan dan fungsi Manajemen Risiko kepatuhan?	3.25	Fungsi second line SKMR dan SKK telah terpisah dari unit kerja operasional dan bisnis, melaksanakan tugasnya secara independen. Kecukupan organisasi Unit Kerja masih belum terpenuhi, baik dari jumlah SDM, kelengkapan pejabat, maupun kompetensinya. Terdapat kekurangan SDM dan kekosongan pejabat di Cabang antara lain pegawai setingkat Kepala Bidang dan staf. Terdapat kekurangan satu pejabat Koordinator Wilayah. Kompetensi pegawai belum merata di setiap unit kerja. Unit kerja yang mengelola risiko kepatuhan belum sepenuhnya memiliki jumlah SDM yang cukup, baik dari kualitas maupun kuantitas. Sedang kecukupan kompetensi terkait manajemen risiko pada semua jenjang organisasi, masih belum memadai, sehingga perlu adanya peningkatan kompetensi melalui berbagai metode yang sesuai dengan kondisi SDM yang ada. Proses operasional telah dijalankan secara independen namun masih terdapat kelemahan, diantaranya belum dilakukan penilaian kinerja individu, belum terdapat reward dan punishment secara tegas, belum optimal dalam rotasi pegawai.
	Fungsi Second Line (SKMR dan SKK) apakah telah terpisah dari Unit Kerja kepatuhan dan melaksanakan tugasnya secara independen	2	
	Apakah kecukupan organisasi di unit kerja kepatuhan telah didukung dengan kompetensi yang baik	4	
	Apakah kecukupan organisasi di satuan manajemen risiko kepatuhan telah didukung dengan kompetensi yang baik	4	
	Apakah proses kepatuhan dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan oleh masing-masing unit kerja secara independen	3	
6	Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko kepatuhan?	3.33	SOTK telah sesuai dengan kebijakan manajemen risiko kepatuhan, namun masih terjadi rangkap jabatan pada fungsi Direktur Kepatuhan, Kepala Cabang. Pada periode penilaian belum dilakukan review berkala terhadap pedoman pengelolaan SDM. Pada periode pelaporan, belum dilakukan evaluasi ketercukupan SDM, sehingga beberapa unit kerja / kantor cabang masih kekurangan SDM.
	Apakah ketentuan SOTK telah sesuai dengan penerapan manajemen risiko kepatuhan, tidak terdapat perangkapan jabatan, independen	3	
	Apakah pedoman pengelolaan SDM dilakukan review secara berkala	4	
	Apakah Direksi melakukan evaluasi ketercukupan jumlah SDM bidang kepatuhan	3	
7	Apakah Direksi telah menyusun kebijakan internal yang mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan, memberikan perhatian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta terdapat kebijakan reward and punishment bagi internal BPR?	3.00	SOTK telah sesuai dengan kebijakan manajemen risiko kepatuhan, namun masih terjadi rangkap jabatan pada fungsi Direktur Kepatuhan, Kepala Cabang. Pada periode penilaian belum dilakukan review berkala terhadap pedoman pengelolaan SDM. Pada periode pelaporan, belum dilakukan evaluasi ketercukupan SDM, sehingga beberapa unit kerja / kantor cabang masih kekurangan SDM.
	Apakah ketentuan SOTK telah sesuai dengan penerapan manajemen risiko kepatuhan, tidak terdapat perangkapan jabatan, independen	3	
	Apakah pedoman pengelolaan SDM dilakukan review secara berkala	3	
	Apakah Direksi melakukan evaluasi ketercukupan jumlah SDM bidang kepatuhan	3	



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 48 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

Hasil Penilaian Pilar 1 -Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris		2.94	Dewan Komisaris dan Direksi memiliki komitmen yang tinggi dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan dengan telah menetapkan ketentuan dan kebijakan serta melakukan review secara berkala, melakukan langkah untuk memastikan telah menetapkan dan melakukan review atas kebijakan penerapan manajemen risiko kepatuhan. Pengurus telah menindaklanjuti komitmen pemeriksaan OJK tentang penerapan kebijakan manajemen risiko kepatuhan yang menjadi temuan pemeriksaan. Meskipun belum sepenuhnya temuan OJK tentang penerapan manajemen risiko kepatuhan telah ditindaklanjuti, namun demikian masih terdapat kelemahan antara lain pemenuhan sumber daya manusia, pelaksanaan dan penerapan atas kebijakan yang ditetapkan, dan penetapan, implementasi, maupun pengawasan rencana strategi penerapan budaya kepatuhan di seluruh unit kerja. Ditetapkan penilaian Pilar 1 adalah Cukup Memadai.
PILAR 2 : Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Limit			
1	Apakah BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	3.00	Rencana bisnis bank disusun berdasarkan strategi penerapan manajemen risiko mengacu pada hasil penerapan manajemen risiko dan profil risiko kepatuhan. Penyusunan rencana bisnis bank telah berdasarkan pada hasil penilaian profil risiko dimasa lalu, dan strategi serta kerangka manajemen risiko yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi profil risiko kepatuhan. Kebijakan manajemen risiko kepatuhan dilakukan kaji ulang oleh SKMR, namun belum dilakukan kaji ulang oleh SKAI atau pihak eksternal. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko kepatuhan telah tersedia untuk seluruh area Manajemen Risiko untuk risiko kepatuhan. Meskipun demikian belum secara keseluruhan pegawai memiliki pemahaman dan penerapan yang baik. Perusahaan terus melakukan monitoring dan pendampingan untuk mengupayakan hal tersebut terealisasi dengan baik. Perumusan penetapan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko telah berdasarkan kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan berdasarkan hasil penilaian profil risiko kepatuhan namun dalam pelaksanaannya masih perlu mendapatkan perhatian oleh seluruh risk owner dan satuan kerja pengendali, agar limit risiko yang ditetapkan aktif dilakukan monitoring untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi dan menetapkan strategi perbaikan yang harus dilakukan
	Apakah dalam penyusunan rencana kerja telah merujuk pada penerapan manajemen risiko kepatuhan	3	
	Apakah dalam menyusun rencana kerja telah mendasarkan pada pengalaman dan capaian sebelumnya dengan tetap memperhatikan pengelolaan dan mitigasi risiko kepatuhan	3	
	Apakah kebijakan manajemen risiko kepatuhan dilakukan kaji ulang oleh pihak yang independen dan dilaporkan ke Dewan Komisaris dan Direksi	3	
	Apakah kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko kepatuhan memadai dan telah tersedia untuk seluruh area Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai	3	
	Apakah perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko ditetapkan telah sesuai dengan sasaran strategi dan strategi bisnis	3	



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 49 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

2	"Apakah BPR: 1. memiliki prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi ? 2. melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan secara konsisten untuk seluruh aktivitas ? Dan 3. melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan secara berkala?"	3.13	BPP Manajemen Risiko telah mengatur mekanisme dan tata cara penetapan limit dan toleransi risiko kepatuhan, namun dalam pelaksanaannya masing - masing fungsi yang berkaitan dengan risiko kepatuhan belum optimal dalam memahami dan menjalankan seluruh aktivitas termasuk menetapkan limit risiko untuk seluruh aktivitas kepatuhan. Bank telah melaksanakan prosedur manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit dan toleransi risiko, namun seluruh unit kerja belum melakukan pengawasan dan monitoring limit dan toleransi risiko kepatuhan secara optimal, sehingga pencegahan dan perbaikan yang harus dilakukan juga tidak tepat waktu / lebih dini. Bank belum optimal melakukan evaluasi terhadap pelampauan limit dan toleransi risiko kepatuhan serta penyebab terjadinya pelampauan limit. Sebagian besar SDM belum memahami ketentuan limit dan toleransi risiko yang telah ditetapkan sebagai dasar acuan dalam pengendalian risiko. Satuan kerja manajemen risiko terus melakukan pendampingan dalam meningkatkan pemahaman setiap SDM. Bank telah melakukan evaluasi dan mengkinikan ketentuan limit dan toleransi risiko kepatuhan berdasarkan kondisi usaha dan perkembangan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap proses kepatuhan, antara lain perubahan POJK 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat. Penetapan limit risiko telah memperhatikan data history serta memperhitungkan kemampuan Bank dalam menyerap risiko, kemampuan SDM dan faktor eksternal serta arah strategi bisnis bank. Penetapan limit risiko belum sepenuhnya sesuai prosedur yang ditetapkan karena masing - masing risk owner belum menyampaikan penetapan limit secara komprehensif. Penyusunan penetapan limit masih terfokus pelaksanaannya oleh SKMR. Penetapan Limit dan toleransi risiko kepatuhan telah meliputi limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per aktivitas fungsional pada tiap - tiap risk owner kepatuhan berdasar hasil penilaian profil risiko.
	Apakah Unit Kerja telah memahami penetapan limit dan toleransi risiko kepatuhan yang ditetapkan dalam SK Direksi	3	
	Apakah Unit Kerja melakukan pengawasan monitoring limit dan toleransi risiko kepatuhan	3	
	Apakah Unit Kerja melakukan evaluasi apabila terjadi pelampauan limit dan toleransi risiko yang ditetapkan	4	
	Apakah SDM telah memahami ketentuan limit dan toleransi risiko yang ditetapkan dan menjadi acuan dalam pengendalian manajemen risiko kepatuhan	3	
	Apakah kebijakan penetapan limit dan toleransi risiko dilakukan pengkinian sesuai dengan kondisi usaha dan perkembangan faktor eksternal yang berpengaruh pada ketentuan limit yang telah ditetapkan	3	
	Apakah perumusan untuk penentuan limit dan toleransi risiko dilakukan sesuai dengan arah dan strategi kepatuhan	3	
	Apakah penetapan limit telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan didokumentasikan sehingga memudahkan untuk dilakukan audit trail	3	
	Apakah penetapan limit dan toleransi risiko meliputi penetapan limit secara keseluruhan, per jenis risiko, dan per aktivitas fungsional yang memiliki exposure risiko	3	



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 50 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

3	Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko kepatuhan sesuai dengan ketentuan?	2.67	Unit kerja kepatuhan belum sepenuhnya memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan /atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risikonya Bank telah memiliki kebijakan penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang diatur dalam BPP Manajemen Risiko namun ketentuan tersebut belum ditetapkan dalam ketentuan dan pedoman tersendiri. BPP Manajemen Risiko tersebut juga belum menjelaskan secara lengkap kriteria produk dan layanan baru, sistem dan prosedur kewenangan pengelolaan mulai dari unit kerja atau organisasi, tata kerja persiapan produk dan atau aktivitas kredit baru, uji coba, pelaksanaan, dan laporan pelaksanaannya. Kebijakan produk dan aktivitas baru dilakukan evaluasi secara berkala sesuai ketentuan. Pada periode penilaian telah dilakukan evaluasi dan pengkinian terhadap kebijakan masing-masing produk kredit
	Apakah unit kerja telah memahami ketentuan dan prosedur produk dan aktivitas baru dan risiko yang melekat pada setiap produk dan mitigasinya	3	
	Apakah ketentuan kebijakan produk dan aktivitas telah didukung dengan ketentuan dan petunjuk kerja yang lengkap	3	
	Apakah ketentuan kebijakan produk dilakukan evaluasi secara berkala	2	
Hasil Penilaian Pilar 2 - Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Limit		2.93	Bank telah memiliki kecukupan sistem dan pelaksanaan proses manajemen risiko kepatuhan yang cukup baik namun mempertimbangkan kompleksitas bisnis yang sangat luas maka ketersediaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan proses manajemen risiko kepatuhan masih kurang. Dalam penerapan manajemen risiko kepatuhan Bank juga telah mengembangkan parameter pengukuran risiko kepatuhan selain yang ditetapkan dari otoritas. Pengukuran yang dikembangkan Bank telah menyesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas Bank. Namun pelaksanaan proses manajemen risiko belum dilakukan secara menyeluruh dan belum terdokumentasinya sejak tahapan identifikasi sampai dengan pengendalian risiko kepatuhan.
PILAR 3 : Kecukupan Proses dan Sistem			



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman51 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

1	Apakah BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kepatuhan yang melekat pada kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko kepatuhan?	3.30	SDM telah melaksanakan proses manajemen risiko kepatuhan, namun terdapat kekurangan dalam pengukuran potensi kerugian akibat fraud, stress testing perubahan kondisi, serta kurangnya laporan yang komprehensif untuk mitigasi risiko kepatuhan. Belum seluruh jenjang organisasi memiliki pemahaman dan kemampuan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian aktivitas operasional dan bisnis. Masih terjadi kegiatan operasional belum mengacu pada penerapan prinsip kehati-hatian. Bank telah melaksanakan proses manajemen risiko kepatuhan, namun belum dilakukan secara menyeluruh, termasuk dalam hal verifikasi dual control dan dukungan dokumen yang memadai. Proses pengambilan keputusan bidang kepatuhan dilakukan melalui pembahasan dalam forum komite SDM, Komite Pengadaan Barang jasa, Komite Penghapusan Aset, Komite Kredit, ALCO, dll. Proses Manajemen risiko kepatuhan yang dilakukan terkadang masih belum didukung dengan data yang informatif akurat dan komprehensif, namun perbaikan terus dilakukan untuk menunjang proses Manajemen Risiko yang akurat. Bank telah memiliki jenis-jenis produk dan layanan sesuai dengan karakteristik masing-masing, namun sejauh ini belum dilakukan analisa secara komprehensif terhadap risiko yang melekat pada masing-masing jenis produk. Evaluasi terhadap kesesuaian asumsi, data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko kepatuhan sudah dilakukan, namun belum secara menyeluruh. Dalam melakukan pengukuran risiko kepatuhan, belum dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan yang material pada kegiatan layanan, produk, dan faktor risiko. Pemantauan risiko kepatuhan dilakukan dengan penetapan limit dan toleransi risiko pada aktivitas fungsional dan jenis risiko, namun belum dilakukan stress testing terhadap exposure risiko yang ada. Perubahan yang material terhadap faktor risiko kepatuhan belum dilakukan penyesuaian pelaporan, akan terus dilakukan pengawasan untuk mengoptimalkan pelaporan-pelaporan jika terjadi perubahan.
	Apakah dalam aktivitas kepatuhan seluruh SDM telah berpedoman pada penerapan manajemen risiko kepatuhan	4	
	Apakah seluruh organisasi mampu dan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas kepatuhan	4	
	Apakah dalam proses kepatuhan dilakukan verifikasi dual control dan didukung dengan dokumen yang memadai	3	
	Apakah dalam proses pengambilan keputusan bidang kepatuhan dilakukan secara pembahasan bersama dan dilakukan secara transparan	3	
	Apakah dalam proses manajemen risiko kepatuhan telah didukung dengan data kepatuhan yang akurat dan informatif	4	
	Apakah dalam proses manajemen risiko kepatuhan telah melakukan analisa karakteristik risiko kepatuhan yang melekat pada produk dan layanan	3	
	Apakah kesesuaian asumsi, data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko kepatuhan telah dilakukan evaluasi	3	



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 52 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

	Apakah dalam melakukan pengukuran risiko kepatuhan telah dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan yang material pada kegiatan layanan, produk, dan faktor risiko	3	
	Apakah dalam melakukan pemantauan risiko kepatuhan telah dilakukan evaluasi terhadap eksposur risiko kepatuhan	3	
	Apabila terdapat perubahan yang material dalam faktor risiko kepatuhan apakah juga dilakukan penyesuaian pelaporan	3	
2	Apakah BPR telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko kepatuhan serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	3.40	Sistem Informasi yang dimiliki oleh SKMR sebagai aplikasi bantu diantaranya E-Semar, Si-moli, Dashboard limit risiko, SKK belum mengembangkan aplikasi khusus sebagai aplikasi bantu. Sistem informasi Manajemen Risiko kepatuhan belum sepenuhnya dapat diakses dengan mudah oleh seluruh unit kerja dan Satuan Kerja Kepatuhan, mencakup informasi pelanggaran pelaporan, informasi pelaksanaan RBB secara rinci, informasi komitmen kepada OJK dan lainnya. Informasi yang dapat disajikan masih terbatas pada data kuantitatif dan belum terdapat data penunjang laporan secara cepat dan terkini per aktivitas fungsional dari setiap unit kerja. Saat ini sedang dikembangkan sistem informasi Monitoring Limit dan toleransi risiko untuk mendukung pelaporan risiko kepatuhan oleh SKMR. Sistem informasi yang telah dikembangkan bank belum sepenuhnya dapat mendukung meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen risiko, antara lain dalam SIM belum dapat disajikan limit risiko yang ditetapkan sehingga apabila terjadi pelampauan maka risk owner akan melakukan pelaporan kepada SKMR dan menyusun strategi yang akan dilakukan untuk perbaikan. Sistem informasi yang dimiliki saat ini belum menyajikan informasi secara lengkap terkait penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Saat ini masih dikembangkan ke arah tersebut untuk menyempurnakan sistem informasi yang sudah ada.
	Sistem Informasi apa saja yang telah dimiliki termasuk dukungan CBS dan aplikasi bantu lainnya	3	
	Apakah sistem informasi risiko kepatuhan dapat dan mudah diakses serta laporan yang lengkap	3	
	Apakah sistem informasi yang dimiliki mampu mendukung pelaporan risiko kepatuhan yang lengkap dan cepat	3	
	Apakah sistem informasi yang dimiliki mampu meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen risiko kepatuhan (terkait produk, layanan, limit, penilaian, contingency plan, dan fungsi pengawasan)	4	
	Apakah sistem informasi yang dimiliki menyajikan informasi realisasi penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan (Risk Control dan tindak lanjut perbaikannya)	4	



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 53 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

Hasil Penilaian Pilar 3 - Kecukupan Proses dan Sistem		3.35	Bank telah memiliki kecukupan proses dan sistem untuk mendukung manajemen risiko kepatuhan melalui aplikasi bantu, ketentuan dan regulasi yang ditetapkan, ketersediaan pegawai di fungsi kepatuhan. Namun berdasarkan pada kompleksitas usaha dan pemenuhan regulasi baik dari otoritas maupun institusi pemerintahan ketersediaan jumlah pegawai di fungsi kepatuhan harus dilengkapi. Jumlah frekuensi dan signifikansi pelanggaran belum dapat dilakukan perbaikan dan pengawasan melalui sistem informasi. Mendasarkan hal tersebut peringkat kecukupan proses dan sistem ditetapkan pada peringkat Kurang Memadai.
PILAR 4 : Sistem Pengendalian yang Menyeluruh			
1	Apakah SKAI atau PEAI telah melakukan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko kepatuhan, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	2.40	SKAI telah melakukan pemeriksaan penerapan manajemen risiko kredit pada Beberapa Divisi di Kantor Pusat dan 11 Kantor Cabang, mencakup evaluasi terhadap implementasi kebijakan, prosedur, proses dan mekanisme mitigasi risiko untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan internal. Hasil pemeriksaan menunjukkan beberapa temuan fundamental terkait kurang memadainya pengendalian internal, diantaranya tidak dilakukannya penilaian risiko secara berkala oleh unit kerja utama. SKAI telah melakukan monitoring tindak lanjut temuan dengan mengirimkan progress tindak lanjut kepada Kepala Cabang maksimal tanggal 5 setiap bulannya dan telah melaporkan kepada Direktur Utama. SKAI melakukan pengawasan terhadap setiap unit kerja dan individu yang terlibat dalam kebijakan manajemen risiko kepatuhan terhadap wewenang dan tanggungjawab, pemahaman dan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang ditetapkan untuk manajemen risiko kepatuhan. SKAI telah melakukan pengawasan pada pemisahan fungsi, struktur organisasi, fungsi pelaporan, dan dokumentasi penerapan manajemen risiko kepatuhan dalam pemeriksaan yang dilakukan di kantor cabang yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan. SKAI telah melakukan verifikasi dan review terhadap sistem pengendalian intern manajemen risiko kepatuhan dalam pemeriksaan yang dilakukan di kantor cabang yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.
	Apakah selama periode penilaian SKAI telah melakukan pemeriksaan penerapan manajemen risiko kepatuhan di berapa cabang atau unit kerja di bidang manajemen risiko kepatuhan	3	
	Apakah setiap temuan SKAI dalam penerapan manajemen risiko kepatuhan telah dilakukan monitoring tindak lanjutnya dan telah dilaporkan kepada Direktur Utama	2	
	Apakah SKAI dalam penerapan manajemen risiko kepatuhan telah melakukan pengawasan atas penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk kepatuhan kebijakan manajemen risiko kepatuhan	3	
	Apakah SKAI telah melakukan pengawasan pada pemisahan fungsi, struktur organisasi, fungsi pelaporan, dan dokumentasi penerapan manajemen risiko kepatuhan	2	
	Apakah SKAI telah melakukan verifikasi dan review terhadap sistem pengendalian intern manajemen risiko kepatuhan	2	



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 54 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

2	Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko kepatuhan telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	2.50	unit kerja pengendalian telah terpisah dari unit kerja operasional kepatuhanUnit kerja kepatuhan belum sepenuhnya memahami dan menjalankan tugas serta tanggung jawabnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang telah ditetapkan. Pemahaman terhadap penerapan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta pemantauan dan mitigasi risiko yang efektif masih belum optimal.
	Apakah unit kerja pengendalian telah terpisah dari unit kerja operasional perkepatuhan	2	
	Apakah unit kerja kepatuhan telah memahami dan menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tupoksi	3	
Hasil Penilaian Pilar 4 - Sistem Pengendalian yang Menyeluruh		2.45	Bank telah memiliki kecukupan sistem pengendalian internal dan melakukan langkah pelaksanaan audit terhadap risiko kepatuhan di cabang secara berkala. Kecukupan organisasi yang bertugas sebagai pengendali di internal yaitu sebagai Risk Management Unit dan Risk Assurance yang terpisah. Satuan Kerja Pengendalian secara berkala melakukan pembahasan dalam forum rapat dengan memberikan rekomendasi kepada Direksi dengan agenda hasil pengawasan atas penerapan manajemen risiko kepatuhan yang dilakukan Satuan Kerja Kepatuhan. Satuan Kerja Pengendalian telah memiliki ketentuan dan pedoman kerja yang cukup dan dilakukan review secara berkala. Meskipun demikian proses pengendalian yang dilakukan oleh fungsi Risk Control dan Risk Assurance belum secara optimal menurunkan tingkat risiko kepatuhan. Hal ini tampak hasil temuan pemeriksaan masih didominasi temuan pelanggaran regulasi Risk Awareness tidak dijalankan di unit kerja. Berdasarkan hal tersebut penilaian pilar 4 adalah Cukup memadai.

REKAP PENILAIAN KPMR KEPATUHAN

Hasil Penilaian Pilar 1 -Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris	2.94
Hasil Penilaian Pilar 2 - Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Limit	2.93
Hasil Penilaian Pilar 3 - Kecukupan Proses dan Sistem	3.35
Hasil Penilaian Pilar 4 - Sistem Pengendalian yang Menyeluruh	2.45
Hasil Penilaian KPMR	3.35
	Kurang Memadai

URAIAN KPMR KEPATUHAN

Hasil penilaian secara self assesment yang dilakukan oleh unit kerja kantor Cabang untuk Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan didominasi hasilnya di tingkat Kurang Memadai. Dewan Komisaris dan Direksi telah menyusun kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dalam Buku Pedoman Perusahaan yang dilakukan review secara berkala. Ketentuan penetapan Limit dan Toleransi risiko dilakukan review berkala melalui forum rapat Komite sesuai ketentuan. Mempertimbangkan cakupan kegiatan operasional di 28 cabang dan kantor kas sebanyak 102, Satuan Kerja Kepatuhan masih belum mencakupi walau terdapat penambahan jumlah karyawan menjadi 3 pegawai. 1 kepala bidang, dan 1 pejabat Kepala Satuan Kerja Kepatuhan. Fungsi pengawasan dilakukan melalui kunjungan langsung melalui kegiatan MMA di unit kerja berdasarkan jadwal yang telah ditentukan dan hasilnya dilaporkan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti. Namun demikian penerapan prinsip kehati-hatian dan budaya sadar risiko belum dapat diterapkan secara menyeluruh pejabat dan jajaran di bawahnya. Pemahaman regulasi internal maupun eksternal oleh pegawai masih lemah yang dibuktikan temuan pelanggaran yang dilakukan Satuan Kerja Pengendalian yang masih terdapat temuan pelanggaran ketentuan dasar. Fungsi Satuan Kerja Pengendalian belum optimal berdasarkan hasil temuan pelanggaran yang terjadi di Cabang. Bank belum memiliki kecukupan proses dan sistem utamanya terkait pemantauan dan alat bantu Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko kepatuhan. Berdasarkan hal tersebut maka penilaian KPMR risiko operasional adalah Kurang Memadai.



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman55 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

PROFIL NILAI KEPATUAHAN

Periode pelaporan				Periode Sebelumnya			
Risiko Inheren	Risiko KPMR	Tingkat Risiko	Kualitas Manrisk	Risiko Inheren	Risiko KPMR	Tingkat Risiko	Kualitas Manrisk
2.71	3.35	3.08	Risiko Sedang (Dilakukan kaji ulang terbatas, rencana tindak dilaporkan triwulanan)	3.37	3.30	4.00	Risiko Tinggi (Dilakukan kaji ulang menyeluruh, rencana tindak dilaporkan triwulanan)
Sedang	Kurang Memadai	Sedang	Risiko Sedang (Dilakukan kaji ulang terbatas, rencana tindak dilaporkan triwulanan)	Tinggi	Kurang Memadai	Tinggi	Risiko Tinggi (Dilakukan kaji ulang menyeluruh, rencana tindak dilaporkan triwulanan)

Komponen	Keterangan
Tingkat Risiko	Hasil Penilaian Tingkat Risiko Inheren Kepatuhan pada peringkat Sedang dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kurang Memadai sehingga harus dilakukan kaji ulang terbatas dan menyusun rencana tindak secara triwulanan. Berdasarkan penilaian tersebut menunjukkan bawah implementasi risiko kepatuhan oleh pegawai masih menjadi perhatian utama dalam pengelolaan risiko. Budaya sadar kepatuhan dan implementasi dari kegiatan sosialisasi, pendidikan, maupun pendampingan belum mampu menekan terjadinya pelanggaran. Seluruh jajaran Pengurus dan pegawai bersama-sama harus memantau dan mengendalikan aktivitas yang menyimpang/ melanggar ketentuan perundang-undangan dan perilaku organisasi yang menyimpang dari standar yang berlaku secara umum untuk meminimalkan dampak negatif. Pemenuhan ketentuan internal, sosialisasi, pendampingan dan fungsi konsultasi, monitoring perlu dilakukan terus menerus agar tidak terjadi pelanggaran/ penyimpangan terhadap ketentuan atau komitmen Bank kepada pihak stake holder. Teladan pimpinan dan penegakan disiplin wajib dilaksanakan dengan tegas dan cepat sebagai upaya preventif dalam pengendalian risiko kepatuhan.
Risiko Inheren	Risiko kepatuhan yang dihadapi Bank saat ini berupa pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, serta kekosongan posisi Direktur Kepatuhan. Keterbatasan SDM di unit kepatuhan menyebabkan fungsi kepatuhan belum berjalan optimal. Beberapa komitmen hasil pemeriksaan OJK dan monitoring regulasi baru juga belum ditindaklanjuti dengan baik. Divisi Legal telah dibentuk, namun belum optimal dalam memberikan kajian hukum akibat keterbatasan SDM. Meski terdapat permasalahan hukum dari sebelum konsolidasi, tidak ada putusan hukum yang berdampak material bagi bank. Sosialisasi kepatuhan telah dilakukan, tetapi belum diikuti evaluasi yang memadai. Bank juga belum memiliki standar kompetensi SDM yang jelas. Mendasarkan pada hasil penilaian maka risiko kepatuhan inheren ditetapkan sebesar 2.71 Tingkat Risiko Sedang.
Tingkat Kualitas MR	Hasil penilaian secara self assesment yang dilakukan oleh unit kerja kantor Cabang untuk Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan didominasi hasilnya di tingkat Kurang Memadai. Dewan Komisaris dan Direksi telah menyusun kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dalam Buku Pedoman Perusahaan yang dilakukan review secara berkala. Ketentuan penetapan Limit dan Toleransi risiko dilakukan review berkala melalui forum rapat Komite sesuai ketentuan. Mempertimbangkan cakupan kegiatan operasional di 28 cabang dan kantor kas sebanyak 102, Satuan Kerja Kepatuhan masih belum mencukupi walau terdapat penambahan jumlah karyawan menjadi 3 pegawai. 1 kepala bidang, dan 1 pejabat Kepala Satuan Kerja Kepatuhan. Fungsi pengawasan dilakukan melalui kunjungan langsung melalui kegiatan MMA di unit kerja berdasarkan jadwal yang telah ditentukan dan hasilnya dilaporkan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti. Namun demikian penerapan prinsip kehati-hatian dan budaya sadar risiko belum dapat diterapkan secara menyeluruh pejabat dan jajaran di bawahnya. Pemahaman regulasi internal maupun eksternal oleh pegawai masih lemah yang dibuktikan temuan pelanggaran yang dilakukan Satuan Kerja Pengendalian yang masih terdapat temuan pelanggaran ketentuan dasar. Fungsi Satuan Kerja Pengendalian belum optimal berdasarkan hasil temuan pelanggaran yang terjadi di Cabang. Bank belum memiliki kecukupan proses dan sistem utamanya terkait pemantauan dan alat bantu Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko kepatuhan. Mendasarkan hal tersebut maka penilaian KPMR risiko operasional adalah Kurang Memadai.



PT BPR BKK JATENG
(Perseroda)

RISIKO LIKUIDITAS



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 56 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

(RISIKO LIKUIDITAS)

INHEREN LIKUIDITAS

No	Parameter	Nilai	Keterangan
PILAR 1 : Komposisi dan Konsentrasi Aset dan Kewajiban			
1	Aset Likuid / Total Aset	1.00	Komposisi aset likuid terhadap total aset sebesar 13,26%, lebih rendah dari limit 15%, lebih rendah dari penilaian pada periode Semester II 2024 yang mencapai 15,64%. Aset likuid dihitung dari jumlah kas dan penempatan di bank lain dalam bentuk giro dan tabungan. Ketiga komponen tersebut lebih rendah dari periode sebelumnya. Total aset mengalami penurunan dari periode sebelumnya. Rasio aset likuid perlu diperhatikan mengingat dalam periode 1 tahun terakhir terus mengalami penurunan dan telah melampaui ambang batas yang ditentukan yakni harus lebih dari 15%.
	Total Aset-Aset Likuid / Total DPK-Aset Likuid	1	
2	Aset Likuid / Kewajiban Lancar	1.17	Komposisi aset likuid terhadap total aset sebesar 13,26%, lebih rendah dari limit 15%, lebih rendah dari penilaian pada periode Semester II 2024 yang mencapai 15,64%. Aset likuid dihitung dari jumlah kas dan penempatan di bank lain dalam bentuk giro dan tabungan. Ketiga komponen tersebut lebih rendah dari periode sebelumnya. Total aset mengalami penurunan dari periode sebelumnya. Rasio aset likuid perlu diperhatikan mengingat dalam periode 1 tahun terakhir terus mengalami penurunan dan telah melampaui ambang batas yang ditentukan yakni harus lebih dari 15%.
	Total Aset Likuid / Pendanaan jangka Pendek	0.11	
	Aset Likuid / Kewajiban Jangka Pendek	0.56	
	Arus Kas Netto / Total DPK	0.44	
	Tabungan / Total DPK	0.56	
	Deposito Jangka Waktu 3 bln / Total DPK	0.11	
	Deposito Jangka Waktu 6 bln / Total DPK	0.22	
	Deposito Jangka Waktu 12 bln / Total DPK	0.11	
	Modal Disetor / Total DPK	0.11	
	Pinjaman / Total DPK	0.11	
3	Kredit Yang Diberikan / Total Dana Pihak Ketiga Bukan Bank	2.25	Rasio kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga lebih tinggi dari penilaian periode sebelumnya yaitu 85.53% dari sebelumnya sebesar 82,14%. Meski terjadi peningkatan, namun rasio ini masih pada batasan yang aman dan sehat.
	DPK Yang Dijamin LPS / DPK	1.25	
	Alat Likuid + Kredit Lancar / Dana Pihak Ke 3	1.00	
	Deposito Tenor Sampai Dengan 6 bln / Alat Likuid	1.00	
	Pertumbuhan Kredit / Pertumbuhan Simpanan	0.25	
4	25 Deposita dan Penabung Terbesar / Total DPK	2.00	Rasio penabung terbesar turun dari periode sebelumnya namun masih berada dibawah ambang batas yang ditetapkan. Sementara itu untuk 25 penabung terbesar mengalami kenaikan sebesar. Penurunan pada rasio ini juga dipengaruhi oleh naiknya aspek pembagi yaitu total DPK yang meningkat dari periode sebelumnya.
5	Kredit Yang Diberikan / Total Dana Pihak Ketiga Bukan Bank	1.13	Rasio pendanaan non inti juga turun pada periode penilaian. Sama halnya dengan periode sebelumnya, pendanaan non inti dinilai dari dana yang rentan terhadap penarikan sewaktu-waktu seperti deposito dengan suku bunga dan nominal diatas ketentuan LPS serta nasabah korporasi. Rasio sebesar 1,30% masih dibawah batasan yang ditetapkan yaitu sebesar 10% yang menunjukkan bahwa ketersediaan dana untuk penarikan sewaktu-waktu masih mencukupi.
	Pendanaan Non Inti-Alat Likuid / Total Aset-Aset Likuid	0.25	
	Deposito Rate Spesial / Alat Likuid	0.50	
	Aset Likuid / Pendanaan Non Inti	0.25	
	Deposito Inti (100 Deposita) / Total DPK	0.25	



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 57 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

Hasil Penilaian Pilar 1 - Komposisi dan Konsentrasi Aset dan Kewajiban		1.51	Pada pilar 1 risiko likuiditas memiliki penilaian yang sama dengan periode sebelumnya secara keseluruhan tingkat risiko yang ditetapkan yaitu sebesar 1,51. Berdasarkan parameter OJK, rasio aset likuid terhadap total aset turun dari 15,64% pada Semester II 2024 menjadi 13.26% pada Semester I 2025. Rasio aset likuid terhadap kewajiban lancar lebih rendah dari 19,26% di semester II 2024 menjadi 16,21% di Semester I 2025. Rasio LDR lebih tinggi dari 82,14% pada periode semester II 2024 menjadi 85,53 % pada Semester I 2025. Rasio 25 deposito dan penabung terbesar terhadap total DPK sebesar 5,34% di semester II 2024 menjadi 5,19% di Semester I 2025. Rasio pendanaan non inti terhadap total pendanaan turun dari 4,19% pada semester II 2024 menjadi 1.30% di Semester I 2025. Berdasarkan pada rasio tersebut pada Pilar 1 Risiko Likuiditas memiliki tingkat risiko inheren Rendah.
PILAR 2 : Kerentanan Pada Kebutuhan Pendanaan Serta Akses Pada Sumber Pendanaan			
1	Penilaian kebutuhan pendanaan BPR pada situasi normal maupun krisis, dan kemampuan BPR untuk memenuhi kebutuhan pendanaan	2.01	Bank belum pernah teruji pada kondisi krisis, namun bank memiliki akses yang sangat memadai untuk pemenuhan terhadap kebutuhan pendanaan. Dukungan pemegang saham sangat tinggi meskipun membutuhkan proses dan birokrasi yang cukup panjang
	Sumber Pendanaan Untuk Memenuhi Kebutuhan	0.67	
	Identifikasi Terhadap Produk Kredit dan Simpanan	0.67	
	Identifikasi Sumber Pendanaan Non Inti	0.67	
2	Penilaian terhadap seberapa luas atau seberapa besar BPR memiliki komitmen pendanaan yang dapat digunakan jika dibutuhkan	2.00	Akses BPR pada sumber pendanaan memadai dibuktikan dengan reputasi BPR adalah baik, meskipun untuk pengajuan pinjaman ke bank lain tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu. Terdapat komitmen/dukungan likuiditas dari pemegang saham pengendali dan dukungan dari perusahaan terkait
Hasil Penilaian Pilar 2 - Kerentanan Pada Kebutuhan Pendanaan Serta Akses Pada Sumber Pendanaan		2.00	Bank memiliki dukungan dan komitmen yang tinggi dari Pemegang saham pengendali, meskipun mendapatkan dukungan likuiditas dalam kondisi krisis atau mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan lain memerlukan proses dan birokrasi yang cukup panjang. Bank juga mendapat dukungan yang baik dari perusahaan terkait saat menghadapi kondisi krisis, yang mencerminkan reputasi baiknya. Walaupun bank belum diuji dalam situasi krisis yang berdampak pada risiko likuiditas, hasil penilaian menetapkan nilai risiko likuiditas pilar 2 tetap memiliki nilai 2 atau rendah, konsisten dengan penilaian sebelumnya.
PILAR 3 : LAINNYA			
1	Faktor Lainnya	2.17	Pilar penilaian lainnya menggunakan beberapa parameter yang mempengaruhi risiko inheren likuiditas antara lain khususnya penyusunan profil maturitas yang dilakukan setiap bulan, penyusunan proyeksi arus kas yang dilakukan setiap bulan, penyusunan stresstest kemampuan yang dilakukan setiap bulan, identifikasi risk events yang mempengaruhi likuiditas dilakukan 3 bulan sekali, identifikasi dan evaluasi terhadap jenis risiko yang meningkatkan risiko likuiditas dilakukan setiap 3 bulan sekali dan monitoring tingkat suku bunga dilakukan setiap 1 minggu sekali. Berdasarkan hal tersebut ditetapkan peringkat risiko pada Pilar tersebut adalah risiko Rendah.
	Penyusunan Profil Maturitas	0.33	
	Penyusunan Proyeksi Arus Kas	0.33	
	Penyusunan Stress Testing Kemampuan Likuiditas	0.50	
	Identifikasi Risk Events yang Mempengaruhi Kemampuan Likuiditas yang Bersumber dari Eksternal	0.33	
	Identifikasi dan Evaluasi terhadap Jenis Risiko lain yang meningkatkan risiko likuiditas	0.33	
	Monitoring Tingkat Suku Bunga Pasar	0.33	



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 58 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

Lainnya	2.17	Pilar penilaian lainnya menggunakan beberapa parameter yang mempengaruhi risiko inheren likuiditas antara lain khususnya penyusunan profil maturitas yang dilakukan setiap bulan, penyusunan proyeksi arus kas yang dilakukan setiap bulan, penyusunan stresstest kemampuan yang dilakukan setiap bulan, identifikasi risk events yang mempengaruhi likuiditas dilakukan 3 bulan sekali, identifikasi dan evaluasi terhadap jenis risiko yang meningkatkan risiko likuiditas dilakukan setiap 3 bulan sekali dan monitoring tingkat suku bunga dilakukan setiap 1 minggu sekali. Mendasarkan hal tersebut ditetapkan peringkat risiko pada Pilar tersebut adalah risiko Rendah.
---------	------	---

REKAP PENILAIAN INHEREN LIKUIDITAS	
Hasil Penilaian Pilar 1 - Komposisi Portofolio Aset Dan Tingkat Konsentrasi Likuiditas	1.51
Hasil Penilaian Pilar 2 - Kualitas Asetm	2.00
Hasil Penilaian Lainnya	2.17
Hasil Penilaian Inheren	2.17
	Rendah

URAIAN INHEREN LIKUIDITAS
Berdasarkan hasil penilaian risiko likuiditas inheren di seluruh pilar yang ditetapkan hasil nilai dan peringkat risiko likuiditas inheren pada tingkat 2 atau risiko rendah. Penilaian ini sama dengan hasil penilaian periode sebelumnya. Struktur dana dalam kondisi yang baik. Pengelolaan dana simpanan masih perlu mendapatkan perhatian mengingat selama ini kinerja pemasaran di bidang dana tidak atau belum dilakukan secara optimal dan konsisten sehingga sangat rentan nasabah memindahkan dananya ke lembaga keuangan lain, apalagi komposisi tabungan dan deposito adalah sebesar 78 : 22 yang sangat memungkinkan nasabah untuk dapat memindahkan dananya sewaktu-waktu walau kewajiban bunga simpanan menjadi lebih rendah. Hasil penilaian risiko likuiditas inheren di seluruh pilar, baik parameter yang telah ditetapkan otoritas maupun parameter tambahan yang ditetapkan Bank, menunjukkan hasil nilai dan peringkat risiko likuiditas inheren pada tingkat 2.17 atau risiko rendah.



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman59 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

KPMR LIKUIDITAS

No	Parameter KPMR	Peringkat Risiko	Keterangan
PILAR 1 : Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris			
1	Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	2.40	Dewan Komisaris telah menyetujui kebijakan manajemen risiko likuiditas dan ketentuan - ketentuan lain yang meliputi SOP, Penyaluran kredit, penempatan antar bank, suku bunga kredit, suku bunga simpanan, strategi dan kerangka manajemen likuiditas, serta limit dan toleransi risiko likuiditas, dan lain lainnya Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko likuiditas, antara lain dengan melakukan penilaian terhadap kecukupan kualitas dan kuantitas kebijakan serta prosedur dengan peraturan OJK dan praktek umum terbaik sesuai size dan kompleksitas bank . Dewan Komisaris mampu mengimplementasikan kompetensinya pada bidang manajemen risiko dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko likuiditas dan memberikan arahan perbaikan yang harus dilakukan oleh Direksi. Dewan Komisaris telah memastikan penerapan kebijakan manajemen risiko likuiditas kepada Direksi dan jajarannya antara lain dengan mengikuti kegiatan exit meeting dan kegiatan MMA untuk mencermati temuan - temuan hasil pemeriksaan atau temuan pada proses kerja terhadap penerapan kebijakan manajemen risiko . selain itu, juga dilakukan pertemuan bersama dengan Satuan Kerja Pengendalian, juga pernah melakukan pertemuan khusus dengan RTU risiko likuiditas yaitu divisi, satker dan kepada cabang / wilayah Dewan Komisaris telah mempertimbangkan masukan dan rekomendasi tertulis dari Komite Pemantau Risiko yang disampaikan secara berkala. Jumlah anggota Komite Pemantau Risiko pada periode penilaian belum sesuai ketentuan sehingga pelaksanaan fungsi Komite Pemantau Risiko juga kurang optimal, antara lain tercermin pada tidak adanya Rapat bersama antara Dewan Komisaris dengan Komite Pemantau Risiko selama periode penilaian.
	Apakah ketentuan dan kebijakan manajemen risiko likuiditas yang disetujui Dewan Komisaris apa saja yang telah ditetapkan (PKPB, SK Direksi, SOP likuiditas, SE Direksi, SK BWMK, SK Limit dan Toleransi Risiko)	2	
	Apakah evaluasi ketentuan dan kebijakan manajemen risiko likuiditas yang disetujui Dewan Komisaris telah dilakukan (Ketentuan likuiditas yang diterbitkan selama periode penilaian) dan kapan dilakukan secara periodik serta dilakukan kepada siapa saja	3	
	Apakah Dewan Komisaris mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen risiko likuiditas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	2	
	Apakah Dewan Komisaris telah memastikan Direksi dan jajarannya dalam penerapan manajemen risiko likuiditas sesuai kebijakan manajemen risiko yang ditetapkan	2	
	Apakah Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi telah mempertimbangkan masukan dari Komite Pemantau Risiko	3	



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman60 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

2	Apakah Dewan komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud ?	3.00	Pada periode penilaian Direksi belum melaporkan pertanggungjawaban penerapan kebijakan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris secara tertulis. Laporan yang disampaikan adalah laporan hasil pemeriksaan SKAI, sehingga pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris tidak optimal karena belum tersaji informasi yang komprehensif terhadap pertanggungjawaban penerapan kebijakan manajemen risiko likuiditas. Dewan Komisaris telah memberikan masukan penerapan manajemen risiko likuiditas dengan melakukan pertemuan bersama satuan kerja, divisi, kepala cabang dan Direksi. Dewan Komisaris telah melakukan monitoring tindak lanjut penerapan manajemen risiko likuiditas dari Direksi terkait dengan capaian RBB, pemenuhan SDM, pemenuhan anggota komite dibawah Dekom dan lainnya. Dewan Komisaris secara konsisiten telah mengembangkan budaya manajemen risiko likuiditas dengan memastikan seluruh ketentuan operasional telah dipenuhi, mengawal implementasinya dengan melakukan kunjungan ke cabang, memantau tindaklanjut hasil kunjungan SKMR dan SKAI, mendorong terpenuhinya kecukupan SDM, mendorong tercapainya target RBB. Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan transaksi pembelian tanah untuk rencana pembangunan gedung kantor pusat, pemberian kredit kepada pihak terkait
	Apakah Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban Direksi dalam penerapan manajemen risiko likuiditas secara tertulis dan dalam forum rapat (terdapat notulen)	3	
	Apakah Dewan Komisaris memberikan masukan dan pengarahannya penerapan manajemen risiko likuiditas kepada Direksi secara tertulis dan forum rapat	3	
	Dewan Komisaris melakukan monitoring tindak lanjut evaluasi pertanggungjawaban Direksi penerapan manajemen risiko likuiditas	3	
	Apakah Dewan Komisaris secara konsisten mengembangkan budaya sadar risiko likuiditas	3	
	Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris	3	
3	Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko likuiditas, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	2.33	Direksi telah optimal dalam mengimplementasikan kompetensinya terkait manajemen risiko likuiditas, sehingga pemenuhan seluruh kewajiban bank kepada pihak ketiga dapat dipenuhi dengan baik, dan terjadi kecukupan likuiditas pada masa krisis maupun pada masa normal. Direksi telah menetapkan kebijakan manajemen risiko likuiditas antara dengan menetapkan pedoman penempatan dana antar bank, ketentuan suku bunga, penetapan rasio keuangan dan lainnya. Direksi telah melakukan evaluasi kebijakan dan ketentuan manajemen risiko likuiditas secara berkala berdasarkan temuan - temuan implementasi kebijakan yang bersumber dari temuan OJK, temuan SKAI, laporan profil risiko atau kaji ulang oleh pihak internal atau eksternal
	Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen risiko likuiditas (Pelatihan tentang manajemen risiko likuiditas yang diikuti, pengalaman di bidang yang berkaitan dengan manajemen risiko likuiditas)	2	



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman61 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

	Ketentuan dan kebijakan manajemen risiko likuiditas yang disetujui Direksi apa saja yang telah ditetapkan (SK Direksi, SOP likuiditas, SE Direksi)	2	
	Kapan evaluasi ketentuan dan kebijakan manajemen risiko likuiditas yang disetujui Direksi dilakukan (Ketentuan likuiditas yang diterbitkan selama periode penilaian)	3	
4	Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi Risiko likuiditas, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko likuiditas terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	2.60	Direksi telah melakukan tindakan mitigasi risiko antara lain melalui pembahasan dalam forum Komite Manajemen Risiko, rapat ALCO secara berkala. Direksi juga melakukan tindakan pengendalian risiko likuiditas dengan memastikan realisasi RBB, penyelesaian kredit bermasalah untuk meningkatkan arus kas masuk, capaian penghimpunan dana pihak ketiga, kewajiban pembayaran kepada pihak internal dan eksternal. Direksi telah menyampaikan kepada seluruh unit kerja khususnya Kepala Cabang dan Pejabat Eksekutif melalui forum evaluasi setiap bulan tindakan dan kebijakan pengendalian risiko likuiditas, kepada jenjang organisasi lain dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan kegiatan monitoring, mentoring dan advising ke cabang. Memberikan teguran dan / atau punishment kepada pelaku pelanggaran / yang tidak berkinerja baik. Direksi secara konsisten mengembangkan budaya risiko likuiditas dengan melakukan pemenuhan dan/atau pengkinian ketentuan, sosialisasi, pemantauan implementasi serta penilaian profil risiko secara berkala, mengembangkan budaya perusahaan, mencontohkan sebagai sosok panutan, melakukan evaluasi dan menyusun langkah - langkah perbaikan terhadap hasil penilaian profil risiko. Direksi melakukan review terhadap delegasi wewenang memutus transaksi operasional dan transaksi bisnis, wewenang melakukan tindakan hukum kepada pejabat eksekutif, dan kewenangan lain berdasarkan prinsip kehati-hatian terhadap risiko likuiditas. Direksi telah melakukan evaluasi terhadap usulan transaksi yang diterima sebelum memberikan persetujuan, terkait dengan penarikan dana ABA, kewenangan memutus kredit dan lainnya.
	Apakah Direksi secara konsisten mengambil tindakan yang perlu dilakukan dalam mitigasi risiko likuiditas	2	
	Apakah Direksi secara berkala menyampaikan tindakan dan kebijakan dalam rangka pengendalian dan mitigasi risiko kepada seluruh_likh unit kerja	3	
	Apakah Direksi secara konsisten telah mengembangkan budaya sadar risiko likuiditas kepada seluruh_likh unit kerja	3	
	Apakah Direksi secara berkala melakukan review atas kebijakan pendelegasian kewenangan yang diberikan	2	
	Apakah Direksi telah melakukan evaluasi terhadap usulan transaksi yang diterima sebelum memberikan persetujuan.	3	



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman62 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

5	Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi likuiditas dan fungsi Manajemen Risiko likuiditas?	2.75	Fungsi second line SKMR dan SKK telah terpisah dari unit kerja operasional dan bisnis , melaksanakan tugasnya secara independen Kecukupan organisasi Unit Kerja masih belum terpenuhi, baik dari jumlah SDM, kelengkapan pejabat, maupun kompetensinya. Terdapat kekurangan SDM dan kekosongan pejabat di Cabang antara lain pegawai setingkat Kepala Bidang dan staf. Terdapat kekurangan satu pejabat Koordinator Wilayah. Kompetensi pegawai belum merata di setiap unit kerja. Unit kerja yang mengelola risiko likuiditas belum sepenuhnya memiliki jumlah SDM yang cukup, baik dari kualitas maupun kuantitas. Sedang kecukupan kompetensi terkait manajemen risiko pada semua jenjang organisasi , masih belum memadai, sehingga perlu adanya peningkatan kompetensi melalui berbagai metode yang sesuai dengan kondisi SDM yang ada. Proses operasional telah dijalankan secara independen namun masih terdapat kelemahan, diantaranya belum dilakukan penilaian kinerja individu, belum terdapat reward dan punishment secara tegas, belum optimal dalam rotasi pegawai.
	Fungsi Second Line (SKMR dan SKK) apakah telah terpisah dari Unit Kerja perlikuiditas dan melaksanakan tugasnya secara independen	2	
	Apakah kecukupan organisasi di unit kerja likuiditas telah didukung dengan kompetensi yang baik	3	
	Apakah kecukupan organisasi di satuan manajemen risiko likuiditas telah didukung dengan kompetensi yang baik	3	
	Apakah proses likuiditas dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan oleh masing-masing unit kerja secara independen	3	
6	Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko likuiditas?	3.00	SOTK telah sesuai dengan kebijakan manajemen risiko likuiditas, namun masih terjadi rangkap jabatan pada fungsi Direktur Kepatuhan, Kepala Cabang. Pada periode penilaian belum dilakukan review berkala terhadap pedoman pengelolaan SDM. Pada periode pelaporan, belum dilakukan evaluasi ketercukupan SDM, sehingga beberapa unit kerja / kantor cabang masih kekurangan SDM.
	Apakah ketentuan SOTK telah sesuai dengan penerapan manajemen risiko likuiditas, tidak terdapat perangkapan jabatan, independen	3	
	Apakah pedoman pengelolaan SDM dilakukan review secara berkala	3	
	Apakah Direksi melakukan evaluasi ketercukupan jumlah SDM bidang likuiditas	3	
Hasil Penilaian Pilar 1 -Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris		2.68	Pengurus dalam hal ini Dewan Komisaris dan Direksi memiliki komitmen yang tinggi dalam rangka penerapan Manajemen Risiko likuiditas dengan telah menetapkan ketentuan dan kebijakan serta melakukan review secara berkala, melakukan langkah untuk memastikan telah menetapkan dan melakukan review atas kebijakan penerapan manajemen risiko likuiditas. Pengurus telah menindaklanjuti komitmen pemeriksaan OJK tentang penerapan kebijakan manajemen risiko likuiditas yang menjadi temuan pemeriksaan. Meskipun demikian masih terdapat kelemahan antara lain belum sepenuhnya penerapan manajemen risiko likuiditas temua OJK dapat ditindaklanjuti, pemenuhan sumber daya manusia dalam hal ini kecukupan tenaga pemasaran di bidang dana, pegawai yang melakukan monitoring aktivitas di bagian dana, evaluasi kinerja tenaga pemasaran di bidang dana, penetapan strategi kinerja di bagian dana.
PILAR 2 : Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Limit			



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 63 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

1	Apakah BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	3.00	Rencana bisnis bank disusun berdasarkan strategi penerapan manajemen risiko mengacu pada hasil penerapan / profil risiko likuiditas Penyusunan rencana bisnis bank telah berdasarkan pada hasil penilaian profil risiko dimasa lalu, dan strategi serta kerangka manajemen risiko yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi profil risiko likuiditas. Kebijakan manajemen risiko kepatuhan dilakukan kaji ulang oleh SKMR, namun belum dilakukan kaji ulang oleh SKAI atau pihak eksternal. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko likuiditas telah tersedia untuk seluruh area Manajemen Risiko untuk risiko likuiditas. Meskipun demikian belum secara keseluruhan pegawai memiliki pemahaman dan penerapan yang baik. Perusahaan terus melakukan monitoring dan pendampingan untuk mengupayakan hal tersebut terealisasi dengan baik. Perumusan penetapan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko telah berdasarkan kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan berdasarkan hasil penilaian profil risiko likuiditas namun dalam pelaksanaannya masih perlu mendapatkan perhatian oleh seluruh risk owner dan satuan kerja pengendali, agar limit risiko yang ditetapkan aktif dilakukan monitoring untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi dan menetapkan strategi perbaikan yang harus dilakukan
	Apakah dalam penyusunan rencana kerja telah merujuk pada penerapan manajemen risiko likuiditas	3	
	Apakah dalam menyusun rencana kerja telah mendasarkan pada pengalaman dan capaian sebelumnya dengan tetap memperhatikan pengelolaan dan mitigasi risiko likuiditas	3	
	Apakah kebijakan manajemen risiko likuiditas dilakukan kaji ulang oleh pihak yang independen dan dilaporkan ke Dewan Komisaris dan Direksi	3	
	Apakah kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko likuiditas memadai dan telah tersedia untuk seluruh area Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai	3	
	Apakah perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko ditetapkan telah sesuai dengan sasaran strategi dan strategi bisnis	3	



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman64 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

2	"Apakah BPR: 1. memiliki prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi ? 2. melaksanakan prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas secara konsisten untuk seluruh aktivitas ? Dan 3. melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas secara berkala?"	2.88	BPP Manajemen Risiko telah mengatur mekanisme dan tata cara penetapan limit dan toleransi risiko likuiditas, namun masing - masing fungsi yang berkaitan dengan risiko kepatuhan belum optimal dalam memahami dan menjalankan seluruh aktivitas termasuk menetapkan limit risiko untuk seluruh aktivitas likuiditas. Bank telah melaksanakan prosedur manajemen risiko likuiditas dan penetapan limit dan toleransi risiko, namun belum konsisten dalam melakukan pengawasan terhadap monitoring limit dan toleransi risiko likuiditas. Bank belum optimal melakukan evaluasi terhadap pelampauan limit dan toleransi risiko likuiditas serta penyebab terjadinya pelampauan limit, sehingga upaya - upaya pencegahan dan perbaikan yang harus dilakukan juga tidak tepat waktu / lebih dini. Sebagian besar SDM belum memahami ketentuan limit dan toleransi risiko yang telah ditetapkan sebagai dasar acuan dalam pengendalian risiko. Satuan kerja manajemen risiko melakukan pendampingan dalam meningkatkan pemahaman setiap SDM. Bank telah melakukan evaluasi dan mengkinikan ketentuan limit dan toleransi risiko likuiditas berdasarkan kondisi usaha dan perkembangan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap proses kepatuhan, antara lain perubahan POJK 1 Tahun 2024 tentang kualitas aset BPR, suku bunga penjaminan LPS. Penetapan limit risiko telah memperhatikan data history serta memperhitungkan kemampuan Bank dalam menyerap risiko, kemampuan SDM dan faktor eksternal serta arah strategi bisnis bank. Penetapan limit risiko belum sepenuhnya sesuai prosedur yang ditetapkan karena masing - masing risk owner belum menyampaikan penetapan limit secara komprehensif. Penyusunan penetapan limit masih terfokus pelaksanaannya oleh SKMR. Penetapan Limit dan toleransi risiko likuiditas telah meliputi limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per aktivitas fungsional pada tiap - tiap risk owner kepatuhan berdasar hasil penilaian profil risiko pada masing - masing risk owner.
	Apakah Unit Kerja telah memahami penetapan limit dan toleransi risiko likuiditas yang ditetapkan dalam SK Direksi	2	
	Apakah Unit Kerja melakukan pengawasan monitoring limit dan toleransi risiko likuiditas	3	
	Apakah Unit Kerja melakukan evaluasi apabila terjadi pelampauan limit dan toleransi risiko yang ditetapkan	3	
	Apakah SDM telah memahami ketentuan limit dan toleransi risiko yang ditetapkan dan menjadi acuan dalam pengendalian manajemen risiko likuiditas	3	
	Apakah kebijakan penetapan limit dan toleransi risiko dilakukan pengkinian sesuai dengan kondisi usaha dan perkembangan faktor eksternal yang berpengaruh pada ketentuan limit yang telah ditetapkan	3	
	Apakah perumusan untuk penentuan limit dan toleransi risiko dilakukan sesuai dengan arah dan strategi likuiditas	3	
	Apakah penetapan limit telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan didokumentasikan sehingga memudahkan untuk dilakukan audit trail	3	



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 65 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

	Apakah penetapan limit dan toleransi risiko meliputi penetapan limit secara keseluruhan, per jenis risiko, dan per aktivitas fungsional yang memiliki exposure risiko	3	
3	Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko likuiditas sesuai dengan ketentuan?	3.00	Unit kerja belum sepenuhnya memiliki pemahaman yang baik mengenai kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan /atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risikonya Bank telah memiliki kebijakan penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang diatur dalam BPP Manajemen Risiko namun ketentuan tersebut belum ditetapkan dalam ketentuan dan pedoman tersendiri. BPP Manajemen Risiko tersebut juga belum menjelaskan secara lengkap kriteria produk dan layanan baru, sistem dan prosedur kewenangan pengelolaan mulai dari unit kerja atau organisasi, tata kerja persiapan produk dan atau aktivitas kredit baru, uji coba, pelaksanaan, dan laporan pelaksanaannya. Kebijakan produk dan aktivitas baru dilakukan evaluasi secara berkala sesuai ketentuan, namun pada periode penilaian belum melakukan evaluasi terhadap kebijakan produk dan aktivitas baru.
	Apakah unit kerja telah memahami ketentuan dan prosedur produk dan aktivitas baru dan risiko yang melekat pada setiap produk dan mitigasinya	3	
	Apakah ketentuan kebijakan produk dan aktivitas telah didukung dengan ketentuan dan petunjuk kerja yang lengkap	3	
	Apakah ketentuan kebijakan produk dilakukan evaluasi secara berkala	3	
Hasil Penilaian Pilar 2 - Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Limit		2.96	Bank telah memiliki kecukupan sistem dan pelaksanaan proses manajemen risiko likuiditas yang cukup baik namun mempertimbangkan kompleksitas bisnis yang sangat luas maka ketersediaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan proses manajemen risiko likuiditas masih kurang. Dalam penerapan manajemen risiko likuiditas Bank juga telah mengembangkan parameter pengukuran risiko likuiditas selain yang ditetapkan dari otoritas. Pengukuran yang dikembangkan Bank telah menyesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas Bank. Namun pelaksanaan proses manajemen risiko belum dilakukan secara menyeluruh dan belum terdokumentasinya sejak tahapan identifikasi sampai dengan pengendalian risiko kepatuhan. Unit kerja treasury bersama dengan Satuan kerja Manajemen Risiko belum sepenuhnya melakukan identifikasi atas produk dan layanan eksisting maupun baru.
PILAR 3 : Kecukupan Proses dan Sistem			



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 66 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

1	Apakah BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko likuiditas yang melekat pada kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko likuiditas?	3.00	SDM telah melaksanakan proses manajemen risiko likuiditas, namun terdapat kekurangan dalam pengukuran potensi kerugian akibat fraud, stress testing perubahan kondisi, serta kurangnya laporan yang komprehensif untuk mitigasi risiko kepatuhan. Belum seluruh jenjang organisasi memiliki pemahaman dan kemampuan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian aktivitas operasional dan bisnis. Masih sering terjadi kegiatan operasional belum mengacu pada penerapan prinsip kehati-hatian. Bank telah melaksanakan proses manajemen risiko likuiditas, dalam pelaksanaan belum dilakukan secara menyeluruh, termasuk dalam hal verifikasi dual control dan dukungan dokumen yang memadai terhadap setiap kewajiban likuiditas. Proses pengambilan keputusan bidang likuiditas dilakukan melalui pembahasan dalam forum komite SDM, Komite Pengadaan Barang jasa, Komite Penghapusan Aset, Komite Kredit, ALCO, dll Proses Manajemen risiko likuiditas terkadang belum didukung dengan data yang informatif akurat dan komprehensif, namun perbaikan terus dilakukan untuk menunjang proses Manajemen Risiko yang akurat. Bank telah memiliki jenis produk dan layanan sesuai dengan karakteristik masing - masing, namun sejauh ini belum dilakukan analisa terhadap risiko yang melekat pada masing - masing jenis produk. Evaluasi terhadap kesesuaian asumsi, data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko likuiditas sudah dilakukan, namun belum secara menyeluruh. Pengukuran risiko likuiditas, belum dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan yang material pada kegiatan layanan, produk, dan faktor risiko. Pemantauan risiko likuiditas dilakukan dengan penetapan limit dan toleransi risiko pada aktivitas fungsional dan jenis risiko, namun belum dilakukan stres testing terhadap exposure risiko yang ada. Perubahan yang material terhadap faktor risiko likuiditas belum dilakukan penyesuaian pelaporan, namun akan terus dilakukan pengawasan untuk mengoptimalkan pelaporan-pelaporan jika terjadi perubahan.
	Apakah dalam aktivitas likuiditas seluruh SDM telah berpedoman pada penerapan manajemen risiko likuiditas	3	
	Apakah seluruh organisasi mampu dan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas likuiditas	3	
	Apakah dalam proses perlikuiditasan dilakukan verifikasi dual control dan didukung dengan dokumen yang memadai	3	
	Apakah dalam proses pengambilan keputusan bidang perlikuiditasan dilakukan secara pembahasan bersama dan dilakukan secara transparan	3	
	Apakah dalam proses manajemen risiko likuiditas telah didukung dengan data likuiditas yang akurat dan informatif	3	
	Apakah dalam proses manajemen risiko likuiditas telah melakukan analisa karakteristik risiko likuiditas yang melekat pada produk dan layanan	3	
	Apakah kesesuaian asumsi, data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko likuiditas telah dilakukan evaluasi	3	



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 67 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

	Apakah dalam melakukan pengukuran risiko likuiditas telah dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan yang material pada kegiatan layanan, produk, dan faktor risiko	3	
	Apakah dalam melakukan pemantauan risiko likuiditas telah dilakukan evaluasi terhadap eksposur risiko likuiditas	3	
	Apabila terdapat perubahan yang material dalam faktor risiko likuiditas apakah juga dilakukan penyesuaian pelaporan	3	
2	Apakah BPR telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko likuiditas serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	2.80	Sistem Informasi yang dimiliki oleh SKMR sebagai aplikasi bantu diantaranya E-Semar, Si-moli, Dashboard limit risiko dan dalam pengembangan aplikasi Simpro, SKK belum mengembangkan aplikasi khusus sebagai aplikasi bantu, unit kerja yang berkaitan dengan risiko likuiditas belum memiliki aplikasi bantu untuk monitoring. Sistem informasi Manajemen Risiko likuiditas belum sepenuhnya dapat diakses dengan mudah oleh seluruh unit kerja, mencakup informasi maturity profil, kewajiban pembayaran jangka pendek, posisi rinci daftar alat likuid, capaian dana pihak ketiga, rencana ekspansi dan pembayaran tunai lainnya. Informasi yang dapat disajikan masih terbatas pada data kuantitatif dan belum terdapat data penunjang laporan secara cepat dan terkini per aktivitas fungsional dari setiap unit kerja. Saat ini sedang dikembangkan sistem informasi Monitoring Limit dan toleransi risiko untuk mendukung pelaporan risiko likuiditas oleh SKMR Sistem informasi yang telah dikembangkan bank belum sepenuhnya dapat mendukung meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen risiko, antara lain dalam SIM belum dapat disajikan limit risiko yang ditetapkan sehingga apabila terjadi pelampauan maka risk owner akan melakukan pelaporan kepada SKMR dan menyusun strategi yang akan dilakukan untuk perbaikan. Sistem informasi yang dimiliki saat ini belum menyajikan informasi secara lengkap terkait penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Saat ini masih dikembangkan ke arah tersebut untuk menyempurnakan sistem informasi yang sudah ada.
	Sistem Informasi apa saja yang telah dimiliki termasuk dukungan CBS dan aplikasi bantu lainnya	2	
	Apakah sistem informasi risiko likuiditas dapat dan mudah diakses serta laporan yang lengkap	3	
	Apakah sistem informasi yang dimiliki mampu mendukung pelaporan risiko likuiditas yang lengkap dan cepat	3	
	Apakah sistem informasi yang dimiliki mampu meningkatkan likuiditas terhadap kebijakan manajemen risiko likuiditas (terkait produk, layanan, limit, penilaian, contingency plan, dan fungsi pengawasan)	3	
	Apakah sistem informasi yang dimiliki menyajikan informasi realisasi penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan (Risk Control dan tindak lanjut perbaikannya)	3	



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 68 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

Hasil Penilaian Pilar 3 - Kecukupan Proses dan Sistem	2.90	Bank telah memiliki kecukupan proses dan sistem untuk mendukung manajemen risiko likuiditas melalui aplikasi bantu, dukungan data dari aplikasi inti bank, serta ketentuan dan regulasi yang ditetapkan, ketersediaan pegawai di fungsi treasury. Kebutuhan sistem informasi manajemen risiko likuiditas untuk bank secara utuh, terkini, lengkap, dan akurat belum dapat terpenuhi dengan baik. Sistem pelaporan kepada unit kerja atas proses manajemen risiko likuiditas belum dijalankan secara rutin dan konsisten.
PILAR 4 : Sistem Pengendalian yang Menyeluruh		
1 Apakah SKAI atau PEAI telah melakukan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko likuiditas, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindaklanjut atas temuan pemeriksaan?	2.80	SKAI telah melakukan pemeriksaan penerapan manajemen risiko kredit pada Beberapa Divisi di Kantor Pusat dan 8 Kantor Cabang mencakup evaluasi terhadap implementasi kebijakan, prosedur, proses dan mekanisme mitigasi risiko untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan internal. Hasil pemeriksaan menunjukkan beberapa temuan fundamental terkait kurang memadainya pengendalian internal, diantaranya tidak dilakukannya penilaian risiko secara berkala oleh unit kerja utama. SKAI melakukan monitoring terhadap tindaklanjut temuan penerapan kebijakan manajemen risiko likuiditas, namun tindaklanjut yang dilakukan oleh risk owner belum optimal. SKAI telah melaporkan kepada Direktur Utama. SKAI melakukan pengawasan terhadap setiap unit kerja dan individu yang terlibat dalam kebijakan manajemen risiko likuiditas terhadap wewenang dan tanggungjawab, pemahaman dan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang ditetapkan untuk manajemen risiko likuiditas SKAI memastikan integritas dan efektivitas proses manajemen risiko dengan melakukan pengawasan yang mencakup verifikasi pemisahan fungsi secara jelas untuk mencegah konflik kepentingan, kelengkapan struktur organisasi, fungsi pelaporan yang efektif, dokumentasi yang komprehensif dalam penerapan kebijakan manajemen risiko likuiditas. SKAI belum sepenuhnya melakukan verifikasi dan review terhadap sistem pengendalian internal manajemen risiko likuiditas, yang antara lain mencakup satuan kerja berfungsi secara memadai, exposure risiko terjaga sesuai limit, kualitas aset yang memburuk, konsentrasi dana, peningkatan biaya dana, arus kas yang memburuk, info publik terhadap bank, peningkatan penarikan simpanan, maturity profile.
Apakah selama periode penilaian SKAI telah melakukan pemeriksaan penerapan manajemen risiko likuiditas di berapa cabang atau unit kerja di bidang manajemen risiko likuiditas	2	
Apakah setiap temuan SKAI dalam penerapan manajemen risiko likuiditas telah dilakukan monitoring tindak lanjutnya dan telah dilaporkan kepada Direktur Utama	3	
Apakah SKAI dalam penerapan manajemen risiko likuiditas telah melakukan pengawasan atas penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk likuiditas kebijakan manajemen risiko likuiditas	3	
Apakah SKAI telah melakukan pengawasan pada pemisahan fungsi, struktur organisasi, fungsi pelaporan, dan dokumentasi penerapan manajemen risiko likuiditas	3	
Apakah SKAI telah melakukan verifikasi dan review terhadap sistem pengendalian intern manajemen risiko likuiditas	3	



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 69 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

2	Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko likuiditas telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	3.00	Unit kerja pengendalian telah terpisah secara jelas dari unit kerja operasional dan bisnis untuk memastikan independensi, mencegah konflik kepentingan dan meningkatkan efektivitas pengendalian internal. Unit kerja likuiditas belum sepenuhnya memahami dan menjalankan tugas serta tanggung jawabnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang telah ditetapkan. Pemahaman terhadap penerapan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta pemantauan dan mitigasi risiko yang efektif masih kurang memadai.
	Apakah unit kerja pengendalian telah terpisah dari unit kerja operasional perlikuiditasan	3	
	Apakah unit kerja likuiditas telah memahami dan menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tupoksi	3	
Hasil Penilaian Pilar 4 - Sistem Pengendalian yang Menyeluruh		2.90	Bank telah memiliki sistem pengendalian internal dan melakukan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan baik reguler maupun khusus oleh SKAI. Kecukupan organisasi dengan telah memisahkan satuan kerja kepatuhan, manajemen risiko, dan audit internal. Demikian juga fungsi treasury yang ada di kantor pusat dengan fungsi operasional atau transaksional. Satuan Kerja Pengendalian secara berkala melakukan pembahasan dalam forum rapat dengan memberikan rekomendasi kepada Direksi dengan agenda hasil pengawasan atas penerapan manajemen risiko likuiditas. Forum rapat ALCO dilakukan bersama antara Direksi dan Unit Kerja secara berkala. Meskipun demikian proses pengendalian yang dilakukan oleh fungsi Risk Control dan Risk Assurance belum secara optimal menurunkan tingkat risiko likuiditas dalam aspek kepatuhan ketentuan pengelolaan likuiditas. Temuan pelanggaran ketentuan pengelolaan likuiditas masih terjadi di beberapa unit kerja cabang.

REKAP PENILAIAN KPMR LIKUIDITAS

Hasil Penilaian Pilar 1 -Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris	2.68
Hasil Penilaian Pilar 2 - Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Limit	2.96
Hasil Penilaian Pilar 3 - Kecukupan Proses dan Sistem	2.90
Hasil Penilaian Pilar 4 - Sistem Pengendalian yang Menyeluruh	2.90
Hasil Penilaian KPMR	2.96
Cukup Memadai	

URAIAN KPMR LIKUIDITAS

Pengawasan atas pengelolaan likuiditas oleh Komisaris dan Direksi telah dilakukan melalui penerbitan Surat Keputusan Direksi dan Surat Edaran. Pengaturan mengenai manajemen likuiditas dievaluasi secara berkala. Direksi juga telah membentuk tim ALCO dan mengadakan pertemuan secara rutin. Bank telah menetapkan batas dan toleransi risiko likuiditas yang diperbarui secara berkala. Prosedur pengelolaan dana dan risiko likuiditas telah disosialisasikan kepada semua unit kerja oleh unit kerja treasury dan satuan kepatuhan. Fungsi pengawasan melalui pemeriksaan periodik atas risiko likuiditas di unit kerja cabang oleh satuan kegiatan independen. Namun, terdapat kekurangan dalam penerapan ALMA dan pemahaman yang belum sepenuhnya oleh unit kerja, serta ALCO belum secara konsisten mengadakan pertemuan sesuai jadwal yang ditetapkan. Oleh karena itu, penilaian KPMR risiko likuiditas adalah cukup memadai.
--



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 70 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

PROFIL NILAI LIKUIDITAS

Periode pelaporan				Periode Sebelumnya			
Risiko Inheren	Risiko KPMR	Tingkat Risiko	Kualitas Manrisk	Risiko Inheren	Risiko KPMR	Tingkat Risiko	Kualitas Manrisk
2.17	2.96	1.96	Risiko Rendah	2.17	2.96	1.96	Risiko Rendah
Rendah	Cukup Memadai	Rendah	Risiko Rendah	Rendah	Cukup Memadai	Rendah	Risiko Rendah

Komponen	Keterangan
Tingkat Risiko	Hasil penilaian periode Semester I 2025 tingkat risiko likuiditas inheren pada peringkat risiko Rendah sedangkan nilai kualitas penerapan manajemen risiko memiliki peringkat Cukup Memadai, sama dengan hasil penilaian pada periode sebelumnya. Salah satu faktor yang mempengaruhi risiko likuiditas antara lain adalah kinerja pertumbuhan dana pihak ketiga. Masih terdapat kekurangan dan kelemahan proses penerapan manajemen risiko likuiditas yaitu antara lain SKMR belum sepenuhnya melakukan identifikasi dan evaluasi risk events, produk dan jasa bank, metode dan teknik mitigasi risiko likuiditas, analisis trend kebutuhan likuiditas serta sumber pendanaan apabila dalam kondisi memburuk dengan menyusun stresstest, telah membuat alat ukur dalam menghitung maturity profil dan proyeksi arus kas namun belum dilakukan analisa dan strategi yang ditetapkan. Bank juga belum memiliki sistem informasi manajemen yang utuh dan cepat yang dapat digunakan oleh Direksi dalam pengambilan keputusan pengelolaan risiko likuiditas. Pada periode penilaian, Satuan Kerja Manajemen Risiko telah mengembangkan aplikasi yang memungkinkan untuk mengetahui besaran lost event yang terjadi dan berdampak pada permodalan.
Risiko Inheren	Berdasarkan hasil penilaian risiko likuiditas inheren di seluruh pilar yang ditetapkan hasil nilai dan peringkat risiko likuiditas inheren pada tingkat 2 atau risiko rendah. Penilaian ini sama dengan hasil penilaian periode sebelumnya. Struktur dana dalam kondisi yang baik. Pengelolaan dana simpanan masih perlu mendapatkan perhatian mengingat selama ini kinerja pemasaran di bidang dana tidak atau belum dilakukan secara optimal dan konsisten sehingga sangat rentan nasabah memindahkan dananya ke lembaga keuangan lain, apalagi komposisi tabungan dan deposito adalah sebesar 78 : 22 yang sangat memungkinkan nasabah untuk dapat memindahkan dananya sewaktu-waktu walau kewajiban bunga simpanan menjadi lebih rendah. Hasil penilaian risiko likuiditas inheren di seluruh pilar, baik parameter yang telah ditetapkan otoritas maupun parameter tambahan yang ditetapkan Bank, menunjukkan hasil nilai dan peringkat risiko likuiditas inheren pada tingkat 2.17 atau risiko rendah.
Tingkat Kualitas MR	Pengawasan atas pengelolaan likuiditas oleh Komisaris dan Direksi telah dilakukan melalui penerbitan Surat Keputusan Direksi dan Surat Edaran. Pengaturan mengenai manajemen likuiditas dievaluasi secara berkala. Direksi juga telah membentuk tim ALCO dan mengadakan pertemuan secara rutin. Bank telah menetapkan batas dan toleransi risiko likuiditas yang diperbarui secara berkala. Prosedur pengelolaan dana dan risiko likuiditas telah disosialisasikan kepada semua unit kerja oleh unit kerja treasury dan satuan kepatuhan. Fungsi pengawasan melalui pemeriksaan periodik atas risiko likuiditas di unit kerja cabang oleh satuan kegiatan independen. Namun, terdapat kekurangan dalam penerapan ALMA dan pemahaman yang belum sepenuhnya oleh unit kerja, serta ALCO belum secara konsisten mengadakan pertemuan sesuai jadwal yang ditetapkan. Oleh karena itu, penilaian KPMR risiko likuiditas adalah cukup memadai.



PT BPR BKK JATENG
(Perseroda)

RISIKO REPUTASI



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 71 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

(RISIKO REPUTASI)

INHEREN REPUTASI

No	Parameter	Nilai	Keterangan
PILAR 1 : Pengaruh Reputasi Pihak Yang Berasosiasi Dengan BPR			
1	Kredibilitas BPR dan Pihak Yang Berasosiasi Dengan BPR	1.80	Pada Periode penilaian tidak terdapat pemberitaan negatif yang terkait langsung dengan BKK Jateng. Hanya terdapat beberapa pemberitaan pencabutan ijin OJK kepada beberapa BPR yang terdapat di wilayah Jawa Tengah pada awal periode Semester I 2025. Pemberitaan tersebut tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap kredibilitas BPR BKK Jateng. Dampak pemberitaan negatif kepada bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah tidak terlalu signifikan. Reputasi industri BPR secara umum masih berjalan dengan baik. Kerjasama dengan notaris masih terdapat proses yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Tidak terdapat pemberitaan negatif dari mitra bisnis. Perjanjian kerjasama dengan notaris jangka waktu 1 tahun dan dapat berhenti setiap saat. Terdapat notaris yg sudah berhenti namun masih memiliki tugas/order. Sudah terdapat media melalui web bkk, WA broadcast, call centre. Namun belum terdapat upaya aktif dari divisi terkait untuk mendapatkan informasi tentang reputasi kepada para nasabah maupun masyarakat luas. WA blast masih terbatas dari nasabah internal BKK dan belum ada evaluasi layanan diberikan kepada nasabah luas. Belum terdapat penunjukan dan pengelolaan PIC yang bertanggung jawab dalam pengelolaan nomor wa blast. Sekper mengelola web, media sosial, pengelolaan oleh bagian Pubdok Sekper. Skala masih menggunakan ketentuan 2023 dan belum dilakukan pengkinian. Penunjukan dan fungsi PIC menjadi skala penilaian Exposure Risiko Reputasi
	Kredibilitas BPR dan Pihak Yang Berasosiasi Dengan BPR	2	
	Pemberitaan Negatif Terhadap Perusahaan Terkait	2	
	Kerjasama Dengan Mitra Bisnis	2	
	Penyediaan Media untuk Menjaring Kejadian Terkait Risiko Reputasi	1	
	Penunjukan PIC untuk Pemantauan Terhadap Informasi yang Meningkatkan Exposure Risiko Reputasi	2	
2	Signifikansi Dan Materualitas Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Kejadian Reputasi	1.80	Dampak yang diakibatkan dari kejadian reputasi pada periode penilaian terjadi kejadian pemalsuan dokumen dan pembobolan rekening nasabah, namun respon tindakan cepat dalam upaya penangkapan pelaku dilakukan secara cepat sehingga tidak sampai meluas dan berdampak pada reputasi bank Beberapa kejadian Reputasi yang terjadi merupakan kejadian pembobolan rekening dan pemalsuan dokumen nasabah yang terjadi pada 1 nasabah, namun dilakukan penanganan dan penggantian rugi secara cepat Kejadian yang terjadi tidak sampai berdampak pada pemberitaan negatif atau penyebaran reputasi negatif Terjadi 1 kejadian yang berpotensi berdampak pada reputasi yakni kejadian pembobolan rekening dan pemalsuan dokumen nasabah Terjadi 1 kejadian yang berpotensi berdampak pada reputasi yakni kejadian pembobolan rekening dan pemalsuan dokumen nasabah
	Signifikansi Dan Materualitas Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Kejadian Reputasi	2	
	Jenis Dan Variasi Pemberitaan	3	
	Jangkauan Dan Kredibilitas Media Massa	2	



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 72 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

	Jumlah Kejadian Terkait dengan Risiko Reputasi pada Periode Penilaian	1	
	Jumlah Pemberitaan Negatif (Regional Jawa Tengah) pada Media Massa Cetak dan Elektronik	1	
	Hasil Penilaian Pilar 1 - Pengaruh Reputasi Pihak Yang Berasosiasi Dengan BPR	1.80	Pengaruh Reputasi terkait dengan pemberitaan negatif pada BPR BKK Jateng maupun pada pihak yang berasosiasi dengan BPR, secara keseluruhan pemberitaan mengenai pencabutan ijin OJK di beberapa BPR di Jawa Tengah, baik BPR milik Pemerintah daerah maupun swasta, dampak pemberitaan tersebut tidak berpengaruh signifikan dengan dampak reputasi BPR BKK Jateng, klarifikasi hanya dilakukan oleh pemegang saham terhadap BPR dengan kepemilikan BUMD. Berdasarkan pada penilaian tersebut maka nilai risiko intern pada pilar 1 sebesar 1,80 (risiko Rendah)
PILAR 2 : Frekuensi Dan Signifikansi Pengaduan Nasabah			
1	Administrasi Dan Tindak Lanjut Pengaduan Nasabah	1.60	Pengaduan nasabah diadministrasikan dengan cukup baik dan tertib, terdapat 4 pengaduan nasabah pada periode sebelum dan keduanya sudah selesai dan status aduan ditutup. Metode pengaduan masih menggunakan aplikasi APPK dari OJK dan tidak terdapat metode pengaduan diluar jalur yang melanggar ketentuan. Jikapun ada pengaduan tersebut di sampaikan melalui sosial media yang dimiliki oleh Bank. kurang dari 3 (Tiga) bulan Dilakukan Analisa Informasi pada Media atau Jejaring Sosial. Informasi dari Lembaga Perlindungan Konsumen dan Konsumen tidak sampai 10 informasi. Prosedur Pengaduan Sederhana dan Respon Paling Lama 15 (Limabelas) hari Kerja Setelah Tanggal Pengaduan.
	Administrasi Dan Tindak Lanjut Pengaduan Nasabah	1	
	Metode Pengaduan Nasabah	2	
	Hasil Analisa Informasi pada Media atau Jejaring Sosial	2	
	Informasi dari Lembaga Perlindungan Konsumen dan Konsumen	1	
	Prosedur Layanan Pengaduan Konsumen Tertulis	2	
2	Signifikansi Dan Materialitas Pengaduan nasabah	1.67	Pengaduan nasabah baik melalui APPK tidak berdampak pada kinerja keuangan secara material dan tingkat signifikansi dari pengaduan tergolong rendah mengingat pengaduan nasabah melalui APPK merupakan pengaduan dari nasabah yang sudah memiliki keputusan hukum berkekuatan tetap. Frekuensi pengaduan nasabah minimal yaitu hanya 4 aduan dan tidak material. Jenis pengaduan nasabah hanya 4 jenis, dan masing - masing jenis pengaduan tidak material yaitu masalah ketidak sesuaian perhitungan angsuran dan permasalahan sistem layanan informasi keuangan Semua aduan sebanyak 4 aduan sudah dapat terselesaikan dengan baik dan saat ini status pengaduan sudah ditutup.
	Signifikansi Dan Materialitas Pengaduan nasabah	2	
	Jenis Aduan Nasabah	2	
	Jumlah Pengaduan Nasabah yang Dapat Diselesaikan	1	
	Hasil Penilaian Pilar 2 - Frekuensi Dan Signifikansi Pengaduan Nasabah	1.63	Pengaduan nasabah diadministrasikan dengan baik, dengan 4 pengaduan pada periode sebelum yang telah selesai. Pengaduan dilakukan melalui aplikasi APPK dari OJK dan media sosial bank. Analisa informasi dari media sosial dilakukan setiap kurang dari 3 bulan. Prosedur pengaduan sederhana dengan respon maksimal 15 hari kerja. Pengaduan tidak berdampak material pada kinerja keuangan, dengan tingkat signifikansi rendah. Terdapat 4 aduan terkait perhitungan angsuran dan sistem layanan informasi keuangan, yang telah selesai, namun ada aduan aktif menunggu tanggapan konsumen. Berdasarkan pada penilaian tersebut maka nilai risiko intern pada pilar 2 sebesar 1.63 (risiko Rendah).
PILAR 3 : Transparansi Informasi Keuangan			



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 73 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

1	Transparansi Informasi Keuangan	2.00	Informasi keuangan Bank yang disampaikan kepada pihak yang berkepentingan sudah lengkap, akurat dan terkini. Publikasi laporan posisi keuangan sudah ditampilkan pada website PT BPR BKK Jateng namun masih belum lengkap. Informasi dan Publikasi sudah terpublish secara transparan melalui website bank. Namun terkait Laporan Pengaduan nasabah sesuai POJK 18 Tahun 2018 tentang "Layanan Pengaduan Nasabah" telah tercantum dalam website bank pada menu Informasi Pengaduan Informasi dan Publikasi sudah terpublish secara transparan melalui website bank. Namun terkait Laporan Pengaduan nasabah sesuai POJK 18 Tahun 2018 tentang "Layanan Pengaduan Nasabah" telah tercantum dalam website bank pada menu Informasi Pengaduan Bank melakukan pemberitahuan melalui papan pengumuman atau media internal terkait dengan adanya pengadaan pegawai. Pengadaan pegawai dilaksanakan secara transparan dan bekerjasama dengan pihak ketiga yang independen. Dalam hal terdapat pemutusan hubungan kerja, Bank menjalankan prosedur dan memberikan hak kepada pegawai sesuai ketentuan yang berlaku disesuaikan dengan kemampuan perusahaan
	Transparansi Informasi Keuangan	2	
	Transparansi Data Dokumen Dan Informasi Terhadap Laporan Keuangan Dan Non Keuangan	2	
	Transparansi Rekrutmen Pegawai	2	
	Pemutusan Hubungan Kerja	2	
2	Transparansi Produk Dan Layanan BPR	2.33	Bank memiliki produk kredit dan simpanan dengan skema sederhana, dan telah dilakukan pemberian informasi secara transparan kepada nasabah atau mitra bisnis dan melalui website bank. Tidak terdapat pemberitaan dari BKK yg menyudutkan pihak atau kompetitor. Tidak terdapat komplain dari pihak atau industri sejenis atau pihak manapun Penguasaan product knowledge dari pegawai juga masih harus ditingkatkan meskipun sosialisasi dan pendampingan telah dilakukan. Pegawai belum sepenuhnya menyampaikan risiko-risiko yang melekat pada produk kepada nasabah. Hal ini mendasarkan terdapatnya pengaduan nasabah akibat tindakan yang dilakukan Bank dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah meskipun tindakan tersebut telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan bank.
	Transparansi Produk Dan Layanan BPR	2	
	Kegiatan Pemasaran	2	
	Transparansi Fasilitas Produk Dan Layanan	3	
Hasil Penilaian Pilar 3 - Transparansi Informasi Keuangan		2.17	Informasi keuangan PT BPR BKK Jateng yang disampaikan kepada pihak berkepentingan lengkap, akurat, dan terkini. Laporan posisi keuangan dipublikasikan di website, namun belum lengkap. Informasi dan publikasi dilakukan secara transparan, tetapi laporan pengaduan nasabah belum tercantum di website sesuai POJK 18 Tahun 2018. Pengadaan pegawai diumumkan secara transparan melalui media internal dan dilakukan dengan pihak ketiga independen. Terdapat pengaduan dari pegawai Salatiga menggunakan pengacara yang telah ditindaklanjuti oleh sekretaris perusahaan. Produk kredit dan simpanan bank disampaikan secara transparan kepada nasabah dan mitra bisnis. Tidak ada pemberitaan negatif atau komplain dari pihak sejenis. Penguasaan pengetahuan produk oleh pegawai perlu ditingkatkan, dan risiko produk belum sepenuhnya disampaikan kepada nasabah, meskipun tindakan bank dalam menyelesaikan kredit bermasalah sudah sesuai prosedur. Mendasarkan pada penilaian tersebut maka nilai risiko inhern pada pilar 3 sebesar 2.17 (risiko Rendah).
PILAR 4 : LAINNYA			



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 74 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

1	Lainnya	1.67	Risiko reputasi yang diidentifikasi terkait dengan kegiatan atau kebijakan yang tidak memenuhi standar atau dapat mempengaruhi citra perusahaan secara minimal. Meskipun demikian, SKAI tetap memperhatikan temuan ini dengan serius untuk mengurangi dampaknya terhadap reputasi perusahaan, dengan memastikan bahwa tindakan korektif yang sesuai diambil untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan manajemen risiko reputasi secara keseluruhan. Terdapat < 10 (Sepuluh) Kejadian Exposure Risiko Reputasi pada Hasil Monitoring Satuan Kerja Kepatuhan. lebih dari 10 (Delapan) Pemberitaan positif pada periode penilaian.
	Laporan Pemeriksaan SKAI	2	
	Laporan Hasil Monitoring Satuan Kerja Kepatuhan	2	
	Pemberitaan Positif Tentang Kinerja dan Kegiatan Bank	1	
	Lainnya	1.67	Terdapat temuan dengan eksposur risiko reputasi yang disebabkan dampak dari adanya peningkatan tindak fraud yang terjadi di cabang. Terdapat < 10 (Sepuluh) Kejadian Exposure Risiko Reputasi pada Hasil Monitoring Satuan Kerja Kepatuhan. Lebih dari 10 (Delapan) Pemberitaan positif pada periode penilaian.

REKAP PENILAIAN INHEREN REPUTASI

Hasil Penilaian Pilar 1 - Pengaruh Reputasi Pihak Yang Berasosiasi Dengan BPR	1.80
Hasil Penilaian Pilar 2 - Frekuensi Dan Signifikansi Pengaduan Nasabah	1.63
Hasil Penilaian Pilar 3- Pelanggaran Etika Bisnis	2.17
Hasil Penilaian Lainnya	1.67
Hasil Penilaian Inheren	2.17
	Rendah

URAIAN INHEREN REPUTASI

PT BPR BKK Jateng menghadapi beberapa tantangan reputasi, terutama dari pemberitaan negatif terkait beberapa BPR di Jawa Tengah yang dicabut ijin oleh OJK, meskipun dampaknya minimal. Klarifikasi media masih terbatas pada pemegang saham. Pengaduan nasabah diadministrasikan dengan baik, menggunakan aplikasi APPK dari OJK dan media sosial, dengan prosedur sederhana dan respon cepat. Informasi keuangan yang disampaikan lengkap dan akurat, meskipun laporan pengaduan nasabah belum tercantum di website. Pengadaan pegawai dilakukan transparan. Produk kredit dan simpanan disampaikan secara transparan, namun pengetahuan produk oleh pegawai perlu ditingkatkan. SKAI menangani risiko reputasi dengan serius, mengidentifikasi kurang dari 10 kejadian eksposur risiko reputasi dan lebih dari 10 pemberitaan positif selama periode penilaian, menunjukkan citra perusahaan secara keseluruhan masih baik. Berdasarkan pada penilaian tersebut maka nilai risiko inheren pada Risiko reputasi sebesar 2.17 (Risiko Rendah).



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 75 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

KPMR REPUTASI

No	Parameter KPMR	Peringkat Risiko	Keterangan
PILAR 1 : Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris			
1	Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko reputasi yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	2.00	Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko Reputasi dan ketentuan ketentuan lain yakni terhadap BPP Manajemen Risiko yang merupakan komitmen dari hasil pemeriksaan OJK tahun 2023. Serta limit dan toleransi risiko reputasi. Dewan komisaris juga melakukan evaluasi terhadap SK Direksi tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang baru dimana adanya pembentukan corporate secretary, Pedoman Perlindungan Konsumen, Pedoman kegiatan tanggung jawab sosial atau CSR, serta ketersediaan media atau situs resmi bank maupun media sosial untuk menyampaikan pemberitaan positif kegiatan Bank Dewan Komisaris Mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen risiko reputasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dewan Komisaris telah memastikan Direksi dan jajarannya dalam penerapan manajemen risiko Reputasi sesuai kebijakan manajemen risiko yang ditetapkan Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi telah mempertimbangkan masukan dari Komite Pemantau Risiko
	Apakah ketentuan dan kebijakan manajemen risiko reputasi yang disetujui Dewan Komisaris apa saja yang telah ditetapkan (PKPB, SK Direksi, SOP reputasi, SE Direksi, SK BWMK, SK Limit dan Toleransi Risiko)	2	
	Apakah evaluasi ketentuan dan kebijakan manajemen risiko reputasi yang disetujui Dewan Komisaris telah dilakukan (Ketentuan reputasi yang diterbitkan selama periode penilaian) dan kapan dilakukan secara periodik serta dilakukan kepada siapa saja	2	
	Apakah Dewan Komisaris mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen risiko reputasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya	2	
	Apakah Dewan Komisaris telah memastikan Direksi dan jajarannya dalam penerapan manajemen risiko reputasi sesuai kebijakan manajemen risiko yang ditetapkan	2	
	Apakah Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi telah mempertimbangkan masukan dari Komite Pemantau Risiko	2	



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 76 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

2	Apakah Dewan komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko reputasi secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud ?	2.60	Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko reputasi dengan membahas risiko reputasi pada forum rapat Pengurus, rapat dengan Pejabat Eksekutif, rapat Komite Manajemen Risiko, rapat Komite Pemantau Risiko, forum exit meeting hasil pemeriksaan SKAI dan memantau tindak lanjut evaluasi penerapan manajemen risiko reputasi Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi antara lain peningkatan mutu layanan dengan meningkatkan kompetensi SDM, peningkatan integritas dan performance SDM, harus tegas dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi, sosialisasi ulang untuk meningkatkan pemahaman, dan memastikan tindak lanjut hasil temuan pelanggaran yang terkait risiko reputasi. Dewan Komisaris telah melakukan monitoring tindak lanjut evaluasi pertanggungjawaban Direksi penerapan manajemen risiko Reputasi Dewan Komisaris secara konsisten telah mengembangkan budaya manajemen risiko reputasi dengan memastikan seluruh ketentuan reputasi telah dipenuhi, mengawal implementasinya dengan melakukan kunjungan ke cabang, memantau tindak lanjut hasil kunjungan SKMR dan SKAI. Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris
	Apakah Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban Direksi dalam penerapan manajemen risiko reputasi secara tertulis dan dalam forum rapat (terdapat notulen)	2	
	Apakah Dewan Komisaris memberikan masukan dan pengarahan penerapan manajemen risiko reputasi kepada Direksi secara tertulis dan forum rapat	2	
	Dewan Komisaris melakukan monitoring tindak lanjut evaluasi pertanggungjawaban Direksi penerapan manajemen risiko reputasi	3	
	Apakah Dewan Komisaris secara konsisten mengembangkan budaya sadar risiko reputasi	3	
	Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris	3	
3	Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko reputasi, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	3.00	Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen risiko Reputasi Namun demikian belum optimalnya pelaksanaan atas kebijakan Manajemen Risiko reputasi, karena kompetensi tentang penguasaan produk dan risiko yang melekat, kesadaran akan budaya kerja, budaya patuh, budaya risiko masih belum memadai, sehingga masih perlu terus dilakukan peningkatan terhadap kualitas SDM guna mengurangi potensi risiko reputasi Direksi telah menyusun Buku Pedoman Perusahaan Manajemen Risiko Reputasi dan pedoman kebijakan lainnya seperti Peraturan Kepegawaian, Disiplin dan Sanksi Pegawai, Kebijakan Anti Fraud, Ketentuan Standar Etika Pegawai, Ketentuan Budaya Kerja Perusahaan, Ketentuan Standar Penampilan Pegawai, ketentuan Standar Pelayanan, ketentuan Benturan Kepentingan, ketentuan Perlindungan Konsumen. Direksi telah melakukan evaluasi ketentuan dan kebijakan manajemen risiko Reputasi yang disetujui Direksi dilakukan secara berkala setiap tahunnya.



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 77 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

	Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen risiko reputasi (Pelatihan tentang manajemen risiko reputasi yang diikuti, pengalaman di bidang yang berkaitan dengan manajemen risiko reputasi)	3	
	Ketentuan dan kebijakan manajemen risiko Reputasi yang disetujui Direksi apa saja yang telah ditetapkan (PKPB, SK Direksi, SOP PerReputasian, SE Direksi, SK BWMK)	3	
	Kapan evaluasi ketentuan dan kebijakan manajemen risiko reputasi yang disetujui Direksi dilakukan (Ketentuan reputasi yang diterbitkan selama periode penilaian)	3	
4	Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi Risiko reputasi, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko reputasi terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	2.60	Direksi secara berkala telah mengambil tindakan untuk memitigasi risiko dan mengkomunikasikan kebijakan tersebut kepada seluruh jenjang organisasi serta hasil evaluasinya melalui forum rapat, tindakan yang diambil antara lain melakukan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan integritas SDM, mengkampanyekan slogan slogan kepatuhan, melakukan sosialisasi terus menerus, melakukan kegiatan MMA ke Kantor Cabang (Monitoring, Mentoring, Advising), melengkapi kebijakan dan prosedur dalam rangka pengawasan dan pengendalian internal, melakukan diskusi terkait dengan budaya kerja perusahaan. Direksi secara berkala menyampaikan tindakan dan kebijakan dalam rangka pengendalian dan mitigasi risiko kepada seluruh unit kerja namun kebijakan Manajemen Risiko reputasi masih belum mampu dipahami oleh seluruh jenjang organisasi. Unit kerja belum sepenuhnya dapat melakukan tahapan proses manajemen risiko khususnya proses identifikasi risiko. Direksi secara konsisten telah mengembangkan budaya sadar risiko Reputasi kepada seluruh unit kerja. Direksi secara berkala melakukan review atas kebijakan pendelegasian kewenangan yang diberikan Direksi telah melakukan evaluasi terhadap usulan transaksi yang diterima sebelum memberikan persetujuan.
	Apakah Direksi secara konsisten mengambil tindakan yang perlu dilakukan dalam mitigasi risiko reputasi	3	
	Apakah Direksi secara berkala menyampaikan tindakan dan kebijakan dalam rangka pengendalian dan mitigasi risiko kepada seluruh_reph unit kerja	3	
	Apakah Direksi secara konsisten telah mengembangkan budaya sadar risiko reputasi kepada seluruh_reph unit kerja	3	
	Apakah Direksi secara berkala melakukan review atas kebijakan pendelegasian kewenangan yang diberikan	2	
	Apakah Direksi telah melakukan evaluasi terhadap usulan transaksi yang diterima sebelum memberikan persetujuan.	2	



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 78 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

5	Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi reputasi dan fungsi Manajemen Risiko reputasi?	2.50	Bank telah memiliki dan membentuk unit kerja yang menangani fungsi reputasi yaitu Divisi SDM dan Umum, Satuan Kerja Kepatuhan, Divisi Corporate secretary, dan fungsi Manajemen Risiko reputasi oleh SKMR. Bank telah memiliki dan membentuk unit kerja yang menangani fungsi reputasi yaitu Divisi SDM dan Umum, Satuan Kerja Kepatuhan, Divisi Corporate secretary, dan fungsi Manajemen Risiko reputasi oleh SKMR. Kecukupan organisasi di satuan manajemen risiko perReputasian belum didukung dengan kompetensi yang baik karena belum adanya pelatihan yang didapatkan khususnya pada risiko reputasi. Proses perReputasian dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan oleh masing-masing unit kerja secara independen
	Fungsi Second Line (SKMR dan SKK) apakah telah terpisah dari Unit Kerja perreputasi dan melaksanakan tugasnya secara independen	2	
	Apakah kecukupan organisasi di unit kerja reputasi telah didukung dengan kompetensi yang baik	3	
	Apakah kecukupan organisasi di satuan manajemen risiko reputasi telah didukung dengan kompetensi yang baik	3	
	Apakah proses perreputasi dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan oleh masing-masing unit kerja secara independen	2	
6	Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko reputasi?	2.67	Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Reputasi antara lain melalui peningkatan kompetensi, integritas dan performance, pemenuhan standar kinerja SDM, penilaian kinerja, mutasi dan rotasi, pemberian sanksi secara tegas, penunjukan pegawai pada fungsi yang tepat sesuai kompetensi dan kualifikasinya. kebijakan dan ketentuan pedoman pengelolaan SDM belum sepenuhnya direalisasikan secara berkala. Direksi melakukan evaluasi ketercukupan jumlah SDM bidang perReputasian secara berkala
	Apakah ketentuan SOTK telah sesuai dengan penerapan manajemen risiko reputasi, tidak terdapat perangkapan jabatan, independen	2	
	Apakah pedoman pengelolaan SDM dilakukan review secara berkala	3	
	Apakah Direksi melakukan evaluasi ketercukupan jumlah SDM bidang reputasi	3	
Hasil Penilaian Pilar 1 -Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris		2.56	Dewan Komisaris dan Direksi PT BPR BKK Jateng telah mengambil langkah signifikan untuk mengelola risiko reputasi melalui kebijakan yang komprehensif dan evaluasi berkala. Pelaksanaan kebijakan ini perlu ditingkatkan terutama dalam hal kompetensi dan kesadaran SDM mengenai risiko reputasi.Manajemen memiliki komitmen yang tinggi dalam melakukan upaya untuk meningkatkan citra dan reputasi perusahaan menjadi lebih baik.

PILAR 2 : Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Limit



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 79 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

1	Apakah BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko reputasi yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	2.60	Bank telah menyusun dan memiliki kebijakan Manajemen Risiko reputasi dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan pegawai antara lain Peraturan Kepegawaian, Disiplin dan Sanksi Pegawai, Kebijakan Anti Fraud, Ketentuan APU PPT, Ketentuan Benturan Kepentingan, Ketentuan Perlindungan Konsumen, Ketentuan Standar Penampilan Pegawai, Ketentuan Standar Pelayanan Nasabah. Dalam penyusunan rencana kerja telah berdasarkan pada pengalaman dan capaian sebelumnya dengan tetap memperhatikan pengelolaan dan mitigasi risiko Reputasi kebijakan manajemen risiko Reputasi dilakukan kaji ulang oleh pihak yang independen yaitu KAP dan OJK dan dilaporkan ke Dewan Komisaris dan Direksi Bank telah melakukan pembahasan pada forum rapat komite pemantau risiko dan komite manajemen risiko tentang risiko reputasi yang tertuang dalam penilaian profil risiko dan penetapan limit risiko maupun pembahasan exit meeting hasil pemeriksaan dari SKAI di setiap cabang. Meskipun demikian unit kerja belum melakukan monitoring atas limit dan toleransi risiko reputasi yang ditetapkan Bank telah melakukan pembahasan pada forum rapat komite pemantau risiko dan komite manajemen risiko tentang risiko reputasi yang tertuang dalam penilaian profil risiko dan penetapan limit risiko maupun pembahasan exit meeting hasil pemeriksaan dari SKAI di setiap cabang. Meskipun demikian unit kerja belum melakukan monitoring atas limit dan toleransi risiko reputasi yang ditetapkan
	Apakah dalam penyusunan rencana kerja telah merujuk pada penerapan manajemen risiko reputasi	3	
	Apakah dalam menyusun rencana kerja telah berdasarkan pada pengalaman dan capaian sebelumnya dengan tetap memperhatikan pengelolaan dan mitigasi risiko reputasi	3	
	Apakah kebijakan manajemen risiko reputasi dilakukan kaji ulang oleh pihak yang independen dan dilaporkan ke Dewan Komisaris dan Direksi	2	
	Apakah kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko reputasi memadai dan telah tersedia untuk seluruh area Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai	3	
	Apakah perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko ditetapkan telah sesuai dengan sasaran strategi dan strategi bisnis	2	



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 80 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

2	"Apakah BPR: 1. memiliki prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit Risiko reputasi yang ditetapkan oleh Direksi ? 2. melaksanakan prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit Risiko reputasi secara konsisten untuk seluruh aktivitas ? Dan 3. melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit Risiko reputasi secara berkala?"	2.50	Bank telah memiliki prosedur Manajemen Risiko Reputasi dalam BPP Manajemen Risiko dan telah mengatur mekanisme dan tata cara penetapan limit dan toleransi risiko seperti metode penilaiannya dan mekanisme apabila terjadi pelampauan limit dan toleransi risiko. Bank telah melakukan identifikasi dan monitoring risiko reputasi secara berkala dan melakukan pembahasan bersama melalui forum rapat Komite. Bank telah melakukan evaluasi dan mengkinikan ketentuan limit dan toleransi risiko reputasi. Ketentuan limit dan toleransi risiko telah dibahas dalam forum rapat komite dan disosialisasikan kepada seluruh unit kerja. Meskipun demikian Bank dalam pelaksanaannya belum optimal dan belum melakukan identifikasi risiko reputasi termasuk menetapkan limit risiko reputasi untuk seluruh aktivitas fungsional. SDM belum terlalu memahami ketentuan limit dan toleransi risiko yang ditetapkan dan menjadi acuan dalam pengendalian manajemen risiko Reputasi Kebijakan penetapan limit dan toleransi risiko dilakukan pengkinian setahun sekali sesuai dengan kondisi usaha dan perkembangan faktor eksternal yang berpengaruh pada ketentuan limit yang telah ditetapkan Perumusan untuk penentuan limit dan toleransi risiko dilakukan sesuai dengan arah dan strategi perReputasian Penetapan limit telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan didokumentasikan sehingga memudahkan untuk dilakukan audit trail Penetapan limit dan toleransi risiko meliputi penetapan limit secara keseluruhan, per jenis risiko, dan per aktivitas fungsional yang memiliki exposure risiko
	Apakah Unit Kerja telah memahami penetapan limit dan toleransi risiko reputasi yang ditetapkan dalam SK Direksi	3	
	Apakah Unit Kerja melakukan pengawasan monitoring limit dan toleransi risiko reputasi	3	
	Apakah Unit Kerja melakukan evaluasi apabila terjadi pelampauan limit dan toleransi risiko yang ditetapkan	3	
	Apakah SDM telah memahami ketentuan limit dan toleransi risiko yang ditetapkan dan menjadi acuan dalam pengendalian manajemen risiko reputasi	3	
	Apakah kebijakan penetapan limit dan toleransi risiko dilakukan pengkinian sesuai dengan kondisi usaha dan perkembangan faktor eksternal yang berpengaruh pada ketentuan limit yang telah ditetapkan	2	
	Apakah perumusan untuk penentuan limit dan toleransi risiko dilakukan sesuai dengan arah dan strategi reputasi	2	
	Apakah penetapan limit telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan didokumentasikan sehingga memudahkan untuk dilakukan audit trail	2	
	Apakah penetapan limit dan toleransi risiko meliputi penetapan limit secara keseluruhan, per jenis risiko, dan per aktivitas fungsional yang memiliki exposure risiko	2	



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 81 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

3	Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko reputasi sesuai dengan ketentuan?	2.67	Bank telah memiliki kebijakan penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang diatur dalam BPP Manajemen Risiko namun ketentuan penerbitan produk/aktivitas baru tersebut belum ditetapkan dalam ketentuan dan pedoman tersendiri sehingga pemahaman akan hal tersebut tidak sampai kepada unit kerja. Ketentuan kebijakan produk dan aktivitas belum sepenuhnya didukung dengan ketentuan dan petunjuk kerja yang lengkap Ketentuan kebijakan produk dilakukan evaluasi secara berkala
	Apakah unit kerja telah memahami ketentuan dan prosedur produk dan aktivitas baru dan risiko yang melekat pada setiap produk dan mitigasinya	3	
	Apakah ketentuan kebijakan produk dan aktivitas telah didukung dengan ketentuan dan petunjuk kerja yang lengkap	3	
	Apakah ketentuan kebijakan produk dilakukan evaluasi secara berkala	2	
Hasil Penilaian Pilar 2 - Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Limit		2.59	Bank telah mengimplementasikan kebijakan Manajemen Risiko Reputasi yang komprehensif, mencakup berbagai aspek penting seperti disiplin pegawai, kebijakan anti fraud, dan perlindungan konsumen. Kebijakan ini diawasi oleh KAP dan OJK, serta dibahas dalam forum internal. Namun, pelaksanaan monitoring dan pemahaman SDM terhadap limit dan toleransi risiko masih perlu ditingkatkan. Selain itu, kebijakan penerbitan produk baru belum sepenuhnya dipahami di seluruh unit kerja, meskipun evaluasi berkala sudah dilakukan. Secara keseluruhan, meski ada area yang perlu diperbaiki, langkah-langkah yang diambil menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pengelolaan risiko reputasi. Mendasarkan hal tersebut penilaian pada pilar ini ditetapkan pada tingkat 2,59 atau cukup memadai.
PILAR 3 : Kecukupan Proses dan Sistem			
1	Apakah BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko reputasi yang melekat pada kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko reputasi?	2.30	Dalam aktivitas perReputasian seluruh SDM telah berpedoman pada penerapan manajemen risiko Reputasi seperti standar pelayanan dan penampilan, perlindungan konsumen, dan lain lain. Seluruh organisasi mampu dan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas perReputasian Dalam proses menjaga Reputasi Bank dilakukan verifikasi dual control seperti pengaduan nasabah akan melalui Satuan Kerja Kepatuhan untuk melakukan monitoring dan didukung dengan dokumen yang memadai Dalam proses pengambilan keputusan bidang perReputasian dilakukan secara pembahasan bersama dan dilakukan secara transparan Dalam proses manajemen risiko Reputasi telah didukung dengan data Reputasi yang akurat dan informatif Dalam proses manajemen risiko Reputasi telah dilakukan analisa karakteristik risiko Reputasi yang melekat pada produk dan layanan Kesesuaian asumsi, data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko Reputasi telah dilakukan evaluasi melalui komite manajemen risiko Dalam melakukan pengukuran risiko Reputasi telah dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan yang material pada kegiatan layanan, produk, dan faktor risiko Dalam melakukan pemantauan risiko Reputasi telah dilakukan evaluasi terhadap eksposur risiko Reputasi Penyesuaian pelaporan akan dilakukan jika terdapat perubahan yang material dalam faktor risiko Reputasi
	Apakah dalam aktivitas reputasi seluruh SDM telah berpedoman pada penerapan manajemen risiko reputasi	2	



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 82 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

	Apakah seluruh organisasi mampu dan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas reputasi	2	
	Apakah dalam proses reputasi dilakukan verifikasi dual control dan didukung dengan dokumen yang memadai	2	
	Apakah dalam proses pengambilan keputusan bidang perreputasian dilakukan secara pembahasan bersama dan dilakukan secara transparan	3	
	Apakah dalam proses manajemen risiko reputasi telah didukung dengan data reputasi yang akurat dan informatif	2	
	Apakah dalam proses manajemen risiko reputasi telah melakukan analisa karakteristik risiko reputasi yang melekat pada produk dan layanan	2	
	Apakah kesesuaian asumsi, data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko reputasi telah dilakukan evaluasi	2	
	Apakah dalam melakukan pengukuran risiko reputasi telah dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan yang material pada kegiatan layanan, produk, dan faktor risiko	3	
	Apakah dalam melakukan pemantauan risiko reputasi telah dilakukan evaluasi terhadap eksposur risiko reputasi	3	
	Apabila terdapat perubahan yang material dalam faktor risiko reputasi apakah juga dilakukan penyesuaian pelaporan	2	
2	Apakah BPR telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko reputasi serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	2.80	Bank telah menetapkan Sistem pengendalian internal terhadap risiko reputasi antara lain dari aplikasi dari otoritas, ketersediaan media informasi di kantor cabang apabila nasabah mengajukan pengaduan baik lisan maupun tertulis. Bank telah memiliki ketentuan dan telah tersedia informasi di halaman web resmi bank dan media sosial. Bank belum memasang di papan pengumuman progress pengaduan nasabah termasuk di web resmi bank sesuai ketentuan Unit kerja telah menindaklanjuti setiap terjadinya pengaduan dan dilakukan monitoring tindak lanjutnya sesuai ketentuan untuk dilaporkan melalui aplikasi dari OJK. Bank telah menetapkan pejabat khusus untuk setiap terjadinya pengaduan dan langkah pelaporannya ke kantor pusat atau pejabat/unit kerja pengaduan nasabah yang ditetapkan. Bank juga telah menyampaikan ke Direksi hasil dan progress tindak lanjut pengaduan sebelum dikirimkan ke OJK. sistem informasi yang dimiliki belum secara optimal mampu meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen risiko Reputasi (terkait produk, layanan, limit, penilaian, contingency plan, dan fungsi pengawasan) sistem informasi yang dimiliki menyajikan informasi realisasi penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan (Risk Control dan tindak lanjut perbaikannya)
	Sistem Informasi apa saja yang telah dimiliki termasuk dukungan CBS dan aplikasi bantu lainnya	2	
	Apakah sistem informasi risiko reputasi dapat dan mudah diakses serta laporan yang lengkap	3	



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 83 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

	Apakah sistem informasi yang dimiliki mampu mendukung pelaporan risiko reputasi yang lengkap dan cepat	3	
	Apakah sistem informasi yang dimiliki mampu meningkatkan reputasi terhadap kebijakan manajemen risiko reputasi (terkait produk, layanan, limit, penilaian, contingency plan, dan fungsi pengawasan)	3	
	Apakah sistem informasi yang dimiliki menyajikan informasi realisasi penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan (Risk Control dan tindak lanjut perbaikannya)	3	
	Hasil Penilaian Pilar 3 - Kecukupan Proses dan Sistem	2.55	Bank telah memiliki kecukupan sistem dan pelaksanaan proses manajemen risiko reputasi dan Bank juga telah mengembangkan parameter pengukuran risiko reputasi selain yang ditetapkan dari otoritas. Pengukuran yang dikembangkan Bank telah menyesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas Bank. Namun pelaksanaan proses manajemen risiko belum dilakukan secara menyeluruh dan belum terdokumentasinya sejak tahapan identifikasi sampai dengan pengendalian risiko reputasi. Unit kerja telah menindaklanjuti setiap terjadinya pengaduan dan dilakukan monitoring tindak lanjutnya sesuai ketentuan untuk dilaporkan melalui aplikasi dari OJK. Bank telah menetapkan pejabat khusus untuk setiap terjadinya pengaduan dan langkah pelaporannya ke kantor pusat atau pejabat/unit kerja pengaduan nasabah yang ditetapkan. Bank juga telah menyampaikan ke Direksi hasil dan progress tindak lanjut pengaduan sebelum dikirimkan ke OJK. Namun demikian Bank belum memasang di papan pengumuman progress pengaduan nasabah termasuk di web resmi bank sesuai ketentuan. Tingkat risiko yang ditetapkan pada pilar Kecukupan Proses dan Sistem adalah pada tingkat 2,55 atau cukup memadai
PILAR 4 : Sistem Pengendalian yang Menyeluruh			
1	Apakah SKAI atau PEAI telah melakukan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko reputasi, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindaklanjut atas temuan pemeriksaan?	3.00	Selama periode penilaian, Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) telah melakukan pemeriksaan penerapan manajemen risiko reputasi di cabang atau unit kerja sesuai dengan rencana kerja tahunan SKAI. Hasil dari pemeriksaan ini akan memberikan wawasan mengenai kepatuhan dan efektivitas strategi yang diterapkan untuk menjaga reputasi perusahaan secara konsisten di seluruh operasional. Setiap temuan SKAI dalam penerapan manajemen risiko reputasi telah dipantau untuk memastikan bahwa semua tindak lanjut yang diperlukan telah diimplementasikan secara tepat waktu dan efektif. Semua hasil monitoring dan pelaksanaan tindak lanjut ini dilaporkan kepada Direktur Utama untuk memastikan keterlibatan dan kesadaran manajemen tertinggi terhadap isu-isu reputasi yang mungkin mempengaruhi citra dan operasi perusahaan secara keseluruhan. SKAI dalam penerapan manajemen risiko reputasi telah melaksanakan pengawasan yang teliti terhadap penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen risiko reputasi yang telah ditetapkan. Evaluasi ini mencakup pengawasan terhadap struktur organisasi yang mendukung pemisahan tugas yang jelas, serta pemantauan terhadap implementasi kebijakan dan prosedur yang relevan. SKAI telah melakukan pengawasan pada pemisahan fungsi, struktur organisasi, fungsi pelaporan, dan dokumentasi penerapan manajemen risiko reputasi. SKAI telah melaksanakan verifikasi dan review menyeluruh terhadap sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko reputasi, mencakup evaluasi terhadap kecukupan kebijakan dan prosedur pengendalian yang telah ditetapkan. SKAI juga meninjau efektivitas mekanisme pemantauan dan evaluasi risiko reputasi yang telah diimplementasikan.



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 84 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

	Apakah selama periode penilaian SKAI telah melakukan pemeriksaan penerapan manajemen risiko reputasi di berapa cabang atau unit kerja di bidang manajemen risiko reputasi	3	
	Apakah setiap temuan SKAI dalam penerapan manajemen risiko reputasi telah dilakukan monitoring tindak lanjutnya dan telah dilaporkan kepada Direktur Utama	3	
	Apakah SKAI dalam penerapan manajemen risiko reputasi telah melakukan pengawasan atas penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk reputasi kebijakan manajemen risiko reputasi	3	
	Apakah SKAI telah melakukan pengawasan pada pemisahan fungsi, struktur organisasi, fungsi pelaporan, dan dokumentasi penerapan manajemen risiko reputasi	3	
	Apakah SKAI telah melakukan verifikasi dan review terhadap sistem pengendalian intern manajemen risiko reputasi	3	
2	Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko reputasi telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	3.00	Unit kerja pengendalian telah sepenuhnya terpisah dari unit kerja operasional yang terlibat dalam manajemen risiko reputasi. Pemisahan ini dirancang untuk memastikan bahwa fungsi pengendalian intern dapat beroperasi secara independen dan objektif dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan efektivitas kontrol yang diterapkan untuk mengelola risiko reputasi perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dapat mengoptimalkan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang ditetapkan, serta meminimalkan potensi konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi citra dan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Unit kerja yang terlibat dalam manajemen risiko reputasi telah memahami dan menjalankan tugas serta tanggung jawab mereka sesuai dengan tupoksinya. Hal ini mencakup implementasi kebijakan dan prosedur yang relevan untuk menjaga dan memperbaiki reputasi perusahaan. SKAI telah memverifikasi bahwa unit kerja tersebut dilengkapi dengan sumber daya yang sesuai dan memiliki kapasitas untuk mengelola risiko reputasi secara efektif.
	Apakah unit kerja pengendalian telah terpisah dari unit kerja operasional perreputasian	3	
	Apakah unit kerja reputasi telah memahami dan menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tupoksi	3	



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 85 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

Hasil Penilaian Pilar 4 - Sistem Pengendalian yang Menyeluruh	3.00	Bank telah memiliki kecukupan organisasi yang bertugas sebagai pengendali di internal yaitu sebagai Risk Management Unit (SKK dan SKMR) dan Risk Assurance (SKAI) yang terpisah. Satuan Kerja Pengendalian secara berkala melakukan pembahasan dalam forum rapat dengan memberikan rekomendasi kepada Direksi dengan agenda hasil pengawasan atas penerapan manajemen risiko reputasi meskipun belum terdokumentasi dengan lengkap. Bank telah memiliki ketentuan pedoman perlindungan nasabah dan prosedur penyelesaiannya oleh unit kerja yang ditetapkan untuk pengendalian risiko reputasi. Bank telah menatausahakan setiap pengaduan dan tindak lanjut sampai dengan pelaporan sesuai ketentuan. Namun belum sepenuhnya dapat menyediakan media yang lebih luas dan mudah diakses oleh nasabah apabila akan mengajukan pengaduan ke bank. Ketersediaan ketentuan mekanisme identifikasi dan pemantauan risiko reputasi belum disusun oleh Bank dan selama pelaksanaan sekedar langkah tindak lanjut tanpa melakukan evaluasi penyebab terjadinya pengaduan nasabah yang memungkinkan terjadinya pengaduan nasabah yang sama dan berulang. Mendasarkan hal tersebut penilaian pada pilar ini ditetapkan pada tingkat 3,00 atau cukup memadai.
---	------	--

REKAP PENILAIAN KPMR REPUTASI

Hasil Penilaian Pilar 1 - Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris	2.56
Hasil Penilaian Pilar 2 - Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Limit	2.59
Hasil Penilaian Pilar 3 - Kecukupan Proses dan Sistem	2.55
Hasil Penilaian Pilar 4 - Sistem Pengendalian yang Menyeluruh	3.00
Hasil Penilaian KPMR	3.00
	Cukup Memadai

URAIAN KPMR REPUTASI

Pengawasan oleh Komisaris dan Direksi telah dilakukan dengan menerbitkan ketentuan dalam bentuk Surat Keputusan Direksi dan Surat Edaran. Penatausahaan dan pelaporan dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan batasan waktu tindak lanjut yang ditetapkan. Langkah tindak lanjut dan penyelesaiannya juga telah disusun dan memastikan unit kerja terkait telah menindaklanjuti atas setiap pengaduan nasabah. Ketersediaan sistem yang terintegrasi belum cukup memadai dan masih mengandalkan proses secara tertulis. SKAI melakukan pemeriksaan terhadap unit kerja secara berkala dan telah dapat mengidentifikasi potensi terjadi risiko reputasi. Bank selalu menanggapi atas setiap terdapatnya pengaduan dan dilaporkan melalui media dari OJK secara tepat waktu. Koordinasi tindak lanjut pengaduan berjalan dengan baik. Namun demikian bank masih memiliki kelemahan dikarenakan bank belum sepenuhnya menyediakan media yang secara luas dapat dan mudah diakses oleh nasabah yang memungkinkan terdapatnya pengaduan yang belum dapat tersalurkan dan dapat diterima lengkap oleh bank. Bank menetapkan peringkat KPMR risiko reputasi pada tingkat Cukup memadai



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 86 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

PROFIL NILAI REPUTASI

Periode pelaporan				Periode Sebelumnya			
Risiko Inheren	Risiko KPMR	Tingkat Risiko	Kualitas Manrisk	Risiko Inheren	Risiko KPMR	Tingkat Risiko	Kualitas Manrisk
2.17	3.00	1.96	Risiko Rendah	2.17	3.00	1.96	Risiko Rendah
Rendah	Cukup Memadai	Rendah	Risiko Rendah	Rendah	Cukup Memadai	Rendah	Risiko Rendah

Komponen	Keterangan
Tingkat Risiko	Hasil evaluasi profil Risiko Reputasi untuk Semester I 2025 didapatkan penilaian tingkat Risiko Sedang dengan nilai Risiko Inheren 2.17 (Rendah) dan nilai Penerapan Manajemen Risiko 3.00 (Cukup Memadai). Bank saat ini sedang meningkatkan kontrol risiko reputasi di unit-unit cabang dengan mengacu pada hasil temuan, terutama dalam menangani masalah kredit dengan mengikuti prosedur dan ketentuan dalam perjanjian kredit. Penting untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam pemahaman produk serta transparansi terkait risiko yang melekat pada setiap produk dan layanan. Bank masih perlu meningkatkan sistem informasi untuk memantau progres pengaduan dan penyelesaiannya secara real-time, serta memperluas akses media yang mudah dijangkau oleh nasabah untuk menyampaikan permasalahan atau pengaduan. Evaluasi risiko telah dilakukan di semua cabang dengan fokus pada dampak reputasi, yang menunjukkan bahwa hampir tidak ada dampak signifikan terhadap reputasi bank dari risiko yang teridentifikasi.
Risiko Inheren	PT BPR BKK Jateng menghadapi beberapa tantangan reputasi, terutama dari pemberitaan negatif terkait beberapa BPR di Jawa Tengah yang dicabut ijin oleh OJK, meskipun dampaknya minimal. Klarifikasi media masih terbatas pada pemegang saham. Pengaduan nasabah diadministrasikan dengan baik, menggunakan aplikasi APPK dari OJK dan media sosial, dengan prosedur sederhana dan respon cepat. Informasi keuangan yang disampaikan lengkap dan akurat, meskipun laporan pengaduan nasabah belum tercantum di website. Pengadaan pegawai dilakukan transparan. Produk kredit dan simpanan disampaikan secara transparan, namun pengetahuan produk oleh pegawai perlu ditingkatkan. SKAI menangani risiko reputasi dengan serius, mengidentifikasi kurang dari 10 kejadian eksposur risiko reputasi dan lebih dari 10 pemberitaan positif selama periode penilaian, menunjukkan citra perusahaan secara keseluruhan masih baik. Mendasarkan pada penilaian tersebut maka nilai risiko inheren pada Risiko reputasi sebesar 2.17 (Risiko Rendah).
Tingkat Kualitas MR	Pengawasan oleh Komisaris dan Direksi telah dilakukan dengan menerbitkan ketentuan dalam bentuk Surat Keputusan Direksi dan Surat Edaran. Penatausahaan dan pelaporan dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan batasan waktu tindak lanjut yang ditetapkan. Langkah tindak lanjut dan penyelesaiannya juga telah disusun dan memastikan unit kerja terkait telah menindaklanjuti atas setiap pengaduan nasabah. Ketersediaan sistem yang terintegrasi belum cukup memadai dan masih mengandalkan proses secara tertulis. SKAI melakukan pemeriksaan terhadap unit kerja secara berkala dan telah dapat mengidentifikasi potensi terjadi risiko reputasi. Bank selalu menanggapi atas setiap terdapatnya pengaduan dan dilaporkan melalui media dari OJK secara tepat waktu. Koordinasi tindak lanjut pengaduan berjalan dengan baik. Namun demikian bank masih memiliki kelemahan dikarenakan bank belum sepenuhnya menyediakan media yang secara luas dapat dan mudah diakses oleh nasabah yang memungkinkan terdapatnya pengaduan yang belum dapat tersalurkan dan dapat diterima lengkap oleh bank. Bank menetapkan peringkat KPMR risiko reputasi pada tingkat Cukup memadai



PT BPR BKK JATENG
(Perseroda)

RISIKO STRATEJIK



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 87 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

(RISIKO STRATEJIK)

INHEREN STRATEJIK

No	Parameter	Nilai	Keterangan
PILAR 1 : Penetapan Strategi Bisnis			
1	Penetapan Strategi Bisnis	2.43	Bank sudah melakukan 5 strategi bisnis yang dituangkan dalam RBB yaitu penguatan likuiditas, penguatan SDM, inovasi digital, efisiensi dan fokus pada bisnis UMKM, Pertanian, Joglo (Rumah), Perikanan. Selain itu juga, BKK Jateng mulai membuka pasar mikro Bank sudah menggunakan beanchmarking dengan industri sejenis baik Bank dan BPR lain dalam menentukan strategi bisnis. Terutama dalam melihat GRC, aset, damas, kredit dan laba. Bank sudah mempersiapkan kajian produk unggulan sesuai dengan masing-masing cabang di kabupaten yang disesuaikan dengan visi misi kepala daerah. Dari sisi layanan dan jaringan bank telah melakukan kajian lokasi untuk menentukan lokasi terbaik bagi bisnis Bank dan nasabah Sudah terpenuhi SDM pada sebagian besar unit kerja. Bank sudah membuat Cetak Biru Pengembangan SDM 2024-2028 dan memiliki kecukupan sumber daya yang memadai dalam mendukung pelaksanaan rencana strategis, yang tercermin dari kualitas dan kuantitas SDM yang terus ditingkatkan melalui program pelatihan berkelanjutan, serta ketersediaan infrastruktur dan teknologi yang mendukung operasional secara efisien. Dari sisi permodalan dan sumber dana, bank mampu menjaga likuiditas dan struktur pendanaan yang sehat untuk mendukung ekspansi bisnis dan pengembangan layanan. Contoh kegiatan antara lain pelaksanaan pelatihan kompetensi pegawai, pembaruan sistem IT core banking, serta optimalisasi penyaluran kredit melalui penghimpunan dana pihak ketiga yang efisien. Bank telah melakukan analisa beban kerja pada seluruh unit kerja, minimal satu kali dalam setahun, untuk memastikan keseimbangan antara kapasitas SDM dengan target kinerja yang ditetapkan. Analisa ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait penyesuaian alokasi tugas, kebutuhan rekrutmen, serta pengembangan kompetensi pegawai guna mendukung pencapaian rencana strategis. Contoh kegiatan meliputi pengisian instrumen analisa beban kerja oleh masing-masing unit, evaluasi output kerja dibandingkan target, serta penyusunan rekomendasi perbaikan struktur kerja oleh tim SDM atau perencanaan. Akan dilakukan setiap triwulan terkait analisis potensi pasar. Dan akan berkoordinasi dengan divisi terkait
	Penetapan Strategi Bisnis	2	
	Evaluasi Posisi Kompetitif di industri	2	
	Analisa Faktor Eksternal	3	
	Rencana Keberlangsungan Manajerial	2	
	Kecukupan Sumber Daya	2	
	Analisa Beban Kerja pada Seluruh Unit Kerja dalam mencapai target	3	
	Analisa Potensi Pasar	3	



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 88 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

Hasil Penilaian Pilar 1 - Penetapan Strategi Bisnis		2.43	Bank sudah melakukan 5 strategi bisnis yang dituangkan dalam RBB yaitu penguatan likuiditas, penguatan SDM, inovasi digital, efisiensi dan fokus pada bisnis UMKM, Pertanian, Joglo (Rumah), Perikanan. Selain itu juga, BKK Jateng mulai membuka pasar mikro Bank sudah menggunakan beanchmarking dengan industri sejenis baik Bank dan BPR lain dalam menentukan strategi bisnis. Terutama dalam melihat GRC, aset, damas, kredit dan laba. Bank sudah mempersiapkan kajian produk unggulan sesuai dengan masing-masing cabang di kabupaten yang disesuaikan dengan visi misi kepala daerah. Dari sisi layanan dan jaringan bank telah melakukan kajian lokasi untuk menentukan lokasi terbaik bagi bisnis Bank dan nasabah Kecukupan SDM dan Manajerial pada periode penilaian masih terdapat kekosongan pada fungsi yang signifikan yakni kekosongan pada Direksi Kepatuhan, Direksi Pemasaran, beberapa pada fungsi jabatan PE, PS serta staff yang masih kosong Bank BKK Jateng sudah membuat Cetak Biru Pengembangan SDM 2024-2028 dan memiliki kecukupan sumber daya yang kurang memadai untuk mendukung pelaksanaan rencana strategis masih terdapat kekosongan. Saat ini PE di kantor pusat sudah mengikuti sertifikasi kompetensi dir 1 dan dir 2 untuk masuk ke talent pool direktur. Selain itu juga akan menyusul Kepala Korwil dan Kepala Cabang. Hal ini didukung dengan maksimalisasi dana untuk pengembangan SDM. Analisa beban kerja belum dilakukan (reconfirm SDM) dan akan berkoordinasi dengan divisi SDM untuk melakukan analisa beban kerja yang akan dilakukan minimal 1 tahun sekali. Akan dilakukan setiap triwulan terkait analisis potensi pasar. Dan akan berkoordinasi dengan divisi terkait
PILAR 2 : Penyusunan Rencana Bisnis			
1	Pertimbangan faktor eksternal dan internal dalam menyusun rencana dan model bisnis	2.70	Dalam menyusun strategi dan model bisnis, Bank telah mempertimbangkan faktor internal seperti kesiapan infrastruktur bisnis, SDM, permodalan dan juga dari faktor eksternal seperti kompetitor, bunga di pasar, isu dan pertumbuhan ekonomi, inflasi dll Bank telah menyiapkan 5 produk unggulan dalam berkompetisi dalam market yang disesuaikan dengan demand di masyarakat, Bank juga senantiasa melakukan upgrade kompetensi SDM untuk meningkatkan Jumlah SDM unggul. Serta penerapan KPI individu untuk mendapatkan SDM unggul (talent pool) Bank memiliki teknologi yang mengikuti perkembangan jama, seperti E wallet (keris) QRIS payment, Qris merchant dan proses untuk persetujuan mobile banking PT BPR BKK Jateng (Perseroda) pada dasarnya telah memiliki struktur organisasi yang lengkap dan mendukung pelaksanaan rencana strategis, dengan pengisian jabatan inti yang sesuai dengan kebutuhan operasional. Namun, masih terdapat ruang perbaikan dalam hal pemerataan kualitas SDM, terutama pada aspek kompetensi teknis tertentu dan pemenuhan kuota personel di unit-unit kerja yang padat aktivitas, seperti divisi kredit dan layanan nasabah Fungsi four eyes akan dilakukan untuk memenuhi fungsi preventif atau pencegahan. Pemeriksaan berkala pada Internal Audit mampu mendeteksi penyimpangan yang terjadi namun pemeriksaan post audit membuat waktu terdeteksi penyimpangan setelah kejadian terjadi. Fungsi four eyes akan dilakukan untuk memenuhi fungsi preventif atau pencegahan. Pemeriksaan berkala pada Internal Audit mampu mendeteksi penyimpangan yang terjadi namun pemeriksaan post audit membuat waktu terdeteksi penyimpangan setelah kejadian terjadi. Hal ini akan diupayakan dilakukan di triwulan keempat. Melakukan Penelitian Terhadap Potensi Pasar (SWOT), Cost and Benefit, Identifikasi dan mitigasi 6 (Enam) Risiko Setiap Tahun Sampai dengan periode penilaian belum pernah dilakukan stresstest, periode ini Bank akan Menyusun Stresstest Dampak Perubahan Lingkungan Bisnis 1 (Satu) Kali Dalam Setahun Kesesuaian dan implementasi kebijakan dilakukan evaluasi Setiap Triwulan sekali atau minimal satu tahun sekali
	Pertimbangan faktor eksternal dan internal dalam menyusun rencana dan model bisnis	3	
	Perubahan Lingkungan Bisnis	2	



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 89 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

	Perkembangan Teknologi	2	
	Struktur Organisasi dan SDM	2	
	Pengendalian Internal	3	
	Analisa Produk Eksisting	2	
	Analisa Layanan Eksisting	4	
	Analisa Produk dan Layanan Baru	3	
	Identifikasi Perubahan Lingkungan Bisnis	3	
	Kesesuaian Kebijakan yang Ditetapkan dengan Implementasi Kebijakan Terhadap Rencana Bisnis	3	
2	Keunggulan kompetitif BPR dan ancaman dari kompetitor	2.50	Pertumbuhan DPK yang tergolong rendah, dibandingkan dengan kompetitor. Dan pertumbuhan kredit menurun dibandingkan periode sebelumnya. Hal tersebut dapat berdampak pada kinerja keuangan BPR. Bank telah menentukan target posisi Bank ditengah persaingan dan melakukan evaluasi capaian target posisi yg telah ditetapkan Telah melakukan survei langsung terhadap nasabah dan masyarakat untuk mengetahui tingkat kepuasan, kebutuhan layanan, serta harapan terhadap fitur produk, Analisis penutupan rekening nasabah, serta BKK Jateng mulai menyiapkan pengembangan Layanan Digital seperti mobile banking. Analisa regionalnya dengan menggunakan tools analisis yaitu Identifikasi dan Penetapan Peer Group, Pengumpulan Data Kinerja Peer Group, Analisa Indikator Kinerja Utama, Benchmarking Posisi Bisnis Bank, serta Identifikasi Faktor Pendukung dan Penghambat Kinerja.
	Keunggulan kompetitif BPR dan ancaman dari kompetitor	3	
	Kondisi persaingan / kompetitor	3	
	Preferensi Nasabah	1	
	Analisa Indikator Utama Posisi Bisnis Peer Group	3	
	Hasil Penilaian Pilar 2 - Penyusunan Rencana Bisnis	2.60	Bank BKK Jateng telah mengimplementasikan lima strategi bisnis dalam Rencana Bisnis Bank (RBB), termasuk penguatan likuiditas, SDM, inovasi digital, efisiensi, dan fokus pada bisnis UKM. Bank telah menggunakan benchmarking dengan lima BPR lainnya dalam menentukan strategi, terutama terkait dengan riset. Selanjutnya, bank telah melakukan kajian dengan menggunakan analisis pasar, seperti SWOT, Demand Supply Analysis, dan Cost and Benefit Analysis, termasuk dalam kajian pindah kantor yang mencakup analisis bisnis dan potensi bisnis. Meskipun SDM telah terpenuhi di beberapa unit kerja, ada kebutuhan untuk mengisi posisi kosong. Bank telah menyusun Cetak Biru Pengembangan SDM 2024-2028 dan telah melaksanakan sertifikasi kompetensi diri bagi PE di kantor pusat. Namun, bank masih perlu meningkatkan teknologi informasi yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Bank juga memiliki mekanisme pengawasan untuk mendeteksi kelemahan dan penyimpangan dalam pencapaian rencana strategis, meskipun perlu peningkatan dalam respons terhadap perubahan faktor eksternal.
PILAR 3 : Pencapaian Target Bisnis			



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 90 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

1	Perbandingan realisasi dan target indikator keuangan utama sesuai ketentuan rencana bisnis bpr, khususnya untuk faktor permodalan, kualitas aset, kredit, likuiditas, penyaluran kredit kepada umkm, dan rentabilitas	3.18	Deviasi tinggi karena laba masih rendah dan jauh dari target .Pencapaian atas target aset, dana masyarakat, dan kredit menunjukkan bahwa strategi ekspansi dan penghimpunan dana telah berjalan efektif. Namun demikian, realisasi pendapatan dan laba belum optimal. Aset tercapai 99,85% dari RBB, damas tercapai 99,25% dari RBB, kredit tercapai 98,3% dari RBB, pendapatan tercapai 100,71% dari RBB, biaya 99,79% dari RBB, dan Laba tercapai 93,79% dari RBB. Hal tersebut akibat adanya peningkatan biaya, khususnya dari pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang bersifat mandatory dan ditujukan untuk memperkuat kualitas portofolio kredit. Modal inti sebesar Rp 404.152.833.743.69 dengan rasio modal inti tercapai sebesar 99,54% dari RBBSaldo Kredit bermasalah sampai dengan periode penilaian tercapai 110% dari RBB dengan Realisasi NPL sebesar 26,84%Laba sebelum pajak periode Juni 2025 sebesar Rp -27.755.061.968,03 atau 106,62% dari RBB sebesar Rp -29.591.452.317,632Capaian NIM periode Juni 2025 sebesar 8,29 atau 81,10% dari RBB sebesar 10,22Realisasi Tabungan periode Juni 2025 sebesar Rp 1.478.227.518.523,43, sedangkan realisasi damas periode Juni 2025 sebesar Rp 1.896.100.530.074,43. Maka komposisi Tabungan Terhadap Dana Pihak Ketiga didapatkan sebesar 77,96%Realisasi Deposito periode Juni 2025 sebesar Rp 417.873.011.551, sedangkan realisasi damas periode Juni 2025 sebesar Rp 1.896.100.530.074,43. Maka komposisi Deposito Terhadap Dana Pihak Ketiga didapatkan sebesar 22,04%Pendapatan Bunga Kontraktual sebesar Rp 113.603.813.502,54 dan Total Aset Produktif 1.120.225.780.772,57 sehingga komposisinya sebesar 10,14%.Pendapatan Bunga Kontraktual sebesar Rp 113.603.813.502,54 dan pendapatan sebesar Rp 194.132.207.977,31 sehingga komposisinya sebesar 58,52%.Biaya Tenaga Kerja sebesar Rp 65.680.062.621,66 dan Beban Operasional sebesar 220.943.961.753,67 sehingga komposisinya sebesar 29,73%.Data laporan bulanan per Juni 2025 menunjukkan angka aset bulan Juni 2025 sebesar Rp. 2.328.631.007.760,96. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya pada Maret 2025 sebesar Rp. 2.282.714.150.142,36 Sehingga terjadi kenaikan aset sebesar 2,01%.Data laporan bulanan per Juni 2025 menunjukkan angka Kredit bulan Juni 2025 sebesar Rp. 1.621.685.615.803,19. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya pada Maret 2025 sebesar Rp. 2.282.714.150.142,36. Sehingga terjadi penurunan kredit sebesar -1,79%.Data laporan bulanan per Juni 2025 menunjukkan angka Damas bulan Juni 2025 sebesar Rp. 1.896.100.530.074,43. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya pada Maret 2025 sebesar Rp. 1.861.598.902.197,12. Sehingga terjadi kenaikan Damas sebesar 1,85%.
			Data laporan bulanan per Juni 2025 menunjukkan angka Laba bulan Juni 2025 sebesar Rp. -27.755.061.968,039. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya pada Maret 2025 sebesar Rp. -46.861.591.660,99. Sehingga terjadi penurunan Laba sebesar -40,77%. Hal tersebut dikarenakan terdapat pencadangan CKPN.Pertumbuhan Penyaluran pada Sektor Usaha Produktif periode Juni 2025 sebesar Rp 1.040.937.108.834,24, sedangkan periode sebelumnya bulan Maret 2025 sebesar Rp 1.056.421.533.639,99, sehingga terjadi penurunan sebesar -1,47%.Realisasi penerimaan hapus buku periode Juni 2025 sebesar Rp 3.893.074.620 atau 96,87% dari RBB sebesar Rp 4.019.034.333
	Perbandingan realisasi dan target indikator keuangan utama sesuai ketentuan rencana bisnis bpr, khususnya untuk faktor permodalan, kualitas aset, kredit, likuiditas, penyaluran kredit kepada umkm, dan rentabilitas	3	
	Capaian target kuantitatif terhadap 6 parameter kuantitatif	4	
	Modal Inti	2	
	Saldo Kredit Bermasalah	4	
	Laba Sebelum Pajak	1	
	NIM	5	
	Komposisi Tabungan Terhadap Dana Pihak Ketiga	1	
	Komposisi Deposito Terhadap Dana Pihak Ketiga	1	



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 91 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

	Komposisi Pendapatan Bunga Kontraktual Terhadap Aset Produktif	1	
	Komposisi Pendapatan Bunga Kontraktual Terhadap Pendapatan	5	
	Komposisi Biaya Tenaga Kerja terhadap Beban Operasional	1	
	Trend Pertumbuhan Aset	4	
	Trend Pertumbuhan Kredit	5	
	Trend Pertumbuhan Dana	5	
	Trend Pertumbuhan Laba	5	
	Pertumbuhan Penyaluran pada Sektor Usaha Produktif	5	
	Penerimaan Hapus Buku	2	
2	Rekam jejak (track record) keberhasilan bpr dalam menerapkan keputusan strategis terkait dengan faktor pengembangan produk/jasa baru, perubahan sasaran bisnis, investasi strategis, rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, serta pencapaian target bisnis	3.57	PT BPR BKK Jateng (Perseroda) memiliki rekam jejak yang cukup baik dalam penerapan keputusan strategis, khususnya dalam pengembangan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar serta penyesuaian arah bisnis secara adaptif terhadap kondisi ekonomi daerah. Keberhasilan dalam memperluas jangkauan layanan, meningkatkan portofolio kredit UMKM, dan melakukan inovasi berbasis digital menjadi bukti konsistensi pencapaian target bisnis secara berkelanjutan. Untuk CAR, CR, BOPO, ROA dan NIM ada yang tercapai dan ada yang tidak capai target. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi pasar di 2025 yang relatif kompetitif antar BPR maupun bank umum. Realisasi Pemenuhan Jumlah SDM Terhadap Target RBB yaitu tercapai 10 dari 12 sdm atau sebesar 83,33% dari RBB (Sumber : Divisi SDM dan Umum). Realisasi Waktu pemenuhan yaitu triwulan 2 dan sesuai target (Sumber : Divisi SDM dan Umum). Sampai dengan Juni 2025 terdapat 1.213 pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dari jumlah total pegawai sebanyak 1.481 orang (81,90%) Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Usaha Baru Terhadap Target masih tercapai sebesar < 70% dari RBB Penyaluran kredit masih terfokus pada kegiatan usaha pada sektor ekonomi yang dikuasai. Realisasi pemindahan jaringan kantor tercapai 4 kantor yg telah selesai di relokasi, diantaranya yaitu KC Rembang, KC Boyolali, Kankas Margasari KC Tegal, dan Kankas Kedungbanteng KC Tegal. Sehingga persentase pencapaian yaitu 19,05% dari total 21 kantor yang seharusnya di relokasi
	Rekam jejak (track record) keberhasilan bpr dalam menerapkan keputusan strategis terkait dengan faktor pengembangan produk/jasa baru, perubahan sasaran bisnis, investasi strategis, rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, serta pencapaian target bisnis	3	
	Capaian target kualitatif	4	
	Realisasi Pemenuhan Jumlah SDM Terhadap Target RBB	3	
	Realisasi Waktu Pemenuhan SDM	2	
	Realisasi Modul Pelatihan dan Pendidikan Terhadap Target	3	
	Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Usaha Baru Terhadap Target	5	
	Realisasi Pemindahan Jaringan Kantor	5	



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 92 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

Hasil Penilaian Pilar 3 - Pencapaian Target Bisnis		3.37	Capaian target kuantitatif rendah dengan sebagian besar target kualitatif tercapai belum memberikan kesejahteraan bagi pegawai. Perlu dilakukan evaluasi ulang terhadap kebijakan tukin untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. BPR memiliki rekam jejak yang baik dalam menerapkan keputusan strategis terkait keempat faktor penilaian. Beberapa target kuantitatif seperti CAR, CR, BOPO, ROA, dan NIM tidak mencapai target, yang berdampak pada aspek kualitatif dalam pencapaian target.
PILAR 4 : LAINNYA			
1	Lainnya	2.75	Evaluasi Isu Strategik Akibat Perubahan Lingkungan Bisnis dilakukan setiap Triwulan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Core dan Supporting RTU dilakukan setiap Triwulan Evaluasi Capaian Target RBB dilakukan setiap 1 bulan Evaluasi Penyusunan dan Penerapan Rencana Kontinjensi dilakukan setiap Triwulan
	Evaluasi Isu Strategik Akibat Perubahan Lingkungan Bisnis	2	
	Evaluasi Pelaksanaan Tugas Core dan Supporting RTU	3	
	Evaluasi Capaian Target RBB	3	
	Evaluasi Penyusunan dan Penerapan Rencana Kontinjensi	3	
	Lainnya	2.75	Evaluasi Isu Strategik Akibat Perubahan Lingkungan Bisnis dilakukan setiap Triwulan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Core dan Supporting RTU dilakukan setiap Triwulan Evaluasi Capaian Target RBB dilakukan setiap 1 bulan Evaluasi Penyusunan dan Penerapan Rencana Kontinjensi dilakukan setiap Triwulan

REKAP PENILAIAN INHEREN STRATEGIK	
Hasil Penilaian Pilar 1 - Penetapan Strategi Bisnis	2.43
Hasil Penilaian Pilar 2 - Penyusunan Rencana Bisnis	2.60
Hasil Penilaian Pilar 3 - Pencapaian Target Bisnis	3.37
Hasil Penilaian Lainnya	2.75
Hasil Penilaian Inheren	3.37
	Tinggi

URAIAN INHEREN STRATEGIK
Hasil Penilaian Tingkat Risiko Inheren Risiko Reputasi pada peringkat Tinggi. Pada penetapan strategi bisnis Bank tidak memiliki produk baru, pilihan strategi yang sesuai sumber daya yang dimiliki dengan tingkat keberhasilan yang tinggi, penyusunan strategi BPR telah mempertimbangan seluruh faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis BPR baik faktor internal maupun faktor eksternal, pencapaian target bisnis BPR memiliki deviasi yang rendah dibanding target kuantitatif dan sebagian besar target kualitatif telah tercapai. Bank BKK Jateng telah berhasil menerapkan lima strategi bisnis utama dalam Rencana Bisnis Bank (RBB), termasuk penguatan likuiditas, SDM, inovasi digital, efisiensi, dan fokus pada bisnis UKM. Meskipun capaian target kuantitatif belum optimal, sebagian besar target kualitatif tercapai. Bank perlu meningkatkan teknologi informasi untuk akses publik dan respons terhadap perubahan eksternal. Evaluasi ulang terhadap kebijakan tukin diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan.



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman93 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

KPMR STRATEJIK

No	Parameter KPMR	Peringkat Risiko	Keterangan
PILAR 1 : Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris			
1	Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko stratejik yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	2.40	Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Stratejik pada forum rapat Pengurus, rapat dengan Pejabat Eksekutif, rapat Komite Manajemen Risiko, rapat Komite Pemantau Risiko, forum exit meeting hasil pemeriksaan SKAI dan memantau tindak lanjut evaluasi penerapan manajemen risiko stratejik namun pelaksanaan dari evaluasi tersebut belum optimal khususnya pembahasan dan penetapan strategi pengelolaan manajemen risiko dengan merujuk pada surat keputusan tentang penetapan limit risiko dan toleransi yang telah diputuskan. Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Stratejik pada forum rapat Pengurus, rapat dengan Pejabat Eksekutif, rapat Komite Manajemen Risiko, rapat Komite Pemantau Risiko, forum exit meeting hasil pemeriksaan SKAI dan memantau tindak lanjut evaluasi penerapan manajemen risiko stratejik namun pelaksanaan dari evaluasi tersebut belum optimal khususnya pembahasan dan penetapan strategi pengelolaan manajemen risiko dengan merujuk pada surat keputusan tentang penetapan limit risiko dan toleransi yang telah diputuskan Dewan Komisaris telah mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen risiko Stratejik dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dewan Komisaris telah memastikan Direksi dan jajarannya dalam penerapan manajemen risiko Stratejik sesuai kebijakan manajemen risiko yang ditetapkan Dewan Komisaris telah mempertimbangkan masukan dari Komite Pemantau Risiko saat melakukan evaluasi
	Apakah ketentuan dan kebijakan manajemen risiko stratejik yang disetujui Dewan Komisaris apa saja yang telah ditetapkan (PKPB, SK Direksi, SOP stratejik, SE Direksi, SK BWMK, SK Limit dan Toleransi Risiko)	2	
	Apakah evaluasi ketentuan dan kebijakan manajemen risiko stratejik yang disetujui Dewan Komisaris telah dilakukan (Ketentuan stratejik yang diterbitkan selama periode penilaian) dan kapan dilakukan secara periodik serta dilakukan kepada siapa saja	3	
	Apakah Dewan Komisaris mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen risiko stratejik dalam menjalankan tugas dan fungsinya	2	
	Apakah Dewan Komisaris telah memastikan Direksi dan jajarannya dalam penerapan manajemen risiko stratejik sesuai kebijakan manajemen risiko yang ditetapkan	3	
	Apakah Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi telah mempertimbangkan masukan dari Komite Pemantau Risiko	2	



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman94 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

2	Apakah Dewan komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko stratejik secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud ?	2.00	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban Direksi dalam penerapan manajemen risiko Stratejik secara tertulis dan dalam forum rapat Dewan Komisaris cukup memberikan masukan dan pengarahannya penerapan manajemen risiko Stratejik kepada Direksi secara tertulis dan forum rapat Dewan Komisaris melakukan monitoring tindak lanjut evaluasi pertanggungjawaban Direksi penerapan manajemen risiko Stratejik Dewan Komisaris secara konsisten mengembangkan budaya sadar risiko Stratejik Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris
	Apakah Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban Direksi dalam penerapan manajemen risiko stratejik secara tertulis dan dalam forum rapat (terdapat notulen)	2	
	Apakah Dewan Komisaris memberikan masukan dan pengarahannya penerapan manajemen risiko stratejik kepada Direksi secara tertulis dan forum rapat	2	
	Dewan Komisaris melakukan monitoring tindak lanjut evaluasi pertanggungjawaban Direksi penerapan manajemen risiko stratejik	2	
	Apakah Dewan Komisaris secara konsisten mengembangkan budaya sadar risiko stratejik	2	
	Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris	2	
3	Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko stratejik, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	2.33	Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen risiko Stratejik Ketentuan dan kebijakan manajemen risiko Stratejik telah disetujui dan ditetapkan oleh Direksi meliputi PKPB, SK Direksi, SOP PerStratejikan, SE Direksi, SK BWMK Direksi telah melakukan evaluasi ketentuan dan kebijakan, melalui rapat serta melakukan kunjungan langsung ke kantor cabang secara berkala untuk memantau capaian kinerja dari aspek kuantitatif maupun kualitatif. Evaluasi capaian cabang juga dilakukan setiap triwulanan
	Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen risiko stratejik (Pelatihan tentang manajemen risiko stratejik yang diikuti, pengalaman di bidang yang berkaitan dengan manajemen risiko stratejik)	2	
	Ketentuan dan kebijakan manajemen risiko stratejik yang disetujui Direksi apa saja yang telah ditetapkan (PKPB, SK Direksi, SOP Perstratejikan, SE Direksi, SK BWMK)	2	
	Kapan evaluasi ketentuan dan kebijakan manajemen risiko stratejik yang disetujui Direksi dilakukan (Ketentuan stratejik yang diterbitkan selama periode penilaian)	3	



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 95 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

4	Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi Risiko stratejik, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko stratejik terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	2.20	Direksi secara konsisten mengambil tindakan yang perlu dilakukan dalam mitigasi risiko Stratejik Secara berkala Direksi menyampaikan tindakan dan kebijakan dalam rangka pengendalian dan mitigasi risiko kepada seluruh unit kerja Secara konsisten Direksi telah mengembangkan budaya sadar risiko Stratejik kepada seluruh unit kerja. Namun penerapan budaya sadar risiko stratejik belum terimplementasi secara optimal. Secara berkala Direksi melakukan review atas kebijakan pendelegasian kewenangan yang diberikan Direksi telah melakukan evaluasi terhadap usulan transaksi yang diterima sebelum memberikan persetujuan.
	Apakah Direksi secara konsisten mengambil tindakan yang perlu dilakukan dalam mitigasi risiko stratejik	2	
	Apakah Direksi secara berkala menyampaikan tindakan dan kebijakan dalam rangka pengendalian dan mitigasi risiko kepada seluruh_strah unit kerja	2	
	Apakah Direksi secara konsisten telah mengembangkan budaya sadar risiko stratejik kepada seluruh_strah unit kerja	3	
	Apakah Direksi secara berkala melakukan review atas kebijakan pendelegasian kewenangan yang diberikan	2	
	Apakah Direksi telah melakukan evaluasi terhadap usulan transaksi yang diterima sebelum memberikan persetujuan.	2	
5	Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi stratejik dan fungsi Manajemen Risiko stratejik?	2.75	Fungsi Second Line seperti SKMR dan SKK telah terpisah dari Unit Kerja perStratejikan dan melaksanakan tugasnya secara independen Kecukupan organisasi di unit kerja perStratejikan telah didukung dengan kompetensi yang cukup baik Kecukupan organisasi di satuan manajemen risiko perStratejikan telah didukung dengan kompetensi yang cukup baik Proses perstratejikan telah dijalankan dan cukup sesuai dengan ketentuan oleh masing-masing unit kerja secara independen
	Fungsi Second Line (SKMR dan SKK) apakah telah terpisah dari Unit Kerja perstratejikan dan melaksanakan tugasnya secara independen	2	
	Apakah kecukupan organisasi di unit kerja stratejik telah didukung dengan kompetensi yang baik	3	
	Apakah kecukupan organisasi di satuan manajemen risiko stratejik telah didukung dengan kompetensi yang baik	3	
	Apakah proses perstratejikan dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan oleh masing-masing unit kerja secara independen	3	
6	Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko stratejik?	2.33	SOTK dan pengelolaan SDM telah sesuai dengan penerapan manajemen risiko stratejik perusahaan yang berlaku. Meskipun saat ini masih terdapat kekosongan di beberapa posisi jabatan. Pedoman pengelolaan SDM dilakukan review secara berkala Direksi telah melakukan evaluasi ketercukupan jumlah SDM bidang perStratejikan



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 96 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

	Apakah ketentuan SOTK telah sesuai dengan penerapan manajemen risiko stratejik, tidak terdapat perangkapan jabatan, independen	3	
	Apakah pedoman pengelolaan SDM dilakukan review secara berkala	2	
	Apakah Direksi melakukan evaluasi ketercukupan jumlah SDM bidang stratejik	2	
Hasil Penilaian Pilar 1 -Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris		2.34	Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan Manajemen Risiko Stratejik melalui berbagai forum rapat dan monitoring tindak lanjutnya, namun belum optimal terutama dalam pembahasan dan penetapan strategi pengelolaan risiko. Evaluasi tersebut melibatkan Direksi dan jajaran serta didukung dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
PILAR 2 : Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Limit			
1	Apakah BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko stratejik yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	2.20	Dalam penyusunan rencana kerja sudah merujuk pada penerapan manajemen risiko Stratejik Pada penyusunan rencana kerja sudah berdasarkan pada pengalaman dan capaian sebelumnya dengan tetap memperhatikan pengelolaan dan mitigasi risiko Stratejik Kurang adanya kaji ulang oleh pihak yang independen pada kebijakan manajemen risiko Stratejik yang akan dilaporkan ke Dewan Komisaris dan Direksi Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko Stratejik memadai dan telah tersedia untuk seluruh area Manajemen Risiko untuk Risiko Stratejik, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko ditetapkan telah sesuai dengan sasaran strategi dan strategi bisnis
	Apakah dalam penyusunan rencana kerja telah merujuk pada penerapan manajemen risiko stratejik	2	
	Apakah dalam menyusun rencana kerja telah berdasarkan pada pengalaman dan capaian sebelumnya dengan tetap memperhatikan pengelolaan dan mitigasi risiko stratejik	2	
	Apakah kebijakan manajemen risiko stratejik dilakukan kaji ulang oleh pihak yang independen dan dilaporkan ke Dewan Komisaris dan Direksi	2	
	Apakah kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko stratejik memadai dan telah tersedia untuk seluruh area Manajemen Risiko untuk Risiko stratejik, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai	3	
	Apakah perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko ditetapkan telah sesuai dengan sasaran strategi dan strategi bisnis	2	



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 97 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

2	"Apakah BPR: 1. memiliki prosedur Manajemen Risiko stratejik dan penetapan limit Risiko stratejik yang ditetapkan oleh Direksi ? 2. melaksanakan prosedur Manajemen Risiko stratejik dan penetapan limit Risiko stratejik secara konsisten untuk seluruh aktivitas ? Dan 3. melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko stratejik dan penetapan limit Risiko stratejik secara berkala?"	2.25	Unit Kerja cukup memahami penerapan limit dan toleransi risiko Stratejik yang ditetapkan dalam SK Direksi Unit Kerja melakukan pengawasan monitoring limit dan toleransi risiko Stratejik Unit Kerja melakukan evaluasi apabila terjadi pelampauan limit dan toleransi risiko yang ditetapkan SDM cukup memahami ketentuan limit dan toleransi risiko yang ditetapkan dan menjadi acuan dalam pengendalian manajemen risiko Stratejik Kebijakan penetapan limit dan toleransi risiko telah dilakukan pengkinian sesuai dengan kondisi usaha dan perkembangan faktor eksternal yang berpengaruh pada ketentuan limit yang telah ditetapkan Perumusan penentuan limit dan toleransi risiko dilakukan sesuai dengan arah dan strategi perStratejikan penetapan limit telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan didokumentasikan sehingga memudahkan untuk dilakukan audit trail Penetapan limit dan toleransi risiko meliputi penetapan limit secara keseluruhan, per jenis risiko, dan per aktivitas fungsional yang memiliki exposure risiko
	Apakah Unit Kerja telah memahami penetapan limit dan toleransi risiko stratejik yang ditetapkan dalam SK Direksi	2	
	Apakah Unit Kerja melakukan pengawasan monitoring limit dan toleransi risiko stratejik	3	
	Apakah Unit Kerja melakukan evaluasi apabila terjadi pelampauan limit dan toleransi risiko yang ditetapkan	2	
	Apakah SDM telah memahami ketentuan limit dan toleransi risiko yang ditetapkan dan menjadi acuan dalam pengendalian manajemen risiko stratejik	3	
	Apakah kebijakan penetapan limit dan toleransi risiko dilakukan pengkinian sesuai dengan kondisi usaha dan perkembangan faktor eksternal yang berpengaruh pada ketentuan limit yang telah ditetapkan	2	
	Apakah perumusan untuk penentuan limit dan toleransi risiko dilakukan sesuai dengan arah dan strategi stratejik	2	
	Apakah penetapan limit telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan didokumentasikan sehingga memudahkan untuk dilakukan audit trail	2	
	Apakah penetapan limit dan toleransi risiko meliputi penetapan limit secara keseluruhan, per jenis risiko, dan per aktivitas fungsional yang memiliki exposure risiko	2	
3	Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko stratejik sesuai dengan ketentuan?	2.33	Unit kerja cukup memahami ketentuan dan prosedur produk dan aktivitas baru dan risiko yang melekat pada setiap produk dan mitigasinya Ketentuan kebijakan produk dan aktivitas cukup didukung dengan ketentuan dan petunjuk kerja yang lengkap Ketentuan kebijakan produk dilakukan evaluasi secara berkala
	Apakah unit kerja telah memahami ketentuan dan prosedur produk dan aktivitas baru dan risiko yang melekat pada setiap produk dan mitigasinya	3	



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman 98 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

	Apakah ketentuan kebijakan produk dan aktivitas telah didukung dengan ketentuan dan petunjuk kerja yang lengkap	2	
	Apakah ketentuan kebijakan produk dilakukan evaluasi secara berkala	2	
Hasil Penilaian Pilar 2 - Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Limit		2.26	Rencana kerja telah disusun dengan merujuk pada penerapan manajemen risiko strategis, mempertimbangkan pengalaman dan capaian sebelumnya serta fokus pada pengelolaan dan mitigasi risiko. Namun, terdapat kekurangan dalam kaji ulang independen terhadap kebijakan manajemen risiko strategis yang akan dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko strategis dianggap memadai dan telah tersedia untuk semua area manajemen risiko, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai. Unit kerja telah memahami dan melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap limit dan toleransi risiko yang telah ditetapkan, termasuk mengenai produk dan aktivitas baru serta risiko yang terkait. Selain itu, kebijakan penetapan limit dan toleransi risiko telah diperbaharui sesuai dengan kondisi usaha dan perubahan faktor eksternal yang relevan, serta didokumentasikan dengan baik untuk audit trail.
PILAR 3 : Kecukupan Proses dan Sistem			
1	Apakah BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko strategis yang melekat pada kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko strategis?	2.60	Seluruh SDM yang melakukan aktivitas perStrategikan kurang berpedoman pada penerapan manajemen risiko Strategik Seluruh organisasi cukup mampu dan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas perStrategikan Dalam proses perStrategikan sudah dilakukan verifikasi dual control dan didukung dengan dokumen yang memadai Dalam proses pengambilan keputusan bidang perStrategikan dilakukan secara pembahasan bersama dan dilakukan secara transparan Dalam proses manajemen risiko Strategik telah didukung dengan data Strategik yang akurat dan informatif Dalam proses manajemen risiko Strategik telah melakukan analisa karakteristik risiko Strategik yang melekat pada produk dan layanan Kesesuaian asumsi, data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko Strategik telah dilakukan evaluasi Dalam melakukan pengukuran risiko Strategik telah dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan yang material pada kegiatan layanan, produk, dan faktor risiko Dalam melakukan pemantauan risiko Strategik telah dilakukan evaluasi terhadap eksposur risiko Strategik Terdapat perubahan yang material dalam faktor risiko Strategik apakah juga dilakukan penyesuaian pelaporan
	Apakah dalam aktivitas perstrategik seluruh SDM telah berpedoman pada penerapan manajemen risiko strategis	3	
	Apakah seluruh organisasi mampu dan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas strategis	2	
	Apakah dalam proses perstrategik dilakukan verifikasi dual control dan didukung dengan dokumen yang memadai	2	
	Apakah dalam proses pengambilan keputusan bidang perstrategikan dilakukan secara pembahasan bersama dan dilakukan secara transparan	2	



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman99 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

	Apakah dalam proses manajemen risiko stratejik telah didukung dengan data stratejik yang akurat dan informatif	2	
	Apakah dalam proses manajemen risiko stratejik telah melakukan analisa karakteristik risiko stratejik yang melekat pada produk dan layanan	3	
	Apakah kesesuaian asumsi, data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko stratejik telah dilakukan evaluasi	3	
	Apakah dalam melakukan pengukuran risiko stratejik telah dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan yang material pada kegiatan layanan, produk, dan faktor risiko	3	
	Apakah dalam melakukan pemantauan risiko stratejik telah dilakukan evaluasi terhadap eksposur risiko stratejik	3	
	Apabila terdapat perubahan yang material dalam faktor risiko stratejik apakah juga dilakukan penyesuaian pelaporan	3	
2	Apakah BPR telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko stratejik serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	2.40	Sistem informasi untuk mendukung proses penilaian dan rencana perstratejikan masih dalam pengembangan dan belum matang sepenuhnya Sistem informasi risiko Stratejik cukup mudah diakses serta memiliki laporan yang lengkap meskipun masih dalam pengembangan Sistem informasi yang dimiliki nantinya akan mampu mendukung pelaporan risiko Stratejik yang lengkap dan cepat Sistem informasi yang dimiliki cukup mampu meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen risiko Stratejik (terkait produk, layanan, limit, penilaian, contingency plan, dan fungsi pengawasan) Sistem informasi yang dimiliki menyajikan informasi realisasi penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan (Risk Control dan tindak lanjut perbaikannya)
	Sistem Informasi apa saja yang telah dimiliki termasuk dukungan CBS dan aplikasi bantu lainnya	3	
	Apakah sistem informasi risiko stratejik dapat dan mudah diakses serta laporan yang lengkap	2	
	Apakah sistem informasi yang dimiliki mampu mendukung pelaporan risiko stratejik yang lengkap dan cepat	2	
	Apakah sistem informasi yang dimiliki mampu meningkatkan stratejik terhadap kebijakan manajemen risiko stratejik (terkait produk, layanan, limit, penilaian, contingency plan, dan fungsi pengawasan)	2	
	Apakah sistem informasi yang dimiliki menyajikan informasi realisasi penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan (Risk Control dan tindak lanjut perbaikannya)	3	



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman100 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

Hasil Penilaian Pilar 3 - Kecukupan Proses dan Sistem		2.50	Sistem informasi untuk penilaian dan rencana perstrategikan masih dalam pengembangan dan belum matang sepenuhnya, meskipun sistem informasi risiko strategik cukup mudah diakses dengan laporan yang lengkap. Kemampuan sistem informasi ini diharapkan dapat mendukung pelaporan risiko strategik secara cepat dan lengkap, serta meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen risiko, termasuk produk, layanan, limit, penilaian, contingency plan, dan fungsi pengawasan. Meskipun demikian, aktivitas perStrategikan oleh seluruh SDM masih kurang berpedoman pada penerapan manajemen risiko strategik, meskipun organisasi secara umum mengedepankan prinsip kehati-hatian. Proses perStrategikan didukung dengan verifikasi dual control dan dokumen yang memadai, serta pengambilan keputusan dilakukan secara transparan. Manajemen risiko strategik telah didukung dengan data strategis yang akurat dan informatif, dengan analisis karakteristik risiko strategik pada produk dan layanan. Evaluasi terhadap asumsi, data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko strategik telah dilakukan, termasuk penyesuaian jika terdapat perubahan material pada layanan, produk, dan faktor risiko. Pemantauan terhadap eksposur risiko strategik telah dilakukan dengan evaluasi, dan perubahan material dalam faktor risiko strategik mengharuskan penyesuaian dalam pelaporan.
PILAR 4 : Sistem Pengendalian yang Menyeluruh			
1	Apakah SKAI atau PEAI telah melakukan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko strategik, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindaklanjut atas temuan pemeriksaan?	2.40	SKAI telah melakukan audit dan evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko strategis di seluruh cabang atau unit kerja yang relevan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa strategi manajemen risiko telah diterapkan secara konsisten dan efektif sesuai dengan kebijakan perusahaan. SKAI telah melaksanakan proses monitoring terhadap semua temuan yang diidentifikasi. Langkah-langkah tindak lanjut yang telah diambil harus terdokumentasi secara jelas, serta dilakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan bahwa rekomendasi perbaikan atau tindakan pencegahan telah dilaksanakan secara efektif. Laporan hasil monitoring dan implementasi tindak lanjut harus disampaikan secara rutin kepada Direktur Utama untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen risiko strategis organisasi. SKAI telah memastikan adanya proses yang jelas dalam penetapan wewenang dan tanggung jawab terkait manajemen risiko strategis. Pengawasan ini tidak hanya memastikan akuntabilitas yang tepat dalam manajemen risiko, tetapi juga memungkinkan untuk peningkatan terus-menerus dalam praktik dan kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan. SKAI memastikan bahwa semua aspek tersebut telah rutin diaudit dan dievaluasi secara menyeluruh. Pengawasan terhadap pemisahan fungsi memastikan tidak adanya konflik kepentingan yang merugikan, sementara pengawasan terhadap struktur organisasi memastikan bahwa tanggung jawab dan wewenang terdistribusi dengan jelas dan sesuai. SKAI telah melakukan verifikasi dan review terhadap sistem pengendalian intern dalam manajemen risiko Strategik. SKAI dapat memastikan bahwa pengendalian intern yang ada cukup kuat dan sesuai dengan standar terbaik, sehingga membantu organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya dengan lebih baik dan mengurangi potensi risiko yang dapat mempengaruhi kinerja jangka panjang.
	Apakah selama periode penilaian SKAI telah melakukan pemeriksaan penerapan manajemen risiko strategik di berapa cabang atau unit kerja di bidang manajemen risiko strategik	2	
	Apakah setiap temuan SKAI dalam penerapan manajemen risiko strategik telah dilakukan monitoring tindak lanjutnya dan telah dilaporkan kepada Direktur Utama	3	



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman101 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

	Apakah SKAI dalam penerapan manajemen risiko strategik telah melakukan pengawasan atas penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk strategik kebijakan manajemen risiko strategik	3	
	Apakah SKAI telah melakukan pengawasan pada pemisahan fungsi, struktur organisasi, fungsi pelaporan, dan dokumentasi penerapan manajemen risiko strategik	2	
	Apakah SKAI telah melakukan verifikasi dan review terhadap sistem pengendalian intern manajemen risiko strategik	2	
2	Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko strategik telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	3.00	Unit kerja pengendalian telah sepenuhnya terpisah dari unit kerja operasional yang terlibat dalam strategi perusahaan. Pemisahan ini penting untuk memastikan bahwa fungsi pengendalian intern dapat beroperasi secara independen dan obyektif dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan efektivitas kontrol yang diterapkan untuk mendukung strategi perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dapat mengoptimalkan pelaksanaan strategi dan meminimalkan risiko konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan strategis jangka panjangnya. Unit kerja yang bertanggung jawab atas strategi perusahaan agar lebih mampu memahami dan menjalankan tugas serta tanggung jawab mereka sesuai dengan tupoksinya. Hal ini mencakup implementasi dan eksekusi rencana strategis yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan perusahaan dalam jangka panjang. SKAI telah memverifikasi bahwa unit kerja tersebut perlu mengembangkan pemahaman yang mendalam mengenai strategi perusahaan dan mampu mengeksekusinya dengan tepat sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Dengan memastikan konsistensi dalam penerapan tupoksi mereka, unit kerja perstrategian dapat memainkan peran kritis dalam mengelola risiko strategis dan mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan secara efektif.
	Apakah unit kerja pengendalian telah terpisah dari unit kerja operasional perstrategikan	3	
	Apakah unit kerja strategik telah memahami dan menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tupoksi	3	
Hasil Penilaian Pilar 4 - Sistem Pengendalian yang Menyeluruh		2.70	Tingkat Risiko yang ditetapkan pada Penilaian Sistem Pengendalian yang Menyeluruh pada BPR adalah 2,70

REKAP PENILAIAN KPMR STRATEGIK

Hasil Penilaian Pilar 1 -Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris	2.34
Hasil Penilaian Pilar 2 - Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Limit	2.26
Hasil Penilaian Pilar 3 - Kecukupan Proses dan Sistem	2.50
Hasil Penilaian Pilar 4 - Sistem Pengendalian yang Menyeluruh	2.70
Hasil Penilaian KPMR	2.70
Cukup Memadai	

URAIAN KPMR STRATEGIK

Rencana kerja telah disusun dengan mempertimbangkan pengalaman sebelumnya dan fokus pada pengelolaan risiko, perlu perbaikan dalam kaji ulang independen terhadap kebijakan yang dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko strategik, dinilai memadai dan telah diterapkan di seluruh area manajemen risiko dengan pemahaman yang baik dari pegawai. Sistem informasi untuk penilaian dan monitoring rencana strategik masih dalam pengembangan dan belum optimal. Evaluasi monitoring kinerja telah dilakukan oleh Pengurus secara berkala namun belum memberikan dampak perbaikan kinerja secara keseluruhan. Arah dan strategi telah disusun dan disampaikan kepada seluruh unit kerja namun implementasi pelaksanaan masih lemah



HASIL PELAPORAN PROFIL RISIKO KANTOR PUSAT PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Halaman102 / 106

Jl. Tanjung No.11-A Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang 50132 - info@bprbkkinfo.com - (024) 86405241 - 0815 1400 0400

PROFIL NILAI STRATEJIK

Periode pelaporan				Periode Sebelumnya			
Risiko Inheren	Risiko KPMR	Tingkat Risiko	Kualitas Manrisk	Risiko Inheren	Risiko KPMR	Tingkat Risiko	Kualitas Manrisk
3.37	2.70	3.50	Risiko Tinggi (Dilakukan kaji ulang terbatas, rencana tindak dilaporkan triwulanan)	3.04	2.80	2.92	Risiko Sedang (Dilakukan kaji ulang terbatas, rencana tindak dilaporkan semesteran)
Tinggi	Cukup Memadai	Tinggi	Risiko Tinggi (Dilakukan kaji ulang terbatas, rencana tindak dilaporkan triwulanan)	Sedang	Cukup Memadai	Sedang	Risiko Sedang (Dilakukan kaji ulang terbatas, rencana tindak dilaporkan semesteran)

Komponen	Keterangan
Tingkat Risiko	Hasil penilaian Tingkat risiko Strategik pada Semester I 2025 adalah Risiko Tinggi dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko memiliki tingkat Cukup Memadai. Pencapaian target bisnis secara kuantitatif maupun kualitatif masih terdapat beberapa deviasi pada beberapa indikator keuangan utama. Hal ini tentunya akan menjadi evaluasi dan tindak lanjut perbaikan yang utama untuk memperbaiki tingkat risiko Strategik bank menjadi lebih baik. Perlu ditingkatkan kompetensi pegawai dalam pemahaman produk dan transparansi terkait risiko pada setiap produk dan layanan. Meskipun belum memiliki sistem informasi yang dapat memantau perkembangan pengaduan dan penyelesaiannya secara real-time, bank sedang mengembangkan sistem informasi dan aplikasi untuk meningkatkan efisiensi strategi perStratejikan di lingkungan BPR. Evaluasi risiko aktifitas telah dilakukan di semua cabang, termasuk penilaian untuk mengukur dan memantau perkembangan strategi bisnis bank. Dengan adanya evaluasi ini, risiko strategik bank dapat lebih terkendali.
Risiko Inheren	Hasil Penilaian Tingkat Risiko Inheren Risiko Strategik pada peringkat Tinggi. Pada penetapan strategi bisnis Bank tidak memiliki produk baru, pilihan strategi yang sesuai sumber daya yang dimiliki dengan tingkat keberhasilan yang tinggi, penyusunan strategi BPR telah mempertimbangan seluruh faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis BPR baik faktor internal maupun faktor eksternal, pencapaian target bisnis BPR memiliki deviasi yang rendah dibanding target kuantitatif dan sebagian besar target kualitatif telah tercapai. Bank BKK Jateng telah berhasil menerapkan lima strategi bisnis utama dalam Rencana Bisnis Bank (RBB), termasuk penguatan likuiditas, SDM, inovasi digital, efisiensi, dan fokus pada bisnis UKM. Meskipun capaian target kuantitatif belum optimal, sebagian besar target kualitatif tercapai. Bank perlu meningkatkan teknologi informasi untuk akses publik dan respons terhadap perubahan eksternal. Evaluasi ulang terhadap kebijakan tukin diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan.
Tingkat Kualitas MR	Rencana kerja telah disusun dengan mempertimbangkan pengalaman sebelumnya dan fokus pada pengelolaan risiko, perlu perbaikan dalam kaji ulang independen terhadap kebijakan yang dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko strategik, dinilai memadai dan telah diterapkan di seluruh area manajemen risiko dengan pemahaman yang baik dari pegawai. Sistem informasi untuk penilaian dan monitoring rencana strategik masih dalam pengembangan dan belum optimal. Evaluasi monitoring kinerja telah dilakukan oleh Pengurus secara berkala namun belum memberikan dampak perbaikan kinerja secara keseluruhan. Arahan dan strategi telah disusun dan disampaikan kepada seluruh unit kerja namun implementasi pelaksanaan masih lemah



PT BPR BKK JATENG
(Perseroda)

TINGKAT KESEHATAN BANK

Laporan Penilaian Sendiri Tingkat Kesehatan
PT. BPR BKK JATENG (Perseroda)
Periode Laporan 30 Juni 2025

- A. Profil BPR
Nama BPR : PT BPR BKK JATENG (PERSERODA)
Posisi : Juni 2025
- B. Penilaian Tingkat Kesehatan BPR

Faktor/Komponen	Penilaian Posisi Periode Desember 2024				Penilaian Posisi Periode Juni 2025			
	Rasio (%)	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai Faktor (c) = (a)*(b)	Rasio (%)	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai Faktor (c) = (a)*(b)
Profil Risiko		4	25%	1.00		4	25%	1.00
Tata Kelola		3	30%	0.90		2	30%	0.60
Rentabilitas *)		2	15%	0.30		4	15%	0.60
1. Return on Asset (ROA)	2.03%	1			-2.36%	5		
2. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	82.87%	1			113.86%	5		
3. Net Interest Margin (NIM) bagi BPR atau Net Imbalan (NI) bagi BPRS	8.11%	2			8.29%	2		
Permodalan *)		2	30%	0.60		3	30%	0.90
1. Rasio KPMM	43.14%	1			43.34%	1		
2. Rasio MIAPB	161.77%	3			91.89%	5		
Nilai Komposit (Penjumlahan dari Nilai Faktor)				2.80				3.10
Peringkat Komposit				Peringkat 3				Peringkat 3

Analisis **)	Analisis Posisi Sebelumnya	Analisis Posisi Periode Saat Ini
1. Kesimpulan Tingkat Kesehatan	Peringkat Komposit 3 (PK-3) mencerminkan kondisi BPR dan BPRS yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain. Hal ini tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan tata kelola, rentabilitas, dan permodalan, yang secara umum cukup baik. Jika terdapat kelemahan baik dari sisi internal maupun eksternal maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan jika tidak berhasil diatasi dengan baik oleh manajemen maka dapat mengganggu kelangsungan usaha BPR dan BPRS.	Peringkat Komposit 3 (PK-3) mencerminkan kondisi BPR dan BPRS yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain. Hal ini tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan tata kelola, rentabilitas, dan permodalan, yang secara umum cukup baik. Jika terdapat kelemahan baik dari sisi internal maupun eksternal maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan jika tidak berhasil diatasi dengan baik oleh manajemen maka dapat mengganggu kelangsungan usaha BPR dan BPRS.
2. Profil Risiko	Penyusunan Laporan Profil Risiko melibatkan seluruh Risk Taking Unit dan telah melalui pembahasan forum Rapat Komite Manajemen Risiko. Laporan Profil Risiko juga direview oleh Komite Pemantau Risiko untuk menetapkan peringkat risiko yang wajar. Berdasarkan hasil penilaian maka didapatkan hasil penilaian Profil Risiko Semester II 2024 ini, secara keseluruhan memiliki Nilai risiko sebesar 3.64 dengan peringkat komposit pada peringkat risiko Tinggi. Nilai Risiko mengalami peningkatan dari periode sebelumnya, peningkatan terjadi pada Risiko Kredit Intern, Risiko Operasional Intern, Risiko Kepatuhan Intern, dan Risiko Strtejik Intern. Pada Risiko Kredit menjadi faktor utama peningkatan penilaian khususnya pada pilar kualitas kredit. Peningkatan Risiko Kredit bermasalah memicu profil risiko menjadi sangat tinggi. Manajemen perlu melakukan perbaikan kualitas kredit dan kualitas monitoring kredit agar tidak terjadi migrasi penuruna kualitas kredit. Pada Risiko Operasional yang perlu diperhatikan adalah pada kekosongan beberapa SOTK terutama pada fungsi yang signifikan yakni Direktur Pemasaran dan Direktur Kepatuhan, sehingga berdampak pada kualitas kinerja struktur dibawahnya. Pemenuhan SOTK perlu dilakukan untuk mengurangi risiko Operasional. Pada Risiko Kepatuhan yang menjadi perhatian merupakan terkait Risk Taking Unit yang belum memahami dan menerapkan budaya sadar risiko secara keseluruhan. Pada beberapa proses bisnis maupun non bisnis masih ditemukan beberapa pelanggaran yang terkait dengan kurangnya penerapan budaya sadar risiko. Hal ini akan menjadi acuan untuk kedepannya bagi Manajemen untuk menyusun kebijakan mengenai penerapan budaya sadar risiko pada seluruh Risk Taking Unit. Risiko Strategik mengalami kenaikan risiko pada Semester II 2024 dikarenakan pencapaian target RBB pada sebagian parameter bisnis dan kinerja keuangan masih belum tercapai dari target RBB yang telah disusun. Langkah-langkah strategik agar perlu dilakukan untuk mendorong perbaikan pencapaian RBB pada Semester II 2024 untuk mencapai target yang telah disusun. Peningkatan Risiko ini akan menjadi komitmen Manajemen untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan proses bisnis maupun non bisnis pada internal PT BPR BKK JATENG (Perseroda).	Penyusunan Laporan Profil Risiko melibatkan seluruh RTU melalui pembahasan forum Rapat Komite Manajemen Risiko serta direview oleh Komite Pemantau Risiko untuk menetapkan peringkat risiko komposite yang wajar. Berdasarkan hasil penilaian diperoleh penilaian Profil Risiko Semester I 2025 sebesar 3.40 dengan Peringkat Risiko Tinggi. Nilai Risiko mengalami penurunan dari periode Semester II 2024 merujuk pada hasil penilaian yang disampaikan OJK 3,64 (risiko tinggi). Risiko Kredit memiliki peringkat Sangat Tinggi sedangkan Risiko Operasional dan Risiko Kepatuhan memiliki peringkat Sedang mengalami perbaikan dibandingkan periode Semester II 2024. Risiko Likuiditas dan Risiko Reputasi stabil di peringkat Rendah, dan Risiko Strategik menjadi peringkat Risiko Tinggi. Profil Risiko Kredit menjadi faktor utama yang mempengaruhi risiko strategik, pilar kualitas kredit sangat mempengaruhi Risiko Kredit secara keseluruhan. Manajemen harus menyusun rencana tindak perbaikan kualitas kredit dan kualitas monitoring kredit mencegah migrasi penurunan kualitas kredit. Pada Risiko Operasional dipengaruhi kekosongan jabatan yakni Direktur Pemasaran dan Direktur Kepatuhan, sehingga berpengaruh pada kualitas kinerja struktur dibawahnya dan penerapan Tata Kelola perusahaan. Pemenuhan pejabat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu dilakukan untuk memperbaiki risiko Operasional. Pada Risiko Kepatuhan perlu dilakukan perbaikan pada peningkatan penerapan budaya sadar risiko dan perbaikan proses rule making the rule. Risiko Strategik mengalami kenaikan, khususnya kualitas aset yang berdampak keuangan dibandingkan peer group BPR, meskipun target indikator rasio keuangan di Semester I 2025 telah sesuai dengan RBB di Semester I. Mitigasi risiko di tahun 2025 harus difokuskan pada strategi perbaikan kualitas kredit khususnya pada debitur inti dan penurunan beban CKPN selain perbaikan kualitas SDM dengan menerapkan pedoman pengelolaan manajemen SDM.

Analisis **)	Analisis Posisi Sebelumnya	Analisis Posisi Periode Saat Ini
3. Tata Kelola	Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan dari 12 (dua belas) faktor penilaian penerapan tata kelola, maka berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.03/2016 Bab VI butir 7, peringkat komposit adalah Cukup Baik. Terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang cukup baik.	Penerapan Tata Kelola oleh PT BPR BKK Jateng (Perseroda) pada Semester I Tahun 2025 dinilai baik, dengan pemenuhan yang memadai terhadap prinsip-prinsip dasar tata kelola. Beberapa kelemahan struktural, seperti kekosongan pada posisi Direksi serta penguatan fungsi pengawasan internal dan kepatuhan, perlu segera ditindaklanjuti. Bank menyadari perlunya perbaikan dan komitmen berkelanjutan untuk mengimplementasikan tata kelola secara menyeluruh dalam setiap proses bisnis dan operasional, guna memastikan keberlangsungan usaha yang sehat dan berkelanjutan.
4. Rentabilitas	Rentabilitas Memadai dengan Peringkat 2 dengan kondisi Sumber Pendapatan Utama (Core Earning) dibandingkan Non Pendatapan Utama (Non Core Earning) memiliki Sumber pendapatan utama dari Core Earnings Dominan yaitu > 80% sd ≤ 90% yaitu 85.83%, Kualitas Core Earning (NPL Gross) memiliki Pendukung Core Earnings Tidak Stabil NPL Gross > 20% yaitu 22.23%, Sumber Utama Pendapatan atau Core Earnings dari Bunga Kontraktual Kredit terhadap Total Core Earnings Per Periode Penilaian memiliki Sumber Pendapatan Bunga Kontraktual Kredit di Core Earnings Dominan mencapai > 80% sd ≤90% yaitu 84.65%, Rata-rata Pertumbuhan NIM, BOPO, ROA, dan ROE 3 tahun terakhir (per periode penilaian) memiliki Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Bunga terhadap Biaya Bunga (NIM) 3 tahun terakhir (per akhir periode penilaian) 0.33% dan Tingkat Kesehatan NIM per periode penilaian Sehat, Rata-rata Rasio Pertumbuhan Biaya Operasional Dibanding Pendapatan Operasional (BOPO) 3 tahun terakhir (per akhir periode penilaian) 0.35% dan Tingkat Kesehatan rasio BOPO periode penilaian tergolong Sangat Sehat, Rata-rata Pertumbuhan Rasio Return On Aset (ROA) 3 tahun terakhir (per akhir periode penilaian) -0.12% dan Tingkat Kesehatan ROA per periode penilaian tergolong Sangat Sehat, Rata-rata Pertumbuhan Rasio Laba Kotor Terhadap Modal Sendiri (ROE) 3 tahun terakhir (per akhir periode penilaian) 2.75% dan Tingkat Kesehatan ROE tergolong Kurang Sehat, Rata-rata Pertumbuhan Laba Kotor (Disetahunkan) Terhadap Saldo Aset Produktif (Aset Produktif per periode penilaian) selama 3 tahun terakhir memiliki Rasio Laba Kotor Terhadap Aset Produktif Menurun ≤ -3% yaitu -0.49%, Rasio ROA, BOPO, dan NIM dibandingkan dengan Peer Group (PT BPR Bank BAPAS 69, PT BPR BKK Purwodadi, dan PT BPR Gunung Rizki Pusaka Utama) memiliki Rasio ROA BPR Positif Seiring Dengan Rasio ROA Peer Group dan Rasio ROA BPR tergolong Minimal Cukup Sehat . Hasil Penilaian Perbandingan ROA BPR terhadap Peer Group 0.26% dan Tingkat Kesehatan ROA BPR Ter tergolong Sangat Sehat, Rasio BOPO BPR Lebih Rendah > -10% sd ≤ -20% dari Rasio BOPO Peer Group. Hasil Penilaian Rasio BOPO BPR Terhadap Peer Group 21.47% dan Tingkat Kesehatan BOPO BPR Ter tergolong Kurang Sehat, Rasio NIM BPR Lebih Tinggi > 10% dari Rasio NIM Peer Group Hasil Penilaian Rasio NIM BPR Terhadap Peer Group 14.62% dan Tingkat Kesehatan NIM BPR Ter tergolong Sehat, Pencapaian Target Laba Sebelum Pajak (Gross) memiliki Realisasi Laba Tidak Melampaui target sebesar ≥ 60% sd < 90% dari RBB. Terdapat Tekanan Terhadap Kinerja Laba dan Kurang Mendukung Pertumbuhan Permodalan yaitu 74.54%, dan terkait Perbandingan Pertumbuhan Kredit yang Diberikan dengan Pertumbuhan Kredit yang Diberikan Peer Group, per Periode Penilaian (atau minimal dalam 6 bulan terakhir) memiliki Realisasi Pertumbuhan Kredit (KYD) ≥ 30% dari Rata-rata Pertumbuhan Kredit Peer Group yaitu 225.95%	Rentabilitas Kurang Memadai dengan Peringkat 4 dengan kondisi Sumber Pendapatan Utama (Core Earning) dibandingkan Non Pendatapan Utama (Non Core Earning) memiliki Sumber pendapatan utama dari Core Earnings Dominan yaitu > 80% sd ≤ 90% yaitu 81.53%, Kualitas Core Earning (NPL Gross) memiliki Pendukung Core Earnings Tidak Stabil NPL Gross > 20% yaitu 26.84%, Sumber Utama Pendapatan atau Core Earnings dari Bunga Kontraktual Kredit terhadap Total Core Earnings Per Periode Penilaian memiliki Sumber Pendapatan Bunga Kontraktual Kredit di Core Earnings Dominan mencapai > 80% sd ≤90% yaitu 84.65%, Rata-rata Pertumbuhan NIM, BOPO, ROA, dan ROE 3 tahun terakhir (per periode penilaian) memiliki Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Bunga terhadap Biaya Bunga (NIM) 3 tahun terakhir (per akhir periode penilaian) 12.5% dan Tingkat Kesehatan NIM per periode penilaian Sehat, Rata-rata Rasio Pertumbuhan Biaya Operasional Dibanding Pendapatan Operasional (BOPO) 3 tahun terakhir (per akhir periode penilaian) 12.5% dan Tingkat Kesehatan rasio BOPO periode penilaian tergolong Tidak Sehat, Rata-rata Pertumbuhan Rasio Return On Aset (ROA) 3 tahun terakhir (per akhir periode penilaian) -118.05% dan Tingkat Kesehatan ROA per periode penilaian tergolong Tidak Sehat, Rata-rata Pertumbuhan Rasio Laba Kotor Terhadap Modal Sendiri (ROE) 3 tahun terakhir (per akhir periode penilaian) -40.63% dan Tingkat Kesehatan ROE tergolong Kurang Sehat, Rata-rata Pertumbuhan Laba Kotor (Disetahunkan) Terhadap Saldo Aset Produktif (Aset Produktif per periode penilaian) selama 3 tahun terakhir memiliki Rasio Laba Kotor Terhadap Aset Produktif Menurun ≤ -3% yaitu -1.38%, Rasio ROA, BOPO, dan NIM dibandingkan dengan Peer Group (PT BPR Bank BAPAS 69, PT BPR BKK Purwodadi, dan PT BPR Gunung Rizki Pusaka Utama) memiliki Rasio ROA BPR Lebih Rendah > -50% dari Rasio ROA Peer Group, dan Rasio ROA tergolong Minimal Kurang Sehat. Hasil Penilaian Perbandingan ROA BPR terhadap Peer Group -174.45% dan Tingkat Kesehatan ROA BPR Ter tergolong Tidak Sehat, Rasio BOPO BPR Lebih Tinggi > 20% dari Rasio BOPO Peer Group dan Rasio BOPO Minimal Tidak Sehat. Hasil Penilaian Rasio BOPO BPR Terhadap Peer Group 48.82% dan Tingkat Kesehatan BOPO BPR Ter tergolong Tidak Sehat, Rasio NIM BPR Setidaknya Seiring Sama Dengan Rasio NIM Peer Group dan Rasio NIM BPR tergolong Minimal Cukup Sehat Hasil Penilaian Rasio NIM BPR Terhadap Peer Group -1.43% dan Tingkat Kesehatan NIM BPR Ter tergolong Sehat, Pencapaian Target Laba Sebelum Pajak (Gross) memiliki Realisasi Laba Tidak Melampaui target sebesar ≥ 90% sd < 100% dari RBB. Terdapat Tekanan Terhadap Kinerja Laba yang Berpotensi Menyebabkan Penurunan Laba yaitu 93.79%, dan terkait Perbandingan Pertumbuhan Kredit yang Diberikan dengan Pertumbuhan Kredit yang Diberikan Peer Group, per Periode Penilaian (atau minimal dalam 6 bulan terakhir) memiliki Realisasi Pertumbuhan Kredit (KYD) Negatif atau Lebih Rendah dari Rata-rata Pertumbuhan Kredit Peer Group yaitu -2.62%
5. Permodalan	Permodalan Memadai dengan Peringkat 2 dengan kondisi Rata-rata Pengelolaan ATMR Selama Periode Penilaian (Saldo KYD Neto dengan Bobot 100% terhadap Aset Tertimbang) memiliki Saldo Kredit Bobot Risiko di ATMR 100% netto Terhadap ATMR ≤ 15% yaitu 12.08%, Pertumbuhan KPMM selama periode penilaian memiliki Rasio Permodalan (KPMM) Selama Periode Penilaian Pertumbuhan Stabil ≤ 10% yaitu 1.05%, Rata-rata Rasio Aset Kualitas Tinggi Terhadap ATMR memiliki Rasio Kredit Kualitas Tinggi terhadap ATMR > 70% yaitu 76.69%, Akses Permodalan memiliki Akses sumber pendanaan permodalan BPR Sangat Memadai, Terdapat 2 (dua) Sumber Pendanaan yang Dapat Ditarik Dalam Kurun Waktu Pendek Sampai Dengan 3 (tiga) bulan, dan terkait Dukungan Permodalan Terdapat Tambahan Setoran Modal dari Pemegang Saham Setiap Tahun > 0.3% dari Modal BPR dengan rata-rata 2.17%	Permodalan Cukup Memadai dengan Peringkat 3 dengan kondisi Rata-rata Pengelolaan ATMR Selama Periode Penilaian (Saldo KYD Neto dengan Bobot 100% terhadap Aset Tertimbang) memiliki Saldo Kredit Bobot Risiko di ATMR 100% netto Terhadap ATMR > 25% yaitu 30.68%, Pertumbuhan KPMM selama periode penilaian memiliki Rasio Permodalan (KPMM) Selama Periode Penilaian Pertumbuhan Stabil ≤ 10% yaitu 0.48%, Rata-rata Rasio Aset Kualitas Tinggi Terhadap ATMR memiliki Rasio Kredit Kualitas Tinggi terhadap ATMR > 90% yaitu 166.4%, Akses Permodalan memiliki Akses sumber pendanaan permodalan BPR Sangat Memadai, Terdapat 2 (dua) Sumber Pendanaan yang Dapat Ditarik Dalam Kurun Waktu Pendek Sampai Dengan 3 (tiga) bulan, dan terkait Dukungan Permodalan Terdapat Tambahan Setoran Modal dari Pemegang Saham Setiap Tahun > 0.3% dari Modal BPR dengan rata-rata 2.27%

Keterangan:

*) Penetapan peringkat faktor rentabilitas dan permodalan dilakukan dengan memerhitungkan aspek kuantitatif dan kualitatif

**) Analisis Posisi Laporan berisi analisis terhadap tingkat kesehatan secara keseluruhan beserta masing-masing faktor penilaian dengan mempertimbangkan informasi terkini kondisi BPR, pokok permasalahan yang sedang dihadapi, termasuk keterkaitan antarfaktor

Kertas Kerja Penilaian Aspek Kuantitatif Rentabilitas

PT BPR BKK JATENG (PERSERODA)

PeriodeJuni2025					
	Komponen	Penilaian Posisi Periode Desember 2024		Penilaian Posisi Periode Juni 2025	
		Rasio	Peringkat	Rasio	Peringkat
a	Return on Asset (ROA)	2.03%	Peringkat 1	-2.36%	Peringkat 5
b	Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	82.87%	Peringkat 1	113.86%	Peringkat 5
c	Net Interest Margin (NIM) bagi BPR atau Net Imbalan (NI) bagi BPRS	8.11%	Peringkat 2	8.29%	Peringkat 2
Hasil Penjumlahan Masing-masing Komponen			4		12
Perhitungan Rata-rata			1.33		4.00

A Aspek 1

Sumber rentabilitas, ditunjukkan antara lain dengan penilaian atas kontribusi komponen pendapatan yang mendukung rentabilitas.

1 Sumber Pendapatan Utama (Core Earning) dibandingkan Non Pendatapan Utama (Non Core Earning)		
No	Penjelasan	Nilai
1	Sumber pendapatan utama dari Core Earnings Sangat Dominan yaitu > 90%	2
2	Sumber pendapatan utama dari Core Earnings Dominan yaitu > 80% sd ≤ 90%	
3	Sumber pendapatan utama dari Core Earnings Cukup Dominan yaitu > 70% sd≤ 80%	
4	Sumber pendapatan utama dari Core Earnings Kurang Dominan yaitu > 60% sd≤ 70%	
5	Mengalami Kerugian atau Sumber pendapatan utama dari Core Earnings≤ 60%	

2 Kualitas Core Earning (NPL Gross)		
No	Penjelasan	Nilai
1	Pendukung Core Earnings Sangat Stabil NPL Gross ≤ 10%	5
2	Pendukung Core Earnings Stabil NPL Gross 10% < NPL Gross ≤ 12.5%	
3	Pendukung Core Earnings Cukup Stabil NPL Gross 12.5% < NPL Gross ≤ 15%	
4	Pendukung Core Earnings Kurang Stabil NPL Gross 15% < NPL Gross ≤ 20%	
5	Pendukung Core Earnings Tidak Stabil NPL Gross > 20%	

3 Sumber Utama Pendapatan atau Core Earnings dari Bunga Kontraktual Kredit terhadap Total Core Earnings Per Periode Penilaian		
No	Penjelasan	Nilai
1	Sumber Pendapatan Bunga Kontraktual Kredit di Core Earnings Sangat Dominan mencapai > 90%	2
2	Sumber Pendapatan Bunga Kontraktual Kredit di Core Earnings Dominan mencapai > 80% sd ≤90%	
3	Sumber Pendapatan Bunga Kontraktual Kredit di Core Earnings Cukup Dominan mencapai >70% sd≤ 80%	
4	Sumber Pendapatan Bunga Kontraktual Kredit di Core Earnings Tidak Dominan mencapai > 60% sd≤ 70%	
5	Sumber Pendapatan Bunga Kontraktual Kredit di Core Earnings Sangat Tidak Dominan mencapai < 60%	

B Aspek 2

Kesinambungan rentabilitas, ditunjukkan antara lain dengan penilaian atas prospek rentabilitas di masa yang akan datang.

1 Rata-rata Pertumbuhan NIM, BOPO, ROA, dan ROE 3 tahun terakhir (per periode penilaian)		
No	Penjelasan	Nilai
1	Pertumbuhan Rasio NIM ≥ 5%, Rasio BOPO menurun ≥ -5%, Rasio ROA meningkat ≥ 5%, Rasio ROE meningkat ≥ 10%	4
2	Pertumbuhan Rasio NIM ≥ 3% sd < 5%, Rasio BOPO menurun ≥ -3% sd < -5%, Rasio ROA meningkat ≥ 3% sd < 5%, Rasio ROE meningkat ≥ 5% sd < 10%	
3	Pertumbuhan Rasio NIM ≥ 0% sd < 3%, Rasio BOPO menurun ≥ 0% sd < -3%, Rasio ROA sama atau meningkat ≥ 0% sd < 3%, Rasio ROE sama atau meningkat ≥ 0% sd <5%	
4	Rasio NIM menurun ≤ -5%, Rasio BOPO meningkat ≥ 5% sd < 0%, Rasio ROA menurun ≤ -5%, Rasio ROE menurun < -10%	
5	Rasio NIM menurun > -5%, Rasio BOPO meningkat ≥ 5%, Rasio ROA menurun > -5%, Rasio ROE menurun > -10%	

- Ringkasan Penilaian Rata-rata Pertumbuhan NIM, BOPO, ROA, dan ROE 3 tahun terakhir (per akhir periode penilaian)
- a Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Bunga terhadap Biaya Bunga (NIM) 3 tahun terakhir (per akhir periode penilaian) 4.5% dan Tingkat Kesehatan NIM per periode penilaian Sehat
 - b Rata-rata Rasio Pertumbuhan Biaya Operasional Dibanding Pendapatan Operasional (BOPO) 3 tahun terakhir (per akhir periode penilaian) 12.5% dar Tingkat Kesehatan rasio BOPO periode penilaian tergolong Tidak Sehat
 - c Rata-rata Pertumbuhan Rasio Return On Aset (ROA) 3 tahun terakhir (per akhir periode penilaian) -118.05% dan Tingkat Kesehatan ROA per periode penilaian tergolong Tidak Sehat
 - d Rata-rata Pertumbuhan Rasio Laba Kotor Terhadap Modal Sendiri (ROE) 3 tahun terakhir (per akhir periode penilaian) -40.63% dan Tingkat Kesehatan ROE tergolong Tidak Sehat

a Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Bunga terhadap Biaya Bunga (NIM) 3 tahun terakhir (per akhir periode penilaian)		
No	Penjelasan	Nilai
1	Pertumbuhan Rasio NIM ≥ 5%	2
2	Pertumbuhan Rasio NIM ≥ 3% sd < 5%	
3	Pertumbuhan Rasio NIM ≥ 0% sd < 3%	
4	Rasio NIM menurun ≤ -5%	
5	Rasio NIM menurun > -5%	

b Rata-rata Rasio Pertumbuhan Biaya Operasional Dibanding Pendapatan Operasional (BOPO) 3 tahun terakhir (per akhir periode penilaian)

No	Penjelasan	Nilai
1	Rasio BOPO menurun ≥ -5%	5
2	Rasio BOPO menurun ≥ -3% sd < -5%	
3	Rasio BOPO menurun ≥ 0% sd < -3%	
4	Rasio BOPO meningkat ≥ 5% sd < 0%	
5	Rasio BOPO meningkat ≥ 5%	

c Rata-rata Pertumbuhan Rasio Return On Aset (ROA) 3 tahun terakhir (per akhir periode penilaian)

No	Penjelasan	Nilai
1	Rasio ROA meningkat ≥ 5%	5
2	Rasio ROA meningkat ≥ 3% sd < 5%	
3	Rasio ROA sama atau meningkat ≥ 0% sd < 3%	
4	Rasio ROA menurun ≤ -5%	
5	Rasio ROA menurun > -5%	

d Rata-rata Pertumbuhan Rasio Laba Kotor Terhadap Modal Sendiri (ROE) 3 tahun terakhir (per akhir periode penilaian)

No	Penjelasan	Nilai
1	Rasio ROE meningkat ≥ 10%	5
2	Rasio ROE meningkat ≥ 5% sd < 10%	
3	Rasio ROE sama atau meningkat ≥ 0% sd <5%	
4	Rasio ROE menurun < -10%	
5	Rasio ROE menurun > -10%	

2 Rata-rata Pertumbuhan Laba Kotor (Disetahunkan) Terhadap Saldo Aset Produktif (Aset Produktif per periode penilaian) selama 3 tahun terakhir

No	Penjelasan	Nilai
1	Rasio Laba Kotor Terhadap Aset Produktif Meningkat > 3%	4
2	Rasio Laba Kotor Terhadap Aset Produktif Meningkat ≤ 2% sd ≤ 3%	
3	Rasio Laba Kotor Terhadap Aset Produktif Sama atau Meningkat ≥ 0% sd < 2%	
4	Rasio Laba Kotor Terhadap Aset Produktif Menurun ≤ -3%	
5	Rasio Laba Kotor Terhadap Aset Produktif Menurun > -3%	

C Aspek 3

Manajemen rentabilitas, ditunjukkan antara lain dengan penilaian atas kemampuan dalam mengelola rentabilitas (selama periode Penilaian)

1 Rasio ROA, BOPO, dan NIM dibandingkan dengan Peer Group (PT BPR Bank BAPAS 69, PT BPR BKK Purwodadi, dan PT BPR Gunung Rizki Pusaka Utama)

No	Penjelasan	Nilai
1	Rasio ROA BPR Lebih Tinggi > 50% dari Rasio ROA Peer Group, Rasio BOPO BPR Lebih Rendah > -20% dari Rasio BOPO Peer Group, Rasio NIM BPR Lebih Tinggi > 10% dari Rasio NIM Peer Group	4
2	Rasio ROA BPR Lebih Tinggi > 25% sd ≤ 50% dari Rasio ROA Peer Group, Rasio BOPO BPR Lebih Rendah > -10% sd ≤ -20% dari Rasio BOPO Peer Group, Rasio NIM BPR Lebih Tinggi > 5% sd ≤10% dari Rasio NIM Peer Group	
3	Rasio ROA BPR Positif Seiring Dengan Rasio ROA Peer Group dan Rasio ROA BPR tergolong Minimal Cukup Sehat , Rasio BOPO BPR Setidaknya Seiring Sama dengan Rasio BOPO Peer Group dan Rasio BOPO BPR Minimal Cukup Sehat , Rasio NIM BPR Setidaknya Seiring Sama Dengan Rasio NIM Peer Group dan Rasio NIM BPR tergolong Minimal Cukup Sehat	
4	Rasio ROA BPR Lebih Rendah > -50% dari Rasio ROA Peer Group, dan Rasio ROA tergolong Minimal Kurang Sehat, Rasio BOPO BPR Lebih Tinggi ≤ 20% dari Rasio BOPO Peer Group dan Rasio BOPO Minimal Kurang Sehat, Rasio NIM BPR Lebih Rendah ≥ -10% dari Rasio NIM Peer Group dan Rasio NIM BPR Minimal Kurang Sehat	
5	Rasio ROA BPR Lebih Rendah < -50% dari Rasio ROA Peer Group dan Rasio ROA tergolong Minimal Tidak Sehat, Rasio BOPO BPR Lebih Tinggi > 20% dari Rasio BOPO Peer Group dan Rasio BOPO Minimal Tidak Sehat, Rasio NIM BPR Lebih Rendah < -10% dari Rasio NIM Peer Group dan Rasio NIM BPR Minimal Tidak Sehat	

Ringkasan Penilaian Pertumbuhan ROA, BOPO, dan NIM BPR dibandingkan dengan Peer Group

a	Rasio ROA BPR Lebih Rendah > -50% dari Rasio ROA Peer Group, dan Rasio ROA tergolong Minimal Kurang Sehat. Hasil Penilaian Perbandingan ROA BPR terhadap Peer Group -174.45% dan Tingkat Kesehatan ROA BPR Tergolong Tidak Sehat	4
b	Rasio BOPO BPR Lebih Tinggi > 20% dari Rasio BOPO Peer Group dan Rasio BOPO Minimal Tidak Sehat. Hasil Penilaian Rasio BOPO BPR Terhadap Peer Group 48.82% dan Tingkat Kesehatan BOPO BPR Tergolong Tidak Sehat	5
c	Rasio NIM BPR Setidaknya Seiring Sama Dengan Rasio NIM Peer Group dan Rasio NIM BPR tergolong Minimal Cukup Sehat Hasil Penilaian Rasio NIM BPR Terhadap Peer Group -1.43% dan Tingkat Kesehatan NIM BPR Tergolong Sehat	3

a Rasio ROA dibandingkan ROA Peer group

No	Penjelasan	Nilai
1	Rasio ROA BPR Lebih Tinggi > 50% dari Rasio ROA Peer Group	4
2	Rasio ROA BPR Lebih Tinggi > 25% sd ≤ 50% dari Rasio ROA Peer Group	
3	Rasio ROA BPR Positif Seiring Dengan Rasio ROA Peer Group dan Rasio ROA BPR tergolong Minimal Cukup Sehat	
4	Rasio ROA BPR Lebih Rendah > -50% dari Rasio ROA Peer Group, dan Rasio ROA tergolong Minimal Kurang Sehat	
5	Rasio ROA BPR Lebih Rendah < -50% dari Rasio ROA Peer Group dan Rasio ROA tergolong Minimal Tidak Sehat	

b Rasio BOPO dibandingkan BOPO Peer group

No	Penjelasan	Nilai
1	Rasio BOPO BPR Lebih Rendah > -20% dari Rasio BOPO Peer Group	5
2	Rasio BOPO BPR Lebih Rendah > -10% sd ≤ -20% dari Rasio BOPO Peer Group	
3	Rasio BOPO BPR Setidaknya Seiring Sama dengan Rasio BOPO Peer Group dan Rasio BOPO BPR Minimal Cukup Sehat	
4	Rasio BOPO BPR Lebih Tinggi ≤ 20% dari Rasio BOPO Peer Group dan Rasio BOPO Minimal Kurang Sehat	
5	Rasio BOPO BPR Lebih Tinggi > 20% dari Rasio BOPO Peer Group dan Rasio BOPO Minimal Tidak Sehat	

c Rasio NIM dibandingkan NIM Peer group

No	Penjelasan	Nilai
1	Rasio NIM BPR Lebih Tinggi > 10% dari Rasio NIM Peer Group	3
2	Rasio NIM BPR Lebih Tinggi > 5% sd ≤10% dari Rasio NIM Peer Group	
3	Rasio NIM BPR Setidaknya Seiring Sama Dengan Rasio NIM Peer Group dan Rasio NIM BPR tergolong Minimal Cukup Sehat	
4	Rasio NIM BPR Lebih Rendah ≥ -10% dari Rasio NIM Peer Group dan Rasio NIM BPR Minimal Kurang Sehat	
5	Rasio NIM BPR Lebih Rendah < -10% dari Rasio NIM Peer Group dan Rasio NIM BPR Minimal Tidak Sehat	

2 Pencapaian Target Laba Sebelum Pajak (Gross)

No	Penjelasan	Nilai
1	Realisasi Laba melebihi target sebesar ≥ 110% RBB dan Sangat Mampu Mendukung Pertumbuhan Permodalan	3
2	Realisasi Laba sama atau melebihi target sebesar ≥ 100% sd < 110% dari RBB dan Mampu Mendukung Pertumbuhan Permodalan	
3	Realisasi Laba Tidak Melampaui target sebesar ≥ 90% sd < 100% dari RBB. Terdapat Tekanan Terhadap Kinerja Laba yang Berpotensi Menyebabkan Penurunan Laba	
4	Realisasi Laba Tidak Melampaui target sebesar ≥ 60% sd < 90% dari RBB. Terdapat Tekanan Terhadap Kinerja Laba dan Kurang Mendukung Pertumbuhan Permodalan	
5	Realisasi Laba Jauh Dibawah Target atau < 60%. Memerlukan Peningkatan Kinerja Laba Untuk Memastikan Kelangsungan Usaha	

3 Perbandingan Pertumbuhan Kredit yang Diberikan dengan Pertumbuhan Kredit yang Diberikan Peer Group, per Periode Penilaian (atau minimal dalam 6 bulan terakhir)

No	Penjelasan	Nilai
1	Realisasi Pertumbuhan Kredit (KYD) ≥ 30% dari Rata-rata Pertumbuhan Kredit Peer Group	5
2	Realisasi Pertumbuhan Kredit (KYD) ≥ 20% sd < 30% dari Rata-rata Pertumbuhan Kredit Peer Group	
3	Realisasi Pertumbuhan Kredit (KYD) ≥ 10% sd < 20% dari Rata-rata Pertumbuhan Kredit Peer Group	
4	Realisasi Pertumbuhan Kredit (KYD) Minimal Sama Dengan ≥ 0 sd < 10% dari Rata-rata Pertumbuhan Kredit Peer Group	
5	Realisasi Pertumbuhan Kredit (KYD) Negatif atau Lebih Rendah dari Rata-rata Pertumbuhan Kredit Peer Group	

BPR peer group : BPR dengan aset minimal Rp. 1 triliun di Jawa Tengah

mempertimbangkan ketersediaan data BPR peer group maka ditentukan minimal data 2 periode triwulan sebelumnya

Penilaian Aspek 1 - Sumber Rentabilitas

Hasil Penjumlahan Masing-Masing Peringkat Komponen	9
Jumlah Komponen	3
Perhitungan Rata-Rata dengan Dibagi Jumlah Komponen	3.00
Total Nilai Aspek 3 Setelah Dikali Bobot Faktor	1.20

Penilaian Aspek 2 - Kesiambungan Rentabilitas

Hasil Penjumlahan Masing-Masing Peringkat Komponen	8
Jumlah Komponen	2
Perhitungan Rata-Rata dengan Dibagi Jumlah Komponen	4.00
Total Nilai Aspek 3 Setelah Dikali Bobot Faktor	1.20

Penilaian Aspek 3 - Manajemen Rentabilitas

Hasil Penjumlahan Masing-Masing Peringkat Komponen	12
Jumlah Komponen	3
Perhitungan Rata-Rata dengan Dibagi Jumlah Komponen	4.00
Total Nilai Aspek 3 Setelah Dikali Bobot Faktor	1.20

Kertas Kerja Penilaian Peringkat Faktor Rentabilitas

Periode	Juni	2025
---------	------	------

Rekap Kualitatif Rentabilitas

No.	Penjelasan	Nilai
1	Sumber Pendapatan Utama (Core Earning) dibandingkan Non Pendatapan Utama (Non Core Earning)	
	Sumber pendapatan utama dari Core Earnings Dominan yaitu > 80% sd ≤ 90% yaitu 81.53%	2
2	Kualitas Core Earning (NPL Gross)	
	Pendukung Core Earnings Tidak Stabil NPL Gross > 20% yaitu 26.84%	5
3	Sumber Utama Pendapatan atau Core Earnings dari Bunga Kontraktual Kredit terhadap Total Core Earnings Per Periode Penilaian	
	Sumber Pendapatan Bunga Kontraktual Kredit di Core Earnings Dominan mencapai > 80% sd ≤90% yaitu 84.65%	2
4	Rata-rata Pertumbuhan NIM, BOPO, ROA, dan ROE 3 tahun terakhir (per periode penilaian)	
	Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Bunga terhadap Biaya Bunga (NIM) 3 tahun terakhir (per akhir periode penilaian) 4.5% dan Tingkat Kesehatan NIM per periode penilaian Sehat	2
	Rata-rata Rasio Pertumbuhan Biaya Operasional Dibanding Pendapatan Operasional (BOPO) 3 tahun terakhir (per akhir periode penilaian) 12.5% dan Tingkat Kesehatan rasio BOPO periode penilaian tergolong Tidak Sehat	5
	Rata-rata Pertumbuhan Rasio Return On Aset (ROA) 3 tahun terakhir (per akhir periode penilaian) -118.05% dan Tingkat Kesehatan ROA per periode penilaian tergolong Tidak Sehat	5
	Rata-rata Pertumbuhan Rasio Laba Kotor Terhadap Modal Sendiri (ROE) 3 tahun terakhir (per akhir periode penilaian) -40.63% dan Tingkat Kesehatan ROE tergolong Tidak Sehat	5
5	Rata-rata Pertumbuhan Laba Kotor (Disetahunkan) Terhadap Saldo Aset Produktif (Aset Produktif per periode penilaian) selama 3 tahun terakhir	
	Rasio Laba Kotor Terhadap Aset Produktif Menurun ≤ -3% yaitu -1.38%	4
6	Rasio ROA, BOPO, dan NIM dibandingkan dengan Peer Group (PT BPR Bank BAPAS 69, PT BPR BKK Purwodadi, dan PT BPR Gunung Rizki Pusaka Utama)	
	Rasio ROA BPR Lebih Rendah > -50% dari Rasio ROA Peer Group, dan Rasio ROA tergolong Minimal Kurang Sehat. Hasil Penilaian Perbandingan ROA BPR terhadap Peer Group -174.45% dan Tingkat Kesehatan ROA BPR Tergolong Tidak Sehat	4
	Rasio BOPO BPR Lebih Tinggi > 20% dari Rasio BOPO Peer Group dan Rasio BOPO Minimal Tidak Sehat. Hasil Penilaian Rasio BOPO BPR Terhadap Peer Group 48.82% dan Tingkat Kesehatan BOPO BPR Tergolong Tidak Sehat	5
	Rasio NIM BPR Setidaknya Seiring Sama Dengan Rasio NIM Peer Group dan Rasio NIM BPR tergolong Minimal Cukup Sehat Hasil Penilaian Rasio NIM BPR Terhadap Peer Group -1.43% dan Tingkat Kesehatan NIM BPR Tergolong Sehat	3
7	Pencapaian Target Laba Sebelum Pajak (Gross)	
	Realisasi Laba Tidak Melampaui target sebesar ≥ 90% sd < 100% dari RBB. Terdapat Tekanan Terhadap Kinerja Laba yang Berpotensi Menyebabkan Penurunan Laba yaitu 93.79%	3
8	Perbandingan Pertumbuhan Kredit yang Diberikan dengan Pertumbuhan Kredit yang Diberikan Peer Group, per Periode Penilaian (atau minimal dalam 6 bulan terakhir)	
	Realisasi Pertumbuhan Kredit (KYD) Negatif atau Lebih Rendah dari Rata-rata Pertumbuhan Kredit Peer Group yaitu -2.62%	5
NILAI ASPEK KUANTITATIF SETELAH DIBOBOT		2.40
NILAI ASPEK KUALITATIF SETELAH DIBOBOT		1.44
TOTAL NILAI SELURUH ASPEK RENTABILITAS SETELAH DIBOBOT		3.84
PERINGKAT FAKTOR RENTABILITAS		4
		Kurang Memadai

Kertas Kerja Penilaian Aspek Kuantitatif Permodalan

PT BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Periode	Juni	2025
---------	------	------

	Komponen	Penilaian Posisi Periode Desember 2024		Penilaian Posisi Periode Juni 2025	
		Rasio	Peringkat	Rasio	Peringkat
a	Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	43.14%	Peringkat 1	43.34%	Peringkat 1
b	Rasio Modal Inti terhadap Aset Produktif Bermasalah Net (MIAPB)	161.77%	Peringkat 3	91.89%	Peringkat 5
	Hasil Penjumlahan Masing-masing Komponen		4		6
	Perhitungan Rata-rata		2.00		3.00

Kertas Kerja Penilaian Aspek Kualitatif Permodalan

Periode	Juni	2025
---------	------	------

1 Aspek 1
Manuemen Permodalan

1 Rata-rata Pengelolaan ATMR Selama Periode Penilaian (Saldo KYD Neto dengan Bobot 100% terhadap Aset Tertimbang)

No	Penjelasan	Nilai
1	Saldo Kredit Bobot Risiko di ATMR 100% netto Terhadap ATMR ≤ 10%	5
2	Saldo Kredit Bobot Risiko di ATMR 100% netto Terhadap ATMR ≤ 15%	
3	Saldo Kredit Bobot Risiko di ATMR 100% netto Terhadap ATMR ≤ 20%	
4	Saldo Kredit Bobot Risiko di ATMR 100% netto Terhadap ATMR ≤ 25%	
5	Saldo Kredit Bobot Risiko di ATMR 100% netto Terhadap ATMR > 25%	

2 Pertumbuhan KPMM selama periode penilaian

No	Penjelasan	Nilai
1	Rasio Permodalan (KPMM) Selama Periode Penilaian Pertumbuhan Singnifikan > 20%	3
2	Rasio Permodalan (KPMM) Selama Periode Penilaian Pertumbuhan≤ 20%	
3	Rasio Permodalan (KPMM) Selama Periode Penilaian Pertumbuhan Stabil ≤ 10%	
4	Pertumbuhan Rasio Permodalan (KPMM) BPR Menurun ≥ -20% atau Pertumbuhan Negatif dan Rasio Permodalan Sehat	
5	Pertumbuhan Rasio Permodalan (KPMM) BPR Menurun < -20% atau Pertumbuhan Negatif dan Rasio Permodalan Tidak Sehat	

3 Rata-rata Rasio Aset Kualitas Tinggi Terhadap ATMR

No	Penjelasan	Nilai
1	Rasio Kredit Kualitas Tinggi terhadap ATMR > 90%	2
2	Rasio Kredit Kualitas Tinggi terhadap ATMR > 80%	
3	Rasio Kredit Kualitas Tinggi terhadap ATMR > 70%	
4	Rasio Kredit Kualitas Tinggi terhadap ATMR ≥ 60%	
5	Rasio Kredit Kualitas Tinggi terhadap ATMR < 60%	

2 Aspek 2
Kemampuan Akses Permodalan

1 Akses Permodalan

No	Penjelasan	Nilai
1	Akses sumber pendanaan permodalan BPR Sangat Memadai, Terdapat Paling Sedikit 2 (Dua) Sumber Pendanaan yang Sewaktu-waktu Dapat Ditarik	2
2	Akses sumber pendanaan permodalan BPR Sangat Memadai, Terdapat 2 (dua) Sumber Pendanaan yang Dapat Ditarik Dalam Kurun Waktu Pendek Sampai Dengan 3 (tiga) bulan	
3	Akses sumber pendanaan permodalan BPR Memadai, Terdapat 1 (satu) Sumber Pendanaan yang Dapat Ditarik Dalam Kurung Jangka Waktu Sampai dengan 6 (enam) bulan	
4	Akses sumber pendanaan permodalan BPR Kurang Memadai, Terdapat 1 (satu) Sumber Pendanaan yang Tidak Dapat Sewaktu-waktu Dapat Ditarik atau Sampai dengan 1 (satu) tahun	
5	Akses sumber pendanaan permodalan BPR Kurang Memadai, Tidak Terdapat Sumber Pendanaan yang Dapat Ditarik	

2 Dukungan Permodalan

No	Penjelasan	Nilai
1	Terdapat Tambahan Setoran Modal dari Pemegang Saham Setiap Tahun > 0.3% dari Modal BPR	1
2	Terdapat Tambahan Setoran Modal dari Pemegang Saham Setiap Tahun > 0.2% dari Modal BPR	
3	Terdapat Tambahan Setoran Modal dari Pemegang Saham Setiap Tahun > 0.1% dari Modal BPR	
4	Terdapat Tambahan Setoran Modal dari Pemegang Saham Setiap Tahun > 0% dari Modal BPR	
5	Tidak ada Dukungan Permodalan dari Pemegang Saham atau (0%)	

BPR peer group : BPR dengan aset minimal Rp. 1 triliun di Jawa Tengah
mempertimbangkan ketersediaan data BPR peer group maka ditentukan minimal data 2 periode triwulan sebelumnya

Penilaian Aspek 1 - Manuemen Permodalan

Hasil Penjumlahan Masing-Masing Peringkat Komponen	10
Jumlah Komponen	3
Perhitungan Rata-Rata dengan Dibagi Jumlah Komponen	3.33
Total Nilai Aspek 3 Setelah Dikali Bobot Faktor	1.33

Penilaian Aspek 2 - Kemampuan Akses Permodalan

Hasil Penjumlahan Masing-Masing Peringkat Komponen	3
Jumlah Komponen	2
Perhitungan Rata-Rata dengan Dibagi Jumlah Komponen	1.50
rTotal Nilai Aspek 3 Setelah Dikali Bobot Faktor	0.90

Kertas Kerja Penilaian Peringkat Faktor Permodalan

Periode Juni 2025		
Rekap Kualitatif Permodalan		
No.	Penjelasan	Nilai
1	Rata-rata Pengelolaan ATMR Selama Periode Penilaian (Saldo KYD Neto dengan Bobot 100% terhadap Aset Tertimbang)	
	Saldo Kredit Bobot Risiko di ATMR 100% netto Terhadap ATMR > 25% yaitu 30.68%	5
2	Pertumbuhan KPMM selama periode penilaian	
	Rasio Permodalan (KPMM) Selama Periode Penilaian Pertumbuhan Stabil ≤ 10% yaitu 0.48%	3
3	Rata-rata Rasio Aset Kualitas Tinggi Terhadap ATMR	
	Rasio Kredit Kualitas Tinggi terhadap ATMR > 80% yaitu 89.91%	2
4	Akses Permodalan	
	Akses sumber pendanaan permodalan BPR Sangat Memadai, Terdapat 2 (dua) Sumber Pendanaan yang Dapat Ditarik Dalam Kurun Waktu Pendek Sampai Dengan 3 (tiga) bulan	2
5	Dukungan Permodalan	
	Terdapat Tambahan Setoran Modal dari Pemegang Saham Setiap Tahun > 0.3% dari Modal BPR dengan rata-rata 2.27%	1
NILAI ASPEK KUANTITATIF SETELAH DIBOBOT		1.80
NILAI ASPEK KUALITATIF SETELAH DIBOBOT		0.89
TOTAL NILAI SELURUH ASPEK PERMODALAN SETELAH DIBOBOT		2.69
PERINGKAT FAKTOR PERMODALAN		3
		Cukup Memadai



PT BPR BKK JATENG
(Perseroda)

LAPORAN TATA KELOLA



PT BPR BKK JATENG (Perseroda)

Jl. Tanjung No.11A Semarang 50132 – Telp (024) 86403887, 86405241, 86042409
www.bkkjateng.co.id | Email: kanpus@bkkjateng.co.id

**LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA**

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

**Laporan Penerapan Tata Kelola
PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Semester 1 Tahun 2025**

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat diundangkan tanggal 1 Juli 2024.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat ditetapkan tanggal 18 Oktober 2024.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah ditetapkan tanggal 26 Mei 2025.

Laporan ini disusun sebagai gambaran umum pelaksanaan Tata Kelola PT BPR BKK Jateng (Perseroda) pada Semester I Tahun 2025. Tujuan dari penerapan Tata Kelola adalah untuk memastikan agar struktur, proses, dan mekanisme pengelolaan BPR dilakukan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, menciptakan serta mengoptimalkan nilai perusahaan secara berkelanjutan, serta berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, nilai etika, prinsip, dan praktik terbaik (*best practices*) dalam industri Bank Perekonomian Rakyat.

Semarang, 30 Juli 2025

PT BPR BKK Jateng (Perseroda)



Eddy S. Bramizanto, SE., MM.
Komisaris Utama



H. Koesnanto, SH., M.Kn
Direktur Utama



PT BPR BKK JATENG (Perseroda)

Jl. Tanjung No.11A Semarang 50132 – Telp (024) 86403887, 86405241, 86042409
www.bkkjateng.co.id | Email: kanpus@bkkjateng.co.id

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENIALAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR : PT BPR BKK Jateng (Perseroda)
Alamat : Jl. Tanjung No.11 A Semarang 50132
Nomor Telepon : (024) 86403887, 86405241, 86042409
Posisi Laporan : 30 Juni 2025
Modal Inti : Rp404.152.833.744,00
Total Aset : Rp2.328.631.007.761,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR BKK Jateng (Perseroda) pada Semester I Tahun 2025, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai dengan Peringkat Nilai 2.
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut:

FAKTOR		NILAI KOMPOSIT
Faktor 1	Aspek Pemegang Saham	2
Faktor 2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi	2
Faktor 3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris	2
Faktor 4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	2
Faktor 5	Penanganan Benturan Kepentingan	2
Faktor 6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	3
Faktor 7	Penerapan Fungsi Audit Intern	2
Faktor 8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2
Faktor 9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	3
Faktor 10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2
Faktor 11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	2
Faktor 12	Rencana Bisnis BPR	3
NILAI KOMPOSIT		2
PERINGKAT KOMPOSIT		2



B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 30 Juni 2025 sebagai berikut:

1. Aspek Pemegang Saham

Struktur kepemilikan Bank telah memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pemegang saham menunjukkan komitmen dalam mendukung pencapaian visi, misi, serta tujuan jangka panjang Bank melalui partisipasi aktif dalam RUPS dan evaluasi berkala terhadap Rencana Bisnis Bank (RBB). Upaya pemenuhan ekuitas dan pencadangan terus dioptimalkan agar selaras dengan target RBB yang telah ditetapkan. Selama periode pelaporan, tidak terdapat konflik kepentingan yang berdampak pada operasional maupun stabilitas Bank.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi

Komposisi Direksi saat ini terdiri dari Direktur Utama dan Direktur Operasional, yang telah menjalankan peran operasional dan pengawasan secara umum dengan baik. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan kebutuhan organisasi, masih terdapat kekosongan pada posisi Direktur Pemasaran dan Direktur Kepatuhan. Pengisian posisi tersebut dipandang penting untuk memperkuat efektivitas pengelolaan fungsi strategis, khususnya dalam pengembangan bisnis dan penguatan fungsi kepatuhan. Meskipun operasional Bank tetap berjalan lancar, pemenuhan struktur Direksi secara lengkap diharapkan dapat lebih mengoptimalkan pelaksanaan tata kelola, eksekusi strategi dan fungsi pengawasan yang akuntabel dan berkelanjutan.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Struktur dan komposisi Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan regulator, didukung oleh keahlian yang relevan di bidang keuangan, manajemen risiko, dan tata kelola, serta dilengkapi dengan pedoman kerja yang jelas dan terdokumentasi. Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan secara aktif melalui rapat rutin, pemberian rekomendasi, serta komunikasi formal dengan Direksi. Efektivitas pengawasan masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam aspek monitoring atas tindak lanjut rekomendasi, dokumentasi hasil rapat, serta peran aktif dalam pengambilan keputusan strategis. Perbaikan pada area tersebut menjadi penting untuk memperkuat fungsi pengawasan berjalan optimal dan selaras dengan prinsip tata kelola yang baik.



4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Struktur tata kelola komite telah memenuhi ketentuan regulator, ditunjukkan dengan terbentuknya Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Manajemen Risiko, yang seluruhnya didukung oleh anggota yang kompeten serta dilengkapi piagam kerja. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris maupun Direksi telah menjalankan fungsinya secara aktif melalui pelaksanaan rapat sesuai jadwal dan menghasilkan rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh organ terkait. Beberapa rekomendasi telah memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kinerja dan tata kelola. Untuk menjaga kesinambungan peran strategis, evaluasi berkala terhadap efektivitas masing-masing komite tetap diperlukan agar kontribusinya semakin optimal dalam mendukung pencapaian tujuan Bank secara berkelanjutan.

5. Penanganan Benturan Kepentingan

Kebijakan penanganan benturan kepentingan telah disusun sesuai dengan ketentuan regulator dan didukung oleh struktur organisasi yang memfasilitasi pelaporan melalui Satuan Kerja Pengendalian atau Dewan Komisaris. Hingga posisi 30 Juni 2025, tidak terdapat kasus benturan kepentingan dalam jajaran manajemen yang berdampak terhadap kepentingan maupun keberlanjutan usaha Bank. Efektivitas implementasi kebijakan dapat diperkuat melalui penunjukan unit khusus yang mengelola aspek ini secara lebih terstruktur, serta peningkatan sosialisasi kepada seluruh karyawan guna mendorong pemahaman dan kesadaran organisasi yang lebih menyeluruh. Penguatan ini diharapkan mendukung penerapan tata kelola yang lebih baik dan berintegritas.

6. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Posisi Direktur Kepatuhan masih kosong sejak 2023 dan belum ada penunjukan formal atas fungsi kepatuhan. Fungsi kepatuhan tetap berjalan dengan dukungan Satuan Kerja Kepatuhan, kebijakan yang komprehensif, serta komitmen yang kuat dari manajemen. Tingkat kepatuhan terhadap regulasi utama tergolong baik tercermin dari tidak adanya sanksi material dari regulator. Keterbatasan SDM dan struktur organisasi yang belum optimal membatasi efektivitas pelaksanaan. Efektivitas fungsi kepatuhan berpotensi lebih optimal dengan penyempurnaan struktur organisasi, penguatan kapasitas SDM, pendekatan yang lebih berbasis risiko, serta pengembangan sistem monitoring dan pelaporan yang terintegrasi dan proaktif. Langkah-langkah ini akan semakin memperkuat peran strategis kepatuhan dalam mendukung penerapan tata kelola yang baik dan berkelanjutan.



7. Penerapan Fungsi Audit Intern

Fungsi audit internal telah berjalan sesuai regulasi dengan pembentukan SKAI yang independen dan pelaporan langsung kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Audit dilakukan secara berkala berdasarkan program kerja tahunan, dengan auditor bersertifikat dan pendekatan risk-based audit. Laporan hasil audit disampaikan kepada OJK sebagai bentuk transparansi dan kepatuhan terhadap pengawasan eksternal. Keterlibatan SKAI dalam proses manajemen risiko dan pengawasan kebijakan strategis masih terbatas. Diperlukan penguatan peran audit internal agar lebih terintegrasi dalam pengelolaan risiko dan tata kelola strategis.

8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Audit eksternal telah dilaksanakan sesuai ketentuan dengan dukungan kebijakan tertulis, kerja sama dengan KAP, serta peran aktif Komite Audit dan Direksi. Audit dilakukan secara berkala, mencakup laporan keuangan, kepatuhan, dan pengendalian internal, serta memberikan masukan perbaikan. Masih terdapat kelemahan pada kriteria pemilihan auditor eksternal, belum ada catatan tentang evaluasi berkala atas kinerja KAP atau rotasi KAP untuk menjaga independensi dalam jangka panjang. Diperlukan penguatan proses seleksi, evaluasi, dan pengawasan atas tindak lanjut rekomendasi untuk menjaga independensi dan efektivitas audit eksternal.

9. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud

Bank telah memiliki struktur dan fungsi manajemen risiko, kepatuhan, APU PPT dan P3SPM, dan Anti Fraud sesuai ketentuan, serta didukung kebijakan internal yang telah disahkan. Pelaksanaan manajemen risiko dan strategi anti fraud cukup memadai, dengan dukungan Manajemen dan pelatihan rutin untuk meningkatkan kesadaran karyawan. Tim Pengendali Fraud (TPF) telah dibentuk sesuai POJK 12 Tahun 2024 dan aktif menjalankan fungsi pencegahan, deteksi, dan respons atas kejadian fraud. Meski masih terdapat kasus fraud, Bank telah menerapkan proses identifikasi, mitigasi, serta edukasi berkelanjutan melalui pelatihan dan media internal. Pencegahan perlu terus diperkuat melalui pemantauan aktif dan evaluasi berkala atas efektivitas strategi yang diterapkan.



10. Batas Maksimum Pemberian Kredit

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai BMPK, serta menerapkannya sesuai POJK 23 Tahun 2022 dan POJK 1 Tahun 2024. Persetujuan kredit telah mengikuti prinsip kehati-hatian dan terdokumentasi dengan baik. Monitoring eksposur kredit, khususnya terhadap kelompok usaha afiliasi, belum optimal. Pelaporan rutin atas potensi pelanggaran BMPK kepada manajemen puncak juga belum tersedia. Meskipun tidak terdapat pelanggaran BMPK, masih terdapat risiko konsentrasi portofolio kredit. Evaluasi terhadap dampak kebijakan BMPK terhadap strategi bisnis perlu ditingkatkan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih terukur.

11. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

Tata kelola organisasi menunjukkan beberapa aspek positif, bank telah memiliki kebijakan terkait pelaporan keuangan dan pengelolaan Teknologi Informasi, serta memperhatikan prinsip manajemen risiko. Struktur organisasi mendukung tata kelola TI, dan Direksi menunjukkan komitmen terhadap transparansi serta pengembangan teknologi. Masih terdapat kekosongan jabatan Kepala Bidang TI dan jaringan, serta keterbatasan SDM yang berdampak pada efektivitas pengelolaan data dan sistem. Pembagian tugas antara unit TI dan keuangan belum optimal, dokumentasi dan uji kerentanan belum rutin, serta masih terdapat denda akibat keterlambatan pelaporan. Diperlukan audit TI yang lebih komprehensif, peningkatan integrasi sistem yang lebih kuat, serta pengukuran kinerja yang terukur untuk meningkatkan akurasi dan akuntabilitas pelaporan.

12. Rencana Bisnis BPR

Rencana Bisnis BPR telah disusun dengan mengacu pada visi, misi, dan tujuan strategis bank, didukung oleh struktur organisasi yang relevan. Rencana bisnis, termasuk perubahan di dalamnya, telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini mencerminkan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban regulasi dan menunjukkan adanya komitmen dalam penerapan tata kelola yang baik. Untuk mencapai tingkat penilaian yang lebih tinggi, diperlukan penguatan pada aspek kualitas penyusunan dan kejelasan tindak lanjut dari rencana bisnis yang disampaikan, agar tidak hanya memenuhi aspek ketepatan waktu, tetapi juga mencerminkan kesiapan strategis dalam menghadapi tantangan usaha.



PT BPR BKK JATENG (Perseroda)

Jl. Tanjung No.11A Semarang 50132 – Telp (024) 86403887, 86405241, 86042409
www.bkkjateng.co.id | Email: kanpus@bkkjateng.co.id

C. Kesimpulan Umum

Penerapan Tata Kelola oleh PT BPR BKK Jateng (Perseroda) pada Semester I Tahun 2025 dinilai baik, dengan pemenuhan yang memadai terhadap prinsip-prinsip dasar tata kelola. Beberapa kelemahan struktural, seperti kekosongan pada posisi Direksi serta penguatan fungsi pengawasan internal dan kepatuhan, perlu segera ditindaklanjuti. Bank menyadari perlunya perbaikan dan komitmen berkelanjutan untuk mengimplementasikan tata kelola secara menyeluruh dalam setiap proses bisnis dan operasional, guna memastikan keberlangsungan usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Semarang, 30 Juli 2025



Eddy S. Bramiyanto, SE., MM.

Komisaris Utama



H. Koesnanto, SH., M.Kn

Direktur Utama



PT BPR BKK JATENG (PERSERODA)

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

SEMESTER 1-2025





DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
FAKTOR 1 - ASPEK PEMEGANG SAHAM	7
FAKTOR 2 - PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI.....	10
FAKTOR 3 - PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS	16
FAKTOR 4 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	22
FAKTOR 5 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	25
FAKTOR 6 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN.....	27
FAKTOR 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	30
FAKTOR 8 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN	33
FAKTOR 9 - PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD ...	35
FAKTOR 10 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT	42
FAKTOR 11 - INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI	45
FAKTOR 12 - RENCANA BISNIS BPR.....	50
KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA	56
LAPORAN POKOK PELAKSANAAN TUGAS ANGGOTA DIREKSI YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN	58
A. INFORMASI UMUM BPR	60
1. Struktur Organisasi	60
2. Formasi Sumber Daya Manusia.....	61
a. Anggota Direksi	61
b. Anggota Dewan Komisaris	61
c. Komite Dewan Komisaris.....	61
d. Susunan Pejabat Eksekutif	62
e. Pendidikan dan Jumlah Sumber Daya Manusia	63
f. Jaringan Kantor beserta Formasi Sumber Daya Manusia	63
g. Formasi Jabatan Kosong.....	64
h. Pegawai Berhenti di Semester 1 tahun 2025	65
3. Ketentuan Internal tahun 2025	65
a. Perkreditan.....	65
b. Penyelesaian Kredit Bermasalah.....	66



c. Dana.....	67
d. Operasional	67
e. Sumber Daya Manusia dan Umum	69
f. Kepatuhan.....	71
g. Manajemen Risiko.....	72
h. Audit Internal	72
i. Sekretariat & Hukum	73
B. PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN.....	73
1. Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan.....	73
2. Penerapan Fungsi Kepatuhan.....	79
a. Pengkinian Ketentuan Internal pada Semester 1 tahun 2025.....	79
b. Penyusunan Ketentuan Baru pada Semester 1 tahun 2025	80
c. Ketentuan Internal yang Masih Dalam Proses	81
3. Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan	82
4. Pelaksanaan pemenuhan komitmen terhadap Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain seperti BI, PPATK, dan LPS.....	82
a. Pelaksanaan Komitmen Rutin kepada OJK dan Regulator lain.....	82
b. Pemenuhan Komitmen Hasil Pemeriksaan OJK tahun 2024	84
C. PENUTUP.....	86



BAB I

PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan *corporate governance*, PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan *corporate governance* sebagai berikut:

1. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.
2. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.8 tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnahan Massal di Sektor Jasa Keuangan.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23 tahun 2022 tanggal 23 November 2022 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perbankan Rakyat diundangkan tanggal 11 Januari 2024;



10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah diundangkan tanggal 30 April 2024;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat diundangkan tanggal 1 Juli 2024;
12. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat ditetapkan tanggal 18 Oktober 2024;
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah;
14. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/SEOJK.03/2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat;
15. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah tanggal 26 Mei 2025;
16. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.9/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah tanggal 26 Mei 2025.
17. Peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan terkini.

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Untuk pencapaian penyelenggaraan kegiatan usaha yang memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan terkait menciptakan dan mengoptimalkan nilai perusahaan secara berkelanjutan, serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, nilai etika, prinsip, dan praktik yang berlaku.

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR BKK JATENG (PERSERODA)

1. Transparency (Keterbukaan)

Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku. Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi, serta mudah diakses pemangku kepentingan. Kebijakan BPR harus tertulis dan dikomunikasikan kepada *stakeholders* yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

2. Accountability (Akuntabilitas)

Kejelasan fungsi & pelaksanaan pertanggungjawaban atas sasaran usaha dan strategi BPR.

3. Responsibility (Tanggung Jawab)

Kesesuaian pengelolaan BPR dengan ketentuan perundangan dan nilai etika,



standar, prinsip, dan praktik.

4. Independency (Independensi)

Keadaan BPR dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

5. Fairness (Kewajaran)

BPR memperhatikan kesetaraan/keseimbangan/keadilan dalam memenuhi hak pemangku kepentingan.

E. PENERAPAN TATA KELOLA

1. Mengoptimalkan peran GRC (Governance, Risk Management, Compliance).

PT BPR BKK Jateng (Perseroda) telah memiliki Satuan Kerja baik di Kepatuhan (SKK), Manajemen Risiko (SKMR), dan Audit Internal (SKAI) yang ketiganya menjadi penjaga gawang agar penerapan tata Kelola Perusahaan berjalan sesuai aturan yang berlaku.

2. Monitoring regulasi, sosialisasi anti-fraud, dan implementasi WBS (whistleblowing)

3. Menerapkan *self assessment* untuk mendeteksi fraud sejak dini.

4. Menerapkan budaya sadar risiko dan patuh pada ketentuan yang berlaku dengan cara standarisasi SPO.

F. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) telah berkomitmen untuk melakukan internalisasi prinsip-prinsip tata kelola kedalam kebijakan - kebijakan operasional yang berlaku. PT BPR BKK Jateng (Perseroda) menyadari internalisasi prinsip-prinsip tata kelola yang lebih luas secara berkelanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi tata kelola di setiap aspek kegiatan PT BPR BKK Jateng (Perseroda).



BAB II

KERTAS KERJA PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

FAKTOR 1 - ASPEK PEMEGANG SAHAM

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Seluruh pemegang saham memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan, tidak terdapat benturan kepentingan, dan struktur kepemilikan jelas, stabil, serta transparan. Tidak ada intervensi dalam pengelolaan bank.
2	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Seluruh kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS telah tercantum secara lengkap dalam anggaran dasar, selaras dengan peraturan perundang-undangan, dan dilaksanakan secara konsisten serta terdokumentasi dengan baik.
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
3	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Pemegang saham secara aktif dan berkala mengkomunikasikan visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris, didukung dokumen atau forum resmi yang terakhir disampaikan pada pertemuan Desk Usulan Perubahan RBB tahun 2025 pada 25 Juni 2025.
4	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Laporan pengawasan Dewan Komisaris telah disampaikan secara berkala setiap semesteran kepada Pemegang Saham dan diperhatikan oleh pemegang saham, namun belum selalu ditindaklanjuti secara strategis.
5	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Pemegang saham memberikan dukungan dalam pengembangan bisnis Bank melalui pemenuhan komitmen penguatan permodalan dan pemenuhan infrastuktur sesuai dengan rencana strategis, namun



		belum menyentuh aspek pengembangan lainnya.
6	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pemegang saham secara konsisten menjamin independensi pengelolaan BPR, tidak terjadi benturan kepentingan, tidak melakukan intervensi, pengambilan keuntungan pribadi, atau penyalahgunaan kekuasaan dalam pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian Direksi/Komisaris.
7	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Masukan dari Komisaris dan pemegang saham dipertimbangkan, telah terdokumentasi namun belum semuanya terakomodasi dalam keputusan akhir.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
8	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Seluruh pemegang saham, termasuk minoritas, memperoleh hak dan perlakuan yang adil, termasuk dalam aksi korporasi yang dilaksanakan secara transparan dan setara. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk mendapatkan informasi Bank secara akurat, hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan hak untuk mendapatkan pembagian keuntungan yang adil sesuai dengan kepemilikan modal
9	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Perkembangan kinerja sebagian besar (khususnya realisasi rencana permodalan Bank) sesuai rencana strategis; dukungan pemegang saham tersedia namun belum konsisten atau belum optimal.
10	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Terdapat potensi benturan atau pengaruh dalam keputusan tertentu, namun tidak berdampak negatif terhadap pengelolaan BPR.



11	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Pembagian deviden telah memperhatikan kebijakan yang sudah disusun, namun belum sepenuhnya mempertimbangkan faktor eksternal secara komprehensif.
----	---	---

KESIMPULAN			NILAI FAKTOR
a.	STRUKTUR		2
	1)	Faktor Positif	
		Pemenuhan struktur dan infrastruktur aspek Pemegang Saham telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
	2)	Faktor Negatif	
Bahwa dukungan dari Pemegang Saham baik dalam hal perencanaan modal maupun pengembangan bisnis, menjadi kunci utama dalam pengendalian dan penguatan permodalan guna mendukung rencana strategis Bank.			
b.	PROSES		
	1)	Faktor Positif	
		Efektivitas proses penerapan Tata Kelola (Governance Process) Bank sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur dari aspek Pemegang Saham yang dipersyaratkan.	
	2)	Faktor Negatif	
		Dalam pelaksanaannya, pemenuhan setoran modal oleh Pemegang Saham tidak berjalan sesuai dengan Rencana Bisnis yang telah ditetapkan oleh Bank.	
	c.	HASIL	
1)		Faktor Positif	
		Hasil penerapan Tata Kelola (Governance Outcome) Bank telah memenuhi harapan pemangku kepentingan.	
2)		Faktor Negatif	
		Kinerja keuangan khususnya pemenuhan ekuitas dan cadangan belum sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (RBB).	



**FAKTOR 2 - PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
DIREKSI**

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	Jumlah anggota Direksi belum sepenuhnya memenuhi ketentuan karena saat ini terdapat kekosongan 2 (dua) Direksi, yaitu Direktur Pemasaran dan Direktur Kepatuhan, dan tidak terdapat penunjukan formal atas fungsi kepatuhan. Bank telah mengirimkan surat kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah selaku Pemegang Saham Pengendali atas tindak lanjut pemberitahuan tertulis atas kekosongan Direksi PT BPR BKK Jateng (Perseroda)
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Direksi berdomisili di provinsi yang sama atau berbatasan langsung dengan lokasi kantor pusat BPR, sesuai ketentuan OJK.
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai ketentuan, serta hanya menjabat dalam asosiasi industri/lembaga pendidikan yang relevan dan tidak mengganggu tugas sebagai Direksi.
4	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan: 1. sesama anggota Direksi, dan/atau; 2. anggota Dewan Komisaris; dan 3. tidak memiliki saham di Bank
5	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai	Unit kerja dan pejabat telah dibentuk sesuai kebutuhan, masih terdapat kekurangan minor dalam pelimpahan wewenang atau evaluasi beban kerja.



	dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	
6	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang ditetapkan dalam Peraturan Direksi No 197/Per-Dir/XII/2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT BPR BKK Jateng (Perseoda)
7	Direksi menyusun & menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR	Kebijakan Remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai mengacu pada Peraturan Gubernur No 14 tahun 2019 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroda Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kredit Kecamatan
8	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi menggunakan tenaga ahli eksternal profesional untuk kebutuhan teknis tertentu, namun tidak untuk menggantikan fungsi struktural organ bank.
9	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	Direksi memiliki kompetensi dasar sesuai ketentuan OJK yang dibuktikan dengan beberapa sertifikasi keahlian yang dimiliki Direksi, namun pengembangan belum secara berkala.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Seluruh anggota Direksi melaksanakan tugas secara konsisten dengan itikad baik, kehati-hatian, penuh tanggung jawab, dan independen, tidak ada pelanggaran etika maupun intervensi dari pihak luar untuk kepentingan terbaik jangka panjang Bank serta pemegang saham dan pihak yang berkepentingan.



11	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Direksi telah menetapkan prinsip-prinsip tata kelola, namun belum terintegrasi dalam sistem dan proses kerja.
12	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	Sebagian besar temuan telah ditindaklanjuti, terdapat kekurangan administratif yang tidak signifikan.
13	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Informasi dan laporan disampaikan tepat waktu, namun ada minor koreksi atau perbaikan atas substansi
14	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Rapat Direksi diselenggarakan secara berkala sesuai ketentuan (minimal 1 kali per bulan), lengkap dengan risalah, agenda, dan daftar hadir.
15	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Direksi secara aktif melakukan koordinasi berkala dengan seluruh pejabat eksekutif dan Komite. Pengambilan kebijakan dan keputusan strategis dilakukan dengan dasar musyawarah mufakat, dan hasil rapat ditindaklanjuti.
16	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Tidak terdapat indikasi atau laporan penggunaan fasilitas/kewenangan Direksi untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak lain. Seluruh Direksi patuh terhadap etika dan hanya menerima hak yang ditetapkan melalui RUPS.
17	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan	Direksi aktif mengikuti program pengembangan dan mendorong



	dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	budaya pembelajaran berkelanjutan di seluruh jenjang organisasi.
18	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Komunikasi kebijakan dilakukan namun belum menyeluruh atau tidak semua pegawai mendapat akses informasi secara bersamaan.
19	Direksi mengungkapkan: a) kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b) hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR	Seluruh Direksi telah mengungkapkan dalam Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola atas kepemilikan saham dan hubungan keuangan/keluarga secara lengkap, tepat waktu, dan terdokumentasi dengan baik.
20	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab	Seluruh Direksi menunjukkan integritas tinggi, reputasi keuangan sangat baik, dan kompetensinya tercermin dalam keputusan strategis dan operasional.
21	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Evaluasi dilakukan secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku, namun pelaksanaan belum sepenuhnya merata di semua area fungsi Direksi.
22	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi melakukan evaluasi menyeluruh dan berkala atas kebijakan remunerasi, memperhatikan kinerja, risiko, dan keseimbangan internal.



C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
23	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Pertanggung jawaban dalam RUPS kepada Pemegang Saham dilaksanakan secara lengkap dan tepat waktu
24	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Sosialisasi kebijakan strategis telah dilakukan dan seluruh pegawai diwajibkan mengimplementasikan dalam tugasnya.
25	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Direksi melaksanakan tugas sesuai pedoman dan tata tertib kerja yang ditetapkan dalam Peraturan Direksi No 197/Per-Dir/XII/2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT BPR BKK Jateng (Perseoda). Keputusan umumnya bersifat kolektif, dan apabila terdapat catatan berbeda pendapat, didokumentasikan secara terbuka.
26	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Hasil Rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat, di tandatangani oleh seluruh anggota Direksi, didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi, dan didokumentasikan dengan baik
27	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .	Kinerja Bank yang diukur dari rasio keuangan terealisasi per Juni 2025 cukup baik di luar rasio yang berkaitan dengan kualitas kredit. secara umum kondisi permodalan dan likuiditas Bank berada pada posisi kuat dan sehat. Dari sisi kualitas aset, menunjukkan bahwa pembentukan CKPN sudah lebih dari cukup untuk menutup seluruh potensi kerugian atas aset bermasalah. Hal ini menunjukkan kompetensi Direksi yang baik.
28	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh laporan tata kelola disampaikan lengkap, akurat, utuh, tepat waktu, dan sesuai ketentuan OJK tanpa catatan.



	secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	
--	---	--

KESIMPULAN		NILAI FAKTOR
a. STRUKTUR		2
1)	Faktor Positif	
	Pemenuhan struktur dan infrastruktur kelengkapan Direksi telah sesuai dengan ketentuan.	
2)	Faktor Negatif	
	Komposisi jabatan Direksi belum terpenuhi sesuai ketentuan	
b. PROSES		
1)	Faktor Positif	
	Efektivitas proses penerapan Tata Kelola (Governance Process) Bank sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur aspek Direksi yang dipersyaratkan.	
2)	Faktor Negatif	
	Kekosongan 2 (dua) posisi Direktur dapat menyebabkan proses persetujuan atau koordinasi yang melibatkan Divisi dibawah Direktur terkait menjadi kurang optimal	
c. HASIL		
1)	Faktor Positif	
	Hasil penerapan Tata Kelola Bank memenuhi harapan pemangku kepentingan	
2)	Faktor Negatif	
	Kurangnya arahan strategis berdampak pada stagnasi	



**FAKTOR 3 - PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
DEWAN KOMISARIS**

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen memenuhi atau lebih dari ketentuan, serta efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan.
2	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di provinsi yang sama atau berbatasan langsung secara darat dengan kantor pusat BPR, sesuai ketentuan OJK.
3	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a) tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b) pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib yang mengikat Dewan Komisaris dan ditetapkan dalam Peraturan Direksi Nomor 193/Per-Dir/XII/2023 yang memuat tugas, tanggung jawab dan wewenang, pengaturan rapat dan pengambilan keputusan Dewan Komisaris.
4	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Komisaris tidak merangkap jabatan, kecuali pada lembaga non-profit/asosiasi sesuai ketentuan OJK. Tidak terdapat konflik kepentingan.
5	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan keluarga sampai derajat kedua, atau kepemilikan silang yang melanggar ketentuan. Semua persyaratan dipenuhi dan terdokumentasi.
6	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang	Seluruh Komisaris Independen tidak memiliki hubungan kepengurusan, keuangan, kepemilikan saham, atau hubungan keluarga dengan pihak manapun di BPR.



	dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	
7	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	Seluruh anggota memiliki kompetensi sesuai ketentuan dan secara aktif mengikuti pelatihan, workshop, atau pendidikan berkelanjutan.
8	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Dokumen tersedia dimana kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan Gubernur No 14 tahun 2019 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroda Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kredit Kecamatan
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
9	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan wewenangnya secara independen, berhati-hati, dan berintegritas, serta tidak memberikan kuasa umum yang menyebabkan pengalihan fungsi.
10	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan kebijakan strategis Bank melalui Rapat Pengurus dan surat pembinaan Dewan Komisaris yang disampaikan kepada Direksi serta melalui sarana pengawasan lainnya yang efektif. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan didokumentasikan



		dengan baik serta merupakan bagian dari dokumen pengambilan keputusan.
11	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional Bank kecuali ditetapkan lain dalam ketentuan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
12	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi dan memastikan langkah perbaikan dan target penyelesaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan komitmen Direksi sehingga kegiatan operasional Bank berjalan secara komprehensif dan tidak terdapat temuan yang berulang.
13	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Dewan Komisaris secara aktif dan berkala meminta penjelasan dari Direksi mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional, serta ditindaklanjuti dengan arahan yang konstruktif.
14	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Dewan Komisaris secara rutin menggunakan dan mengevaluasi pedoman kerja dalam pelaksanaan tugasnya, serta melakukan perbaikan apabila diperlukan.
15	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal	Setiap anggota Komisaris aktif dan menyediakan waktu secara optimal, hadir dalam rapat, pengawasan, serta kegiatan strategis lainnya sesuai pedoman kerja.



	sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	
16	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Rapat diselenggarakan secara berkala (sesuai ketentuan minimal) dengan keputusan yang diambil melalui musyawarah mufakat dan terdokumentasi dengan baik.
17	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari PT BPR BKK Jateng (Perseroda) selain remunerasi dan fasilitas yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan keputusan RUPS.
18	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan seluruh hasil pengawasan ditindaklanjuti secara sistematis dan terdokumentasi
19	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan Gubernur No 14 tahun 2019 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroda Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kredit Kecamatan
20	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris aktif melakukan evaluasi kinerja komite secara berkala dan menggunakan hasilnya untuk peningkatan efektivitas komite. Evaluasi terdokumentasi dan ditindaklanjuti
21	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi	Kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan Gubernur



	bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	No 14 tahun 2019 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroda Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kredit Kecamatan
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
22	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Tugas dilaksanakan sesuai ketentuan dan pertanggungjawaban disampaikan lengkap, tepat waktu, dan diterima tanpa catatan oleh RUPS.
23	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Semua hasil rapat didokumentasikan dalam risalah lengkap, tepat waktu, dan didistribusikan ke seluruh anggota, serta menjadi dasar monitoring keputusan.
24	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Kebijakan remunerasi disusun dengan memperhatikan kwajaran dan keadilan serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, kondisi ekonomi (antara lain inflasi), dan perbandingan remunerasi dengan peer BPR dalam industri, serta mempertimbangkan peran dan kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang selaras dengan pencapaian Bank.
25	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Seluruh laporan Dewan Komisaris kepada OJK disampaikan tepat waktu, lengkap, akurat, dan sesuai dengan ketentuan. Tidak ada catatan koreksi dari OJK.
26	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang	Dalam hal peningkatan kemampuan dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pengelolaan Bank yang diperoleh dari pelatihan dan sertifikasi, Dewan Komisaris melakukan pengawasan berdasarkan pengalaman dan keahlian yang dimiliki masing-masing anggota Dewan Komisaris.



	dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .	
--	--	--

KESIMPULAN			NILAI FAKTOR
a.	STRUKTUR		2
	1)	Faktor Positif	
		Pemenuhan struktur dan infrastruktur kelengkapan Dewan Komisaris telah sesuai ketentuan.	
	2)	Faktor Negatif	
		Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan struktur dan infrastruktur dari aspek Dewan Komisaris.	
b.	PROSES		
	1)	Faktor Positif	
		Efektivitas proses penerapan Tata Kelola (Governance Process) Bank sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur aspek Dewan Komisaris yang dipersyaratkan.	
	2)	Faktor Negatif	
		Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan Tata Kelola dari aspek Dewan Komisaris.	
c.	HASIL		
	1)	Faktor Positif	
		Hasil penerapan tata Kelola (Governance Outcome) Bank telah memenuhi harapan pemangku kepentingan.	
	2)	Faktor Negatif	
		Tidak terdapat faktor negatif hasil penerapan Tata Kelola dari aspek Dewan Komisaris.	



FAKTOR 4 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Komite telah dibentuk dan berfungsi sesuai ketentuan, namun terdapat kekurangan minor, seperti keterwakilan independen yang belum optimal, meskipun tidak memengaruhi efektivitas.
2	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Pedoman tersedia untuk seluruh komite dan sesuai ketentuan, namun belum seluruhnya diperbarui atau belum digunakan secara optimal dalam praktik.
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
3	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	Komite melaksanakan tugasnya dengan baik dan memberi rekomendasi, namun belum seluruh rekomendasi ditindaklanjuti atau belum terdokumentasi dengan lengkap.
4	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	Komite Audit secara aktif mengevaluasi pelaksanaan audit intern, memberi rekomendasi, dan memonitor tindak lanjut secara sistematis, didukung notulen dan laporan evaluasi.
5	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	Evaluasi dilakukan secara rutin, namun tidak seluruh aspek risiko dikaji mendalam atau belum sepenuhnya ditindaklanjuti.
6	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan	Komite secara aktif mengevaluasi kebijakan remunerasi dan menyusun rekomendasi kepada Dewan Komisaris, serta menyusun sistem seleksi dan penggantian



	memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Direksi/Dewan Komisaris secara transparan dan terdokumentasi.
7	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Seluruh komite aktif menyelenggarakan rapat sesuai jadwal dan pedoman kerja, menghasilkan keputusan yang dijalankan oleh organ terkait dan terdokumentasi dengan baik.
8	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	Evaluasi telah dilakukan, namun belum semua komite melakukannya secara konsisten atau terdokumentasi secara lengkap.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
9	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	Rekomendasi diberikan dan dipertanggungjawabkan, namun belum seluruhnya terdokumentasi secara lengkap atau belum semua ditindaklanjuti.
10	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	Komite Dewan Komisaris (Audit, Pemantau Risiko, Remunerasi & Nominasi) secara aktif memberikan rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti Dewan Komisaris, dan mempertanggungjawabkan tugasnya dengan laporan berkala.
11	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	Risalah disusun dan dibagikan, namun terdapat ketidakteraturan dalam dokumentasi atau distribusi.



KESIMPULAN			NILAI FAKTOR
a.	STRUKTUR		2
	1)	Faktor Positif	
		Pemenuhan Struktur dan Infrastruktur kelengkapan Komite Dewan Komisaris dan Komite Direksi telah sesuai ketentuan	
	2)	Faktor Negatif	
		Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan struktur dan infrastruktur dari aspek Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris	
b.	PROSES		
	1)	Faktor Positif	
		Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur aspek kelengkapan Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris yang dipersyaratkan	
	2)	Faktor Negatif	
		Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan tata kelola dari kelengkapan Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris	
c.	HASIL		
	1)	Faktor Positif	
		Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah memenuhi harapan pemangku kepentingan	
	2)	Faktor Negatif	
		Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek kelengkapan Komite Dewan Komisaris dan Komite Direksi	



FAKTOR 5 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	Pedoman Kebijakan Benturan Kepentingan PT BPR BKK Jateng (Perseroda) telah ditetapkan sesuai SK Direksi Nomor 053/Kep-Dir/IV/2025 Tanggal 24 April 2025
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Sampai dengan posisi 30 Juni 2025, seluruh jajaran manajemen PT BPR BKK Jateng (Perseroda) telah menangani setiap keputusan yang memenuhi kondisi benturan kepentingan secara profesional dan transparan dengan mengacu kepada Kebijakan Benturan Kepentingan yang dimiliki oleh BPR
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
3	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai telah melakukan upaya menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan yang berpotensi merugikan BPR.
4	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	Sampai dengan posisi 30 Juni 2025, tidak terdapat Benturan Kepentingan yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR
5	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	BPR telah berhasil menangani benturan kepentingan sesuai dengan



	Pedoman Kebijakan Benturan Kepentingan yang dimiliki oleh BPR.
--	--

KESIMPULAN		NILAI FAKTOR
a. STRUKTUR	1) Faktor Positif	2
	Pemenuhan Pedoman Kebijakana dan Prosedur Benturan Kepentingan telah sesuai ketentuan	
	2) Faktor Negatif	
	Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan kebijakan dan prosedur Benturan kepentingan	
b. PROSES	1) Faktor Positif	
	Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance proses) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Benturan Kepentingan yang dipersyaratkan.	
	2) Faktor Negatif	
	Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penarapan kebijakan benturan kepentingan di BPR	
c. HASIL	1) Faktor Positif	
	Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah memenuhi harapan pemangku kepentingan	
	2) Faktor Negatif	
	Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek benturan kepentingan	



FAKTOR 6 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Terdapat kekosongan posisi Direktur Kepatuhan dimana pada tahun 2023 Direktur Kepatuhan bergeser menjadi Direktur Pemasaran, dan pada tahun 2024 Direktur Kepatuhan yang ditunjuk berdasarkan RUPS tanggal 23 Juli 2024 tidak disetujui oleh OJK sesuai surat no SR-88/KO.1323/2024 tanggal 26 Sep 2024 tentang Keputusan atas Pencalonan Direktur Kepatuhan PT BPR BKK Jateng (Perseroda). BPR telah mengirimkan laporan kepada Gubernur Jawa Tengah selaku Pemegang Saham Pengendali atas kondisi ini pada tanggal 23 April 2025
2	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif telah dibentuk sesuai ketentuan permodalan dan beroperasi secara efektif.
3	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Dokumen telah disusun dan digunakan, namun belum semua prosedur diperbarui atau diimplementasikan secara konsisten.
4	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Telah ditunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dimana Satuan Kerja Kepatuhan terdiri dari 1 orang Kepala Satuan Kerja, 2 Kepala Bidang, 2 Residen Area Kepatuhan (Area Pekalongan dan Area Semarang), 1 staf Kepatuhan, dan 2 staff APU PPT. Sedangkan cakupan pekerjaan Satuan Kerja Kepatuhan ada 4 bidang yaitu Kepatuhan, Perlindungan Konsumen, APU PPT, dan Anti Fraud.
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
5	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya	Strategi dan kebijakan telah dirumuskan dan disosialisasikan,



	budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	namun frekuensi atau jangkauan pelaksanaan pelatihan belum optimal.
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.	Direksi memantau regulasi dan telah menerapkan sebagian besar, namun masih ada area yang memerlukan penyesuaian atau perbaikan minor.
7	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Fungsi kepatuhan dijalankan sesuai prosedur, namun masih ada kekurangan dalam dokumentasi atau pengendalian lanjutan.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
8	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	Terdapat penurunan pelanggaran, namun masih ditemukan pelanggaran administratif ringan yang segera ditindaklanjuti.
9	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Laporan disampaikan tepat waktu dan sesuai substansi, namun terdapat koreksi minor atau keterlambatan tidak signifikan.

KESIMPULAN		NILAI FAKTOR
a. STRUKTUR	1)	Faktor Positif
		Pemenuhan Struktur dan Infrastruktur kelengkapan fungsi kepatuhan telah sesuai ketentuan
	2)	Faktor Negatif
		Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan struktur dan infrastruktur dari aspek fungsi kepatuhan
b. PROSES		
		3

**PT. BPR BKK JATENG (Perseroda)**

Jl. Tanjung No.11a Semarang 50132 – Telp (024) 86403887, 86405241, 86042409
www.bkkjateng.co.id | email: kanpus@bkkjateng.co.id

	1)	Faktor Positif	
		Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance proses) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur fungsi kepatuhan yang dipersyaratkan	
	2)	Faktor Negatif	
		Tidak terdapat faktor negatif dan proses penerapan fungsi kepatuhan di BPR	
c. HASIL			
	1)	Faktor Positif	
		Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah memutuhi harapan pemangku kepentingan	
	2)	Faktor Negatif	
		Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek fungsi kepatuhan	

FAKTOR 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank telah membentuk Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang dipimpin oleh Kepala SKAI dengan mendepankan independency sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan sangat baik.
2	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	SKAI telah melaksanakan fungsi audit intern dan memiliki serta mengkinikan secara berkala pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.
3	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	SKAI melakukan pelaksanaan fungsi audit secara independency yang tertuang dalam Piagam Audit versi Juni 2025 terkait dengan larangan kewenangan SKAI "melakukan perangkapan tugas dan jabatan diluar SKAI atau melaksanakan tugas operasional PT BPR BKK Jateng (Perseroda)".
4	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Sesuai SOTK dan Piagam Audit versi Juni 2025, dalam menjalankan tugasnya, SKAI bertanggungjawab langsung secara struktural kepada Direktur Utama
5	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	SDM SKAI terdiri dari 1 Kepala SKAI, 4 Koordinator SKAI, 12 Anggota SKAI dan 3 Residen Audit Internal yang diberikan Pelatihan dan Sertifikasi bidang Audit secara berkesinambungan untuk mendukung dalam pelaksanaan tugas secara efektif
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan	SKAI berpedoman terhadap SEOJK 9/2025 tentang Penerapan Fungsi Audit Internal, Piagam Audit versi Juni 2025



	ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	dan Keputusan Direksi nomor 201/Kep.Dir/XII/2025 tentang Pedoman Standar Pelaksanaan Audit
7	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	Pelaksanaan Kaji Ulang terakhir pada Desember 2022 dan akan dilakukan Kaji Ulang sekali dalam 3 tahun (Rencana Kaji Ulang di tahun 2025)
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Pelaksanaan audit dilakukan independen sesuai dengan end to end audit proses dan framework audit yang meliputi persiapan, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit dan tindak lanjut
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait	Pelatihan dan Sertifikasi bidang Audit secara berkesinambungan untuk mendukung dalam pelaksanaan tugas secara efektif
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	SKAI memberikan laporan secara periodik 3 (tiga) atas hasil status pelaksanaan program audit sesuai dengan perencanaan tahunan
11	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	SKAI menyampaikan laporan pokok pelaksanaan audit secara semesteran ke OJK sesuai dengan ketentuan

KESIMPULAN		NILAI FAKTOR 1
a. STRUKTUR	1) Faktor Positif	2
	Struktur audit internal telah dibentuk secara formal melalui pembentukan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang dipimpin oleh Kepala SKAI, dengan dukungan pedoman pelaksanaan audit yang sesuai dengan	



		ketentuan regulator. SKAI juga telah memiliki Program Audit tahunan dan secara aktif menyampaikan hasil audit kepada Direksi dan Dewan Komisaris, menunjukkan adanya peran dan pengakuan kelembagaan dalam tata kelola internal bank.	
	2)	Faktor Negatif	
		Masih terdapat keterbatasan pada pelibatan audit internal dalam proses manajemen risiko, termasuk belum optimalnya integrasi audit internal dalam pengawasan atas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan strategis.	
b.	PROSES		
	1)	Faktor Positif	
		Pelaksanaan audit internal telah mengacu pada pedoman kerja yang sesuai dengan standar profesi dan peraturan yang berlaku. Proses audit dilakukan secara berkala berdasarkan program kerja tahunan, dan auditor internal telah memiliki sertifikasi kompetensi untuk menjamin kualitas pelaksanaan audit. Hal ini mencerminkan bahwa fungsi audit telah berjalan dengan sistematis dan terstruktur sesuai dengan prinsip governance dan risk-based audit.	
	2)	Faktor Negatif	
		Meskipun proses audit berjalan, namun mekanisme pelaporan temuan dan pemantauan tindak lanjut hasil audit belum sepenuhnya didukung oleh sistem informasi yang terdokumentasi secara elektronik atau terintegrasi	
c.	HASIL		
	1)	Faktor Positif	
		Hasil audit internal telah dilaporkan secara berkala kepada Direksi dan Komisaris serta dilengkapi dengan tindak lanjut atas temuan audit. SKAI juga telah menyampaikan laporan hasil audit kepada OJK sebagai bentuk transparansi dan kepatuhan terhadap pengawasan eksternal. Hal ini menunjukkan adanya tanggung jawab dan kesinambungan dalam menindaklanjuti hasil pengawasan.	
	2)	Faktor Negatif	
		Meskipun hasil audit disampaikan, belum seluruhnya didukung dengan pengukuran efektivitas dari tindak lanjut yang telah dilaksanakan	

FAKTOR 8 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Bank telah menunjuk KAP yang memiliki izin OJK dan kompetensi sesuai sektor perbankan. KAP dipilih berdasarkan legalitas, ruang lingkup audit yang jelas, serta komunikasi berjalan baik antara KAP, manajemen, dan OJK.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	Bank telah menunjuk KAP yang memiliki izin OJK dan kompetensi sesuai sektor perbankan. KAP dipilih berdasarkan legalitas, ruang lingkup audit yang jelas, serta komunikasi berjalan baik antara KAP, manajemen, dan OJK. Penunjukan KAP dilakukan melalui proses yang transparan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris, rekomendasi komite audit yang disetujui dalam RUPS.
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Bank melaporkan hasil audit dan management letter kepada OJK secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Hasil audit cukup menggambarkan kondisi BPR dan menyajikan informasi yang akurat, namun masih terdapat area yang bisa didalami lebih lanjut.
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cakupan audit sepenuhnya sesuai atau melebihi ruang lingkup minimum yang ditetapkan OJK, mencakup seluruh aspek penting



	laporan keuangan dan pengendalian internal.
--	---

KESIMPULAN		NILAI FAKTOR
a. STRUKTUR	1) Faktor Positif	2
	Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek legal formal (izin OJK), ruang lingkup audit jelas, standar profesional terpenuhi, serta komunikasi yang baik antara KAP, manajemen, dan OJK. KAP yang ditunjuk memiliki kompetensi dan pengalaman di sektor perbankan.	
	2) Faktor Negatif	
	Belum ada catatan tentang evaluasi berkala atas kinerja KAP atau rotasi KAP untuk menjaga independensi dalam jangka panjang.	
b. PROSES	1) Faktor Positif	
	Proses penunjukan KAP dilakukan secara transparan, melalui usulan Dewan Komisaris, rekomendasi Komite Audit, dan persetujuan RUPS sesuai ketentuan.	
	2) Faktor Negatif	
	Rekomendasi Komite Audit disebutkan, namun belum terlihat dokumentasi penguatan peran aktif komite dalam memantau pelaksanaan audit.	
c. HASIL	1) Faktor Positif	
	Prosedur audit dilakukan sesuai ruang lingkup dan standar yang ditentukan oleh OJK, tanpa pengurangan material atas area audit.	
	2) Faktor Negatif	
	Belum terdapat indikator kuantitatif atas peningkatan kualitas keuangan atau tata kelola pasca-audit.	

**FAKTOR 9 - PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD**

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank telah memiliki komite di bawah Direksi (Komite Manajemen Direksi) dan komite di bawah Dewan Komisaris (Komite Pemantau Risiko) dan Satuan Kerja yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko. Organ Komite Manajemen Risiko terdapat kekosongan jabatan Direktur Kepatuhan sedangkan organ Komite Pemantau Risiko terisi lengkap dari Pihak Independen.
2	BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	Bank telah memiliki kebijakan manajemen risiko sesuai SK Direksi No 086/Per-Dir/II/2022. Prosedur Manajemen Risiko telah disusun dalam BPP Manajemen Risiko dan telah mengatur mekanisme dan tata cara penetapan limit dan toleransi risiko seperti metode penilaiannya dan mekanisme apabila terjadi pelampauan limit dan toleransi risiko. Bank telah melakukan evaluasi dan mengkinikan ketentuan Risk Statement dalam SK Direksi No 216.1/Kep-Dir/XI/2024 tentang Penetapan <i>Risk Appetite</i> dan Toleransi Risiko.
3	BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Bank telah memiliki kebijakan-kebijakan terkait dengan manajemen risiko diantaranya: BPP Manrisk, Pedoman Budaya Sadar Risiko dan Maturitas Budaya Sadar Risiko. Namun dalam pelaksanaannya, bank masih perlu mengkinikan dan menyusun beberapa ketentuan terkait.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi	Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko belum berjalan secara efektif, namun dengan adanya

	manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	kekosongan jabatan 2 (dua) Direksi yaitu Direktur Pemasaran dan Direktur Kepatuhan menjadi salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan, meskipun tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko telah berjalan efektif namun belum didukung dengan ketentuan pedoman dan pelaksanaan fungsi. Satuan Kerja Manajemen Risiko telah menjalankan fungsi dan tugas dengan memadai namun efektivitas penerapan manajemen risiko belum sepenuhnya mampu menjangkau area kerja seluruh cabang dan jaringannya.
5	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Direksi telah melaksanakan seluruh aktivitas mulai dari penyusunan, pengawasan implementasi, hingga evaluasi secara konsisten. Hal ini tercermin dengan keikutsertaan direksi dalam setiap kegiatan seperti kegiatan monev dan kegiatan-kegiatan lainnya yang terkait.
6	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan	Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi kebijakan Manajemen Risiko melalui berbagai forum dan memantau tindak lanjutnya. Dewan Komisaris juga memastikan penerapan manajemen risiko oleh Direksi, mempertimbangkan masukan Komite Pemantau Risiko, melakukan pengawasan pertanggungjawaban Direksi, memberikan arahan strategis, mengembangkan budaya sadar risiko, serta memutuskan permohonan



	kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Direksi atas transaksi yang memerlukan persetujuan.
7	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	Bank telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko yang dituangkan dalam Laporan Profil Risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015
8	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	Bank sebagian besar telah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi sesuai POJK Nomor 9 Tahun 2024, dengan penerapan yang dinilai cukup memadai serta didukung kebijakan dan prosedur yang diperlukan.
9	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank cukup memadai dalam menerapkan program APU, PPT dan PPPSPM. Bank telah memiliki kebijakan internal terkait dengan APU, PPT dan PPPSPM. sebagai bentuk implementasi yang cukup baik, sebagian besar bank telah menjalankan aspek 5 (lima) pilar APU, PPT dan PPPSPM, yaitu sbb: 1. Sebagai Bentuk Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris sudah dilakukan tercermin dalam pembahasan rapat dan menghadiri secara langsung pelatihan APU, PPT dan PPPSPM. 2. Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur namun masih perlu pengkinian dan penyusunan terkait dengan ruang lingkup APU, PPT dan PPPSPM.



		3. SKAI juga telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan ruang lingkup APU, PPT dan PPPSPM. 4. Sebagai bentuk penunjang implementasi, bank memiliki sistem informasi manajemen namun masih dalam pengembangan. 5. Bank telah menjalankan secara rutin pelatihan APU, PPT dan PPPSPM untuk pegawai. Meskipun demikian, pada penilaian FIR PPATK tahun 2024 Bank menunjukkan Kenaikan nilai dibanding capaian tahun 2023, yaitu dari Cukup Baik menjadi Baik.
10	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank memadai dalam menerapkan strategi anti fraud. Bank telah memiliki kebijakan internal terkait dengan strategi anti fraud dan juga telah membentuk Tim Pengendali Fraud (TPF) yang bertujuan untuk melakukan pencegahan, deteksi, dan merespons kecurangan (fraud) yang terjadi dalam suatu organisasi. Sebagai penunjang agar terlaksananya strategi anti fraud secara efektif, bank telah mengembangkan sistem WBS (Whistleblowing System) yang dapat diakses oleh pihak eksternal dan internal. Meskipun kasus fraud masih ada, namun bank telah melakukan serangkaian pelatihan terkait dengan anti fraud secara aktif kepada seluruh pegawai, menayangkan flayer terkait dengan anti fraud secara aktif dan secara rutin sebagai bentuk pencegahan.
11	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	Bank telah memiliki kecukupan sistem pengendalian internal dan melakukan langkah pelaksanaan audit terhadap setiap risiko di cabang



		secara berkala. Namun demikian, unit kerja belum sepenuhnya memahami dan menjalankan tugas serta tanggung jawabnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang telah ditetapkan. Pemahaman terhadap penerapan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta pemantauan dan mitigasi risiko yang efektif masih perlu dioptimalkan.
12	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Satuan Kerja Manajemen Risiko telah menyusun Laporan Profil Risiko setiap triwulanan dan menyampaikan kepada Otoritas setiap Semesteran. Penyusunan laporan profil risiko telah dibahas dalam forum rapat Komite Manajemen Risiko dan dilakukan review oleh Komite Pemantau Risiko. Meskipun demikian OJK telah menyampaikan surat tentang perbedaan penilaian profil risiko untuk penilaian Semester II 2024 terhadap jenis risiko intern operasional dan kepatuhan dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk jenis risiko kredit, operasional dan kepatuhan.
13	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	Bank telah memiliki Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk Penerapan Manajemen Risiko yang terintegrasi, namun unit kerja belum sepenuhnya menjadikan rujukan pengendalian risiko di unit kerjanya masing-masing.
14	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Direksi secara konsisten mengembangkan budaya manajemen risiko dengan melakukan pemenuhan kecukupan sumber daya manusia di fungsi pengendalian (second line dan third line). SDM Satuan Kerja Manajemen Risiko telah memiliki sertifikasi manajemen risiko dan pelatihan yang memadai.



C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	Bank telah menyusun Laporan Profil Risiko dan Profil Risiko Lain telah yang dilakukan secara tertib dan tepat waktu yang dilaporkan setiap semester didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015. Namun demikian strategi perbaikan profil untuk seluruh jenis risiko belum terimplementasi sesuai dengan target profil risiko yang ada di rencana kerja.
16	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dalam penerbitan produk dan aktivitas baru. Bank telah melakukan pelaporan kepada OJK secara tertib dan tepat waktu.
17	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	Bank menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin baik secara semesteran dan apabila terdapat kejadian fraud yang berdampak signifikan disampaikan secara insidental.

KESIMPULAN			NILAI FAKTOR
a. STRUKTUR	1)	Faktor Positif	3
		Bank saat ini telah memiliki struktur organisasi dan fungsi kepatuhan, manajemen risiko, APU PPT & P3SPM berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini.	
	2)	Faktor Negatif	
		Cakupan kebijakan bank terkait pengelolaan risiko cukup memadai, namun dalam penetapan strategi pengelolaan risiko dan implementasinya masih perlu dioptimalkan.	
b. PROSES	1)	Faktor Positif	
		Penerapan tata kelola (governance process) di bank dinilai cukup memadai, dimana bank memiliki beberapa kebijakan dan prosedur untuk acuan dalam melakukan segala aktifitas.	



	2)	Faktor Negatif	
		Diperlukan peningkatan lebih lanjut terkait dengan Sistem Informasi Manajemen sebagai salah satu faktor penunjang agar implementasi dapat berjalan secara efektif dan menyeluruh.	
c.	HASIL		
	1)	Faktor Positif	
		Penerapan tata kelola (governance outcome) Bank dinilai cukup memadai, karena sesuai terhadap regulasi. Capaian ini mencerminkan pengelolaan yang cukup efektif dalam mendukung kinerja dan keberlangsungan usaha Bank.	
	2)	Faktor Negatif	
		Masih terdapat ruang perbaikan dalam penguatan konsistensi pelaksanaan kebijakan, pengkinian prosedur internal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan mekanisme pengawasan yang lebih proaktif.	



FAKTOR 10 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No. 030/Kep-Dir/II/2023 yang terbit pada tanggal 09 Februari tahun 2023. Ketentuan tersebut telah mencakup pemberian kredit pada pihak terkait, debitur grup, monitoring, hingga penyelesaian pelampauan BMPK.
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikasikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	Kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK telah dikinikasikan sesuai SK Direksi No 030/Kep-Dir/II/2023 Tanggal 9 Februari 2023 dari ketentuan sebelumnya SK Direksi No. 73/Kep-Dir/II/2022
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Bank telah memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), serta proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau debitur besar dilakukan dengan memperhatikan ketentuan serta prinsip kehati-hatian. Penerapannya telah disesuaikan dengan POJK Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR dan Batas Maksimum Penyaluran Dana BPRS dan POJK Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset.
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar	Bank telah melaksanakan kewajiban pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara memadai terkait laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan



	dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank tidak melanggar ketentuan BMPK, baik dalam pemberian kredit kepada pihak terkait maupun debitur besar. Hal ini mencerminkan bahwa BPR telah melaksanakan prinsip kehati-hatian dan mematuhi ketentuan OJK. Meskipun demikian, belum sepenuhnya terdapat dokumentasi atau sistem pengawasan internal yang menunjukkan evaluasi dan pemantauan risiko kredit BMPK secara berkelanjutan

KESIMPULAN			NILAI FAKTOR
a.	STRUKTUR		2
	1)	Faktor Positif	
		1. BPR memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Sistem monitoring dan mekanisme penyelesaian masalah yang ada memungkinkan BPR untuk secara proaktif mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan kredit sehingga mengurangi potensi kredit bermasalah	
	2)	Faktor Negatif	
		1. Dalam pelaksanaan monitoring dan penyelesaian masalah, Bank masih bergantung pada proses manual atau belum menerapkan peran teknologi, hal tersebut melekat risiko kesalahan atau manipulasi data. 2. Keterbatasan pada Penerapan Kebijakan yang ada belum tentu mencakup seluruh dinamika pemberian kredit, terutama pada debitur besar atau grup yang kompleks, sehingga perlu evaluasi berkala.	
b.	PROSES		
	1)	Faktor Positif	
		1. Proses evaluasi dan pengkinian sistem/prosedur menunjukkan adanya budaya pengendalian internal dan tata kelola yang baik (good governance), terutama dalam pengelolaan risiko kredit besar dan kredit kepada pihak terkait.	



		2. Ketentuan atau kebijakan yang diperbarui secara reguler cenderung lebih relevan dan efektif dalam menghadapi dinamika operasional serta potensi risiko baru.	
	2)	Faktor Negatif Pelaksanaan evaluasi dan pengkinian terhadap ketentuan atau kebijakan dapat berjalan kurang optimal apabila komponen sumber daya manusia belum memiliki pemahaman secara menyeluruh dan mendalam terhadap peraturan ataupun regulasi baru dan juga terhadap perkembangan bisnis.	
c.	HASIL		
	1)	Faktor Positif Kedisiplinan dalam pelaporan mengurangi risiko penalti atau sanksi administratif dari OJK dan meningkatkan kepercayaan regulator terhadap kredibilitas BPR.	
	2)	Faktor Negatif Meskipun pelaporan sudah dilakukan dengan benar, dengan adanya isi laporan yang mencakup pelanggaran terhadap BMPK atau pemberian kredit kepada pihak terkait tetap dapat berdampak negatif terhadap persepsi pengawasan internal, baik oleh regulator maupun publik.	



FAKTOR 11 - INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	BPR telah memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan telah tersedia dan didukung sistem informasi, namun beberapa proses masih dilakukan secara manual sehingga terdapat potensi keterlambatan laporan. SDM telah mengikuti pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya.
2	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	BPR telah memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan telah tersedia dan didukung sistem informasi, namun beberapa proses masih dilakukan secara manual sehingga terdapat potensi keterlambatan laporan. SDM telah mengikuti pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya.
3	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	Pedoman Kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan keuangan bank dan Pedoman Kebijakan Penyelenggaraan sistem teknologi informasi telah ditetapkan sesuai SK Direksi Nomor 049/Kep-Dir/IV/2025 dan 003.1/Kep-Dir/I/2025



		Kebijakan telah tersedia dan disosialisasikan, namun implementasi belum sepenuhnya terintegrasi dalam SOP lintas unit dan belum dievaluasi secara periodik.
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
4	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	BPR telah memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi sesuai POJK Nomor 13/POJK.01/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan POJK. Telah terdapat kebijakan umum manajemen risiko TI dan sebagian telah diterapkan. Namun, dokumentasi dan uji keamanan sistem masih perlu diperkuat secara berkala.
5	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah disusun sesuai pasal 34 dan pasal 35 POJK Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Laporan telah disusun dan dipublikasikan sesuai ketentuan
6	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah disusun sesuai pasal 28 ayat 1 POJK Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi BPR dan BPRS. Laporan tahunan telah tersedia, memuat informasi pokok sesuai ketentuan OJK. Namun masih terdapat kekurangan informasi yang bersifat minor
7	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada	BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR sesuai POJK Nomor 22 Tahun 2023



	persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Informasi produk dan layanan disampaikan secara terbuka melalui media resmi, leaflet, dan website. Sudah sesuai ketentuan OJK dan diperbarui secara berkala.
8	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai POJK Nomor 23 tahun 2024. Beberapa laporan reguler telah disampaikan tepat waktu dan mengikuti pedoman dan ketentuan yang ditetapkan otoritas.
9	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya dan telah sesuai POJK Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank. Penyusunan laporan telah mengacu pada SAK. Dan tidak terdapat window dressing. Namun masih terdapat koreksi atas kualitas kredit atas temuan pemeriksaan
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat	Integritas Informasi keuangan dan laporan keuangan BPR memadai dan dapat dipertanggungjawabkan. Masih terdapat temuan atas penyalahgunaan keuangan oleh pemeriksaan internal
11	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu sesuai POJK Nomor 23 Tahun 2024. Laporan tahunan sudah disampaikan tepat waktu dan lengkap sesuai ketentuan OJK
12	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan



pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	telah disampaikan sesuai POJK Nomor 22 tahun 2023 secara tepat waktu. Laporan pengaduan telah tersedia dan dilaporkan tepat waktu. Namun, dokumentasi proses penyelesaian belum seluruhnya terdigitalisasi dan monitoring SLA belum otomatis.
---	---

KESIMPULAN			NILAI FAKTOR
a.	STRUKTUR		2
	1)	Faktor Positif	
	Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai telah tersedia sesuai ketentuan. Telah tersedia sistem pelaporan keuangan dan non-keuangan yang cukup lengkap, didukung sistem informasi dan SDM yang telah mengikuti pelatihan sesuai tugas. Kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem TI telah disusun dan disosialisasikan.		
	2)	Faktor Negatif	
	Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan integritas pelaporan keuangan dan sistem teknologi informasi Masih terdapat kekosongan pada jabatan kepala bidang TI dan jaringan dan kecukupan SDM bidang TI.		
b.	PROSES		
	1)	Faktor Positif	
	Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan integritas Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai yang dipersyaratkan. Transparansi informasi produk/layanan telah dipublikasikan melalui kanal resmi dan diperbarui berkala. Tidak ditemukan indikasi window dressing atau rekayasa laporan, dan penyusunan laporan sudah mengacu pada SAK.		
	2)	Faktor Negatif	
	Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi di BPR.		



		Dokumentasi dan uji kerentanan sistem TI belum dilakukan secara berkala. Dan masih terdapat denda atas penyampaian laporan kepada otoritas.	
c.	HASIL		
	1)	Faktor Positif	
		Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah memenuhi harapan pemangku kepentingan Laporan tahunan dan laporan publikasi telah disampaikan lengkap dan tepat waktu. Serta laporan pengaduan telah tersedia dan dilaporkan sesuai ketentuan OJK.	
	2)	Faktor Negatif	
		Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek pemenuhan integritas sistem pelaporan keuangan dan sistem teknologi informasi. Dokumentasi penyelesaian pengaduan belum seluruhnya terdigitalisasi dan sistem monitoring SLA belum otomatis.	



FAKTOR 12 - RENCANA BISNIS BPR

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR. Namun demikian, capaian kinerja pada beberapa indikator utama masih menunjukkan adanya ruang perbaikan. Per Juni 2025, realisasi Damas telah mencapai 99,25% dari target, dengan selisih sebesar Rp14,29 miliar. Pada sisi kredit, realisasi mencapai 98,3% atau kurang Rp28,13 miliar. Sementara itu, rasio kredit bermasalah (NPL) tercatat sebesar 26,84%, sedikit di atas target RBB sebesar 25,33%, dengan kredit non lancar yang melebihi target sebesar Rp17,5 miliar. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka pelaksanaan rencana bisnis dapat dinilai cukup memadai, meskipun ke depan tetap diperlukan penguatan strategi pelaksanaan dan pengendalian risiko agar lebih selaras dengan target yang telah ditetapkan.
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana bisnis BPR menunjukkan adanya dukungan yang cukup signifikan dari pemegang saham dalam memperkuat permodalan dan infrastruktur pendukung, termasuk aspek sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, serta kebijakan dan prosedur. Hal ini tercermin dari capaian realisasi modal inti sebesar Rp404,15 miliar atau 99,54% dari target RBB sebesar Rp406,03 miliar, yang menunjukkan komitmen pemegang saham terhadap keberlanjutan dan penguatan struktur permodalan BPR. Selain itu, adanya



		rencana penambahan modal oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp1,5 miliar dan Pemerintah Kabupaten Boyolali sebesar Rp1 miliar semakin memperkuat prospek peningkatan kapasitas modal ke depan. Dengan memperhatikan data tersebut, maka dukungan pemegang saham terhadap rencana bisnis dapat dinilai cukup memadai, meskipun ke depan diperlukan percepatan realisasi komitmen serta penguatan koordinasi agar dukungan tersebut semakin berdampak pada peningkatan kinerja dan daya saing BPR secara berkelanjutan.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	Dukungan pemegang saham terhadap rencana bisnis BPR tercermin dari upaya penguatan struktur permodalan dan pengembangan infrastruktur, seperti sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, serta pembaruan kebijakan dan prosedur. Hal ini terlihat dari realisasi modal inti yang telah mencapai 99,54% dari target RBB, menunjukkan komitmen yang nyata dalam mendukung daya tahan keuangan BPR. Di sisi lain, capaian indikator operasional seperti aset (99,85%), Dana Pihak Ketiga (99,25%), dan pendapatan (100,71%) menunjukkan bahwa dukungan tersebut mulai berdampak positif terhadap stabilitas dan pertumbuhan bisnis. Meskipun terdapat beberapa aspek yang masih memerlukan perhatian, seperti rasio NPL yang sedikit di atas target dan produksi kredit yang belum optimal, arah strategis yang ditempuh sudah menunjukkan kesinambungan antara perencanaan dan implementasi.



B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
4	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	Rencana bisnis BPR telah disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur dengan mempertimbangkan faktor internal-eksternal, prinsip kehati-hatian, dan manajemen risiko. Tercermin dari capaian modal inti sebesar 99,54%, realisasi kredit 98,30% dan dana pihak ketiga untuk tabungan 99,25% dari target RBB. Meskipun beberapa indikator seperti NIM (81,10%) dan laba sebelum pajak masih di bawah proyeksi, namun menunjukkan arah perencanaan yang cukup selaras dengan kondisi usaha. Dengan demikian, penyusunan rencana bisnis dinilai cukup memadai, meskipun pelaksanaannya perlu terus diperkuat.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR	Dewan Komisaris telah menjalankan Fungsi Pengawasan sesuai Regulasi. Adanya Mekanisme Rapat Berkala dan Evaluasi yang dijalankan oleh dewan komisaris dengan direksi dimana dalam evaluasi tersebut salah satunya adalah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR, dimana rapat minimal dilakukan 1 bulan sekali. Evaluasi atas realisasi anggaran, risiko, dan strategi dilakukan secara terukur namun, efektivitas pengawasan tersebut masih dapat ditingkatkan, mengingat masih terdapat beberapa capaian kinerja utama seperti NIM yang baru mencapai 81,10% dari target. Selain itu, belum optimalnya hasil pelaksanaan rencana bisnis di sejumlah aspek strategis mengindikasikan perlunya penguatan peran Dewan Komisaris, baik dalam pemberian arahan maupun tindak lanjut terhadap hasil evaluasi. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, pelaksanaan pengawasan dinilai memadai, namun ke depan diperlukan



		peningkatan kualitas monitoring dan pengendalian agar lebih responsif terhadap dinamika kinerja BPR.
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana bisnis, termasuk perubahan di dalamnya, telah disampaikan oleh PT BPR BKK Jateng (Perseroda) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyampaian tersebut dilakukan tepat waktu, yaitu pada 30 Juni 2025, sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Hal ini mencerminkan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban regulasi dan menunjukkan adanya komitmen dalam penerapan tata kelola yang baik. Namun, untuk mencapai tingkat penilaian yang lebih tinggi, ke depan diperlukan penguatan pada aspek kualitas penyusunan dan kejelasan tindak lanjut dari rencana bisnis yang disampaikan, agar tidak hanya memenuhi aspek ketepatan waktu, tetapi juga mencerminkan kesiapan strategis dalam menghadapi tantangan usaha.
7	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham	Secara umum, indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis BPR telah menunjukkan capaian yang cukup memadai. Aset tercapai 99,85% dari target, DPK 99,25%, dan penyaluran kredit 98,3%, menunjukkan bahwa perencanaan telah disusun secara realistis dan implementasinya berjalan cukup baik. Pada sisi pendapatan, realisasi bahkan sedikit melampaui target (100,71%), dan biaya operasional relatif terkendali di angka 99,79%. Meskipun masih terdapat deviasi seperti pada rasio NPL yang tercatat 26,84% atau sedikit di atas target RBB (25,33%), serta



		produksi kredit yang baru mencapai 75,93%, capaian ini tetap mencerminkan adanya arah implementasi yang cukup terjaga. Realisasi komitmen pemegang saham dalam mendukung struktur permodalan juga terus berjalan. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka indikator kinerja dapat dinilai cukup memadai, dengan ruang penguatan pada aspek kualitas kredit dan efisiensi penyaluran.
--	--	---

KESIMPULAN			NILAI FAKTOR
a.	STRUKTUR		3
	1)	Faktor Positif	
		Rencana bisnis Bank telah disusun sesuai ketentuan. Fungsi Bisnis dan Pemasaran berjalan dengan baik serta sesuai prosedur.	
	2)	Faktor Negatif	
	Fungsi Strategis Direktur Pemasaran belum terpenuhi dan RBB belum sepenuhnya tercapai sesuai target.		
b.	PROSES		
	1)	Faktor Positif	
		Efektivitas proses penerapan tata kelola BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastuktur penyusunan RBB dan RAKB yang dipersyaratkan.	
	2)	Faktor Negatif	
	Kurang optimalnya dalam monitoring dan evaluasi yang sistematis terhadap pencapaian rencana bisnis serta beberapa SOP masih direncanakan untuk diupdate sesuai kondisi dan kebutuhan bisnis saat ini		
c.	HASIL		
	1)	Faktor Positif	
		Kinerja BPR menunjukkan fondasi yang cukup kuat dari sisi permodalan, penghimpunan dana mendekati target, dan pengelolaan aset yg baik. Pendapatan operasional yang melebihi target serta kepatuhan terhadap regulasi juga menjadi indikator positif atas perencanaan dan implementasi bisnis. Ini mencerminkan bahwa meskipun masih ada tantangan pada sisi risiko dan profitabilitas,	



		arah dan landasan pertumbuhan perusahaan tetap kondusif untuk dikembangkan lebih lanjut.	
	2)	Faktor Negatif Secara keseluruhan tingginya rasio NPL, belum optimalnya penyaluran dan produksi kredit, serta masih terbatasnya efisiensi dan profitabilitas usaha. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan strategi manajemen risiko, peningkatan efisiensi operasional, serta pengembangan produk dan pemasaran agar ke depan kinerja lebih solid dan berkelanjutan. Dalam Capaian Kinerja antara RBB dan Realisasi di bulan Juni ini rata - rata diatas 90%.	



KESIMPULAN UMUM
HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

NAMA BPR : PT BPR BKK JATENG (PERSERODA)

POSISI : 30 Juni 2025

FAKTOR		NILAI KOMPOSIT
Faktor 1	Aspek Pemegang Saham	2
Faktor 2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi	2
Faktor 3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris	2
Faktor 4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	2
Faktor 5	Penanganan Benturan Kepentingan	2
Faktor 6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	3
Faktor 7	Penerapan Fungsi Audit Intern	2
Faktor 8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2
Faktor 9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	3
Faktor 10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2
Faktor 11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	2
Faktor 12	Rencana Bisnis BPR	3
NILAI KOMPOSIT		2
PERINGKAT KOMPOSIT		2

KESIMPULAN AKHIR

Manajemen Bank secara umum telah melaksanakan penerapan tata kelola dengan baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan prinsip-prinsip tata kelola yang memadai pada sebagian besar aspek yang dinilai. Beberapa area masih memerlukan penyempurnaan, secara umum hal tersebut dapat diselesaikan dan ditangani melalui langkah-langkah perbaikan dalam lingkup pengelolaan internal Bank.

FAKTOR POSITIF

• **Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola**

Struktur tata kelola (*governance structure*) telah didukung oleh keberadaan 2 (dua) orang anggota Direksi dan 4 (empat) orang Dewan Komisaris, yang secara umum memadai dalam mendukung pelaksanaan fungsi tata kelola di lingkungan bank. Infrastruktur tata kelola juga diperkuat oleh keberadaan Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja Kepatuhan yang memiliki peran strategis, profesional, dan independen.

• **Proses Penerapan Tata Kelola**

Proses implementasi tata kelola (*governance process*) telah berjalan secara

efektif, tercermin dalam pemenuhan kewajiban kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan proses pengambilan keputusan yang dilandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola. Hal ini turut berkontribusi pada peningkatan efisiensi dan pencapaian target kinerja perusahaan.

- **Hasil Penerapan Tata Kelola**

Penerapan tata kelola pada Semester I Tahun 2025 telah menunjukkan hasil yang baik dengan tingkat pemenuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang memadai. Beberapa kelemahan struktural, seperti kekosongan pada posisi Direksi serta penguatan fungsi pengawasan internal dan kepatuhan, perlu segera ditindaklanjuti. Bank menyadari perlunya perbaikan dan komitmen berkelanjutan untuk mengimplementasikan tata kelola secara menyeluruh dalam setiap proses bisnis dan operasional, guna memastikan keberlangsungan usaha yang sehat dan berkelanjutan.

FAKTOR NEGATIF

- **Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola**

Jumlah anggota Direksi belum sepenuhnya memenuhi ketentuan karena saat ini terdapat kekosongan 2 (dua) Direksi, yaitu Direktur Pemasaran dan Direktur Kepatuhan, dan tidak terdapat penunjukan formal atas fungsi kepatuhan. Bank terus berupaya menyempurnakan struktur dan infrastruktur dengan selalu menyesuaikan perkembangan/kondisi bisnis dan regulasi yang berlaku dengan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah selaku Pemegang Saham Pengendali sebagai bagian dari upaya penyempurnaan struktur dan infrastruktur organisasi yang sejalan dengan dinamika bisnis dan ketentuan regulasi.

- **Proses Penerapan Tata Kelola**

Secara umum proses tata kelola (*governance process*) telah diterapkan dengan baik dalam kegiatan operasional dan bisnis, namun terdapat beberapa aspek sistem pengendalian internal yang masih perlu diperkuat. Beberapa pelanggaran yang terjadi telah ditindaklanjuti secara tepat dan tidak menimbulkan dampak kerugian yang signifikan, namun tetap menjadi perhatian untuk penyempurnaan ke depan.

- **Hasil Penerapan Tata Kelola**

Faktor negatif aspek *governance outcome* selama Semester I Tahun 2025, terdapat pengenaan sanksi administrasi oleh regulator dalam bentuk teguran dan denda administrasi. Hal ini menjadi indikator perlunya peningkatan kesadaran terhadap risiko (*risk awareness*) dan budaya sadar kepatuhan (*compliance culture*) serta penguatan implementasi sistem pengendalian internal yang lebih menyeluruh di seluruh lini bisnis dan operasional.



BAB III

POKOK PELAKSANAAN TUGAS ANGGOTA DIREKSI YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 13/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81/OJK) yang selanjutnya disingkat POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah dan SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024, dan Surat Edaran OJK no 8/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan, maka bank wajib menyusun dan menyampaikan laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan PT BPR BKK Jateng (Perseroda).

Fungsi kepatuhan merupakan fungsi yang menjalankan serangkaian tindakan atau langkah yang bersifat pencegahan atau preventif (exante) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, serta memastikan kepatuhan BPR terhadap komitmen yang dibuat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain seperti Bank Indonesia (BI), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dalam rangka menerapkan fungsi kepatuhan bank wajib menyampaikan:

- a. Laporan hasil penilaian sendiri (self assessment) atas pelaksanaan tata kelola
- b. Laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan mencakup:
 1. Informasi umum BPR dan BPR Syariah sesuai dengan kondisi terkini yang mencakup:
 - Formasi sumber daya manusia yang terdiri atas anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Komite, dan Pejabat Eksekutif;
 - Ketentuan internal yang dimiliki termasuk tanggal pemberlakuan.
 2. Informasi mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan mencakup:
 - Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja BPR, mengenai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain;
 - Hasil pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan, serta tindak lanjut anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan atas penerapan budaya kepatuhan dan fungsi kepatuhan pada seluruh unit kerja BPR, termasuk rencana penyesuaian ketentuan internal yang belum sesuai dengan ketentuan dan pemenuhan struktur organisasi atau sumber daya manusia;



- Penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan, meliputi penjelasan atas upaya yang telah dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan; dan
 - Pelaksanaan pemenuhan komitmen terhadap Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain seperti Lembaga Penjamin Simpanan, Bank Indonesia, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- c. Laporan khusus (insidental) mengenai kebijakan dan/atau keputusan direksimenurut pendapat anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lain dan membahayakan kelangsungan usaha BPR.
- d. Laporan penggantian sementara jabatan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan

Fungsi kepatuhan sangat tergantung pada kesadaran seluruh jenjang organisasi terhadap pentingnya budaya patuh dan budaya risiko dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengendalian guna mengurangi terjadinya penyimpangan yang berdampak pada risiko terhadap perusahaan.

Direksi bertanggung jawab terhadap terlaksananya fungsi kepatuhan, Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan. Terwujudnya budaya kepatuhan dalam rangka mengelola risiko merupakan tanggung jawab dari seluruh bagian dalam organisasi, namun keberhasilannya sangat tergantung pada komitmen yang tinggi dari Manajemen Puncak yaitu Pengurus dan Pejabat Eksekutif, untuk menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha sesuai dengan visi misi Perusahaan.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam menumbuhkan dan menciptakan budaya kepatuhan antara lain sebagai berikut:

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan dalam organisasi;
2. Menyusun kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan;
3. Menyusun sistem dan prosedur kepatuhan;
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan serta kegiatan usaha yang dilakukan bank telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku;
5. Meminimalkan risiko kepatuhan.

Adapun upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Fungsi Kepatuhan PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) pada semester 1 tahun 2025, antara lain sebagai berikut:

1. Memastikan BPR sudah memenuhi kelengkapan ketentuan dan peraturan yang berlaku:



- a. Melalui Surat No. 0892/SKET/BKK-KANPUS/IV/2025 tanggal 23 April 2025 yang ditujukan kepada Gubernur Jateng selaku Pemegang Saham Pengendali telah menyampaikan mengenai kekosongan Jabatan Direktur Kepatuhan dan Direktur Pemasaran. Disampaikan juga berdasarkan Surat Peringatan Tertulis OJK tanggal 17 April 2025, apabila sampai dengan akhir Juni 2025 belum terdapat tindak lanjut dengan mengajukan calon Direktur Pemasaran dan Direktur Kepatuhan kepada OJK Provinsi Jateng malak PT BPR BKK Jateng (Perseroda) akan dikenakan sanksi dan tindakan pengawasan lebih lanjut sesuai dengan pasal 33 ayat 2 POJK 9 tahun 2024.
 - b. Melakukan pemantauan secara rutin terhadap peraturan-peraturan baru yang dikeluarkan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, PPATK, Dirjen Pajak, Kementrian, Peraturan Daerah/ Gubernur dan/atau pihak lainnya yang berkaitan dengan BPR dan BUMD. Selanjutnya melakukan pengkinian pada ketentuan internal.
 - c. Melakukan sosialisasi /pelatihan internal, Focus Group Discusion/ FGD, dan mengikuti sosialisasi OJK/ otoritas terkait.
 - d. Melakukan fungsi konsultasi kepada semua unit kerja termasuk Direksi mengenai ketentuan internal dan eksternal.
 - e. Melakukan reuiu terhadap peraturan yang berlaku dan memantau tindak lanjut pengkinian yang harus dilakukan oleh BPR sehubungan dengan berlakunya peraturan baru. Membuat revisi/kajian ulang terhadap ketentuan internal BPR sudah sesuai dengan peraturan OJK dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - f. Memantau semua pelaporan kepada OJK dan otoritas lainnya sesuai batas waktu yang ditentukan.
 - g. Melakukan *self assesment* Tata Kelola secara berkala.
 - h. Melakukan penilaian Indeks Kepatuhan Kantor Cabang secara berkala.
 - i. Membuat Rencana Kerja Kepatuhan dan melakukan pemantauan implementasinya.
2. Memantau kepatuhan BPR terhadap tindak lanjut pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan, KAP dan otoritas lainnya seperti:
 - a. Tindak lanjut penyelesaian hasil temuan pemeriksaan.
 - b. Penyelesaian pengaduan konsumen, serta memastikan pengaduan nasabah tidak terulang.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pokok-Pokok Pelaksanaan Tugas Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan pada PT BPR BKK Jateng (Perseroda) adalah sebagai berikut:

A. INFORMASI UMUM BPR

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi PT BPR BKK Jateng (Perseroda) yang ditetapkan dengan Peraturan Direksi Nomor 084/Per-Dir/V/2023 tanggal 31 Mei 2023, Satuan Kerja (Satker) dibawah Direktur Kepatuhan seperti struktur dibawah ini:

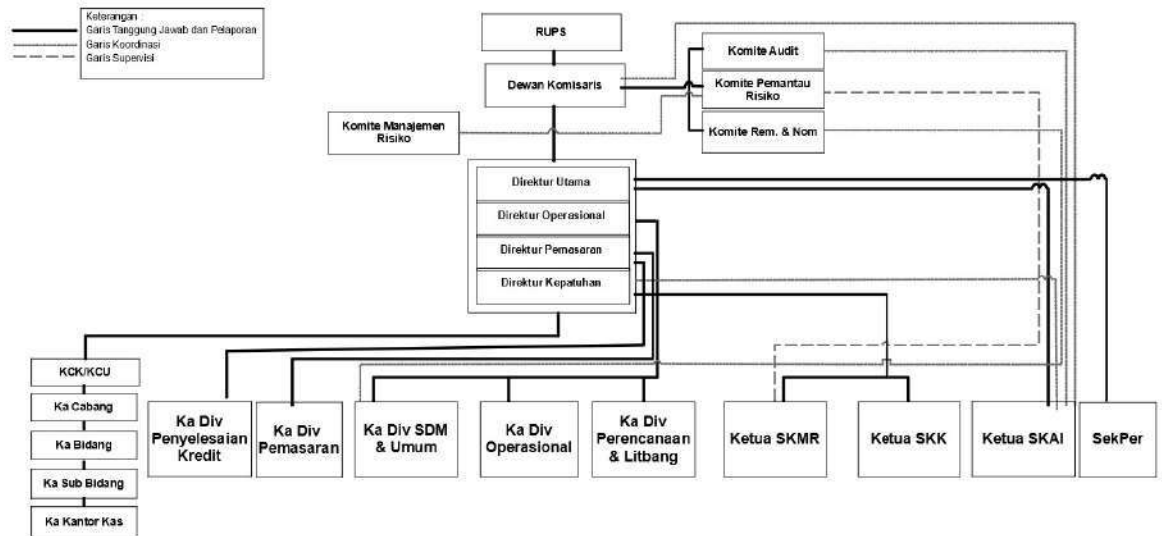


PT. BPR BKK JATENG (Perseroda)

Jl. Tanjung No.11a Semarang 50132 – Telp (024) 86403887, 86405241, 86042409

www.bkkjateng.co.id | email: kanpus@bkkjateng.co.id

Struktur Organisasi PT BPR BKK Jateng (Perseroda)



2. Formasi Sumber Daya Manusia

a. Anggota Direksi

No	NAMA	JABATAN	MASA JABATAN
1.	Koesnanto, S.H., M.Kn.	Direktur Utama	2 Juli 2024 s.d 2 Juli 2029
2.	Drajat Adhitya Walidi, S.E., M.M.	Direktur Operasional	2 Juli 2024 s.d 2 Juli 2029

b. Anggota Dewan Komisaris

No	NAMA	JABATAN	MASA JABATAN
1.	Eddy Sulistiyo Bramiyanto, S.E., M.M.	Komisaris Utama	2 Juli 2023 s.d 2 Juli 2027
2.	Budi Susetyono, MPA.	Komisaris	2 Juli 2023 s.d 2 Juli 2027
3.	Fahmy Akbar Idries, SE., M.M.	Komisaris Independen	30 Okt 2023 s.d 30 Okt 2027
4.	Heru Suprihati, S.H., M.M.	Komisaris Independen	30 Okt 2023 s.d 30 Okt 2027

c. Komite Dewan Komisaris

No	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN
1.	Gede Sujana, SE	Komite Audit	Anggota Komite
2.	Denny Prasetyo.W, SE, MSi		Anggota Komite
3.	Enni Marhaenningsih	Komite Pemantau Risiko	Anggota Komite
4.	Dr. Dwi Ratmono, Msi, Ak		Anggota Komite

**PT. BPR BKK JATENG (Perseroda)**

Jl. Tanjung No.11a Semarang 50132 – Telp (024) 86403887, 86405241, 86042409
 www.bkkjateng.co.id | email: kanpus@bkkjateng.co.id

No	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN
1.	Gede Sujana, SE	Komite Audit	Anggota Komite
2.	Denny Prasetyo.W, SE, MSi		Anggota Komite
5.	Budi Susetyono	Komite Remunerasi dan Nominasi	Anggota Komite
6.	Kepala Divisi SDM & Umum		Anggota Komite

d. Susunan Pejabat Eksekutif

No	NAMA	MULAI MENJABAT	JABATAN
1	Yulius Sri Mulyanto, SH	14/04/2025	Kepala Divisi Pemasaran
2	Riza Pahlevi, A.Md	06/08/2022	Kepala Divisi Operasional
3	Vacant	-	Kepala Divisi Perencanaan & Litbang
4	Rudy Wahyu Triyanto, SE	06/06/2023	Kepala Divisi Penyelesaian Kredit
5	Fandy Farisa, SH, M.Kn	06/06/2023	Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan
6	Sholeh Kusdianto, S.Kom, S.Akun, MM	06/06/2023	Kepala Satuan Kerja Kepatutan
7	Gunawan Pramodo, SE., MH	18/05/2021	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko
8	Eko Yuliyanto, ST	06/06/2023	Kepala Satuan Kerja Audit Internal
9	Susanto, SE	06/11/2023	Kepala Kantor Wilayah
10	Diah Nur Hayati, SE	06/11/2023	Kepala Kantor Wilayah
11	Riyanto, SE	14/04/2025	Kepala Kantor Wilayah
12	Saiful Azis Nasution, SH	08/05/2021	Kepala Kantor Wilayah
13	Agustina Dwi Puspita Jati	18/05/2021	Kepala Cabang Utama
14	Ir. Sugeng Mariyanto	06/08/2022	Kepala Cabang Rembang
15	Sukarno, SE	18/05/2021	Kepala Cabang Pati
16	Zumrotut Taqiyah, STP	14/04/2025	Kepala Cabang Demak
17	Dwi Disdianto, SE	06/06/2023	Kepala Cabang Kendal
18	Sugito, SE, MM	14/04/2025	Kepala Cabang Wonosobo
19	Wahyu Hermawan, S.Sos	18/05/2021	Kepala Cabang Semarang
20	Sarni, SE, MM	06/06/2023	Kepala Cabang Sragen
21	Sri Harmini, SH, MM	10/03/2023	Kepala Cabang Kota Surakarta
22	Abdul Muid, SE, ME	14/04/2025	Kepala Cabang Kota Pekalongan
23	Widodo, SE	06/08/2022	Kepala Cabang Sukoharjo
24	Maharany Amalia H, ST, MM	14/04/2025	Kepala Cabang Salatiga
25	Much. Kurniawan, SE	14/04/2025	Kepala Cabang Magelang
26	Aminul Huda, SE	14/04/2025	Kepala Cabang Banyumas
27	Aan Joko Pramono, S. Sos	05/07/2024	Kepala Cabang Purworejo
28	Egi Nur Rahman, A. Md	01/10/2024	Kepala Cabang Kebumen

**PT. BPR BKK JATENG (Perseroda)**

Jl. Tanjung No.11a Semarang 50132 – Telp (024) 86403887, 86405241, 86042409
 www.bkkjateng.co.id | email: kanpus@bkkjateng.co.id

29	Eko Fitriyanto, SE, MM	14/04/2025	Kepala Cabang Wonogiri
30	Widyo Mukti Hartono, SE	05/07/2024	Kepala Cabang Purbalingga
31	Rachmad Santoso, S.Pi	14/04/2025	Kepala Cabang Banjarnegara
32	Kasih Kartiko Fibriadi, SE	14/04/2025	Kepala Cabang Batang
33	Bambang Rismanto, SE	06/06/2023	Kepala Cabang Brebes
34	Andri Astrianto, SE, MM	06/06/2023	Kepala Cabang Kota Tegal
35	Budi Haryanto, SE, M.Si	06/08/2022	Kepala Cabang Pemalang
36	Handoko, SS	14/04/2025	Kepala Cabang Karanganyar
37	Fathul Amin, SE	14/04/2025	Kepala Cabang Tegal
38	Antonius Aji Purwoko	06/11/2023	Kepala Cabang Cilacap
39	Turnoto, SE	06/11/2023	Kepala Cabang Pekalongan
40	Rini Purwa Ningsih, SE	04/12/2023	Kepala Cabang Boyolali

e. Pendidikan dan Jumlah Sumber Daya Manusia.

Jumlah pengurus dan pegawai PT BPR BKK Jateng (Perseroda) per Juni 2025 adalah sebanyak 1.490 dengan rincian berikut:

No	UNIT KERJA	JUMLAH	PENDIDIKAN
1	Dewan Komisaris	4	S2
2	Direksi	2	S1, S2
3	Anggota Komite	4	S1, S2
4	Kepala Divisi/Kepala Satuan	8	D3, S1, S2
5	Kepala Kantor Wilayah	4	SI, S2
6	Kepala Cabang	28	SMA, D3, S1, S2
7	Kepala Bidang	71	SMA, D3, S1, S2
8	Kepala Sub Bidang	58	SMA, D3, S1, S2
9	Kepala Kantor Kas	99	SMA, D3, S1, S2
10	Staf Administrasi	968	SMA, D3, S1, S2
11	Staf Non Administrasi	232	SMA, S1
12	Residen	12	D3, S1, S2

f. Jaringan Kantor beserta Formasi Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM pada setiap jaringan Kantor beserta Formasi Sumber Daya Manusia pada Setiap Unit Kerjanya:

No	Kantor Cabang	Jml. Kan. Kas	Kantor Kas		Kantor Cabang			Jmlh
			Staf & Non Staff	Ka. Kan. Kas	Staf & Non Staff	Ka. Subid/ Ka. Bid	Pinca/ PE	
1	Banjarnegara	4	23	4	32	0	1	62
2	Banyumas	2	13	2	21	5	2	44
3	Batang	4	19	4	17	0	1	43
4	Boyolali	0	0	0	15	0	1	18
5	Brebes	12	73	11	29	5	1	121



PT. BPR BKK JATENG (Perseroda)

Jl. Tanjung No.11a Semarang 50132 – Telp (024) 86403887, 86405241, 86042409
www.bkkjateng.co.id | email: kanpus@bkkjateng.co.id

6	Cilacap	4	20	3	19	0	1	45
7	Demak	5	39	5	29	5	2	81
8	Karanganyar	6	40	6	39	3	1	91
9	Kebumen	1	3	0	21	0	1	27
10	Kendal	1	3	1	17	0	1	24
11	Kota Pekalongan	2	12	2	15	0	1	32
12	Kota Salatiga	0	0	0	16	0	1	19
13	Kota Surakarta	0	0	0	15	0	1	18
14	Kota Tegal	2	8	2	14	0	1	27
15	Magelang	4	16	4	21	0	1	44
16	Pati	0	0	0	13	0	1	16
17	Pekalongan	5	12	5	30	0	1	50
18	Pemalang	6	25	6	33	5	1	72
19	Purbalingga	0	0	0	16	0	1	19
20	Purworejo	0	0	0	18	0	1	21
21	Rembang	3	6	3	18	0	1	30
22	Semarang	6	15	6	16	3	1	43
23	Sragen	5	37	5	25	5	1	74
24	Sukoharjo	5	20	5	26	0	2	54
25	Tegal	12	77	12	23	5	2	120
26	Utama (Semarang)	0	0	0	14	5	1	22
27	Wonogiri	10	65	10	21	5	1	104
28	Wonosobo	3	10	3	26	0	1	42
		102	536	99	599	46	32	1.363

Unit Kerja	Jumlah Pegawai
Kantor Cabang	1.363 (staf & non staf)
Kantor Pusat	107
Kantor Wilayah	20
Total	1.490

g. Formasi Jabatan Kosong

Formasi jabatan struktural yang masih kosong per Juni 2025 adalah sebagai berikut:

No	Nama Jabatan	Unit Kerja
1	Kepala Divisi Litbang	Kantor Pusat
2	Kepala Bidang Sekretaris Perusahaan & Humas	Kantor Pusat
3	Kepala Bidang Treasury dan Dana	Kantor Pusat
4	Kepala Bidang Teknologi Informasi, Jaringan dan Pelayanan	Kantor Pusat
5	Kepala Bidang Operasional	KC Sragen
6	Kepala Sub Bidang Penagihan Kredit	Kantor Pusat
7	Kepala Sub Bidang Humas & Publikasi	Kantor Pusat
8	Kepala Sub Bidang Digital Marketing	Kantor Pusat
9	Residen Analis Area Banyumas	Kantor Wilayah
10	Residen Kepatuhan Area Banyumas	Kantor Wilayah

**PT. BPR BKK JATENG (Perseroda)**

Jl. Tanjung No.11a Semarang 50132 – Telp (024) 86403887, 86405241, 86042409
 www.bkkjateng.co.id | email: kanpus@bkkjateng.co.id

11	Residen Kepatuhan Area Solo Raya	Kantor Wilayah
12	Residen Audit Internal Area Pekalongan	Kantor Wilayah
13	Kepala Kantor Kas Buluspesantren	KC Kebumen
14	Kepala Kantor Kas Songgom	KC Brebes
15	Kepala Kantor Kas kesugihan	KC Cilacap

h. Pegawai Berhenti di Semester 1 tahun 2025

Alasan Berhenti	Jumlah (orang)
Pensiun	23
Mengundurkan Diri	37
Meninggal Dunia	0
Pensiun Dini	7
Pemberhentian tidak dengan hormat	4
Total	71

3. Ketentuan Internal tahun 2025

Ketentuan Intern yang berlaku sampai dengan Juni 2025 adalah sebagai berikut:

a) Perkreditan

No	Ketentuan	No SK	Mulai Berlaku
1	Standar Prosedur Operasional Pemasaran	BKK-JTP	31-Jan-22
2	Hapus Buku Aset Tetap Dan Inventaris	065/Kep-Dir/II/2022	09-Feb-22
3	Tim Hapus Buku	066/Kep-Dir/II/2022	09-Feb-22
4	Batas Jangka Waktu Kredit Yang Tidak Wajib Diasuransikan	068/Kep-Dir/II/2022	09-Feb-22
5	Kebijakan Angsuran Debitur Pada Hari Libur	069/Kep-Dir/II/2022	09-Feb-22
6	Kewajiban Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	071/Kep-Dir/II/2022	09-Feb-22
7	Nilai Agunan Sebagai Pengurang Pembentukan PPAP	072/Kep-Dir/II/2022	09-Feb-22
8	Monitoring, Pembinaan Dan Pengawasan Debitur	076/Kep-Dir/II/2022	09-Feb-22
9	Kebijakan Pemberian Lebih Dari Satu Fasilitas Kredit	077/Kep-Dir/II/2022	09-Feb-22
10	Penggantian Atau Pengambilan Sebagian Jaminan Sebelum Pelunasan Kredit	078/Kep-Dir/II/2022	09-Feb-22
11	Pedoman Penomoran Surat Perjanjian Kredit	079/Kep-Dir/II/2022	09-Feb-22
12	Pedoman Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)	081/Kep-Dir/II/2022	09-Feb-22
13	Perubahan SK Direksi Nomor 073 Kep.Dir II 2022 tentang BMPK	030/Kep-Dir/II/2023	09-Feb-23

**PT. BPR BKK JATENG (Perseroda)**

Jl. Tanjung No.11a Semarang 50132 – Telp (024) 86403887, 86405241, 86042409
 www.bkkjateng.co.id | email: kanpus@bkkjateng.co.id

14	Tahapan Penanganan Kredit Portofolio At Risk (PAR)	002/SE/II/2023	20-Feb-23
15	Penjaminan Kredit Dari BPJS TK untuk Kredit BKK Jateng	003/SE/III/2023	03-Mar-23
16	Ketentuan Pembiayaan Program Tuku Lemah Oleh Omah Dan Tuku Lemah Sak Omahe	006/SE/VII/2023	01-Jul-23
17	Service Level Agreement (SLA) Proses Kredit	003/SE/BKK-KANPUS/VII/2024	31-Jul-24
18	Penegasan Kegiatan Kunjungan Lapangan Analis Kredit	009/SE/IX/2023	01-Sep-23
19	Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan	074/Per-Dir/V/2024	02-Mei-24
20	Fasilitas Kredit Khusus Notaris-PPAT Rekanan	005/SE/BKK-KANPUS/VIII/2024	08-Aug-24
21	Wewenang Otorisasi Persetujuan Pelunasan Kredit	012/SE/BKK-KANPUS/IX/2024	30-Sep-24
22	Ketentuan Dokumen Kredit	164/Kep-Dir/VIII/2024	09-Sep-24
23	Penugasan untuk Maintenance terhadap <i>Portofolio at Risk</i> (PAR)	186/Kep-Dir/X/2024	09-Okt-24
24	Penerapan Kualitas Aset Produktif dalam Bentuk Kredit di Lingkungan PT BPR BKK Jateng	238/Kep-Dir/XII/2024	24-Des-24
25	Produk Kredit BKK Korporasi	042.1/Kep-Dir/III/2025	28-Mar-25
26	Produk Kredit BKK Joglo	042.2/Kep-Dir/III/2025	28-Mar-25
27	Produk Kredit BKK K3	042.3/Kep-Dir/III/2025	28-Mar-25
28	Produk Kredit BKK Sinden	042.4/Kep-Dir/III/2025	28-Mar-25
29	Produk Kredit BKK KUB	042.5/Kep-Dir/III/2025	28-Mar-25
30	Produk Kredit BKK KMB	043.1/Kep-Dir/III/2025	28-Mar-25
31	Produk Kredit BKK Agro	043.2/Kep-Dir/III/2025	28-Mar-25
32	Produk Kredit BKK Bahari	043.3/Kep-Dir/III/2025	28-Mar-25
33	Produk Kredit BKK BUMDES	043.4/Kep-Dir/III/2025	28-Mar-25
34	Produk Kredit KKPP	043.5/Kep-Dir/III/2025	28-Mar-25
35	Produk Kredit Jolo Mitra	044.1/Kep-Dir/III/2025	28-Mar-25
36	Penetapan Tingkat Suku bunga kredit dan biaya kredit	003/SE/BKK KANPUS/IV/2025	08-Apr-25
37	Skema dan Ketentuan Pembiayaan Program Rumah Sekeng	004/SE/BKK KANPUS/IV/2025	14-Apr-25
38	Agunan Kredit	109/Kep-Dir/VI/2025	30-Jun-25

b) Penyelesaian Kredit Bermasalah

No	Ketentuan	No SK	Mulai Berlaku
1	Hapus Buku Kredit	080/Kep-Dir/II/2022	09-Feb-22
2	Pejabat Pemutus Agunan Yang Diambil Alih	083/Kep-Dir/II/2022	09-Feb-22
3	Agunan Yang Diambil Alih	084/Kep-Dir/II/2022	09-Feb-22

**PT. BPR BKK JATENG (Perseroda)**

Jl. Tanjung No.11a Semarang 50132 – Telp (024) 86403887, 86405241, 86042409
 www.bkkjateng.co.id | email: kanpus@bkkjateng.co.id

4	Ketentuan Restrukturisasi Kredit	195/Kep-Dir/IX/2022	27-Sep-22
5	Pemberian Keringanan Bunga dan/atau Penghapusan Denda Pelunasan Kredit Macet	135/Kep-Dir/VII/2024	02-Aug-24
6	Pemberian Keringan Dan/Atau Pembebasan Bunga Dan/Atau Denda Pelunasan Kredit Hapus Buku	169/Kep-Dir/IX/2024	11-Sep-24
7	Penetapan Hapus Buku Kredit PT BPR BKK JATENG (PERSERODA) Th. 2024	239/Kep-Dir/XII/2024	27-Dec-24
8	Program Pemberian Insentif Penanganan Kredit Hapus Buku	002/SE/BKK KANPUS/III/2025	25-Mar-25

c) Dana

No	Ketentuan	No SK	Mulai Berlaku
1	Batasan Likuid dan Dana Antar Bank Aktiva yang Dikelola Kantor Cabang	026/Kep-Dir/II/2022	09-Feb-22
2	Batasan Alat Likuid yang Dikelola Teller	027/Kep-Dir/II/2022	09-Feb-22
3	Batas Wewenang Penarikan Dana Antar Bank Aktiva	035/Kep-Dir/II/2022	09-Feb-22
4	Kewajiban Rekonsiliasi Saldo Rekening Antar Bank Aktiva	047/Kep-Dir/II/2022	09-Feb-22
5	Perubahan Suku Bunga Antar Kantor	005/SE/V/2022	12-Mei 22
6	Tingkat Suku Bunga Simpanan	005/SE/BKK- KANPUS/V/2023	31-Mei-23
7	Pembentukan Tim ALCO	143/Kep-Dir/VI/2022	30-Jun-22
8	Produk Simpanan	152/Kep-Dir/VIII/2024	30-Aug-24
9	Pedoman Penempatan Pada Bank Lain	002/Per-Dir/IX/2024	21-Okt-24

d) Operasional

No	Ketentuan	No SK	Mulai Berlaku
1	Standar Prosedur Operasional Front Office (Teller, CS, Ruang Khasanah, APU PPT)	BKK-JTP	31-Jan-22
2	Standar Prosedur Operasional Back Office (Admin Dan Monitoring Kredit, TI, Akuntansi)	BKK-JTP	31-Jan-22
3	Asuransi Uang Kas	028/Kep-Dir/II/2022	09-Feb-22
4	Opname Jaminan Kredit	029/Kep-Dir/II/2022	09-Feb-22
5	Kas Opname	030/Kep-Dir/II/2022	09-Feb-22
6	Batas Waktu Penyimpanan Barang Jaminan	034/Kep-Dir/II/2022	09-Feb-22



PT. BPR BKK JATENG (Perseroda)

Jl. Tanjung No.11a Semarang 50132 – Telp (024) 86403887, 86405241, 86042409
www.bkkjateng.co.id | email: kanpus@bkkjateng.co.id

7	Batasan Limit Uang Muka Untuk Operasional	036/Kep-Dir/II/2022	09-Feb-22
8	Pejabat Penandatanganan Bilyet Deposito	037/Kep-Dir/II/2022	09-Feb-22
9	Pejabat Penandatanganan Buku Tabungan	038/Kep-Dir/II/2022	09-Feb-22
10	Ketentuan Layanan Jemput Bola	039/Kep-Dir/II/2022	09-Feb-22
11	Pemegang Kunci Di Lingkungan	040/Kep-Dir/II/2022	09-Feb-22
12	Penegasan Akses Ruang Khasanah Dan Ruang Teller	041/Kep-Dir/II/2022	09-Feb-22
13	Petugas Pengganti Kegiatan Operasional	043/Kep-Dir/II/2022	09-Feb-22
14	Pengaturan Menu Dan User Akses Core Banking System (CBS)	054/Kep-Dir/II/2022	09-Feb-22
15	Ketentuan Penggantian Buku Tabungan dan Bilyet Deposito	055/Kep-Dir/II/2022	09-Feb-22
16	Penegasan Kegiatan Kantor Kas	059/Kep-Dir/II/2022	09-Feb-22
17	Otorisator dan Batas Kewenangan Dalam Memberikan Persetujuan Penarikan Simpanan	063/Kep-Dir/II/2022	09-Feb-22
18	Pedoman Teknologi Sistem Informasi (TSI)	090/Kep-Dir/II/2022	09-Feb-22
19	Pengelolaan Liabilitas Segera	259/Kep-Dir/XII/2022	30-Dec-22
20	Pencabutan Surat Keputusan Direksi PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Nomor: - 202/KEP-DIR/IX/2022 tentang Biaya Pengelolaan - 247/KEP-DIR/XI/2022 tentang Pengelolaan Rekening Administratif - 255.1/KEP-DIR/XII/2022 tentang Kebijakan Tindakan Terhadap Rekening Tabungan Pasif	038.1/Kep-Dir/III/2023	6-Mar-23
21	Pembentukan Cadangan Imbalan Pasca Kerja bagi Pegawai.	063/Kep-Dir/IV/2024	18-Apr-24
22	Sarana Prasarana dan Fasilitas untuk Komisaris dan Direksi	001/Kep-Dir/I/2025	1-Jan-25
23	Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat (SAK EP) atas Instrumen Keuangan	044.2/Kep-Dir/III/2025	28-Mar-25
24	Larangan Menulis Manual pada Buku Tabungan Nasabah	004/SE/BKK KANPUS/IV/2025	4-Jun-25

**PT. BPR BKK JATENG (Perseroda)**

Jl. Tanjung No.11a Semarang 50132 – Telp (024) 86403887, 86405241, 86042409
www.bkkjateng.co.id | email: kanpus@bkkjateng.co.id

e) Sumber Daya Manusia dan Umum

No	Ketentuan	No SK	Mulai Berlaku
1	Standar Prosedur Operasional Back Office (SDM, Umum, KPI)	BKK-JTP	31-Jan-22
2	Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa	048.1/Kep-Dir/VI/2021	03-Jun-21
3	Ketentuan Hari dan Jam Kerja	090/Kep-Dir/VI/2021	15-Jun-21
4	Penggajian Pegawai	091/Kep-Dir/VI/2021	03-Jun-21
5	Pedoman Tata Tertib Pegawai	018/Kep-Dir/II/2022	09-Feb-22
6	Budaya Kerja Perusahaan	020/Kep-Dir/II/2022	09-Feb-22
7	Peraturan Dan Sanksi Displin Pegawai	023/Kep-Dir/II/2022	09-Feb-22
8	Keikutsertaan Program Jaminan Ketenagakerjaan BPJS	031.2/Kep-Dir/II/2022	09-Feb-22
9	Keikutsertaan Program Jaminan Kesehatan BPJS	032/Kep-Dir/II/2022	09-Feb-22
10	Batas Kewenangan Memutus Pengeluaran Biaya	033/Kep-Dir/II/2022	09-Feb-22
11	Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur	045/Kep-Dir/II/2022	09-Feb-22
12	Pengamanan Dokumen Dan Arsip	042/Kep-Dir/II/2022	09-Feb-22
13	Uang Saku Dan Akomodasi Kegiatan Pendidikan	046/Kep-Dir/II/2022	09-Feb-22
14	Pemberian Dana Sosial	049/Kep-Dir/II/2022	09-Feb-22
15	Pemberian Bantuan Biaya Pindah Tugas	050/Kep-Dir/II/2022	09-Feb-22
16	Biaya Representasi Dan Entertainment	051/Kep-Dir/II/2022	09-Feb-22
17	Standar Pelayanan Dan Penampilan	052/Kep-Dir/II/2022	09-Feb-22
18	Pedoman Pengarsipan Surat Masuk dan Surat Keluar	053/Kep-Dir/II/2022	09-Feb-22
19	Bahan Bakar Minyak Operasional	060/Kep-Dir/II/2022	09-Feb-22
20	Uang Saku Dinas Luar	061/Kep-Dir/II/2022	09-Feb-22
21	Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja	064/Kep-Dir/II/2022	09-Feb-22
22	Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja Dan Uang Penggantian Hak	067/Kep-Dir/II/2022	09-Feb-22
23	Peraturan Perusahaan	085/Kep-Dir/II/2022	09-Feb-22
24	Bahan Bakar Minyak (BBM) Untuk Operasional Direksi Dan Pejabat Struktural	056/Kep-Dir/II/2022	09-Feb-22
25	Biaya Pemeliharaan Dan Perbaikan Kendaraan Bermotor	057/Kep-Dir/II/2022	09-Feb-22
26	Pemberian Fasilitas Uang Voucher Pulsa Direksi Dan Pejabat	058/Kep-Dir/II/2022	09-Feb-22



PT. BPR BKK JATENG (Perseroda)

Jl. Tanjung No.11a Semarang 50132 – Telp (024) 86403887, 86405241, 86042409
www.bkkjateng.co.id | email: kanpus@bkkjateng.co.id

	Struktural		
27	Organ Komite Remunerasi Dan Nominasi	119/KepDir/V/2022	17-Mei-22
28	Ketentuan Pemberian Hak thdp Pemutusan Hubungan Kerja	142 KepDir VI 2022	30-Jun-22
29	Pemberian Fasilitas Pengganti Sewa Rumdin PS serta Fasilitas Mess utk Pegawai Kanpus	156/Kep-Dir/VII/2022	26-Jul-22
30	Komite Displin Dan Sanksi Pegawai	154/Kep-Dir/VII/2022	26-Jul-22
31	Komite Personalia	157/Kep-Dir/VII/2022	26-Jul-22
32	Komite Manajemen Risiko	161/Kep-Dir/VII/2022	31-Jul-22
33	Tunjangan Fungsional kepada Tim Teknologi Informasi	174/Kep-Dir/VIII/2022	10-Agu-22
34	Pedoman Pengelolaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan <i>Corporate Social Responsibility</i>	203/Kep-Dir/IX/2022	30-Sep-22
35	Tentang Penyusutan Aset Dan Pencatatan Biaya Sebagai Aset Inventaris	204/Kep-Dir/IX/2022	30-Sep-22
36	Peraturan Direksi Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja	084/Per-Dir/V/2023	01-Mei-23
37	Pedoman Penetapan Formasi Efektif	202/Kep-Dir/XII/2023	29-Dec-23
38	Pedoman Rekrutmen Pegawai Profesional	203/Kep-Dir/XII/2023	29-Dec-23
39	Standar Prestasi Kerja Pegawai	064/Kep-Dir/IV/2024	18-Apr-24
40	Format Dan Spesifikasi Formulir Aplikasi Nasabah	133/Kep-Dir/VII/2024	31-Jul-24
41	Penilaian Kinerja Kantor Cabang	135.1/Kep-Dir/VIII/2024	05-Aug-24
42	Penerapan Aplikasi Simpeg Versi 1	137/Kep-Dir/VIII/2024	12-Aug-24
43	Penyetaraan Tunjangan Untuk Jabatan Fungsional	174/Kep-Dir/IX/2024	30-Sep-24
44	Tunjangan Fungsional Anggota SKAI	175/Kep-Dir/IX/2024	30-Sep-24
45	Prosedur Promosi dan Demosi Pegawai	176/Kep-Dir/IX/2024	30-Sep-24
46	Pengangkatan Organ Komite Audit	184/Kep-Dir/X/2024	02-Okt-24
47	Pengangkatan Organ Komite Pemantau Risiko	200/Kep.Dir/XI/2024	1-Nov-24
48	Penghapusan Barang Inventaris Tahun 2024	237/Kep-Dir/XII/2024	24-Dec-24
49	Pemberian Gaji Ketiga Belas	245/Kep-Dir/XII/2024	31-Dec-24
50	Pemberian Tunjangan Hari Raya tahun 2025	038/Kep-Dir/III/2025	18-Mar-25
51	Pemberian Kewenangan kepada Kepala Kantor Wilayah	040/Kep-Dir/III/2025	25-Mar-25



f) Kepatuhan

No	Ketentuan	No SK	Mulai Berlaku
1	Pedoman Kebijakan Pelaksanaan Tata Kelola (Good Corporate Governance)	BKK-JTP/GCG/I	31-Jan-22
2	Standar Prosedur Operasional Functional Dan UKK (SKAI, Perlindungan Konsumen, Manajemen Risiko)	BKK-JTP	31-Jan-22
3	Pedoman Pengendalian Gratifikasi	019/Kep-Dir/II/2022	09-Feb-22
4	Peraturan <i>Whistleblowing Sistem</i>	024/Kep-Dir/II/2022	09-Feb-22
5	Petugas Yang Ditunjuk Dalam Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	044/Kep-Dir/II/2022	09-Feb-22
6	Standar Etika Pegawai	025/Kep-Dir/II/2022	09-Feb-22
7	Himbauan Antisipasi Transaksi Tunai Mencurigakan	010/SE/IX/2023	18-Sep-23
8	Pedoman Kebijakan Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat	144.1/KepDir/IX/2023	27-Sep-23
9	SOP Fungsi Kepatuhan	BKK-JTP/Kep/IX	30-Sep-22
10	Pedoman Dan Kebijakan Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal	187.1/Kep-Dir/XII/2023	11-Dec-23
11	Himbauan Larangan Dan Dampak Judi Online Bagi Pegawai PT BPR BKK Jateng	004/SE/BKK-KANPUS/VIII/2024	02-Aug-24
12	Himbauan Netralitas Pegawai PT BPR BKK JATENG (Perseroda)	014/SE/BKK-KANPUS/X/2024	04-Okt-24
13	Mekanisme Pelaporan APU, PPT, dan PPPSPM pada Kantor Cabang Dan Kantor Kas	015/SE/BKK-KANPUS/X/2024	30-Okt-24
14	Ketentuan Penyusunan Peraturan	218/Kep-Dir/XI/2024	29-Nov-24
15	Pelaksanaan Uji Tuntas Lanjut (Enhanced Due Diligence)	016/SE/BKK-KANPUS/XI/2024	02-Dec-24
16	Pejabat Sebagai Wajib Lapor LHKPN Di Lingkungan PT BPR BKK JATENG (Perseroda)	236/Kep-Dir/XII/2024	12-Dec-24

**PT. BPR BKK JATENG (Perseroda)**

Jl. Tanjung No.11a Semarang 50132 – Telp (024) 86403887, 86405241, 86042409
www.bkkjateng.co.id | email: kanpus@bkkjateng.co.id

17	Pedoman Kebijakan Strategi Anti Fraud	242/Kep-Dir/XII/2024	31-Des-24
18	Budaya Kepatuhan	003/Kep-Dir/I/2025	7-Jan-25
19	Kebijakan Benturan Kepentingan	053/Kep-Dir/IV/2025	24-Apr-25
20	Tim Pengendali Fraud	089/Kep-Dir/V/2025	26-Mei-25

g) Manajemen Risiko

No	Ketentuan	No SK	Mulai Berlaku
1	Standar Prosedur Operasional Functional Dan UKK (SKAI, Perlindungan Konsumen, Manajemen Risiko)	BKK-JTP	31-Jan-22
2	Penetapan Limit Dan Toleransi Risiko Tahun 2022	038/Kep-Dir/II/2022	09-Feb-22
3	Pedoman Penerapan Manajemen Risiko	086/Per-Dir II/2022	09-Feb-22
4	Core Dan Supporting Risk Taking Unit	056/Kep-Dir/III/2023	30-Mar-23
5	Batas Wewenang Memutus Kredit, Pejabat Pemutus Kredit, dan Komite Kredit	193/Kep-Dir/X/2024	31-Okt-24
6	Penetapan Risk Appetite dan Toleransi Risiko tahun 2025	216.1/Kep-Dir/XI/2024	29-Nov-24
7	Budaya Sadar Risiko	002/Kep-Dir/I/2025	7-Jan-25
8	Pemberian Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) kepada Kepala Cabang	059/Kep-Dir/IV/2025	25-Apr-25
9	Pedoman Budaya Risiko dan Pengukuran Maturitas Budaya Sadar Risiko	108/Kep-Dir/VI/2025	30-Jun-25

h) Audit Internal

No	Ketentuan	No SK	Mulai Berlaku
1	Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern	249/KepDir/XII/2024	31-Des-24
2	Penetapan Audit Rating dan Penilaian Risiko dalam Pelaksanaan Audit di Lingkungan	035/Kep-Dir/III/2025	3-Mar-2025



PT. BPR BKK JATENG (Perseroda)

Jl. Tanjung No.11a Semarang 50132 – Telp (024) 86403887, 86405241, 86042409
www.bkkjateng.co.id | email: kanpus@bkkjateng.co.id

i) Sekretariat & Hukum

No	Ketentuan	No SK	Mulai Berlaku
1	Biaya Operasional Penanganan Kredit Bermasalah dengan Kejaksaan Tinggi & Kejaksaan Negeri di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	002/Kep-Dir/I/2021	15-Jun-25
2	Tata Cara Pemberian Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan PT BPR BPR BKK Jateng (Perseroda)	036/Kep-Dir/III/2025	3-Mar-25
3	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan PT BPR BPR BKK Jateng (Perseroda)	037/Kep-Dir/III/2025	3-Mar-25
4	Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Pekerjaan Notaris Rekanan (SIMONTOK)	010/SE/BKK-KANPUS/VI/2025	10-Jun-25

B. PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN

1. Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan

Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain yang terkini dan relevan pada semester 1 tahun 2025 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA KEGIATAN PELATIHAN DAN SOSIALISASI	WAKTU PELAKSANAAN	PESERTA	JUMLAH PESERTA
1	Refreshment Sertifikasi Manris Perbankan Jenjang 5	15 Jan 2025	Komisaris Utama	1
2	Pelatihan Aplikasi Digital SI-PIPKu (Sistem Informasi Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan)	24 Jan 2025	Kasubid dan Kabid	3
3	e-Learning	04, 06, 11, 13, 18, 20, dan 25 Februari 2025	1. AO Kredit 2. AO Remedial 3. AO Dana 4. Teller 5. CS 6. Kepala Bidang Pemasaran 7. Kepala Bidang Operasional 8. Analisa dan Appraisal Kredit 9. Admin dan Legal Kredit 10. Kepala KanKas	



PT. BPR BKK JATENG (Perseroda)

Jl. Tanjung No.11a Semarang 50132 – Telp (024) 86403887, 86405241, 86042409
www.bkkjateng.co.id | email: kanpus@bkkjateng.co.id

4	Sosialisasi LPS	04 Feb 2025	Kabid Treasury & Dana, Kasubid Akuntansi & Pelaporan	2
5	Product Knowledge dan Analisa Pasar	07 Feb 2025	AO Kredit, AO Maintenance, Kasubid Kredit, Kabid Pemasaran, dan Kepala Cabang	83
6	Workshop Konsolidasi Tindak Lanjut Core Banking IT PT BPR BKK (Perseroda) Se - Jawa Tengah	10 Feb 2025	Kabid Teknologi Informasi, Jaringan dan Pelayanan; Kabid Pengembangan Teknologi Informasi; Kasubid Akuntansi dan Pelaporan; Kasubid Layanan Digital; Staf Perencanaan dan Penelitian Pengembangan	5
7	Sertifikasi Manrisk Jenjang 4 & Resertifikasi Manrisk Jenjang 4	12 - 15 Feb 2025	Kepala Cabang, Kasubid AMU, Koordinator SKAI, Residen Audit Internal, Residen Kepatuhan	10
8	Pelatihan Penilaian Property Untuk Tujuan Kredit	13 - 14 Feb 2025	Kasubid Analis Kredit & Residen Analis Kredit	4
9	Workshop SAK EP dan Pedoman Akuntansi BPR	13 - 15 Feb 2025	PE & PS Kantor Pusat, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Cabang, Kepala Bidang Pemasaran, Residen Manajemen Risiko, Staf Akuntansi dan Pelaporan Pusat, & Staf Analis Kredit dan Appraisal	115
10	Diklat Reguler Perpajakan	18 - 19 Feb 2025	Kepala Divisi Operasional Kepala Bidang Akuntansi	10



PT. BPR BKK JATENG (Perseroda)

Jl. Tanjung No.11a Semarang 50132 – Telp (024) 86403887, 86405241, 86042409
www.bkkjateng.co.id | email: kanpus@bkkjateng.co.id

			Kepala Sub Bidang Akuntansi Staf Akuntansi dan Pelaporan Staf Akuntansi dan Pelaporan Kasubid Perencanaan Akuntansi, dan Pelaporan Kepala Bidang Operasional Kepala Bidang Operasional Kepala Bidang Operasional Kasubid Perencanaan Akuntansi, dan Pelaporan	
11	Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) dan Tata Kelola Pengarsipan Data Nasabah	22 Feb 2025	Kabid Operasional, Kepala Kantor Kas, Teller, dan Customer Service	48
12	Pelatihan Risk Awareness for BPR Based on KKNi SMR Jk 4	24 Feb 2025	Residen Audit Internal	2
13	Pelatihan Aspek Legal Perbankan : “Pengelolaan Dokumen Kredit dalam Pembuktian Perkara Pidana dan Perdata”	24 – 25 Feb 2025	Sekretaris Perusahaan Kabid Hukum Kerjasama dan Hubungan Kelembagaan Kasubid Hukum Staf Hukum Kasubid Analisis Kredit	5
14	Bimbingan Teknis Pengendalian Risiko Korupsi pada Badan Usaha	25 – 26 Feb 2025	Kepala Bidang Manajemen Risiko, Koordinator SKAI	2
15	e-Learning	7, 11, 13, 18, 20 Mar 2025	1. Kepala Cabang 2. Kepala Sub Bidang 3. AO Kredit 4. AO Dana 5. AO Remedial 6. Staf SDM & Umum	662



PT. BPR BKK JATENG (Perseroda)

Jl. Tanjung No.11a Semarang 50132 – Telp (024) 86403887, 86405241, 86042409
www.bkkjateng.co.id | email: kanpus@bkkjateng.co.id

			7. Staf Akuntansi & Pelaporan	
16	Pelatihan Building Corporate University Roadmap	3-5 Maret 2025	Kepala Sub Bidang & Staf Diklat dan Pengembangan SDM	2
17	Sertifikasi Manrisk Jenjang 5	4-5 & 7 Maret 2025	Kepala Cabang, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Satuan Kerja Audit Internal	9
18	Pelatihan Data Analytic and Visualization with Power BI	10-12 Maret 2025	Kepala Bidang Akuntansi, Kasubid Layanan Digital, Anggota Manajemen Risiko, Staf Litbang	4
19	Webinar SDM – Modul Pelatihan Induksi Karyawan Baru BPR	13 Maret 2025	Kepala Sub Bidang Diklat & Pengembangan SDM	1
20	Pelatihan Persuasive Communication for Selling	14-15 Maret 2025	AO Kredit	78
21	e-Learning	10, 15, 17, 22, dan 24 April 2025	1. Kepala Cabang 2. Kepala Bidang Pemasaran 3. Kepala Bidang Operasional 4. Kepala Kantor Kas 5. Kepala Sub Bidang 6. AO Kredit 7. AO Dana 8. AO Remedial 9. Staf SDM & Umum 10. Staf Akutansi & Pelaporan 11. Staf Analis & Appraisal Kredit 12. Staf Admin & Legal Kredit 13. Customer Service	1.080



PT. BPR BKK JATENG (Perseroda)

Jl. Tanjung No.11a Semarang 50132 – Telp (024) 86403887, 86405241, 86042409
www.bkkjateng.co.id | email: kanpus@bkkjateng.co.id

			14. Teller	
22	Pelatihan “Strategi Anti Fraud dan Pengenalan Audit Investigasi Terhadap Kerugian Keuangan Negara”	10 April 2025	Kepala SKAI, Koordinator SKAI, Residen Audit Internal, Anggota SKAI	21
23	Pelatihan Persuasive Communication for Selling (Batch 3 & 4)	11-12 April 2025	AO Kredit	73
24	Pelatihan Risk Acceptance Criteria Untuk UMKM Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Kredit PT BPR BKK Jateng (Perseroda)	25-26 April 2025	Kepala Divisi, Kepala Satuan Kerja, Kepala Bidang Kantor Pusat, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Cabang, Kabid Pemasaran, Kasubid Kredit, Kepala Kantor Kas, Residen Analis Kredit, Staf Analis Kredit dan Appraisal, Anggota Manajemen Risiko, Anggota SKAI	106
25	e-Learning	6, 8, 15, 20, dan 22 April 2025	1. Kepala Cabang 2. Kepala Bidang Pemasaran 3. Kepala Bidang Operasional 4. Kepala Kantor Kas 5. Kepala Sub Bidang 6. AO Kredit 7. AO Dana 8. AO Remedial 9. Staf SDM & Umum 10. Staf Akutansi & Pelaporan 11. Staf Analis & Appraisal Kredit 12. Staf Admin & Legal Kredit	1.087



PT. BPR BKK JATENG (Perseroda)

Jl. Tanjung No.11a Semarang 50132 – Telp (024) 86403887, 86405241, 86042409
www.bkkjateng.co.id | email: kanpus@bkkjateng.co.id

			13. Customer Service 14. Teller	
26	Sertifikasi Kompetensi Pendidikan Dasar Penilaian PDP 1 Properti	26 April - 5 Mei 2025	Kepala Sub Bidang Analis Kredit, Residen Analis Kredit, Kepala Bidang Pemasaran, Kepala Sub Bidang AMU, Kepala Sub Bidang Analisa & Restrukturisasi	8
27	Pelatihan “Workshop Menyusun Kamus Kompetensi dan Melakukan Assesment Kompetensi Untuk Karyawan”	5-6 Mei 2025	Kasubid & Staf Diklat dan Pengembangan SDM	2
28	Pelatihan Anti Fraud, Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana Korupsi (Area Semarang)	8-9 Mei 2025	Pejabat Eksekutif dan Pejabat Struktural	62
29	Pelatihan APU, PPT, PPPSPM dan Good Corporate Governance (GCG)	16 Mei 2025	Pengurus dan Pejabat Eksekutif	47
30	Pendidikan Sertifikasi MR Perbankan Kualifikasi Jenjang 5	14-15 dan 17 Mei 2025	Kepala Cabang	5
31	Pelatihan Restrukturisasi Kredit (Area Semarang & Solo Raya)	17 Mei 2025	AO Remedial & Divisi Penyelesaian Kredit Kantor Pusat	59
32	Pelatihan Anti Fraud, Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana Korupsi (Area Solo Raya)	19-20 Mei 2025	Pejabat Struktural	66
33	Pelatihan dan Sertifikasi BNSP – Certified Internal Audit Profesional (CIAP)	19-21 Mei 2025	Kepala, Koordinator, dan Staff SKAI	5
34	Training of Trainer	21 - 23 Mei 2025	Kadiv Ops & Kasatker SKAI	2
35	Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen SDM	22-25 Mei 2025	Kabid SDM, Kasubid Kepegawaian, Kasubid Diklat	3
36	Pelatihan & Ujian Sertifikasi CAFM (Certified Anti Fraud Manager)	2-4 Juni 2025	Kepala Satuan Kerja Kepatuhan, Kepala Bidang APU PPT dan	2

**PT. BPR BKK JATENG (Perseroda)**

Jl. Tanjung No.11a Semarang 50132 – Telp (024) 86403887, 86405241, 86042409
 www.bkkjateng.co.id | email: kanpus@bkkjateng.co.id

			Perlindungan Konsumen	
37	Pelatihan Anti Fraud, Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana Korupsi (Area Banyumas) 1	3-4 Juni 2025	Pejabat Struktural dan Pejabat Eksekutif Area Banyumas	38
38	Penyegaran Sertifikasi Kerja Direktur TK 1	3-5 Juni 2025	Kepala Bidang Operasional	1
39	Pelatihan Anti Fraud, Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana Korupsi (Area Pekalongan) 1	10-11 Juni 2025	Pejabat Struktural dan Pejabat Eksekutif Area Pekalongan	81
40	Manunggal Leadership Retreat untuk Ngopeni Nglakoni Jawa Tengah Tahun 2025	10-16 Juni 2025	Direktur Utama	1
41	Sosialisasi POJK 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan BPRS dan Harmonisasi Perbarindo DPK Semarang	14-15 Juni 2025	Kepala Bidang Manajemen Risiko	1
42	Pelatihan Pendidikan Dasar Perbankan Batch 1 & 2	14-15 Juni 2025	Staff Kantor Cabang dan Kantor Pusat	112
43	Pelatihan “Workshop Fraud Risk Management & Audit Investigasi Fraud”	17-18 Juni 2025	Kasatker Manrisk dan Anggota Manrisk	2
44	Pelatihan “Fundamentals Of IT Auditing”	18-19 Juni 2025	SKAI	4
45	Pelatihan Restrukturisasi kredit (Area Banyumas & Pekalongan) 1	19-20 Juni 2025	AO Remedial	69
46	Pelatihan Pendidikan Dasar Perbankan	21 Juni 2025	AO Kredit, Dana, Remedial	56
47	PJJ Penyegaran DIR 1, DIR 2 & Komisaris	24-26 Juni 25	Komisaris Utama, Komisaris, dan Kepala Cabang	3

2. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Penerapan fungsi kepatuhan pada seluruh unit kerja BPR termasuk rencana penyesuaian ketentuan intern yang belum sesuai dengan ketentuan dan pemenuhan struktur organisasi/sumber daya manusia:

a. Pengkinian Ketentuan Internal pada Semester 1 tahun 2025

Nomor Ketentuan	Tentang	Rujukan
001/Kep-Dir/I/2025	Sarana Prasarana dan Fasilitas untuk	Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 14 tahun 2019 tentang



PT. BPR BKK JATENG (Perseroda)

Jl. Tanjung No.11a Semarang 50132 – Telp (024) 86403887, 86405241, 86042409
www.bkkjateng.co.id | email: kanpus@bkkjateng.co.id

	Komisaris dan Direksi PT BPR BKK JATEN.pdf	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jateng No 4 tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah BPR BKK Jawa Tengah
035/Kep-Dir/III/2025	Penetapan Audit Rating dan Penilaian Risiko dalam Pelaksanaan Audit di Lingkungan BPR BKK Jateng	SEOJK nomor 7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat
042.1/Kep-Dir/III/2025	Produk Kredit BKK Korporasi	-
042.2/Kep-Dir/III/2025	Produk Kredit BKK Joglo	-
042.3/Kep-Dir/III/2025	Produk Kredit BKK K3	-
042.4/Kep-Dir/III/2025	Produk Kredit BKK Sinden	-
042.5/Kep-Dir/III/2025	Produk Kredit BKK KUB	-
043.1/Kep-Dir/III/2025	Produk Kredit BKK KMB	-
043.2/Kep-Dir/III/2025	Produk Kredit BKK Agro	-
043.3/Kep-Dir/III/2025	Produk Kredit BKK Bahari	-
043.4/Kep-Dir/III/2025	Produk Kredit BKK BUMDES	-
043.5/Kep-Dir/III/2025	Produk Kredit KKPP	-
044.1/Kep-Dir/III/2025	Produk Kredit Jolo Mitra	-
003/SE/BKK KANPUS/IV/2025	Penetapan Tingkat Suku bunga kredit dan biaya kredit	-
053/Kep-Dir/IV/2025	Kebijakan Benturan Kepentingan	POJK 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS
059/Kep-Dir/IV/2025	Pemberian Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) kepada Kepala Cabang	SK Direksi no 074/Per-Dir/V/2024 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR BKK Jateng.

b. Penyusunan Ketentuan Baru pada Semester 1 tahun 2025

Nomor Ketentuan	Tentang	Rujukan
002/Kep-Dir/I/2025	Budaya Sadar Risiko	POJK no 13/POJK.13/2015



		tentang Manajemen Risiko BPR
003/Kep-Dir/I/2025	Budaya Kepatuhan	POJK 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS
036/Kep-Dir/III/2025	Tata Cara Pemberian Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan BPR BKK Jateng	PerGub Jateng no 56 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Prov Jateng No 6 tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Prov Jateng
037/Kep-Dir/III/2025	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan BPR BKK Jateng	Peraturan Komisi Informasi no 1 tahun 2017 tentang Pengklarifikasian Informasi Publik
040/Kep-Dir/III/2025	Pemberian Kewenangan kepada Kepala Kantor Wilayah BPR BKK Jateng	
002/SE/BKK-KANPUS/III/2025	Program Pemberian Insentif Penanganan Kredit Hapus Buku di Lingkungan BPR BKK Jateng	
004/SE/BKK-KANPUS/IV/2025	Skema dan Ketentuan Pembiayaan Rumah Sekeng	SE Direksi No 006/SE/BKK-KANPUS/VII/2023 tentang Ketentuan Pembiayaan Program “Tuku Lemah Sak Omahe”
089/Kep-Dir/V/2025	Pembentukan Tim Pengendali Fraud	POJK 12 tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan
008/SE/BKK-KANPUS/V/2025	Larangan Menulis Manual pada Buku Tabungan Nasabah	Temuan fraud

c. Ketentuan Internal yang Masih Dalam Proses

No	Ketentuan	Keterangan
1	Pemberian Keringanan Bunga dan/atau Denda Pelunasan Kredit Debitur NPL & PH	Pengkinian
2	Restrukturisasi Kredit	Pengkinian



3	Otorisator & Batas Kewenangan dalam Memberikan Persetujuan Penarikan Simpanan	Pengkinian
4	Pemberian Insentif kepada AO	Dengar Pendapat
5	Top-up kredit	Penyusunan
6	Opname Jaminan Kredit	Pengkinian
7	SOP Fungsi Kepatuhan	Pengkinian
8	Pedoman Kerja Residen Area Kepatuhan	Dengar Pendapat
9	Standar Etika Pegawai	Pengkinian
10	Perlindungan Konsumen	Pengkinian

3. Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan

Dalam periode pelaksanaan pokok-pokok tugas Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan pada semester 1 tahun 2025 tidak terdapat penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.

4. Pelaksanaan pemenuhan komitmen terhadap Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain seperti BI, PPATK, dan LPS.**a. Pelaksanaan Komitmen Rutin kepada OJK dan Regulator lain**

No.	Nama Laporan	Keterangan	Jangka Waktu
1	Pembayaran Pajak PPH Pasal 21	Terlaksana	Bulanan
2	Pembayaran Pajak PPh Pasal 23/26	Terlaksana	Bulanan
3	Pembayaran Pajak PPh Pasal 25	Terlaksana	Bulanan
4	Pembayaran Pph Pasal 4 ayat 2 Pemotongan	Terlaksana	Bulanan
5	Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan	Terlaksana	Bulanan
6	Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan	Terlaksana	Bulanan
7	Laporan Bulanan OJK (APOLO)	Terlaksana	Bulanan
8	Laporan SLIK OJK	Terlaksana	Bulanan
9	Laporan Pajak Pph Pasal 21	Terlaksana	Bulanan
10	Laporan Pajak Pph Pasal 25	Terlaksana	Bulanan
11	Laporan Pajak PPh Pasal 23/26	Terlaksana	Bulanan
12	Laporan Pajak Pph Pasal 4 ayat 2	Terlaksana	Bulanan
13	Laporan OBOX 1	Terlaksana	Bulanan
14	Laporan Publikasi TW 1, 2, 3, 4	Terlaksana	Triwulanan
15	Laporan Publikasi TW 1, 2, 3, 4 (Pengumuman)	TW 1 Terlaksana	Triwulanan
16	Pembayaran Iuran OJK (SIPO)	TW 1 Terlaksana	Triwulanan
17	Laporan Realisasi Pengkinian Data Tahun sebelumnya dilaporkan Bersama Laporan Realisasi RBB	Terlaksana	Tahunan
18	Laporan Pembayaran Premi LPS		Semesteran
19	Laporan Tahunan (Audited)	Terlaksana	Tahunan
20	Laporan Pajak Badan Final	Terlaksana	Tahunan



PT. BPR BKK JATENG (Perseroda)

Jl. Tanjung No.11a Semarang 50132 – Telp (024) 86403887, 86405241, 86042409
www.bkkjateng.co.id | email: kanpus@bkkjateng.co.id

21	Laporan Penilaian Sendiri LPS	Terlaksana	Semesteran
22	Laporan Evaluasi Hasil Audit KAP	Terlaksana	Tahunan
23	Perubahan Rencana Bisnis (apabila ada)	Terlaksana	Semesteran
24	Laporan GCG (Perbarindo)	Terlaksana	Tahunan
25	Laporan PKAP (jika Sudah melakukan Penunjukan KAP dan Dekom dan Perikatan dengan KAP)		Tahunan
26	Laporan Rencana Bisnis Bank 2025	Terlaksana	Tahunan
27	Laporan Pajak Tahunan Wajib Pajak Perorangan (Pribadi)	Terlaksana	Tahunan
28	Laporan Cetak Biru	TW 1 Terlaksana	Triwulanan
29	Laporan Pelaksanaan Fungsi Audit Intern terhadap Penyelenggaraan Teknologi Informasi	Terlaksana Periode tahun 2024	Semesteran, max. 31 Juli dan 31 Januari
30	Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit Intern	Terlaksana Periode tahun 2024	Semesteran, max. 31 Juli dan 31 Januari
31	Laporan Profil Risiko & TKS	Terlaksana Periode tahun 2024	Semesteran, max. 31 Juli dan 31 Januari
32	Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG)	Terlaksana Periode tahun 2024	Semesteran, max. 31 Juli dan 31 Januari
33	Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola (GCG)	Terlaksana	1 Tahun sekali, max. 30 April
34	Laporan Layanan Pengaduan Nasabah	Terlaksana	Semesteran, max. 31 Juli dan 31 Januari
35	Laporan SIGAP (DTTOT, DPPSPM & Judol)	Terlaksana	Fluktuatif-3 hari sejak email masuk
36	Laporan SIPENDAR (Teroris)	Terlaksana	Data rilis setiap Triwulanan di tanggal 13, max.3 hari sejak dirilis
37	Laporan IRA (APU-PPT & PPPSPM)	Terlaksana	Tahunan
38	Laporan SIPESAT (PPATK)	Terlaksana	Triwulanan, 1- 10 Pada Bulan Berikutnya
39	Permintaan Data Target dan Realisasi Inklusi Keuangan Periode TW IV thn sebelumnya	Terlaksana	1 Tahun 1 Kali Max. Akhir Januari
40	Laporan Perbedaan Kualitas Aset Produktif (PDF) (Include Laporan Bulanan)	TW 1 Terlaksana	Oktober
41	Laporan Struktur Kelompok Usaha (Badan Hukum)	Terlaksana	Januari



b. Pemenuhan Komitmen Hasil Pemeriksaan OJK tahun 2024

No	Komitmen Terhadap	Pemenuhan/Keterangan
1	Dewan Komisaris melalui Sekretaris Dewan Komisaris akan berkoordinasi dengan bagian diklat untuk menjadwalkan pelatihan dan pengembangan Dewan Komisaris maupun Pengurus PT BPR BKK Jateng (Perseroda). Namun berdasarkan pemaparan RBB 2025 bidang SDM, belum terdapat rencana pelatihan dan pengembangan untuk Dewan Komisaris	Jadwal pelatihan dan pengembangan untuk Dewan Komisaris di TW 4 : Future Proof Leadership
2	Meningkatkan fungsi WBS untuk pihak Internal maupun eksternal dan melakukan pengkinian ketentuan dengan menjamin kerahasiaan bagi pelapor. Namun, belum terdapat dokumentasi atas evaluasi, rencana perbaikan, maupun implementasi terkait dengan penjaminan kerahasiaan bagi pelapor.	SK Direksi No 089/Kep-Dir/V/2025 tentang Tim Pengendali Fraud
3	Kelemahan Terhadap Pengelolaan CBS	- Report Riwayat Kredit sudah mencantumkan Jumlah Tunggakan Bunga dan Hari Menunggak - Menyesuaikan Diskon Bunga - Telah memberikan pemberitahuan non aktif menu angsuran kredit tunai
4	Komite Remunerasi dan Nominasi belum memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi tercermin dari belum adanya evaluasi dan penyesuaian penentuan skala gaji sehingga tidak terdapat peningkatan gaji pegawai selama 5 tahun terakhir. Penentuan gaji masih mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 14 tanggal 8 Mei 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2017 tentang Pembentukan PD BKK Jateng	Karena regulasi penggajian masih merujuk pada Pergub No. 14 Tahun 2019 sehingga belum dilakukan kaji ulang mengenai peraturan internal mengenai penentuan skala gaji pegawai.
5	Kelemahan dalam pemberian rekomendasi proses Mutasi, Promosi dan Demosi beberapa Pejabat Eksekutif	Telah melampirkan aktivitas komite remunerasi dan Nominasi
6	Komite Remunerasi dan Nominasi belum menyusun program pengembangan dan pelatihan kepada anggota Pengurus dan pejabat eksekutif sesuai dengan kebutuhan organisasi.	Terlampir jadwal pelatihan pengurus telah di TL dengan menyampaikan softcopy berupa RBB Diklat Tahun

**PT. BPR BKK JATENG (Perseroda)**

Jl. Tanjung No.11a Semarang 50132 – Telp (024) 86403887, 86405241, 86042409
www.bkkjateng.co.id | email: kanpus@bkkjateng.co.id

		2025 termasuk di dalamnya pelatihan bagi Pengurus
7	Kelemahan dalam Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	Melampirkan data Fraud
8	Kelemahan dalam pelaksanaan Fungsi Satuan Kerja Manajemen Risiko	- SDM terpenuhi - Ketentuan SK Direksi Tentang Penetapan Risk Appetite dan Risk Tolerance untuk Tahun 2025 telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris dengan Nomor SK Dir: 216.1/Kep-Dir/XI/2024 Tanggal 29 November 2024. Ketentuan ini juga sebagai evaluasi dan mencabut ketentuan penetapan limit risiko pada tahun sebelumnya.
9	Penyusunan rancangan kebijakan Perusahaan dibidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tehnologi Informasi, dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan	Tersedia draft kebijakan
10	Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja bidang dibidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tehnologi Informasi, dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan.	Tersedia rencana kerja Divisi Litbang
11	Penyusunan dan pelaksanaan rencana kalender akademik pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia	Terlampir jadwal pelatihan tahun 2025
12	Bank akan memperbaiki ketentuan internal terkait penempatan ABA dengan menambahkan risk appetite, risk tolerance dan risk limit dengan memperhatikan kinerja bank penerima penempatan dana	SK No 002/Per-Dir/IX/2024 tentang Kebijakan Penempatan ABA
13	Kelemahan Tim ALCO	Telah ditindaklanjuti
14	Kelemahan Pengelolaan Aset Tetap dan Inventaris (ATI)	70% Telah ditindaklanjuti
15	Bank akan melakukan pemetaan kesalahan penggolongan Aset Tetap dan Inventaris paling lambat 31 Oktober 2024. Selanjutnya, bank akan segera melakukan penyesuaian pencatatan pembebanan pada laporan bulan berikutnya.	Telah ditindaklanjuti
16	Evaluasi Proses Mutasi	Telah ditindaklanjuti
17	Pemenuhan Kekosongan Jabatan	Beberapa telah ditindaklanjuti
18	Evaluasi Status Kepegawaian	Telah ditindaklanjuti
19	Evaluasi Pemberian Tunjangan&Remunerasi	Telah ditindaklanjuti



PT. BPR BKK JATENG (Perseroda)

Jl. Tanjung No.11a Semarang 50132 – Telp (024) 86403887, 86405241, 86042409
www.bkkjateng.co.id | email: kampus@bkkjateng.co.id

C. PENUTUP

Laporan pokok pelaksanaan Tugas Direksi Kepatuhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban dan komitmen PT BPR BKK Jateng (Perseroda) dalam menerapkan prinsip Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance*) berdasarkan pilar Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Kewajaran (*fairness*). Selama Semester 1 tahun 2025, pelaksanaan fungsi kepatuhan telah diupayakan secara preventif melalui optimalisasi seluruh sumber daya untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran atau penyimpangan terhadap kebijakan, ketentuan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik eksternal maupun internal.

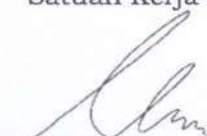
Namun jika di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atau penyimpangan dalam operasional, hal tersebut akan ditangani secara tuntas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, guna memastikan kepatuhan dan integritas perusahaan tetap terjaga.

Demikian Laporan Pokok-Pokok Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan ini disusun sebagai bentuk pertanggung-jawabandan disampaikan kepada pihak-pihak terkait, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 30 Juli 2025

Disusun oleh

Satuan Kerja Kepatuhan


Sholeh Kusdianto, S.Kom, S. Akun, MM

Kepala Satuan Kerja Kepatuhan

Disetujui oleh

PT BPR BKK Jateng (Perseroda)



Eddy S. Bramiyanto, SE., MM.

Komisaris Utama



H. Koesnanto, SH., M.Kn

Direktur Utama